SERI MEMORIA PASSIONIS NO.43

TONG BICARA TAPI DONG JALAN TERUS

ANALISIS, KRONIK, DAN REKOMENDASI HAK ASASI MANUSIA PAPUA TAHUN 2024

Undang-undang Republik Indonesia
No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak ekslusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SERI MEMORIA PASSIONIS NO.43

TONG BICARA TAPI DONG JALAN TERUS

ANALISIS, KRONIK, DAN REKOMENDASI HAK ASASI MANUSIA PAPUA TAHUN 2024



Alexandro Rangga OFM, Bernadus B. Koten, David Dapi OFM,
Ignasius Ngari OFM, Goklian PH Lumban Gaol OFM, Yuliana Langowuyo

Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua

***TONG* BICARA TAPI *DONG* JALAN TERUS**
Analisis, Kronik, dan Rekomendasi
Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2024
Copyrights©2025, JPIC OFM Papua
Cetakan I, Maret 2025

Penerbit:
SKPKC Fransiskan Papua
Jl. Kemiri Kompleks Misi Katolik
Biara St. Antonius Sentani, Jayapura Papua 99352
www.fransiskanpapua.org
Email: skpkc2010@gmail.com

Penulis : Alexandro Rangga OFM
Bernadus B. Koten
David Dapi OFM
Goklian PH Lumban Gaol OFM
Ignasius Ngari OFM
Yuliana Langowuyo
Editor : Alexandro Rangga OFM

Desain Cover : Leonard Ohee
Desain Isi : Oktavianus

SERI *MEMORIA PASSIONIS*

Seri *Memoria Passionis* ditulis berdasarkan kronik, yang merupakan catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Kata "kronik" berasal dari bahasa Latin "Chronicus," yang diambil dari bahasa Yunani "Chronicós," turunan dari kata "Chronos," yang berarti waktu. Oleh karena itu, *Memoria Passionis* adalah karya sejarah yang menceritakan peristiwa-peristiwa di Papua dalam urutan kronologis, disertai analisis terkait dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam konteks ini, *Memoria Passionis* tidak hanya mengingatkan akan penderitaan dan pelanggaran HAM, tetapi juga merupakan catatan sejarah yang membuktikan keberadaan masyarakat atau bangsa Papua. Tradisi ini mirip dengan kronik masa lalu seperti dinasti-dinasti di China atau *Kronik Revolusi Indonesia* yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, Ediati Kamil, dan Koesalah Soebagyo. Memoria Passionis melanjutkan tradisi ini untuk merekam peristiwa di Papua dengan baik dan rapi.

Refleksi atas *Memoria Passionis* membangun kesadaran akan kesamaan nasib, membentuk karakter dan identitas bangsa. Ingatan akan penderitaan dapat membawa pada pengampunan politik dan keadilan sosial. Ini juga membuka narasi baru, memimpin pada kebebasan untuk beraksi dan misi, serta transformasi. Ingatan masa lalu adalah pendidikan publik yang membantu masyarakat mencegah peristiwa serupa di masa depan. Ini menunjukkan bagaimana konsep mengingat penderitaan dan harapan untuk pemulihan bisa mendorong perubahan sosial dan memperjuangkan keadilan dan Hak Asasi Manusia.

DAFTAR SINGKATAN

AlDP : Aliansi Demokrasi untuk Papua
AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi
AMAN : Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Bareskrim : Badan Reserse Kriminal
Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Brimob : Brigader Mobil
Brigjen : Brigadir Jenderal
DAP : Dewan Adat Papua
Danramil : Komandan Rayon Militer
DOB : Daerah Otonomi Baru
DOM : Daerah Operasi Militer
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRP : Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
DPO : Daftar Pencarian Orang
dr : Dokter
Elsham : Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
ESDM : Energi Sumber Daya dan Mineral
FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama
GIDI : Gereja Injili di Indonesia
GKI : Gereja Kristen Indonesia
HAM : Hak Asasi Manusia
Humas : Hubungan Masyarakat

Irjen : Inspektur Jenderal
ITE : Informasi dan Transaksi Elektronik
JDP : Jaringan Damai Papua
JPU : Jaksa Penuntut Umum
Jerat : Jaringan Kerja Rakyat
Kabid : Kepala Bidang
Kabag : Kepala Bagian
Kadis : Kepala Dinas
Kingmi : Gereja Kemah Injil Indonesia
KKB : Kelompok Kriminal Bersenjata
KKSB : Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata
KLHK : Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KNPB : Komite Nasional Papua Barat
Kodap : Komando Daerah
Kodam : Komando Daerah Militer
KontraS : Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan
Kombes : Komisaris Besar
Komnas : Komisi Nasional
Koramil : Komando Rayon Militer
KPK : Komisi Pemberantas Korupsi
KPU : Komisi Pemilihan Umum
KWI : Konferensi Waligereja Indonesia
LBH : Lembaga Bantuan Hukum
Letkol : Letnan Kolonel
MA : Mahkamah Agung
Mayjend : Mayor Jenderal
Mabes : Markas Besar
Menko : Mentri Koordinator
Medsos : Media Sosial
MK : Mahkamah Konstitusi
MRP : Majelis Rakyat Papua
OPM : Organisasi Papua Merdeka
Otsus : Otonomi Khusus

OTK : Orang Tak Dikenal
P : Pastor/Pater
PAHAM : Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia
Pamtas : Pengamanan Perbatasan
Pangdam : Panglima Komando Daerah Militer
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pdt : Pendeta
Pemda : Pemerintah Daerah
Pemkab : Pemerintah Kabupaten
Pemprov : Pemerintah Provinsi
Pempus : Pemerintah Pusat
PSU : Pemungutan Suara Ulang
Pjs : Pejabat Sementara
Plt : Pelaksana Tugas
PN : Pengadilan Negeri
Pol : Polisi
Polri : Kepolisian Republik Indonesia
Polda : Kepolisian Daerah
Polres : Kepolisian Resor
Polsek : Kepolisian Sektor
Prada : Prajurit Dua
Pratu : Prajurit Satu
Pst : Pastor
PTUN : Pengadilan Tata Usaha Negara
Puskesmas: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu : Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu
RI : Republik Indonesia
Satgas : Satuan Tugas
SD : Sekolah Dasar
SMP : Sekolah Menengah Pertama
SMA : Sekolah Menengah Atas
SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
Sekda : Sekretaris Daerah

Serda : Sersan Dua
Serka : Sersan Kepala
Serma : Sersan Mayor
Sertu : Sersan Satu
STFT : Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi
Tapol : Tahanan Politik
Tipikor : Tindakan Pidana Korupsi
TNI : Tentara Nasional Indonesia
TPNPB : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
TPS : Tempat Pemungutan Suara
ULNWP : United Liberation National West Papua
Uncen : Universitas Cenderawasih
USTJ : Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
UU : Undang-Undang
Wabup : Wakil Bupati
Wagub : Wakil Gubernur
Wapres : Wakil Presiden
Walhi : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Yapis : Yayasan Pendidikan Islam
YPK : Yayasan Pendidikan Kristen
YPPK : Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik

DAFTAR ISI

Seri *Memoria Passionis* ..... *v*
Daftar Singkatan vi
Daftar Isi x
Kata Pengantar xii
Pendahuluan xiv

BAB I *MALAS TAHU*: HUTAN RUSAK DAN MASYARAKAT ADAT HANCUR 1
Oleh Ignasius Ngari OFM

BAB II PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PAPUA: REFLEKSI DAN TANTANGAN DI TAHUN 2024 53
Oleh Yuliana Langowuyo

BAB III LINGKARAN SETAN KEKERASAN DI PAPUA: KONFLIK BERSENJATA TPNPB OPM VS TNI-POLRI 74
Oleh Alexandro Rangga OFM

BAB IV KORUPSI= AMBIL APA YANG BUKAN *KO PU* MILIK= MENCURI 164
Oleh David Dapi OFM

BAB V DI BALIK NOKEN: MENYINGKAP REALITAS PEMILU 2024 DI PAPUA 188
Oleh Yuliana Langowuyo

BAB VI KONFRONTASI DAN REPRESI TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI PAPUA 2024 216
Oleh Goklian PH Lumban Gaol OFM

BAB VII KRISIS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI PAPUA: TANGGUNG JAWAB SIAPA? 239
Oleh Bernadus B. Koten

BAB VIII JERAT NARKOBA DAN MIRAS DI TANAH PAPUA 288
Oleh Alexandro Rangga OFM

PENUTUP 314
Biodata Penulis 317

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Memoria Passionis N0. 43, dengan judul ***Tong* Bicara tapi *Dong* Jalan Terus: Analisis, Kronik, dan Rekomendasi Hak Asasi Manusia Papua Tahun 2024** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan publikasi tahunan JPIC OFM Papua yang bertujuan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Papua, khususnya terkait dengan situasi sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, memberikan catatan kritis analitis rekomendasi strategis yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Pada tahun 2024, Tanah Papua masih menghadapi serangkaian tantangan yang sangat kompleks; dari isu-isu deforestasi dan lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia, hingga kesehatan dan pendidikan. Selain data primer berupa kronik, buku ini juga menggali lebih dalam berbagai aspek yang berkontribusi pada krisis yang melanda Papua. Dari analisis deforestasi dan dampaknya terhadap masyarakat adat, hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara masyarakat Papua dan aparat keamanan, setiap bab dalam buku ini memberikan wawasan yang mendalam dan terstruktur.

Selain itu, lewat catatan kritis yang ada, kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk berpikir kritis dan bertindak secara kolaboratif dalam mencari solusi bagi berbagai permasalahan di Papua. Partisipasi aktif dari masyarakat Papua sendiri, khususnya masyarakat adat, sangatlah penting dalam proses ini karena keunikan budaya dan

tradisi lokal harus dijaga dan dihormati sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkeadilan.

Akhirnya, kami berharap bahwa buku ini tidak hanya menjadi sekadar bacaan, tetapi juga sebuah panggilan untuk bertindak. Kami berharap karya ini dapat menjadi bahan refleksi dan diskusi bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, TPNPB/OPM, Komnas HAM, media, serta masyarakat Papua sendiri. Dengan kerja sama dari semua pihak, kita dapat menciptakan masa depan Papua yang lebih cerah, di mana Hak Asasi Manusia dihormati, lingkungan dilestarikan, dan masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang sejati. Semoga upaya ini dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi Tanah Papua.

Sentani, 27 Februari 2025

JPIC OFM PAPUA

Alexandro Rangga OFM
Direktur JPIC OFM Papua

PENDAHULUAN

Papua, dengan segala kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, terus menjadi sorotan dalam konteks Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tahun 2024 menyajikan tantangan-tantangan baru, serta mempertegas persoalan-persoalan yang sudah lama ada. Deforestasi yang tak terkendali, pelanggaran Hak Asasi Manusia, krisis kesehatan dan pendidikan, serta peredaran narkoba dan minuman keras merupakan sebagian dari isu-isu kritis yang memerlukan perhatian serius.

Nada dasar buku ini ialah adanya sikap tidak peduli dan malas malas tahu dari pemerintah terhadap suara-suara keberpihakan terhadap Papua baik dalam forum-forum resmi, diskusi dan seminar maupun dalam bentuk protes, demonstrasi dan penolakan di jalan, di tanah ulayat maupun di depan gedung-gedung pemerintahan. Dengan menggunakan metode analisis kritis, setiap bab akan membedah masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan solusi konkret dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari buku ini adalah untuk mendorong dialog dan tindakan nyata dari berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan Papua yang lebih baik.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang ditulis oleh para ahli di bidangnya masing-masing, yang memberikan pandangan mendalam dan analisis kritis terhadap isu-isu utama yang dihadapi Papua pada tahun 2024. Bab pertama, yang ditulis oleh Ignasius Ngari OFM, memaparkan dampak buruk deforestasi yang tak terkendali di Papua. Analisis ini mencakup peran ekonomi, pertambangan, dan perkebunan ilegal dalam mempercepat laju deforestasi, serta kurangnya perhatian terhadap

protes masyarakat dan justifikasi ekonomi, yuridis, dan militer terhadap deforestasi.

Bab kedua, yang ditulis oleh Yuliana Langowuyo, mengulas situasi Hak Asasi Manusia di Papua yang memprihatinkan, mencakup kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan dan kebijakan represif terhadap masyarakat sipil. Analisis ini mengevaluasi upaya penegakan hukum yang masih jauh dari harapan dan tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia di wilayah tersebut.

Alexandro Rangga OFM, dalam bab ketiga, mengeksplorasi lingkaran setan kekerasan yang terjadi akibat konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri. Bab ini membahas dampak konflik terhadap masyarakat sipil, pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh kedua belah pihak, dan bagaimana pendekatan militeristik justru memperparah situasi di Papua.

David Dapi OFM, melalui bab keempat, memberikan analisis mendalam tentang maraknya kasus korupsi di Papua sepanjang tahun 2024. Bab ini mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi, dampak negatif terhadap masyarakat, dan menawarkan rekomendasi untuk pemberantasan korupsi yang lebih efektif demi kemajuan Papua.

Yuliana Langowuyo kembali dengan analisis dalam bab kelima, yang membahas kompleksitas pelaksanaan Pemilu di Papua, terutama dengan penggunaan sistem noken. Bab ini mengevaluasi efektivitas, keadilan, dan relevansi sistem noken dalam konteks demokrasi modern, serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pemilu yang adil dan transparan.

Goklian PH. Lumban Gaol OFM menyoroti konfrontasi dan represifitas terhadap kebebasan berpendapat di Papua sepanjang tahun 2024 dalam bab keenam. Bab ini mencakup berbagai insiden terkait demonstrasi dan kebebasan pers, serta analisis mengenai pendekatan militer yang masih dominan dalam menanggapi aspirasi masyarakat Papua.

Dalam bab ketujuh, Bernadus Boki Koten mengupas tuntas krisis kesehatan dan pendidikan di Papua. Bab ini menjelaskan bagaimana kurangnya fasilitas kesehatan dan pendidikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Papua, serta menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan dasar ini.

Bab terakhir, yang ditulis oleh Alexandro Rangga OFM, menganalisis peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta minuman keras di Papua. Bab ini mengidentifikasi tren umum, faktor-faktor pendorong, dan memberikan rekomendasi untuk penanganan yang lebih efektif.

Melalui bab-bab ini, buku ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi di Papua selama tahun 2024 dan menawarkan solusi yang komprehensif. Diharapkan analisis yang ada dapat menjadi dasar bagi dialog dan tindakan nyata untuk menciptakan Papua yang lebih baik, adil, dan sejahtera. *Selamat membaca.*

Sentani, 27 Februari 2025
Editor



Aksi Kampanye Solidaritas Mahasiswa Papua Selatan Menolak Deforestasi Papua Selatan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Selatan Papua.
(Dok. LBH Papua)

BABI

MALAS TAHU: HUTAN RUSAK DAN MASYARAKAT ADAT HANCUR

Oleh Ignasius Ngari OFM

Pendahuluan

Ekonomi adalah panglima kehidupan dan atas nama ekonomi lingkungan dapat diabaikan. Ekonomi secara literal berarti aturan atau manajemen rumah tangga. Jika lingkungan adalah rumah, apakah demi manajemen, rumah harus dirusakan? Inilah kesan yang muncul ketika membaca kronik tentang masalah lingkungan hidup pada 2024 di tanah Papua.

Paling kurang ada tiga hal menonjol yang kemudian kami analisa dalam tulisan ini. Hal yang pertama adalah adanya deforestasi yang tak terkendali. Hal yang kedua adalah adanya pertambangan dan perkebunan illegal. Hal yang ketiga adalah tiadanya keperdulian terhadap protes-protes deforestasi. Deforestasi dibenarkan secara ekonomi, yuridis dan militer. Suara-suara protes bak anjing menggongong khafila berlalu.

Ketiga hal ini akan dianalisa berdasakan metode kritik analitis. Analisa hanya dilakukan berdasarkan data kronik yang tersedia. Kronik ini adalah kronik masalah lingkungan pada tahun 2024. Kronik ini hanya menjangkau wilayah yang disebut tanah Papua. Pisau analisa yang dipakai adalah metode kritik rasional. Kritik rasional ini bersandar pada logika dan etika. Logika mengurus cara berpikir yang rasional. Etika mengurus tindakan yang seharusnya berdasarkan pertimbangan rasional.

Analisa ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran agar semakin banyak orang yang terlibat dalam menyerukan perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan adalah rumah, rumah yang juga ramah terhadap persoalan ekonomi tetapi tidak menjadikan pembangunan ekonomi sebagai panglima yang tega membakar rumahnya sendiri. Dibaliknya terdapat sebuah tendesi untuk mulai mempertanyakan pendekatan pembangunan untuk kemajuan.

1. Deforestasi Tak Terkendali

Ketua Pokja Adat MRP Provinsi Papua, Raymond May mengatakan bahwa kerusakan hutan Indonesia, terutama Papua adalah hal yang nyata. Hal ini didasari oleh hal yang sederhana yaitu tingginya jumlah pengaduan masyarakat adat. Pengaduan ini dapat dibenarkan karena pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua yang jumlahnya seperti disinyalir oleh *Greenpeace*, menyebabkan Papua akan kehilangan 7, 5 juta hektar hutan. Kehilangan di masa depan ini adalah bagian dari daftar panjang sejarah kelam kerusakan hutan di Papua yang sudah mulai dirasakan. *Greenpeace* menyatakan bahwa telah dialihfungsikan hutan untuk lahan kelapa sawit sebesar 158.821 Hektar. Khusus di Merauke, hutan seluas 112.000 hektar telah rusah oleh karenanya. Akibatnya, penderitaan telah mulai dirasakan. Masyarakat Awyu kehilangan hutan tempat hidup karena dikonversi menjadi perkebunan kelapa Sawit. Faktor besar yang menyebabkan hal ini adalah pembabatan hutan untuk dijadikan lahan Perkebunan kelapa sawit. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono dan Yusuf Kala (2009-2011), izin yang telah dikeluarkan sebesar 900.291 hektar.

Faktor terkini yang menjadi ancaman serius adalah peningkatan investasi di tanah Papua, khususnya di Papua Selatan dengan adanya Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua Selatan yang menjadikan Merauke sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pada 2024, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Investasi RI memberikan target investasi kepada Provinsi Papua Selatan di tahun 2024 yang harus direalisasikan Januari 2025 sebesar Rp 1,87 triliun. Selain itu, Presiden Jokowi juga

menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada Juni 2023 sebagai karpet merah bagi industri gula dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati di Tanah Papua seluas 700.000 hektar. Tambahan lagi, pada 12 Juli 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Hal tersebut belum ditambah lagi dengan aktivitas penambangan liar yang merajalela di tanah Papua dan kesewenangan perusahanan untuk membuang limbah pertambangan tanpa memperdulikan AMDAL. Yang dituntut memiliki AMDAL saja melanggar apalagi penambang liar yang tidak mengenal AMDAL.

Kerusakan hutan, sekali lagi adalah hal yang nyata. Ini adalah juga kehancuran masyarakat adat Papua dan juga orang yang menghuni wilayah-wilayah di tanah Papua secara keseluruhan. Kerusakan hutan yang nyata disebabkan oleb berbagai hal; untuk kepentingan pembangunan provinsi baru, pengalihfungsiannya untuk kepentingan kelapa sawit yang telah direstui oleh pemerintah pusat serta bertambah nyata dengan target investasi dan proyek strategi nasional seluas 2 juta hektar.

Realisasi deforestasi akan berjalan mulus. Target ini dijamin dan diamankan dengan sekali lagi mengalihkan ribuan hektar hutan lindung sebagai tempat penyimpanan sarana dan prasarana ketahanan pangan dan militer. Selain karena dukungan faktor yuridis, pelaksanaan investasi dan PSN terjamin keamanannya. Akibatnya, pemrotes terhadap aktivitas itu akan dianggap sebagai pengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Karena dijaga dan didukung oleh aparat, mustahil bagi masyarakat Papua

yang sering kali memiliki trauma dengan pihak militer akan berdaya mempersoalkan apalagi menentangnya.

Bagaimana dengan nasib hutan adat dan hutan hidup bagi masyarakat asli yang terkena dampak langsung dari aktivitas PSN yang berlandaskan hukum nasional dan berkekuatan pelindung militer Indonesia? Bagaimana dengan nasib hutan itu sendiri sebagai paru-paru dunia dan tempat hidup dari berbagai keanekaan hayati dan margasatwa? Apakah nilainya dipandang lebih rendah daripada kepentingan ekonomi nasional? Apakah kepentingan ekonomi nasional itu adalah hal yang benar dan urgent?

Paling kurang ada tiga kesalahan dalam cara berpikir atau kesesatan berpikir dari tindakan pengalihan hutan untuk fungsi tunggal ekonomi berskala nasional itu.

Pertama, adanya kesalahan logis dari solusi ketahanan pangan. Titik berangkatnya adalah pandangan bahwa ketahanan pangan menjadi bermasalah karena perubahan iklim seperti dikatakan oleh Presiden Jokowi Widodo. Padahal kita tahu bahwa perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global dan pemanasan global disebabkan salah satunya oleh deforestasi. Menurut berbagai literatur, salah satu sebab dari perubahan iklim adalah deforestasi dan degradasi hutan. Jika pemanasan global semakin tinggi, terjadi resiko kekeringan dan kerusakan hutan yang makin luas. Salah satu contoh adalah hutan Amazon. Perubahan iklim disebabkan karena hutan dirusak. Deforestasi akan meningkatkan emisi karbon dioksida (Houghton, 2010, Cox, 2008; *IPCC, 2019; Malhi, 2008;* Pachauri & Mayer,, 2014; *Lewis, 2013).*

Solusi dengan nama PSN dan berbagai model investasi itu adalah sebuah kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ini mencakup dua hal *oversimplification* dan kesesatan kausalitas. Dalam *oversimplificiation*, sebab lemahnya daya tahan pangan karena masalah iklim. Masalah iklim disebabkan oleh deforestasi. Deforestasi dilakukan untuk meningkatkan daya tahan pangan. Dalam kesesatan ini terlihat jelas bahwa sebab perubahan iklim tidak mau dipikirkan secara mendalam agar solusi ketahanan pangan tidak memperparah masalah yang menjadi alasan

peningkatan daya tahan pangan. Persoalan sebab tidak dipikirkan secara mendalam. Sebabnya tidak diatasi. Solusi memperparah sebab. Inilah kesesatan kausalitas (*Bdk,* Soekadijo, 2003, Bab 2). Selain itu terdapat sebuah kesasatan berpikir yang mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Solusi ini tampaknya mempertimbangkan kuantitas lahan daripada kualitas lahan. Lalu apakah tidak baik pemerintah meningkatkan kualitas lahan yang sudah ada, daripada merusak hutan yang tinggal sedikit?

Ketahanan pangan bukannya dianggap tidak penting. Ini adalah persoalan yang menyangkut hidup mati. Tiadanya pangan dapat menimbulkan kelaparan dan kekacauan sosial. Namun jika iklim tidak diselamatkan, maka apakah pangannya akan berhasil? Dalam jangka pendek pangan akan bertahan, namun dalam jangka panjang ia akan menimbulkan masalah yang jauh lebih serius

Problem cara berpikir salah yang kedua adalah soal energi terbarukan. Energi terbarukan dalam kaitan dengan masalah investasi dan PSN di Papua Selatan adalah biomassa. Ini merupakan energi yang menggunakan bahan organic, seperti limbah pertanian, kayu dan sampah (Demirbas, 2007). Di dalam *The Role of Biomass in the Energi Transition* (2018) dijelaskan bahwa biomassa dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan demikian energi terbarukan adalah energi yang ramah lingkungan. Upaya pembangunan energi terbarukan itu diupayakan lewat pengalihan fungsi hutan. Hutan dialihkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian dan perkebunan digunakan untuk energi terbarukan. Singkatnya lingkungan dirusakan untuk ramah lingkungan. Bukankah ini sebuah pemikiran yang sesat?

Hal ini dapat ditambah lagi dengan analisa ekonomi yang memperlihatkan kerugian daripada keuntungan dari kelapa sawit. Hal itu disebut oleh peneliti Wiko Saputra dalam diskusi publik bertajuk *Investasi Bodong: Mengungkap Beban dan Manfaat dari Investasi Sawit di Tanah Papua*. Kajian Wiko dan timnya menggunakan metode *cost-benefit analysis* (CBA) untuk menghitung untung-rugi investasi sawit di Papua. Hasilnya, kerugian

lingkungan akibat perkebunan sawit mencapai Rp. 96,6 triliun, sementara manfaat ekonomi dan penerimaan pajaknya hanya Rp. 17,6 triliun. Dengan *cost-benefit ratio* (CBR) sebesar 5,48 persen, Wiko menyimpulkan bahwa investasi sawit ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan.

Kesalahan berpikir ketiga adalah hutan harus dialihkan demi kepentingan ekonomi. Dasar pemikiran yang ada di baliknya adalah bahwa nilai ekonomi hutan yang ada belum dimaksimalkan. Padahal hutan bagi masyarakat adat Papua melebihi nilai ekonomi. Dalam karya Bernadus Wos Baru, *Orang Papua di Persimpangan Jalan, Peradaban, Konflik, dan Perjuangan Menegakkan Martabatnya* (2023), ditegaskan bahwa bagi orang asli Papua, hutan-tanah adat bukan hanya dipandang bernilai secara ekonomis, tetapi juga bermakna spiritual-rohani. Tanah-hutan juga dipercaya sebagai tempat manifestasi Yang Ilahi kepada manusia. Hutan-tanah adat juga sebagai tempat (*locus*) pijakan marga atau klan (*fam*) secara komunal-sosiologis. Ia juga bermakna penyembuhan (*healing*) karena di dalam hutan juga terdapat berbagai jenis obat-obatan yang berfungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit karena hutan adalah apotek hidup (Bdk, Selina Aurora, 2024) Secara umum tanah dilihat sebagai sumber makanan, obatan-obatan, bahan bangunan, sumber air, udara yang segar, tempat sakral dan identitas suku (Manoby, Siscawati, & Dewi, 2023, 15(2); Asrida, Jong, 2022).

Secara kultural hutan dan tanah dipandang sebagai mama. Mama adalah yang melahirkan, merawat dan menjamin kehidupan manusia. Karenanya mama dihargai dengan sebutan surga di telapak kaki ibu. Telapak kaki hanya bisa dilihat dan dijangkau dengan menundukkan diri. Menunduk dalam kasanah kultural diartikan sebagai penghormatan. Mama yakni hutan dan tanah harus dihargai agar perannya untuk menjamin kelangsungan hidup tidak terganggu. Dalam cara berpikir ini, terdapat sebuah pemahaman tentang hutan dan tanah yang sifatnya transcendental. Sifat pelampauan ini sebenarnya sebuah pelampauan terhadap nilai ekonomi semata-mata. Pelampauan tidak diartikan sebagai sebuah pengabaian tetapi suatu transformasi ke tataran yang lebih tinggi. Bahwa nilai ekonomi itu penting tetapi kepentingannya tidak berhenti

pada nilai ekonomi *per se* tetapi nilai ekonomi dibingkai bersama nilai lain dalam sakralitas kultural yaitu mama.

Jadi kerangka pikir ekonomi yang berkelanjutan harus ditempatkan dalam keseluruhan kerangka berpikir masyarakat Papua. Tujuannya adalah kerangka pikir ekonomi terhadap hutan selaras dengan kerangka pikir ekonomi kultural. Pengabaian terhadap kerangka pikir ekonomi kultural mencerminkan sebuah kesalahan berpikir bahwa persoalan ekonomi tak menjadi pikiran masyarakat. Ia hanya milik ekslusif pemerintah dan investor yang menguntungkan semua orang dan karena itu, dengan kekuatan yuridis dan militer tak ada toleransi bagi pemikiran alternatif. Dari sudut cara berpikir, terdapat semacam pengabaian bahwa orang setempat tak memikirkan persoalan ekonomi. Ia hanya ada karena diperkenalkan pemerintah. Ini adalah sebuah bentuk pengabaian kearifan local yang turut memperhitungkan kepentingan ekonomi. Apakah tidak lebih baik meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam aktivitas ekonomi modern yang berurusan langsung dengan hutan adat mereka, agar faktor ekonomi masyarakat adat dapat ditransformasi sesuai dengan tuntutan dan tantangan kemajuan modern? Kita tidak bisa beranggapan bahwa masyarakat adat tidak memikirkan persoalan ekonomi. Ia hanya ada karena diperkenalkan dan dipaksakan. Hal ini mencederai kearifan (pemikiran dan tindakan) yang sudah menyejarah, mensejahterakan dan menyelamatkan masyarakat adat penghuni hutan adat.

Jika dirujuk dari status provinsi-provinsi di tanah Papua, semua telah berada di dalam bingkai otonomi khusus (2001) yang sudah berlangsung dalam dua dekade. Namun di dalam dua decade ini, ada tiga hal yang tidak diperhatikan secara serius. Pertama, masyarakat telah lama mendambahkan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat atas hutan dan tanah, namun secara formal yuridis belum dijamin hingga sekarang. Kedua, kebijakan otonomi khusus tak diikuti dengan kerangka penataan hutan yang mendukung kepemilikan tersebut. Ketiga, pemerintah lokal lebih memberikan perhatian pada agenda pembangunan lain seperti mengejar target investasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat (Sopaheluwakan, dan Fatem, 2023).

2. Penambangan dan Pengalihan Hutan secara Illegal

Dari Papua Barat Daya, Blok Wabu, Danau Sentani, hingga Boven Digul, permasalahan hutan yang pertama-tama adalah mudahnya orang melakukan usaha pertambangan dan perkebunan tanpa izin. Hal-hal ini merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Kesewenangan adalah ekspresi dari tiadanya ketaatan asas, norma dan nilai hutan yang lebih luas dari sekedar kepentingan ekonomi. Bank Dunia, UNEP dan ICMM pada tahun 2022, memberikan dokumen yang berisi dampak, penyebab dan solusi penambangan illegal. Ada tiga penyebabnya; faktor kemiskinan, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan global. Secara ekonomi ia mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak, *royalty*, menciptakan pasar gelap yang merugikan. Dari sudut sosial hal ini memicu konflik dengan masyarakat lokal dan perusahaan legal. Tak jarang hal ini melibatkan pengeksploitasian tenaga kerja termasuk anak. Dari perspektif lingkungan hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah serta hilangnya keanekaragaman hayati. Perusakan hutan untuk kepentingan tambang dan Perkebunan dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Program pembangunan apapun juga bentuknya dan dari manapun juga asalnya harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan keane-karagaman budaya penduduk Papua dan lingkungan ekologi di Tanah Papua.

3. Anjing Menggonggong Kafila Berlalu

Masyarakat adat di Merauke seperti masyarakat Awyu, Ye, Malind, Kimahi dan Mayo Bodol terus menyuarakan protes mereka karena hutan adat yang juga adalah hutan kehidupan, hutan ekonomi, hutan kebudayaan serta hutan sakral sedang terancam dikurangi bahkan dihabiskan. Protes-protes tersebut mendapat sambutan dari berbagai kalangan. Kalangan yang paling banyak membantu adalah sejumlah LSM dan beberapa kelompok mahasiswa. Pihak perwakilah rakyat secara khusus Dewan Perwakolah Daerah (DPD) juga turut menampung aspirasi masyarakat. Gereja-Gereja Papua memberikan perhatian terhadap

keprihatinan lingkungan hidup dari suku-suku yang terdampak di Papua secara khusus yang sedang massif terjadi di Papua Selatan. Mereka menyatukan dukungan dalam bentuk memberikan ruang bagi disuarakan keprihatinan itu bagi seluruh kalangan Gereja serta mendoakannya bersama.

Yang cukup disayangkan adalah Papua Selatan dengan penduduk mayoritas Katolik, suara Gerejanya terdengar terlalu sayup. Beberapa kali umat memohon pihak keuskupan untuk memberikan dukungan bagi keprihatinan mereka namun tanggapan sebagai suara kenabian seperti yang dilakukan uskup Keuskupan Agung Ende yang secara tegas dan public menolak aktivitas geothermal tidak terdengar di Papua Selatan (Dhae, 2025). Gereja Katolik di Papua Selatan diwakilkan secara minor oleh Imam Projo Keuskupan Agung Merauke yakni Pastor Pius Manu (https://www.tempo.co/lingkungan/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal-405399).

Model seperti ini memperlihatkan bahwa perjuangan untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan adat merupakan perjuangan dari kaum kecil. Kecil dari segi jumlah, kekuatan dan daya tawar. Perjuangan ini sangat bermakna bagi orang kecil yang bukan saja tergusur dari rumahnya tetapi tergusur dari ruang kehidupan. Tempat yang memungkinkan mereka hidup dan beraktivitas sedang dihancurkan dengan tiadanya keperdulian yang bermakna.

Lalu apakah jumlah kepentingan yang sedikit patut disenyapkan dan tidak diperdulikan sama sekali? Model seperti ini memperlihatkan cara berpikir yang utilitarianis. Pemikiran ini memiliki gagasan dasar bahwa kebenaran sebuah tindakan ditentukan oleh konsekuensi. Konsekuensi adalah kebahagian terbesar dari jumlah terbesar. Yang mau dicapai adalah kebahagian dari orang banyak. Yang sering dikritik dengan cara pandang seperti ini adalah bahwa atas nama jumlah yang banyak, jumlah yang sedikit dapat diabaikan. Atas nama kepentingan umum atau kepentingan nasional, maka kepentingan individual dan kepentingan local dapat diabaikan. Pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah kepentingan umum turut menampung dan mengakomodir kepentingan individual dan local. Utilitarianisme dapat menghasilkan hasil yang tak adil meskipun



Aksi Damai Masyarakat Adat 18 Marga asal Suku Wambon, dari Distrik Arimop, yang didampingi oleh LBH Papua Pos Merauke mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kab. Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan.
(Dok. LBH Papua)

itu menguntungkan banyak masyarakat (https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/calculating-consequences-the-utilitarian-approach/). Lalu, apakah demi kepentingan umum kepentingan yang lebih kecil harus dikorbankan?

Sebelum menjawab, kita perlu bertanya apakah kepentingan umum? Dalam perspektif rasional kepentingan umum adalah jumlah kepentingan individual yang dimaksudkan untuk mencapai kesatuan dan mempromosikan kebaikan bersama. Tujuan inilah yang mengawal produk hukum dan kepemerintahan. Jika tidak, ini memperlihatkan bahwa kepentingan umum yang dikedepankan oleh institusi merusak masyarakat. Kerusakan yang paling parah adalah munculnya ketidak-adilan sosial. Bukankah keadilan sosial adalah merupakan prinsip kebenaran moral, *fairness* dan penataan hukum? Bukankah setiap warga harus menerima apa yang harus mereka dapatkan seperti penghargaan, hukum dan hak. Secara *distributive* terjadi ketidakadilan dalam alokasi

sumber dan keuntungan karena masyarakat peramu yang sederhana yang mengandalkan hutan secara turun temurun untuk kehidupan mereka tidak mendapat haknya secara wajar dan tempat penghidupannya diambil untuk sebuah kepentingan yang namannya ketahanan pangan nasional. Secara *restorative*, masyarakat seringkali tidak mendapat ganti rugi yang wajar. Secara *prosedural*, proses pengambilalihan hutan tidak adil karena seringkali aktivitas perkebunan dan pertambangan di hutan adat tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat sering dibuat kaget oleh hadirnya pekerja, alat berat di hutan mereka tanpa konsultasi berasama mereka.

Kepentingan umum itu mesti dijalankan secara adil dan tidak bisa dipaksakan begitu saja. Tentu saja ada urgensi dari proyek strategis nasional. Namun proyek strategis nasional ini tampak otoriter, karena menggerakan kekuatan militer untuk memastikan pelaksanaannya. Dengan hadir dalam model usaha seperti ini, proyek strategi ini berbau tak sedap. Kehadiran militer dalam jumlah besar untuk kepentingan proyek strategis nasional akan memperpanjang trauma masyarakat Papua Selatan. Bau tak sedap lain adalah cara seperti ini sebenarnya membenarkan ketidakadilan yang terus dilaporkan sepanjang tahun ini.

Memang proyek berskala besar akan memberikan manfaat berupa peningkatan produksi pangan, penciptaan lapangan kerja, terjadi diversifikasi pangan di Papua Selatan serta terjadi peningkatan daya tahan pangan nasional serta energi terbarukan.

Hal yang harus menjadi sorotan adalah akan tersedianya lapangan kerja. Pertanyaan lapangan kerja untuk siapa kalau pengawal dan pekerja adalah militer? Apakah terjadi peningkatan pengangguran di Merauke yang harus diatasi dengan proyek strategis nasional? Bukankah penciptaan lapangan kerja baru dengan sistem kerja modern sebenarnya secara tidak langsung menyingkirkan masyarakat asli yang pada umumnya adalah peramu?

Peramu itu bukan pekerja tetapi pencari dan pengumpul. Inilah sistem kerja yang berbeda dengan sistem kerja masyarakat petani dan apalagi sistem pertanian modern yang amat ketat dan teratur. Sistem kerja yang baru untuk masyarakat yang sudah memiliki sistem kerja

sendiri yang unik merupakan sebuah tantangan yang akan berlangsung lama. Ia paling kurang berlangsung 16 tahun atau setara dengan umur seluruh pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun ini pun baru pada tataran teoritis. Dunia kerja setelah pendidikan perlu lagi melatih orang pada tahun-tahun awal untuk mahir dalam dunia kerja. Jadi menawarkan sebuah sistem pertanian modern pada masyarakat peramu merupakan sebuah tindakan yang hampir mustahil. Lebih dari itu, jika mereka telah hidup dan hidup di dalam hutan Papua Selatan yang dapat dianggap sebagai 'surga' dan yang telah melahirkan manusia-manusia terbesar di Indonesia dari marga Kaize, Mahuse, Gebse dan Balagaise, bukankah pengalihan fungsi hutan menjadi lahan pertanian merupakan sebuah tragedi?

Tentu saja orang akan berpikir bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan umum? Kepentingan umum itu harus bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan penghargaan terhadap martabat setiap pribadi. Ketika kepentingan umum mengorbankan kelompok tertentu yang akan tertatih-tatih berhadapan dengan kemajuan pertanian, bukankah kepentingan umum sama dengan kepentingan jumlah terbanyak yang mengabaikan kepentingan jumlah yang sedikit? Lalu apa artinya masyarakat adat yang berjumlah sedikit di hadapan masyarakat Indonesia yang berjumlah banyak itu? Kritik yang paling mendasar terhadap cara berpikir utilitarianisme adalah bahwa cara berpikir ini menjadikan sejumlah manusia sebagai sarana bagi manusia lain. Padahal manusia itu sudah sejak Immanuel Kant (1724-1804) dianggap tidak boleh digunakan. Ia memiliki tujuan dalam dirinya. *So act that you use humanity, whether in your own person or in the person of any other, always at the same time as an end, never merely as a means.* Manusia tidak bisa diperalat untuk kepentingan lain. Kehendak mereka yang baik dan benar harus dihargai setara dengan kehendak dari mayoritas (Kant (1785), trans. Mary J. Gregor, 2001:429).

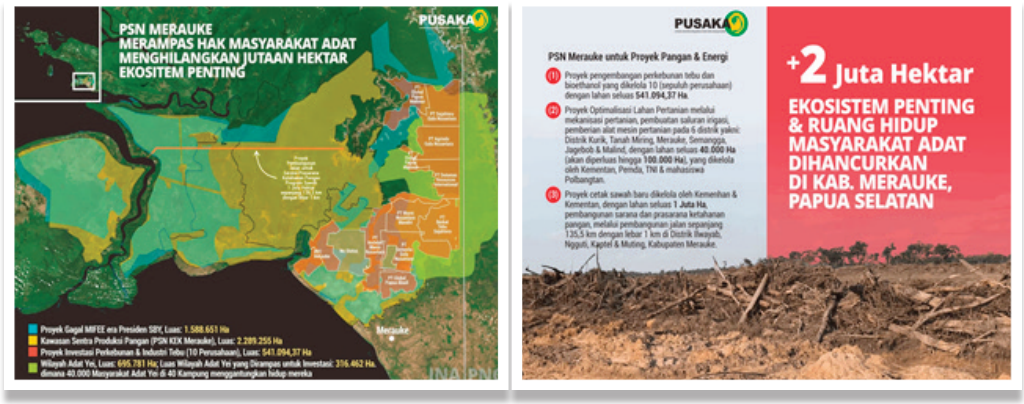
Tiadanya telinga yang jelas mendengar sebenarnya merupakan sebuah panggilan bagi yang berkehendak baik untuk mendengarnya. Orang yang berkehendak baik mengarahkan kebaikan pertama-tama kepada mereka yang seringkali tidak didengarkan. Salah satu yang harus

memberikan perhatian terhadapnya adalah Gereja Katolik di Keuskupan Merauke. Gereja Katolik Keuskupan Merauke sebagai institusi yang besar perlu menjadikan derita kaum tertindas di wilayahnya deritanya juga (*Bdk, Gaudium et Spes,* No 1). Gereja Keuskupan sebagai bagian dari Gereja Universal semestinya senada dengan suara *Laudato S*i dari Paus Fransiskus. Ensklik yang dikeluarkan pada 18 Juni 2015 itu berisikan semangat perhatian terhadap ekologi. Di dalamnya ditegaskan bahwa kita perlu melakukan pertobatan ekologis. Sikap yang tidak tepat terhadap lingkungan harus dirubah. Lingkungan tidak rusak dengan sendirinya tetapi hasil dari aktivitas manusia. Karena itu, gaya hidup manusia perlu dirubah. Keperdulian harus diarahkan secara lebih luas mencakup semua mahluk ciptaan. Orang miskin seringkali menjadi korban utama dari aktivitas lingkungan. Perhatian terhadap mereka hak-hak dasarnya tidak boleh diabaikan. Untuk memperjuangkan itu semua diperlukan kerjasama dengan semua orang yang berkehendak baik.



Bahan Kampanye JPIC OFM Papua berdasarkan laporan Yayasan Pusaka
(Dok. JPIC OFM Papua)

Mengapa diperlukan menyatukan semua pihak yang berkehendak baik untuk dapat membuka telinga para penguasa yang memiliki modal ekonomi, hukum dan militer yang sedang menjalankan tindakan yang dengan terang menyebabkan deforestasi? Deforestasi yang dilakukannya legal, terjamin dan beralasan. Namun deforestasi pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan zaman yang sedang dilanda *global warming* dan bertentangan dengan kemanusian yang adil dan beradab. Dari kedua hal ini, deforestasi dapat disamakan dengan tindakan membakar rumah dan manusia yang ada di dalamnya.



Peta dan Penjelasan PSN
(Dok.Yayasan Pusaka)

Manusia yang ada di dalamnya dan orang yang berkehendak baik hanya didengarkan di jalan-jalan kota, di halaman gedung pemerintahan dan pelataran Gereja. Seperti biasa jalanan dan halaman rumah serta pelataran Gereja tak dapat menyahut. Suara demikian dipandang tak bermakna. Kini, makna ditentukan oleh jumlah orang, jumlah kepentingan, keuntungan dan kekuatan besar. Martabat alam, manusia dan keadilan meskipun merupakan fundasi-fundasi negara telah, sedang dan akan dikangkangi. Realitas ketidakadilan lingkungan dan tiadanya kemanusiaan yang adil dan beradab tak lagi mengganggu para penguasa negara. Rakyat kecil seakan-akan bukan bagian dari elemen penting negara. Karena itu jeritan mereka adalah gonggongan anjing di hadapan kafila yang sedang berlalu.



Militer, Pemerintah dan Perusahaan yang melakukan survey di lokasi PSN Merauke.
(Dok. LBH Papua)

Penutup: Moratorium Pembangunan demi Keadaban

Problem lingkungan di Papua adalah hal yang nyata dan meluas. Problem ini bukan sebuah kasus tetapi sebagai sebuah tindakan sengaja atas nama pembangunan ekonomi, yang disebut ketahanan pangan dan energi terbarukan. Sekali lagi, ini adalah tindakan yang berlandaskan hukum, berkekuatan ekonomi dan militer. Pelaksanaannya tak pernah dapat dipandang sebagai tindakan criminal. Penolakan terhadapnya dapat dikriminalisasi.

Apakah bangsa ini sedemikian terbelakang sehingga harus dibangun segencar dan seluas untuk mengejar ketertinggalan? Harus diakui kita tak terbelakang. Kita terbelakang dalam soal peradaban. Inilah yang harus dilakukan, sebagaimana pernah didengungkan dengan revolusi mental ala Jokowi. Revolusi mental perlu dilakukan pertama-tama dengan moratorium pembangunan yang mengarah pada sifatnya yang materialis, konsumeristis dan kompetitif dalam skala yang luas, massif dan yang

menciptakan ketidakadilan sosial dan yang tidak memperhatikan martabat manusia. Hal ini harus dihentikan, dievaluasi dan didialogkan ulang. Tujuannya adalah agar pembangunan betul merupakan pembangunan bagi seluruh rakyat tanpa terus menjadikan masyarakat suku, adat dan yang kecil terus termaginalisir. Hanya dengan itu, kita dapat menciptakan Pembangunan yang memperhatikan manusia, lingkungan, hutan dan peradaban manusia.

Daftar Pustaka

Asrida Elisabeth, Hans Nicolas Jong, 1 Desember, 2022. *In First for Indonesia, Government Recognizes Indigenous Papuans' Ancesteral Forest,* dalam *Mongabay.*

Aurora, Selina, 2024. *Menghidupi Ekoteologi Bergereja di Papua,* dalam https://Laolao-papua.com.

Bank Dunia, UNEP dan ICMM pada tahun 2022, *Laporan Iklim dan Pembangunan Negara Indonesia*, *Laporan Iklim dan Pembangunan Negara Indonesia.*

Baru, Bernadus Wos, 2023. *Orang Papua di Persimpangan Jalan, Peradaban, Konflik, dan Perjuangan Meneggakan Martabatnya,* Pustaka Larasan, Denpasar.

Calculating Consequences: The Utilitarian Apporach of Ethics, dalam *Markkula Center for Applied Ethics at Santa Clara University,* dalam https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/calculating-consequences-the-utilitarian-approach.

Cox, P. M., et al. – 2008. *Increasing risk of Amazonian drought due to climate change*, (2008), Nature,

Demirbas, A., 2018. *Biomass as a Renewable Energy Source* dalam *The Role of Biomass in the Energi Transition,* Springer Publishing.

Dhae, Arnoldus, *Uskup Agung Ende Tegas Tolak Eksplorasi Geotermal di Pulau Flores,* dalam *Media Indonesia,* 10/1/2025).

Gaudium et Spes, No 1, Departemen Dokumentasi Penerangan KWI.

https://www.tempo.co/lingkungan/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal-405399).

https://www.scu.edu/ethics/ethics-resources/ethical-decision-making/calculating-consequences-the-utilitarian-approach/

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2019. *Laporan Khusus tentang Perubahan Iklim dan Tanah*. IPCC.

Kant, *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785), Mary J. Gregor, 2001.

Malhi, Y., et al, 2008, *Climate change, deforestation, and the fate of the Amazon*, Frontiers in Ecology and the Environment

Manoby, W. M., M. Siscawati, & K.H. Dewi, 2023. *Papua Special Autonomy in Engagement With Gender, Generations and Deforestation: Insight From Feminist Political Ecology. Jurnal Bina Praja,* 15(2).

Pachauri, R. K., & Mayer, L. (Eds.), 2014. *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*, Cambridge University Press

Paus Fransiskus, *Laudato Si,* Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2015.

Soekadijo, 2003. *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik dan Induktif*, Kanisius, Yogyakarta.

Sopaheluwakan dan Fatem, 2023, *Two-decades Decentralization and Recognition of Customary Forest Rights, Cases from Special Autonomy Polity in West Papua,* dalam Forest Policy and Economics Volume 151, June 2023.

Kronik Investasi: Land Grabbing dan Deforestasi

10-11 Januari

Pemerintah Provinsi Papua Barat belum bisa menerbitkan izin pertambangan rakyat karena arealnya berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Mereka masih harus mengoordinasikan rencana itu dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Johan Abraham Tulus mengatakan regulasi mengenai pertambangan rakyat telah diakomodasi dalam peraturan daerah khusus. Namun, realisasinya harus menunggu izin pelepasan atau alih fungsi kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dia melanjutkan Pemprov Papua Barat akan melakukan survei terlebih dahulu apabila KLHK menyetujui usul alih fungsi kawasan. Mereka harus memastikan lagi potensi di lokasi yang hendak diterbitkan izin pertambangan rakyat tersebut. Menurut Johan, mereka juga akan bertemu pihak Polda Papua Barat guna menjelaskan persoalan penambangan emas liar (Koran Jubi).

12-13 Januari

Kepolisian Daerah Papua Barat akan membentuk tim khusus untuk memberantas kembali aktivitas penambangan emas liar. Mereka menilai penambangan liar merusak lingkungan sehingga harus dihentikan aktivitasnya. Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir mengatakan tim khusus dibentuk seusai penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka akan diterjunkan ke lokasi untuk memberantas aktivitas pertambangan liar. Isir mengaku telah menerima informasi mengenai aktivitas penambangan emas liar di Manokwari dan Pegunungan Arfak. Aktivitas tersebut menggunakan ratusan alat berat dan merkuri (Koran Jubi).

17-18 Januari

Pemerintah Provinsi Papua Tengah membantah pernah menerbitkan izin pertambangan di Blok Wabu, Kabupaten Intan Jaya. Bantahan itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sum-

ber Daya Mineral Papua Tengah Frets James Boray, Senin, 15 Januari 2024. *"Saya menyampaikan bahwa tidak benar Pemprov Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengeluarkan kebijakan tentang izin penambangan di Blok Wabu. Penjabat Gubernur tidak ada mengeluarkannya izin,"* kata Boray. Dia menjelaskan Blok Wabu sebelumnya ialah kawasan konsesi tambang PT Freeport Indonesia. Mereka telah mengeksplorasinya sejak puluhan tahun, tetapi belum pernah mengeksploitasi atau mengoperasikan penambangannya (Koran Jubi).

17 Januari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua mengingatkan pihak terkait, dalam pembangunan RS UPT Vertikal Papua di belakang komplek Uncen Abepura, untuk memperhatikan dampak lingkungan di kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir. Selain itu, pengelolaan limbahnya tidak berdampak pada peristiwa penggusuran warga yang menempati wilayah tempat resapan air. *"Sebab jika hal itu terjadi, maka akan berdampak pada peristiwa penggusuran paksa yang adalah pelanggaran HAM,"* tegas Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Selasa (16/01) Pelanggaran HAM berat yang dimaksud Emanuel sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1), UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan Internasional tentang hak ekonomi sosial dan budaya (Cenderawasih Pos).

19-20 Januari

- Koordinator Umum Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua Tolak Investasi Blok Wabu, Marius Jagani mengatakan masyarakat adat di Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua Tengah memiliki alasan menolak investasi Blok Wabu, bekas wilayah tambang Blok B PT Freeport Indonesia. Salah satunya, Blok Wabu memiliki sumber mata air yang mengalir di beberapa kabupaten. *"Sungai Wabu dan Kemabu menjadi sumber air bagi masyarakat adat mulai dari Intan Jaya sampai ke Paniai, Deiyai, Dogiyai, Timika, dan Nabire dan cabangnya sampai ke Mamberamo. Selain itu, sumber ikan dan mamalia lainnya, sumber kacang pohon dan lainnya, seranggan dan burung, babi. Sumber pohon-pohon berdiameter besar yang dapat dipakai membangun rumah, pagar dan*

jembatan, sumber estetika, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan," kata Jagani saat membacakan pernyataan di depan demonstran di Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (18/01). Jagani mengatakan Gunung Wabu adalah wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat setempat semenjak leluhur menurunkan puluhan marga dan suku yang mendiami dan bangunan rumah huni, rumah doa. Begitupun bagian wilayah Paniai, di sana banyak masyarakat adat yang sudah menyatu dengan keadaan alamnya (Koran Jubi).

- Bupati Hermus Indou mendukung Kepolisian Daerah Papua Barat dalam memberantas penambangan liar di Manokwari. Dia menegaskan penambangan liar merupakan kejahatan. *"Pemerintah Kabupaten Manokwari mendukung penuh upaya Kepala Polda Papua Barat dalam memberantas tambang ilegal. Saya katakan ini tambang liar merupakan kejahatan,"* kata Indou, Rabu (17/01). Dia mengatakan penambangan emas liar telah mencuri sumber daya alam di Manokwari. Dampak perusakan lingkungannya juga mengerikan (Koran Jubi).

24-25 Januari

Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) telah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungsan, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan di Jakarta pada Juni 2023, terkait proses izin AMDAL baru soal tambang bawah tanah dan tailing PT Freeport yang harus dipending. Hal itu disebabkan karena tidak melibatkan warga yang terkena dampak, terutama di tiga Lembah Tsinga, Waa dan Arwanop. Pasalnya bahwa kementerian sudah menanggapi surat tersebut. Surat tanggapan permohonan fasilitas manajemen PT FI dan LEMASA belum mendapat tanggapan, sementara proses AMDAL terus berlangsung sampai sekarang (Koran Jubi).

Pembentukan empat provinsi baru mengancam kelestarian hutan alam di Tanah Papua. Greenpeace Indonesia memperkirakan sekitar 7,5 juta hektare hutan alam berpotensi hilang akibat pemekaran Provinsi

Papua dan Papua Barat tersebut. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Nicodemus Wamafma mengatakan daya dukung fiskal provinsi baru masih lemah sehingga membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan. Karena itu, mereka pasti mengandalkan investasi berbasis lahan atau industri ekstraktif sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Koran Jubi).

26-27 Januari

Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan penambangan Blok Wabu di Intan Jaya harus mendapat izin atau restu dari pemilik hak ulayat. Hal itu disampaikan Ramandey di Kota Jayapura pada Kamis (25/01). *"Penambangan Blok Wabu harus mendapat restu dari masyarakat pemilik hak ulayat,"* ujarnya. Pada 18 Januari 2024, massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Rakyat Papua menggelar aksi, damai menolak pengelolaan Blok Wabu di Intan Jaya. Mereka menilai penambangan Blok Wabu, sebuah area bekas wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Intan Jaya, akan merugikan masyarakat adat di sana (Koran Jubi).

02-03 Februari

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap berkolaborasi dalam memberantas pertambangan emas liar di wilayah Sorong Raya. Mereka segera berkonsultasi dengan Kepolisian Daerah Papua Barat mengenai rencana pembentukan tim khusus. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan maraknya penambangan liar, terutama yang menggunakan alat berat mengakibatkan perusakan lingkungan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan banjir dan longsor. *"Kami pada prinsipnya mendukung penuh langkah kepolisian dalam menertibkan semua kegiatan tambang tanpa izin. Maraknya pertambangan ilegal dengan menggunakan alat berat mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan di Papua Barat Daya,"* kata Musa'ad, Selasa (30/01). Musa'ad mengaku pemerintah daerah selama ini kesulitan dalam memberantas berbagai praktik perusakan lingkungan (Koran Jubi).

06 Februari

Sebanyak 806 orang yang terdiri dari masyarakat sipil, mahasiswa, atas nama lembaga maupun organisasi mengajukan surat permohonan atau petisi selamatkan hutan adat Papua. Surat tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, menyebut lima point tersebut diantaranya surat terbuka disampaikan demi keadilan untuk pejuang lingkungan hidup, Hendrikus Woro yang berjuang untuk Marga Woro dan Suku Awyu yaitu penggugat dalam perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim Nomor 6/G/ LH/2023/PTUN.JPR PTUN Jayapura (Cenderawasih Pos).

07-08 Februari

Luas konsesi perkebunan kelapa sawit mencapai 158.821 hektare di seluruh Tanah Papua. Pembukaan konsesi tersebut menimbulkan persoalan serius terhadap lingkungan dan juga kehidupan masyarakat adat. Aktivis Greenpeace Indonesia di Papua, Samuel Moifilit mengatakan ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit menuai banyak permasalahan bagi masyarakat adat setempat. Hutan ulayat mereka hilang padahal kehidupan masyarakat adat sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut. *"Hutan alam di Tanah Papua menjadi sasaran pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, HTI hutan tanam ilndustri, dan proyek lumbung pangan food estate. Luas perkebunan kepala sawit saja yang membuka hutan alam di Tanah Papua sudah mencapai 158.821 hektare,"* kata Moifilit, saat dihubungi Jubi. Dia mencontohkan kondisi di Merauke. Sekitar 112 ribu hektare hutan alam di kabupaten tersebut rusak akibat berbagai aktivitas industri ekstraktif (Koran Jubi).

09 Februari

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melakukan penanaman pohon Mangrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Rabu (07/02). Kepala Pengawasan Internal BRGM, A Triko Iriandi mengatakan, pada dasarnya dalam kegiatan restorasi gambut itu, tidak akan

pernah terlepas dari peran masyarakat sesuai dengan slogan BRGM. Pulihkan gambut, hijaukan Mangrove, tingkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya kepentingan masyarakat memang di atas segalanya (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

21 Februari

Pihak LBH Papua mendesak Pengadilan Tinggi Manado untuk membatalkan putusan PTUN Jayapura terhadap perkara pencabutan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan, tuntutan itu dilayangkan lantaran PTUN Jayapura sebelumnya pada Kamis (02/11) menolak gugatan pemimpin warga Woro dari Suku Awyu, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adatnya seluas 39.000 hektare (Cenderawasih Pos).

06-07 Maret

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah Agustinus Hanggaibak mengatakan MRP Papua Tengah telah membentuk Pansus AMDAL PT Freeport Indonesia dan sekaligus Ketua Pansus. *"Kami sudah bentuk dan saudara Yahuda Gobay telah ditunjuk sebagai Ketua Pansus Amdal Freepart dari MRP Papua Tengah untuk mengecek keterlibatan masyarakat adat termasuk Amungme dan Kamoro,"* katanya di Timika Selasa (05/03) siang. Dia menambahkan, Ketua Pansus Yehuda Gobay akan datang ke Timika untuk melihat langsung, termasuk bertemu dengan masyarakat Suku Amungmo dan Kamoro (Koran Jubi).

08-09 Maret

- Ketua Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA), John Magal sangat mendukung upaya MRP Provinsi Papua Tengah untuk membentuk Pansus AMDAL PT Freeport Indonesia, untuk duduk dan saling mendengar, serta menerima masukan dari berbagai pihak. *"Saya melihat apa yang diprakarsai MRP Papua Tengah dengan membentuk Pansus AMDAL PT Freeport adalah sangat penting untuk semua pihak duduk dan membicarakan dampak lingkungan bagi masa depan masyarakat*

Amungme ke depan terutama dengan AMDAL Kedua Tambang Bawah Tanah," kata Ketua LEMASA, John Magal, kepada di Jubi di Timika, Kamis (07/03) siang (Koran Jubi).

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua meng-apresiasi peran masyarakat adat Papua dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Kepala P3E Papua KLHK Edward Sembiring di Manokwari, Papua Barat, Kamis (07/03) mengatakan kearifan lokal yang terpelihara oleh masyarakat adat sejak dahulu sejalan dengan prinsip-prinsip konservasi. *"Hutan di Tanah Papua ini masih lestari karena ada kearifan lokal yang dipegang teguh masyarakat hukum adat,"* kata Sembiring. Menurut dia, masyarakat hukum adat Papua memahami bahwa alam merupakan sumber kehidupan yang perlu dijaga dan dirawat selayaknya seorang manusia. Masyarakat adat juga memiliki peran sangat penting dalam memproteksi kerusakan ekosistem lingkungan dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (Koran Jubi).

14 Maret

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutuskan menolak upaya banding atas Gugatan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang diperkarakan Hendrikus Woro, Pembela Lingkungan Hidup dari Suku Awyu, Kabupaten Boven Digoel, maupun Penggugat Intervensi yang dimohonkan pimpinan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan Eksekutif WALHI Nasional. Putusan majelis hakim PT TUN Manado tertanggal 01 Maret 2024 yang diketuai Simbar Kristianto, S.H menampik gugatan tersebut dengan dalil sudah melewati batas waktu. Menurut majelis hakim, gugatan Hendrikus Woro ke PTUN Jayapura pada 13 Maret 2023 telah melebihi tenggat waktu 90 hari sejak diketahuinya objek sengketa, yakni izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Pemerintah Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua, Tigor G Hutapea, dalam Siaran Pers Tim Advokasi (14 Maret

2024) mengkritisi putusan majelis hakim PT TUN Manado, bahwa perhitungan hari oleh majelis hakim ini patut dipertanyakan sebab mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan kalender khusus yang ditetapkan Gubernur Papua–yang memiliki libur Natal lebih panjang ketimbang kalender nasional. Gugatan juga telah melalui proses pemeriksaan dismissal di PTUN Jayapura, dinyatakan diterima, dan tak melewati batas waktu kedaluwarsa (https://pusaka.or.id/pembela-ham-lingkungan-hidup-dari-suku-awyu-ajukan-kasasi/).

15 Maret

Masyarakat adat Suku Awyu mengajukan kasasi atas putusan PTUN Manado yang menolak banding terkait gugatan mereka atas izin kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua. Kasasi itu diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis (14/03). Hal itu disampaikan anggota Tim Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua selaku penasehat hukum masyarakat adat Suku Awyu, Emanuel Gobay. "*Saat ini kami baru saja melakukan pendaftaran kasasi. Itu artinya kita sudah melewati beberapa tahapan di PTUN Jayapura, kemudian banding, dan ke tahapan kasasi,*" kata Gobay (Koran Jubi).

18-19 Maret

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sangat mendukung rencana pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong oleh investor asal China. Staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, George Yarangga di Sorong, menjelaskan dukungan pemerintah atas kehadiran investor untuk berinvestasi di KEK Sorong menurutnya sangat penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mengoptimalkan KEK Sorong (Koran Jubi).

20 Maret

Ekspansi bisnis perkebunan kelapa sawit besar-besaran dan izin konversi hutan terluas untuk bisnis minyak kelapa sawit di daerah Papua terjadi pada periode Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (2009-2014), luasnya mencapai 900.291 hektar atau 9002,91 km2 dan kawasan hutan sasaran terluas berada di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan sekarang. Tanah Papua menjadi impian dan sasaran para investor dan perusahaan transnasional. Pengusaha asal Sumatera Barat dan pemilik Menara Group, Chairul Anhar, mengklaim memiliki izin konversi hutan seluas 2800 km2 dan/atau luasnya lebih dari 25 persen dari total luas izin yang diterbitkan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan saat itu. Luas izinnya melebihi empat kali luas Provinsi DKI Jakarta seluas 661,5 km2. Hutan tempat hidup bagi Suku Awyu akan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah, yang akan dioperasikan tujuh perusahaan, yakni PT Megakarya Jaya Raya (MJR), PT Kartika Cipta Pratama (KCP), PT. Graha Kencana Mulia (GKM), PT Energi Samuderan Kencana (ESK), PT Trimegah Karya Utama (TKU), PT. Manunggal Sukses Mandiri (MSM) dan PT Nabati Usaha Mandiri (NUM). Dalam perkembangannya kepemilikan saham perusahaan telah beralih ke pemilik baru, dijual ke perusahaan lain yang beralamat di Timur Tengah, Singapura dan Malaysia. Operasi Proyek Tanah Merah yang akan menghancurkan hutan Papua ini terungkap mempunyai banyak masalah hukum, skandal korupsi dan melibatkan aktor pejabat dan konglomerat (the Gecko Project dan Tempo, 2018), misalnya dokumen AMDAL tidak ada, penggunaan tanda tangan pejabat yang dipalsukan dan tipu daya pemberian uang dengan motivasi perolehan dukungan masyarakat, tidak ada negosiasi dan persetujuan bebas masyarakat, dan sebagainya (https://pusaka.or.id/suku-awyu-melawan-perusahaan-proyek-tanah-merah-hingga-mahkamah-agung/).

26 Maret

Laju deforestasi di Papua menjadi ancaman nyata untuk keberlang-sungan kehidupan di masa depan. Dua penerima Kalpataru, Alex

Waisimon dan Petronela Meraudje mengingatkan publik untuk bisa memastikan keberadaan hutan yang lestari. *"Kami hanya memiliki hutan bakau dan ini menjadi dapur bagi kami. Kalau hutan rusak kami terancam,"* kata Petronela Meraudje peraih Kalpataru tahun 2023 dalam kegiatan diskusi Telusur Celah Tonotwiyat di Rumah Bakau Jayapura, Minggu (24/03). Ia menyampaikan dalam tatanan adat pihaknya tidak mendapat ruang untuk berbicara dan hutan bakau inilah yang dijadikan tempat mencari dan berkumpul sesama perempuan (Cenderawasih Pos).

03-04 April

Aktivitas penambangan pasir di Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura membuat keruh air di Danau Sentani. Nelayan setempat pun mulai mengeluh karena sulit mencari ikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri mengaku terkejut dengan dampak penambangan pasir di Danau Sentani. Meskipun dapat mencegah pendangkalan danau, aktivitas itu juga merusak kualitas air. "*Dampak positif dari penambangan tersebut ialah mencegah pendangkalan dan bernilai ekonomi menjadi sumber penghasilan warga, tetapi air danau menjadi keruh akibat penyedotan pasir. Kami pernah mendatangi masyarakat dan tokoh adat Kampung Ifar Besar untuk membicarakan menyelesaikan masalah penambangan ini,"* kata Abdul, Sabtu pekan lalu (Koran Jubi).

04 April

Kecurigaan aparat TNI-AL terhadap bongkaran muatan kayu Merbau sebanyak kurang lebih 3000 batang ternyata benar dimana ada persyaratan administrasi yang dipalsukan. Barang bukti kayu Merbau ini akhirnya dilakukan 'police line. Dari data yang disampaikan kepada wartawan diketahui jika kayu berbagai macam ukuran ini merupakan milik PT Crown Pasifik Abadi yang rencananya akan dikirim ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Barang ini akan dikirm menggunakan container melalui pelabuhan Jayapura. Sebelumnya Danlantamal X Jayapura, Brigjend TNI (Mar) Ludi Prastyono menjelaskan bahwa pihaknya tak main-main dengan temuan ini (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

18 April

Saat ini, masyarakat adat Wambon Kenemopte di Kampung Subur dan Aiwat, Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan (sekarang), sedang menghadapi permasalahan penggusuran dan pengrusakan lahan dan hutan yang dilakukan perusahaan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Merauke Rayon Jaya (MRJ), terjadi semenjak awal April 2024. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) telah menerima laporan masyarakat adat terdampak bahwa PT MRJ telah menggusur lahan dan hutan adat dengan cara melanggar hukum adat, yakni penggusuran dan pembabatan hutan tanpa musyawarah dan restu izin sebagaimana hukum adat setempat. Perusahaan PT MRJ juga belum menyampaikan dokumen perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dari negara dan persyaratan seperti kelayakan lingkungan, rencana kerja usaha, AMDAL dan sebagainya kepada masyarakat. Pejabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan, dan Kepala Bidang Lingkungan Hidup DLHKP Provinsi Papua Selatan, juga mengkonfirmasi tidak menerbitkan surat pemberian izin dan rekomendasi, dan persyaratan usaha lainya, tentang keberadaan dan rencana operasi perusahaan hutan tanaman industri PT MRJ. *"Perusahaan PT MRJ tidak menghormati HAM Masyarakat Adat Wambon Kenemopte, perusahaan diduga melanggar hukum yakni beroperasi membongkar dan menggusur hutan, dan memanfaatkan hasil hutan kayu, tidak sesuai ketentuan negara dan tanpa izin masyarakat adat"*, jelas Tigor G Hutapea, staf advokasi Pusaka (https://pusaka.or.id/perusahaan-hti-pt-merauke-rayon-jaya-di-kabupaten-boven-digoel-diduga-melakukan-tindakan-melawan-hukum/).

19 April

Kasi 3 Gakkum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku-Papua, Muhammad Anis mengakui kasus 3.000 batang kayu Merbau atau kayu besi ilegal yang diamankan Lantamal X Jayapura dinaikkan statusnya ke penyidikan. Memang benar dari hasil gelar perkara yang dilaksanakan di Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta memutuskan untuk dinaikkan statusnya. Anis mengakui, masih menunggu surat perintah penyidikan dari Ditjen Gakkum-KLHK. Tim yang menangani merupakan tim gabungan dari Jakarta dan Jayapura (Cenderawasih Pos).

02 Mei

Pemerintah Pusat melalui Kementrian Investasi RI memberikan target investasi kepada Provinsi Papua Selatan di tahun 2024 yang harus direalisasikan sebesar Rp 1,87 triliun. *"Pemerintah pusta lewat Kementrian Investasi memberikan target kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 1,87 triliun. Target ini harus bisa direalisasikan sampai 10 Januari 2025,"* kata Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem, Selasa (30/04). Petrus Assem mengungkapkan, pihaknya telah membagi target tersebut keempat kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan telah mengirim surat kepada kepala dinas penanaman modal dan PTSP di keempat kabupaten tersebut sehingga ada giat-giat untuk mendapat investasi tentunya kerja sama dengan Pemprov Papua Selatan. "*Investasi terbesar tentunya ada di Kabupaten Merauke disusul Kabupaten Boven Digoel, diikuti Kabupaten Mappi dan Asmat,"* jelasnya. Dikatakan dari perkembangan investasi di Papua Selatan sampai sekarang ini dengan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 274 perusahaan. Dimana PMA sebanyak 5 perusahaan dengan nilai investasi Rp 5,31 triliun (Cenderawasih Pos).

03 Mei

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Papua Selatan siap mengarahkan investor yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Papua Selatan untuk berinvestasi di Kabupaten Mappi dan Asmat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem terkait minimnya investasi di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat. Padahal, investasi baik penanaman

modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sangat penting bagi kemajuan suatu daerah. *"Kami siap mendorong para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat,"* kata Petrus Assem. Petrus Assem menjelaskan bahwa dari investasi yang masuk di Provinsi Papua Selatan, terbanyak berada di Kabupaten Merauke kemudian disusul Kabupaten Boven Digoel. Sementara Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat masih minim investasi (Cenderawasih Pos).

24 Mei

Ikatan Mahasiswa Merauke atau Immer Kota Jayapura Papua menggelar mimbar bebas menolak lahan tebu 2 juta hektare di Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini digelar di halaman Asrama Maro Putra, Padang Bulan, Heram Kota Jayapura Papua pada pukul 16.00 WIT, Kamis (23/05). Dalam kegiatan ini, mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan, "Mimbar Bebas Kitorang menolak proyek 2 juta hektar tebu di Kabupaten Merauke, *Save Indigenous Papuans' Forests, Kami dibesarkan dengan sagu dan hutan adat bukan dengan uang perusahaan, Stop jual tanah, Jaga hutan Papua, Papua bukan tanah kosong*. Bahkan dalam kegiatan ini ada tiga pemuda yang memakai busana adat sebagai pemberi pesan bahwa masyarakat adat di Merauke masih ada dan lahan seluas dua juta hektare bukan tanah kosong. Mereka menyebut aksi itu untuk menyadarkan pemerintah Papua Selatan. *"Sebelum ada aturan negara, aturan adat sudah ada duluan. Kasitau bupati, di Papua Selatan bukan tanah kosong, kepentingan bapak-bapak Jawa sana kami jadi korban, kami mahasiswa dan masyarakat dengan tegas menolak investor tebu 2 juta hektar,"* ujar Stenly Dambujai dalam orasinya (https://jubi.id/animha/2024/immer-jayapura-tolak-2-juta-hektar-tebu-di-merauke/).

27 Mei

Sebanyak 72 unit bantuan peralatan mesin pertanian dari Kementrian Pertanian tiba di Dermaga Pelabuhan Merauke dengan menggunakan KRI Soeharsono 990, Minggu (26/05). Bupati Merauke Romanus Mbaraka didampingi Ketua DPR Merauke Sugiyanto menyambut kedatangan

72 unit bantuan peralatan Alsintan tersebut. Bupati Merauke Romanus Mbaraka menjelaskan bahwa bantuan ini dalam rangka optimalisasi lahan pertanian seluas 40.000 hektar (Cenderawasih Pos).

28 Mei

Pejuang lingkungan hidup dari Suku Awyu dan Moi mendatangi gedung Mahkamah Agung di kawasan Jakarta Pusat. Mengenakan busana khas suku masing-masing, mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantor lembaga peradilan tertinggi itu, ditemani oleh Solidaritas Mahasiswa Papua dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Lewat aksi damai ini, masyarakat adat Suku Awyu dan Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka. Masyarakat adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Hendrikus Woro menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL seluas 36.094 hektare, atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta, dan berada di hutan adat marga Woro, bagian dari suku Awyu. Namun gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, kasasi di Mahkamah Agung adalah harapannya yang tersisa untuk mempertahankan hutan adat yang telah menjadi warisan leluhurnya dan menghidupi marga Woro turun-temurun. Selain kasasi perkara PT IAL ini, sejumlah masyarakat adat Awyu juga tengah mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digoel. PT KCP dan PT MJR, yang sebelumnya kalah di PTUN Jakarta, mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Perwakilan masyarakat adat Moi Sigin pun melawan dengan mengajukan diri sebagai tergugat intervensi di PTUN Jakarta pada Desember 2023. Setelah hakim menolak gugatan itu awal Januari lalu, masyarakat adat Moi Sigin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 03 Mei 2024. Keberadaan perusahaan sawit PT IAL dan PT SAS akan merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan Moi. Hutan tersebut juga habitat bagi flora dan fauna endemik

Papua, serta penyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Operasi PT IAL dan PT SAS dikhawatirkan memicu deforestasi yang akan melepas 25 juta ton CO2e ke atmosfer, memperparah dampak krisis iklim di Tanah Air. *"Kami meminta Mahkamah Agung cermat memeriksa perkara gugatan suku Awyu dan Moi, melihat kepentingan pelindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat, serta mengeluarkan putusan kemenangan untuk suku Awyu dan Moi. Majelis hakim perlu mengedepankan aspek keadilan lingkungan dan iklim, yang dampaknya bukan hanya akan dirasakan suku Awyu dan suku Moi tapi juga masyarakat Indonesia lainnya,"* kata Tigor Hutapea, anggota tim kuasa hukum suku Awyu dan Moi dari Pusaka Bentala Rakyat (https://pusaka.or.id/suku-awyu-dan-moi-gelar-aksi-damai-di-mahkamah-agung-serukan-penyelamatan-hutan-adat-papua/).

03 Juni

Puluhan masyarakat asli Malind dari Kampung Buepe, Distrik Kaptel dan Kampung Zanegi, Distrik Animha, yang terdampak dari aktifitas perusahaan hutan tanaman industri (HTI) PT Plasma Nutfah Marind Papua PT Plasma Nutfah Marind Papua dan PT Selaras Inti Semesta, bertemu dan berdialog dengan pemerintah di Kota Merauke. Pemerintah yang hadir pejabat DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke, Ismanto, anggota DPRD Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan. Masyarakat menyampaikan surat pernyataan sikap terkait permasalahan yg dihadapi dengan adanya aktifitas perusahaan yang menggusur hutan adat dan dusun, untuk industri kemersial kertas dan energi biomass. *"Kami meminta perusahan bertanggung jawab untuk memperbaiki dan memulihkan fungsi-fungsi hutan dusun sagu, tempat mencari ikan, tempat keramat, tempat suci dan hutan tempat berburu, serta tempat sekitar aliran sungai dan rawa"*, ungkap Lukas Samkakai, tokoh masyarakat Malind dari Kampung Buepe, Distrik Kaptel. Perusahaan menebang kayu dan masyarakat adat setempat diberikan uang kompensasi kayu Rp. 2.500 per meter kubik. Standar nilai kompensasi ini digunakan perusahaan dengan dasar Peraturan Gubernur Papua Nomor 64 Tahun 2012 tentang Standar Kompensasi atas Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bulan Kayu yang Dipungut pada Areal

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Gubernur Papua ini dan pemberian uang kompensasi perusahaan dianggap tidak adil, tidak sesuai dengan kerugian sosial ekonomi dan kerusakan hutan, yang ditanggung masyarakat. *"Nilai kompensasi merugikan masyarakat, kami minta pemerintah meninjau peraturan ini,"* ungkap Vitalis Gebze dari Kampung Zanegi, Distrik Animha (https://pusaka.or.id/masyarakat-asli-malind-meminta-perusahaan-bertanggung-jawab-memulihkan-sumber-kehidupan-masyarakat/).

04 Juni

Perwakilan Suku Awyu dan Suku Moi, Papua ke Jakarta untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah adat yang terancam jadi perkebunan sawit. Masyarakat adat menggugat pemerintah agar izin perusahaan perkebunan sawit dicabut dan kasusnya sedang kasasi di Mahkamah Agung. *"Kami bersama Suku Aywu. Kami melawan krisis keanekaragaman hayati. Selamatkan hutan adat dan Orang Papua. Papua bukan tanah kosong. Save Indegenous People. Save Indegenous Papuan's Forest."* Begitu bunyi spanduk spanduk dan pamflet masyarakat Suku Awyu dan Suku Moi, di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat, 27 Mei lalu (https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/).

07 Juni

Bupati Sorong Selatan menerbitkan SK tentang Pengakuan Perlindungan dan Penghormatan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat yang diberikan kepada tujuh kelompok marga, sub suku dan persekutuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. *"Saya mewakili bupati menyerahkan surat keputusan bupati Sorong Selatan tentang pengakuan perlndung dan penghormatan hak masyarakat hukum adat dan wilayah adat pada hari ini secara resmi,"* ungkap Dance Nauw, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Penyerahaan SK penetapan pengakuan hak masyarakat adat dilakukan bersamaan dengan peluncuran dan peresmian Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Sorong Selatan, berlokasi di Kampung Ani

Sesna, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan. Keputusan ini pertama kali diputuskan dan ditetapkan oleh Bupati Sorong Selatan. Pada Juni 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Sorong Selatan. Diketahui terdapat 42 kelompok sub suku dan ratusan marga dari masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, yang didaftarkan dan diakui keberadaanya melalui Perda 03/2022 (https://pusaka.or.id/apresiasi-langkah-maju-pemda-sorong-selatan-dengan-menetapkan-hak-masyarakat-adat-dan-wilayah-adat/).

20 Juni

Ekspansi atau perluasan maupun pembesaran merupakan watak dari sistem ekonomi kapitalisme yang dilakukan melalui reproduksi modal dan alat produksi dalam skala yang diperluas dan diperbesar, seperti reinvestasi laba pada berbagai usaha, sentralisasi modal, konsolidasi dan pemusatan modal, penggabungan (merger) usaha, pengambilalihan dan pencaplokan (akuisisi) dengan membeli dan menyatukan perusahaan, perdagangan barang dan jasa, termasuk menyingkirkan pemodal lain, yang diorganisasikan dan dikendalikan terpusat oleh satu atau lebih pemilik modal. Pada gilirannya pemilik modal akan menimba keuntungan cuan dari sistem ekonomi ini. Pandemic Covid 19 dijadikan sebagai peluang ekonomi dengan melakukan akuisisi dan pengambilalihan tiga perusahaan minyak kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Tanah Papua, yakni (1) PT Inti Kebun Sejahtera dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 38.300 hektar ; (2) PT Inti Kebun Sawit dengan IUP seluas 37.000 ha ; dan (3) PT Inti Kebun Lestari seluas 34.400 ha. Ketiganya berhubungan dengan Ciliandry Anky Abadi Group, salah satu unit bisnis keluarga Fangiono dan dilaporkan memiliki berbagai permasalahan ketidakpatuhan pada prinsip NDPE dan berkonflik dengan masyarakat adat pemilik lahan. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah melakukan evaluasi perizinan terhadap 24 perusahaan kelapa sawit di Papua Barat dengan luas wilayah perizinan sebesar 576.090,84 hektar (2021). Pemerintah menemukan adanya pelanggaran legalitas dan/atau administrasi perizinan, seperti

pelanggaran kewajiban ketidakpatuhan dalam Izin Usaha Perkebunan, beroperasi tanpa Hak Guna Usaha, melakukan penanaman di lahan gambut yang dilarang, dan sebagainya. Tahun 2021, Bupati Sorong mencabut 4 (empat) perusahaan perkebunan kelapa sawit, yakni PT Cipta Papua Plantation ; PT Sorong Agro Sawitindo ; PT Papua Lestari Abadi ; PT Inti Kebun Lestari (https://pusaka.or.id/ekspansi-industri-perkebunan-minyak-kelapa-sawit-milik-keluarga-fangiono-di-tanah-papua/).

28 Agustus

Investasi sawit di Tanah Papua ternyata lebih banyak memberikan kerugian dibandingkan manfaatnya. Hal ini disampaikan oleh peneliti Wiko Saputra dalam diskusi publik bertajuk "Investasi Bodong: Mengungkap Beban dan Manfaat dari Investasi Sawit di Tanah Papua" yang ditayangkan langsung di YouTube Bentala Pusaka pada Selasa (27/08). Dalam diskusi tersebut, Wiko memaparkan hasil kajian timnya yang menunjukkan bahwa investasi sawit di Papua, yang melibatkan 58 perusahaan dengan izin usaha perkebunan seluas 1.571.696 hektare, hanya memanfaatkan sekitar 15 persen dari total lahan yang diizinkan. *"Izin sudah diterbitkan untuk area yang luas, tetapi hanya 169.162 hektare yang benar-benar ditanami sawit,"* ungkap Wiko. Ia menambahkan bahwa perusahaan lebih banyak memanfaatkan lahan sebagai "landbank" yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bukan untuk pengembangan perkebunan sawit. Kajian Wiko dan timnya menggunakan metode cost-benefit analysis (CBA) untuk menghitung untung-rugi investasi sawit di Papua. Hasilnya, kerugian lingkungan akibat perkebunan sawit mencapai Rp96,6 triliun, sementara manfaat ekonomi dan penerimaan pajaknya hanya Rp17,6 triliun. Dengan cost-benefit ratio (CBR) sebesar 5,48 persen, Wiko menyimpulkan bahwa investasi sawit ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan (https://jubi.id/mamta/2024/investasi-sawit-di-papua-terbukti-lebih-banyak-rugi-daripada-untung/).

02 September

Ketua Pokja Adat MRP, Raymond May mengatakan bahwa kerusakan hutan Indonesia, terutama Papua adalah hal yang nyata. Dirinya bisa

mengukur itu dari pengaduan masyarakat adat yang masuk ke lembaga MRP. *"Pengaduan yang banyak itu mengenai tanah dan hutan, akibat pihak yang berkepentingan,"* kata Raymond kepada Cenderawasih Pos, Jumat (30/08). Raymond mengatakan bahwa saat ini masyarakat Papua di delapan kabupaten dan satu kota terancam dengan hutan adatnya. Hal itu disebabkan oleh masuknya para investor untuk menginvestasi di Papua. Ketua Pokja Adat MRP itu mengatakan bahwa pihaknya telah memprogramkan untuk pemetaan komunal terhadap hutan adat yang ada di provinsi Papua. Tujuan dientuknya pemetaan itu adalah agar masyarakat yang mempunyai hutan harus mendapatkan asas manfaat. Karena ada masyarakat yang keberlangsungan hidupnya dari hutan itú sendir (Cenderawasih Pos).

Program Strategis Nasional di Tanah Papua

23 Mei

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri perkebunan tebu jutaan hektar di Merauke, Papua Selatan. Proyek ini digadang-gadang untuk mendukung swasembada gula nasional dan bioetanol. Berbagai kalangan khawatir rencana ini berisiko menyengsarakan Masyarakat Adat Papua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membuat Satgas mempercepat proyek ini 19 April 2024. Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jadi ketua satgas. Proyek pangan dan energi seluas 2 jutaan hektar ini masuk dalam

Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai lanjutan dari proyek pengembangan pangan skala besar (food estate). Nilai investasi proyek ini mencapai US$8 miliar, setara Rp130 triliun (asumsi kurs Rp16.252). Proyek ini terbagi dalam empat klaster, dan bakal ada lima konsorsium dalam negeri yang akan terlibat. PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co dan Wilmar Group bakal bergabung ke dalam konsorsium ini. Proyek ini bakal dikelola swasta dan BUMN. Konsorsium itu akan membangun lima pabrik gula, lahan pabrik gula, sekaligus produksi bioetanol, kebun, dan pembangkit listrik dengan kapasitas 120 megawatt (120 MW). Akses jalan, pelabuhan, hingga bendungan

akan ikut dibangun sebagai infrastruktur pendukung proyek ini. Saat ini, proyek sudah mulai berjalan dan dalam tahap pembibitan awal seluas 120 hektar, dikembangkan PT Global Papua Abadi (GPA) dan PT Murni Nusantara Mandiri (MNM). Bibit tebu impor dari Australia, dan diperkirakan proses pembibitan perlu 11 bulan. *"Proyek ini berisiko mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan menggerus ruang hidup mereka,"* kata Franky Samperante, Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, kepada Mongabay (https://www.mongabay.co.id/2024/05/23/jutaan-hektar-jadi-kebun-tebu-was-was-nasib-orang-papua/).

14 Juni

- Ratusan masyarakat Suku Kimahima dan Maklew dari Pulau Terapung, Kimaam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan menggelar aksi demo damai ke Kantor DPR Kabupaten Merauke, Kamis (13/06). Aksi demo damai yang dilakukan tersebut berupa penolakan investasi masuk ke wilayah mereka. Apalagi, saat ini terkonfirmasi akan adanya investasi perkebunan tebu yang dibuka di wilayah tersebut. Kedatangan masyarakat tersebut diterima Wakil Ketua II DPR Merauke Dominikus Ulukyanan dan anggota DPR Merauke asal Dapil Kimaam Moses Kaibu serta anggota DPR Merauke lainnya Dormasan Pasaribu. Wakil Ketua II DPR Dominikus Ulukyanan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat tersebut karena datang ke Dewan sebagai tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut. Hanya saja, bahwa aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan ini belum seluruhnya bisa dijawab (Cenderawasih Pos).
- Masyarakat Kimaima dan Maklew di Distrik Kimaam menggelar aksi demonstran di Kantor DPRD Merauke pada Kamis (13/06). Aksi demonstrasi itu mempertanyakan rencana pembukaan lahan perkebunan tebu di wilayah mereka. Idelfonsius Cambu, mengungkapkan kecurigaan mereka terhadap aktivitas pesawat dan kapal yang turut membawa mobil truk dan baju-baju bertuliskan Jhonlin Group. Mereka menolak keras kehadiran perusahaan yang diduga PT Global Papua Abadi dan perusahaan lainnya, serta mendesak

pemerintah menjelaskan terkait aktivitas itu. *"Kami curiga dan kami juga memastikan kalau aktivitas itu adalah aktivitas perusahaan yang ingin beroperasi di sana. Belakangan kami mendengar aktivitas pesawat dan kapal disana untuk melakukan survei pembukaan lahan perkebunan tebu di wilayah kami. Kami mau tegaskan kami menolak ini,"* ujar para demonstran (https://papuaselatanpos.com/2024/06/14/masyarakat-kimaima-dan-maklew-gelar-demo-tolak-pembukaan-lahan-tebu-di-distrik-kimaam/).

04 Juli

Rencana pemerintah mengembangkan industri gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mendapat respon berbagai kalangan. Mereka khawatir, perkebunan tebu dan industrinya yang ditetapkan sebagai PSN ini hanya akan menguntungkan investor, sedang masyarakat alami kesusahan, bahkan kemiskinan. Dian Patria, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, masih banyak masalah sosial dan birokrasi yang seharusnya dibenahi pemerintah di Papua, seperti persoalan isu strategis daerah otonomi khusus atau pemekaran Papua yang hingga kini belum rampung. "*Ini (isu strategis daerah otonomi) saja masih banyak yang belum selesai. Pemerintah sudah mau bikin proyek macam-macam [industri tebu]. Kalau saya hitung [daerah otonomi] mungkin progresnya baru 20%,"* katanya dalam diskusi bertema siapa diuntungkan di proyek raksasa, PSN perkebunan tebu dan bioetanol di Merauke, di Kantor YLBHI, akhir Juni lalu. Pemerintah berencana kembangkan industri gula dan bioetanol seluas 2 juta hektar. Proyek itu, katanya, tak lantas mensejahterakan masyarakat Papua (https://www.mongabay.co.id/2024/07/04/menyoal-proyek-perkebunan-tebu-dan-bioetanol-di-merauke/).

02 Agustus

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di lokasi perusahaan perkebunan tebu PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 23 Juli 2024. Presiden Jokowi mengatakan bahwa kegiatan

ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim yang ekstrim. Sebelumnya pada November 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menambahkan daftar PSN di Papua yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024 tentang Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dimana Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgasnya. Kebijakan dan dukungan negara atas PSN Pengembangan Pangan dan Energi ini dibingkai sebagai solusi di tengah krisis. Diskursus, solusi dan kebijakan negara ini bukan pertama kali di Papua, sebelumnya ada Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPPP), Food Estate Papua, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Merauke. Namun, bukan kemakmuran bersama yang dirasakan, tetapi segudang persoalan baru yang bermunculan. Mulai dari pengalihan penguasaan tanah skala luas yang mencapai jutaan hektar melalui praktik tipu muslihat. Sebagai akibatnya, masyarakat adat tereksklusi dan kehilangan kontrol atas tanah dan hutan yang menjadi sumber kehidupan, sulitnya akses atas sumber pangan dan sumber mata pencaharian, penghancuran sistem sosial dan budaya, eksploitasi buruh dan pemberian upah tidak layak, kekerasan, ketidakpatuhan negara dan korporasi dalam pemenuhan janji kesejahteraan dan bagi hasil yang layak, terjadi deforestasi, malnutrisi, pengrusakan ekosistem yang merupakan tempat hidup flora dan fauna, hingga pencemaran air (https://pusaka.or.id/proyek-strategis-nasional-pengembangan-pangan-dan-energi-merauke-berpotensi-melanggar-hak-asasi-manusia-dan-memperparah-krisis-ekologi/).

07 Agustus

"Dunia sekarang krisis pangan karena perubahan iklim. Karena panas yang panjang, terik yang panjang…kemandirian pangan, ketahanan pangan,

kedaulatan pangan harus jadi konsentrasi," kata Presiden Joko Widodo, saat penanaman tebu perdana di perusahaan perkebunan tebu, PT Global Papua Abadi (GPA) di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan, 23 Juli. Menurut presiden, proyek ini langkah strategis menjawab krisis pangan global yang dipicu perubahan iklim ekstrem. Ucapan senada juga ketika Jokowi mulai canangkan pengembangan pangan skala besar (food estate) beberapa tahun lalu yang mulai di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Proyek baru lewat ekspansi perkebunan tebu dan bioetanol di Merauke, Papua, mulai berjalan. Izin skala luas mulai terbit. Pada 2023 dan 2024, pemerintah mengeluarkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan surat rekomendasi kepada sembilan perusahaan perkebunan seluas 469.147 hektar tersebar di Distrik Tanah Miring, Eligobel, Sota, Ululin, Animha, Mutting, dan Jagebob di Merauke. Franky Samperante, Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat mengatakan, kebijakan dan dukungan negara untuk pengembangan pangan dan energi yang masuk proyek strategis nasional ini terbingkai jadi solusi di tengah krisis. Padahal, dari proyek-proyek sebelumnya, malah muncul berbagai masalah. Yayasan Pusaka, katanya, mengkaji cepat aspek penggunaan kawasan hutan dan lingkungan hidup dari perizinan dan pengembangan industri perkebunan tebu, pabrik gula dan bioethanol di Merauke ini. Temuan Pusaka, sebagian besar izin berada pada kawasan hutan produksi dikonversi 45%, hutan produksi terbatas 30%, sisanya, areal penggunaan lain 25%. Izin perkebunan tebu GPA Group, katanya, pada kawasan hutan dan daerah moratorium izin atau peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) lebih dari 30% atau sekitar 145.644 hektar. "Proyek ini berisiko lingkungan hidup, terutama meningkatkan emisi gas rumah kaca, yang secara kumulatif meningkatkan krisis ekologi," kata Angky, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dan LBH Papua Pos Merauke kepada media (https://www.mongabay.co.id/2024/08/07/proyek-tebu-merauke-ingatkan-risiko-lingkungan-dan-pelanggaran-ham/).

10 Agustus

Memperingati hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh pada 07 Agustus, Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan (AMPERA PS), melakukan aksi penolakan terkait pemberian izin-izin investasi berskala Makro oleh pemerintah Indonesia di wilayah masyarakat adat Suku Malind yang ada di Merauke. Aksi penolakan dilakukan di Mangga 2 Kimaam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada Jumat 9 Agustus 2024 WP. Aksi tersebut melibatkan anak-anak, pemuda, remaja dan perempuan serta masyarakat. Dalam aksi singkat tersebut massa aksi memegang poster-poster yang berisi pesan-pesan tegas menyatakan penolakan atas segala bentuk investasi di seluruh tanah adat yang ada di Papua Selatan. Investasi perkebunan berskala makro di Papua Selatan dianggap telah merampas ruang hidup masyarakat Adat Malind.Ketua AMPERA, Ambrosius Nit menyoroti berbagai persoalan Masyarakat Adat Papua Selatan yang kini terancam kehilangan tanah-tanah adat khususnya Kimahima dan Maklew karena hadirnya PSN seperti gula dan bioetanol yang membutuhkan jutaan hektare lahan di Merauke, Provinsi Papua Selatan, dan menurut dugaan AMPERA akan menyasar tanah-tanah masyarakat Adat. *"Kami di Papua Selatan tidak butuh proyek strategis nasional seperti perkebunan gula, perkebunan sawit dan hutan tanaman industri serta Investasi Makro lainnya, karena semua itu tidak menjamin kehidupan masyarakat adat mengingat fakta hari ini masyarakat adat yang telah menyerahkan tanah-tanah adat mereka ke perusahaan menghadapi berbagai masalah seperti minimnya fasilitas pendidikan, angka putus sekolah yang sangat tinggi, keterbelakangan ekonomi dan terjadi malnutrisi pada anak-anak,"* katanya (https://jubi.id/rilis-pers/2024/ampera-ps-investasi-berskala-makro-berpotensi-melanggar-ham-masyarakat-adat-papua/).

23 Agustus

- Masyarakat adat dari Makleuw kembali menggelar aksi demo menolak masuknya investasi masuk ke wilayah Merauke, Kamis (22/08). Investasi ini berkaitan dengan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dimana Merauke dipilih sebagai lokasi yang akan "digarap". Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya meng-

gelar aksi demo ke Kantor DPR Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu. Dalam aksi demo damai itu, mereka membawa 4 spanduk besar. Salah satu diantaranya bertuliskan selamatkan tanah dan manusia Papua (Cenderawasih Pos).

- Pada 10 November 2023, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, yang merevisi dan menambahkan daftar PSN di Papua yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan. Permenko 8/2023 ini sekaligus menjustifikasi minat pemerintah menetapkan proyek lumbung pangan terintegrasi (food estate) berlokasi di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pemerintah nasional dan daerah berencana menjadikan Merauke sebagai KEK. KEK Merauke ini difokuskan pada produksi padi dan tebu dengan luas lahan mencapai 2 (dua) juta hektar. Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada Juni 2023 sebagai karpet merah bagi industri gula dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati di Tanah Papua seluas 700.000 hektar. PSN Merauke mendalilkan proyek tersebut untuk mewujudkan dan menjamin ketahanan pangan nasional, ketahanan energi dan pelaksanaan energi bersih. Presiden Joko Widodo menyampaikan "menjadikan Indonesia lumbung pangannya di Merauke" (https://pusaka.or.id/melawan-proyek-brutal-psn-merauke/).

25 Agustus

Pada 10 November 2023, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN, yang merevisi dan menambahkan daftar PSN di Papua yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan. Permenko

8/2023 ini sekaligus menjustifikasi minat pemerintah menetapkan proyek lumbung pangan terintegrasi (food estate) berlokasi di Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pemerintah nasional dan daerah berencana menjadikan Merauke sebagai KEK. KEK Merauke ini difokuskan pada produksi padi dan tebu dengan luas lahan mencapai 2 (dua) juta hektar. Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) pada Juni 2023 sebagai karpet merah bagi industri gula dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati di Tanah Papua seluas 700.000 hektar (https://pusaka.or.id/melawan-proyek-brutal-psn-merauke/).

13 September

Pada Jumat, 13 September 2024, perwakilan masyarakat adat dari Marga Moiwend dan Gebze menyampaikan permintaan dukungan dari Uskup Agung Merauke Mgr. Canisius Mandagi terkait perampasan hutan adat di Distrik Ilawayab, Merauke, Papua Selatan, untuk proyek strategis nasional. Kedua marga ini secara terang-terangan menolak PSN di tanah ulayatnya. Permintaan kedua marga ini disampaikan dalam bentuk surat kepada Uskup Agung Merauke (https://jubi.id/rilis-pers/2024/uskup-merauke-diminta-suarakan-penderitaan-marga-moiwend-dan-gebze/).

14 September

Pada 12 Juli 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dalam Rangka Pertahanan dan Keamanan Atas Nama Kementerian Pertahanan RI seluas 13.540 hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut SK KLHK 835. Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan ini merupakan bagian dari PSN yakni Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi

Merauke untuk membuat cetak sawah 1 (satu) juta hektar. Dalam proses pembangunan satu juta hektar lahan, diawali dengan pembangunan dermaga dan jalan usaha tani untuk memasukkan dan mendistribusikan alat pertanian maupun logistic pertanian. Hal ini disampaikan Komandan Satgas Ketahanan Pangan Mabes TNI, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam Program Podcast RRI Merauke Edisi ke 9, pada 26 Agustus 2024.

"Kiri dan kanan jalan ada parit besar yaitu parit primer untuk mendorong mengairi sawah yang ada di kiri kanan jalan", ungkap Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) telah melakukan analisis tumpang susun peta lampiran SK KLHK 835, peta kawasan hutan, peta administrasi dan peta tempat penting masyarakat adat di Merauke (WWF, 2006), serta laporan warga, hasilnya bahwa keberadaan lokasi pembangunan dimaksud berada pada kawasan hutan adat dan terdapat tempat-tempat penting yang bernilai konservasi tinggi, seperti tempat keramat dan jalur leluhur, dusun pangan, tempat berburu dan areal konservasi tradisional, yang berada di Distrik Ilwayab, Ngguti, Kaptel dan Muting, Kabupaten Merauke. Perwakilan marga pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend dan Gebze Dinaulik, menginformasikan bahwa tanah, dusun dan hutan adat, sumber kehidupan mereka telah digusur oleh perusahaan dan dikawal anggota TNI bersenjata, yang dilakukan tanpa ada musyawarah dan mufakat dengan masyarakat adat setempat. *"Proyek ini melanggar hak hidup, hak masyarakat adat dan merusak lingkungan hidup sebagaimana terkandung dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent). Bahwa sebelum proyek dimulai maka terlebih dahulu masyarakat diberikan dan mendapat informasi proyek pembangunan yang akan berlangsung di wilayah adat mereka, serta diberikan kebebasan berunding membuat keputusan apakah menerima atau justeru menolak proyek. Hal ini tidak dilakukan pemerintah pengembang proyek dan perusahaan",* kata Franky Samperante, Direktur PUSAKA (https://pusaka.or.id/mendesak-presiden-dan-kementerian-terkait-proyek-psn-merauke-segera-mengevaluasi-dan-menghentikan-proyek-cetak-sawah-baru-satu-juta-hektar-merauke/).

17 September

Dua marga di Merauke, Papua Selatan yakni marga Molwend dan Gebze meminta Keusukupan Agung Merauke ikut bersuara menghentikan penyerobotan dan penggusuran paksa tanah adat atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka meminta keuskupan bersurat ke presiden meminta mengkaji kembali bukaan lahan yang sedang terjadi. Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum, Jumat (13/09), Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung Merauke ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN. Marga Moiwend dan Gebze pemilik tanah adat secara terbuka menyatakan penolakan dan tidak menerima aktivitas investasi berskala makro dan menengah di atas tanah adat mereka (Cenderawasih Pos).

19 September

Komnas HAM RI mengapresiasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *"Komnas HAM mengapresiasi adanya peraturan menteri tersebut dan berharap ini dapat dijadikan dasar hukum, bagi upaya-upaya untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sebagai bagian dari HAM,"* kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat konferensi pers di kantornya, Jakarta. Atnike mengatakan, Peraturan Menteri LHK itu sekaligus melengkapi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia menilai, pengakuan terhadap aktivis lingkungan di Indonesia sudah semakin maju (Cenderawasih Pos).

09 Oktober

Pelaksanaan PSN yang berkaitan dengan ketahanan pangan mendapat penolakan. Masyarakat suku Malind, Maklew, Mayo Bodol, Kimahima dan Yei di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, terus menyuarakan perampasan tanah untuk PSN dalam bentuk cetak sawah dan swasembada gula dan bioetanol di wilayah tersebut. Penolakan tersebut disampaikan pada Minggu (06/10) dimana masyarakat dari beberapa suku sebagai pemilik hak ulayat melangsungkan pertemuan adat yang dinamakan "Munggui Makan Malind Sasi Mayan" di Dusun Payum Merauke. Pertemuan itu untuk memperjelas sikap mereka sebagai pemilik hak ulayat kepada pemerintah (Cenderawasih Pos).

16 Oktober

- Masyarakat mengaku trauma dan takut dengan kehadiran tentara yang menjaga lokasi PSN sawah 1 juta hektar di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke Pater Pius Cornelis Manu Pr. Menurut Pater Pius, kehadiran tentara itu tidak membawa efek positif, malah membawa bencana dan membuat masyarakat semakin trauma. Hal ini disampaikan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Merauke (https://jubi.id/polhukam/2024/warga-takut-dengan-kehadiran-tentara-di-lokasi-psn-sawah-1-juta-hektare-merauke/).
- Masyarakat adat dari Kampung Wanam, Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke melakukan aksi demo di tugu lingkaran Brawijaya Merauke, Selasa (15/10). Aksi demo damai yang dilakukan itu terkait dengan pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat ekscavator. Namun sebelum di Libra, masyarakat adat tersebut terlebih dahulu ke Keuskupan Agung Merauke untuk menemui Uskup Mandagi. Hanya saja, masyarakat adat tersebut tidak bisa sampai ke rumah Uskup karena polisi telah memblokade jalan terlebih dahulu. Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Merauke Pastor Henderikus MSC menemui menerima aspirasi masyarakat adat (Cenderawasih Pos).

Kelompok masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan, menyuarakan penolakannya terhadap PSN food estate di daerah mereka. Mereka berunjuk rasa mendatangi Kantor Kementerian Pertahanan pada Rabu, 16 Oktober 2024, menuntut proyek dihentikan. *"Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,"* kata Pastor Pius Manu, tokoh agama dan pemilik tanah adat dalam konferensi pers usai unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024. Seperti diketahui, food estate Merauke masuk daftar PSN per November 2023. PSN tepatnya bernama 'Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan', yang dipromosikan dan dicanangkan seluas lebih dari 2 juta hektare pada Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) (https://www.tempo.co/lingkungan/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal-405399).

26 Oktober

Mega PSN food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan 'Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan'. Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke. *"Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,"* kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024 (https://www.democrazy.id/2024/10/masyarakat-adat-tuntut-setop-proyek-psn.html#google_vignette).

02 November

Masyarakat adat yang melakukan penolakan PSN 2 juta hektar di Merauke, Papua Selatan mengalami teror psikologi serta intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan, orang-orang yang diduga dari pihak intelijen dan pemerintah yang mengawal proses pembabatan hutan di Kampung Wanam dan Wogikel, Distrik Ilwayab, Merauke, Papua Selatan. Menurut Ketua Forum Masyarakat Adat Malind dan Kondodigun, Simon Petrus Balagaize, suasan teror dan intimidasi mulai dirasakan pasca 27

Agustus 2024 (https://jubi.id/polhukam/2024/marak-protes-terhadap-psn-food-estate-di-merauke-masyarakat-adat-mendapat-teror-dan-ancaman/).

07 November

Tiga Batalyon teritorial yang ditugaskan secara khusus untuk mensukseskan Program Strategis Nasional melalui pembukaan lahan 1 juta hektar untuk cetak sawah di Distrik Ilwayab, tiba di Pelabuhan Merauke, Minggu (10/11). Ketiga Batalyon yang tiba di Merauke tersebut adalah Yonif 801/Nduka Adyatama Yuddha, Yonif 802/Wimani Mambe Jaya, dan Yonif 803/Ksatria Yuddha Kentsuwri. Pejabat Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi didampingi Pejabat Sekda Madda Remmeng turut hadir pada upacara penerimaan ketiga Batalyon Teritorial Pembangunan tersebut. Upacara penerimaan dipimpin Danrem 174/ ATW, Brigjen TNI Andy Setyawan di Pelabuhan Yos Sudarso, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ketiga Batalyon ini akan ditempatkan di Wanam, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel. *"Semoga kedatangan kalian membawa keberkahan dan kedamaian bagi masya rakat serta semakin mendorong kemajuan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di wilayah Papua Selatan,"* kata Danrem 174/ ATW Brigjen TNI Andy Setyawan (Cenderawasih Pos).

02 Desember

Puluhan perwakilan masyarakat adat suku Malind, Maklew, Khimaima dan Yei dari Distrik Ilwayab, Ngguti, Tubang, Malind, Eligobel, Kimaam, Okaba, Kabupaten Merauke, bertemu dan berdialog dengan Ketua Komite II DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI Badikenita Sitepu dan anggota DPD asal daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan, serta perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sekda Provinsi Papua Selatan. Pertemuan dan Kunjungan Kerja DPD RI berlangsung di Kantor Bupati Merauke pada Senin, 02 November 2024. Komite II DPD RI yang membidangi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, sebelumnya telah menerima aspirasi masyarakat adat terkait permasalahan dan penolakan PSN Merauke tentang pengembangan kawasan pangan dan energi untuk cetak

sawah baru dan tanaman lainnya, termasuk perkebunan tebu dan pabrik bioethanol seluas lebih dari 2 juta hektar. Pemimpin masyarakat adat, Forum Masyarakat Adat Malind Kondo Digoel dan Solidaritas Merauke menyampaikan sikap penolakan terhadap proyek strategis nasional dan investasi perkebunan yang beroperasi di wilayah adat, karena melanggar dan merampas hak-hak masyarakat adat. Selain itu perwakilan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil dan pemuda mahasiswa juga menyampaikan dan meminta kepada pemerintah untuk menarik keberadaan dan aktivitas aparat militer TNI di Distrik Ilwayab (https://pusaka.or.id/kunjungan-kerja-komite-ii-dpd-ri-masyarakat-adat-malind-menyatakan-menolak-psn-merauke/).

04 Desember

Masyarakat Adat Malind yang menjadi korban pengusuran dan penyerobotan tanah adat serta serta masyarakat lokal di sekitar PSN Ketahanan Pangan dan Energy food estate, melangsungkan Audiensi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Merauke pada Senin, 02 Desember 2024. Anggota DPD yang hadir adalah Ketua Komite II Badikenita Sitepu, Wakil Ketua III Komite II DPD RI A. Abd. Waris Halid serta 2 perwakilan DPD RI asal Papua Selatan. Audiensi tersebut dilangsungkan di auditorium Kantor Bupati Merauke. Masyarakat Adat yang hadir sebagai perwakilan dan menyampaikan sikap penolakan terhadap PSN food estate tersebut antara lain dari Distrik Ilwayab, Distrik Tubang, Distrik Okaba, Distrik Eligobel, Distrik Sota, Distrik Nguti, dan Distrik Kimaam. Dari Distrik Ilwayab terdiri dari Kampung Wogikel, Kampung Yulili, Kampung Bibikem, dan Kampung Wanam. Di Distrik ilwayap juga ada 4 marga yang menolak PSN food estate yaitu Marga Moiwend, Gebze, Balagaize, dan Basik-basik yang merupakan korban langsung penyerobotan dan penggusuran paksa. Sedangkan dari Distrik Tubang terdiri dari Kampung Wamal, Kampung Dokip, Kampung, Kampung Dudalim, Kampung Yowid, Kampung Woboyu dan Kampung Welbuti. Kemudian Distrik Okaba terdiri dari warga Kampung Magai Wambi, Kampung S Wambi, kampung Du Miraf, Kampung Iwol,

Kampung Makalin, Kampung OKaba, Kampung Alaku, Kampung Alatep, dan Kampung Sangase.

Kemudian di Distrik Eligobel terdiri dari warga Kampung Tanas, Kampung Kweeel, Kampung Bupul dan Kampung Torai. Distrik Sota terdiri dari Kampung Erambu dan Kampung Tanas. Distrik Nguti terdiri dari Kampung Salamepe, Kampung Nakias, Kampung Tagaepe, Kampung Puepe, Kampung Yomob, Kampung Yawimo, dan Kampung Kwemsik. Distrik Kimaam terdiri dari Kampung Tururam, dan kampung Webu. Distrik Padua terdiri dari Kampung Bamol, Sigat, dan Kalwa. Dalam Audiensi tersebut perwakilan masing-masing kampung dan pemilik hak ulayat menyampaikan pernyataan sikap penolakan terhadap PSN food estate di Merauke. Menurut mereka, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent), yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan (https://witness.tempo.co/article/detail/9778/masyarakat-adat-di-merauke-menolak-psn-food-estate.html).

09 Desember

Food estate telah ditetapkan sebagai salah satu PSN dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang ditetapkan dalam dalam PP nomor 109/2020 dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pangan secara terintegrasi. Program ini akan dilaksanakan diberbagai daerah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Untuk menjalankan program food estate tersebut, banyak hutan yang ada di kabupaten Merauke tersebut dialihfungsikan mejadi lahan pertanian. Sekitar satu juta hektare hutan di Kabupaten Merauke yang dialihfungsikan menjadi lahan cetak sawah guna mendukung program nasional serta dua juta hektare lahan yang dialihfungsikan sebagai proyek pengembangan tebu dan bioetanol. Mirisnya, lahan tersebut mengalihfungsikan hutan yang masih digunakan oleh Masyarakat adat yaitu masyarakat adat suku Malind, Mayo Bodol, Kimahima, dan Yei. Bagi masyarakat adat suku Malind, hutan bukan sekadar wilayah yang

dipenuhi pepohonan, tetapi merupakan jantung kehidupan mereka. Wilayah yang begitu luas ini memiliki peran krusial bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat, mencakup lebih dari 200.000 hektare yang menjadi sumber daya vital sekaligus habitat utama bagi komunitas tersebut. Namun kini, tampaknya Pemerintah sedang merampas kehidupan mereka. Hal itu karena Pemerintah menjadikan hutan tersebut dialihfungsikan menjadi tempat PSN yaitu food estate tanpa adanya sosialiasi dan mempertimbangkan nasib masyarakat adat. Penggunaaan tanah menjadi food estate ini sama sekali tidak ada persetujuan dari pemilik ulayat. Akibatnya, muncul berbagai konflik terkait hak kepemilikan dan pengelolaan tanah yang telah menjadi bagian penting dari identitas dan kehidupan masyarakat adat tersebut (https://kumparan.com/queen-aisyah-nabila/dari-tanah-ke-pangan-dampak-psn-terhadap-hak-masyarakat-adat-di-merauke-244T9gYjYD2/1).

10 Desember

Pada 10 Desember 2024, di Lapangan Bola Kaki Zakheus, Kota Jayapura, Perwakilan Masyarakat Adat Awyu, Papua Selatan lainnya, Dewan Gereja Papua dan Solidaritas untuk Masyarakat Adat di Selatan Papua melaksanakan Ibadah Jalan Salib. Di dalam Ibadah Jalan Salib ini, peserta yang terlibat dalam doa tersebut mendoakan masyarakat adat Papua yang terdampak proyek investasi, Menurut Frengki Woro, Salib ini sebagai sasi (tanda larangan) yang kami tancap di wilayah adat kami di Awyu. Berbagai cara sudah mereka lakukan untuk menjaga hutan, lahan adat dari perampasan. Mereka menyerahkan usaha tersebut kepada Tuhan dan leluhur kami. Lanjut Frengki, siapa yang datang merusak atau merampas lahan atua hutannya akan berhadapan dengan Tuhan dan leluhurnya (https://fransiskanpapua.org/2024/12/11/jalan-salib-merah-perayaan-hari-ham-10-desember-2024/).



Baliho Ucapan selamat datang kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo di Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan, dalam rangka penanaman tebu perdana di Lokasi PT Global Papua Abadi.
(Dok. Yayasan Pusaka)

BAB II

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PAPUA: REFLEKSI DAN TANTANGAN DI TAHUN 2024

Oleh Yuliana Langowuyo

Pengantar

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu paling krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Laporan-laporan tahunan dari berbagai sumber, termasuk Komnas HAM, memberikan gambaran tentang kondisi HAM yang memprihatinkan dan berbagai kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Tulisan ini akan membahas situasi HAM di Indonesia dengan fokus pada Tanah Papua, serta upaya dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Raport Merah Penegakan HAM di Papua

Membaca kronologi sepanjang tahun 2024 terkait proses mencari keadilan kasus pelanggaran HAM dalam mekanisme hukum di negara ini, Indonesia mestinya mendapatkan rapor merah untuk penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia dan secara khusus di Tanah Papua.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk penanganan pelanggaran HAM, baik melalui mekanisme peradilan umum

maupun pengadilan HAM.[1] Namun, berdasarkan kronik tahun 2024, penerapan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, khususnya yang terkait dengan konflik bersenjata dan pelanggaran HAM berat, masih jauh dari harapan. Meski terdapat rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, upaya konkret dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, baik secara yudisial maupun non-yudisial, masih sangat terbatas.

Kondisi HAM di Papua tahun 2024

Situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah seharusnya menjadi pokok bahasan yang serius dan tidak boleh hilang dari perhatian publik Indonesia. Laporan tahunan dari Komnas HAM menyebutkan bahwa situasi HAM di Tanah Papua jauh lebih buruk dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun telah menyebabkan lonjakan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan penyiksaan oleh aparat keamanan, terutama di dataran tinggi. Selama periode Januari hingga Desember 2024, tercatat 113 peristiwa pelanggaran HAM. Dari jumlah tersebut, 85 kasus berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Beberapa jenis insiden yang ditemukan meliputi kontak tembak (24 peristiwa) dan penyerangan terhadap warga sipil (34 peristiwa).[2]

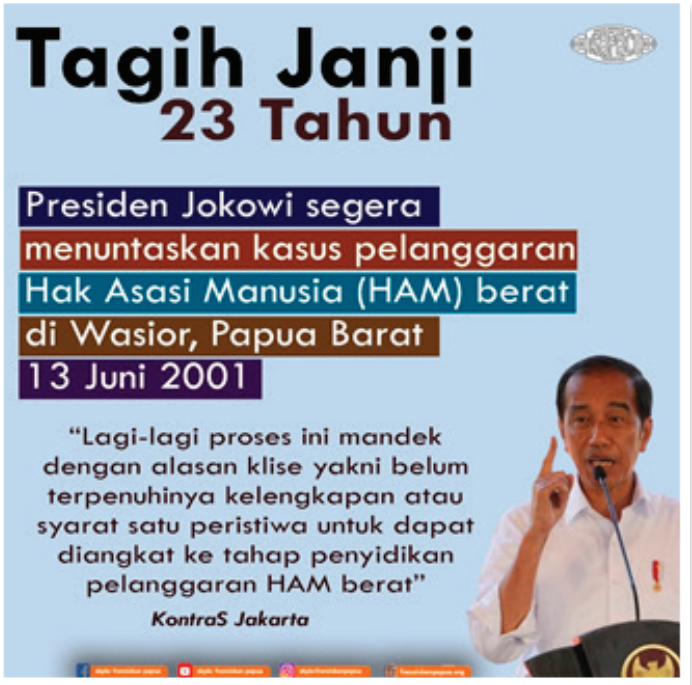
Dalam data KOMNAS HAM RI, jumlah kasus yang ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ada 17 kasus dan dari 17 kasus tersebut, 4 kasus terjadi di Tanah Papua, yaitu Wasior 2001-2002, Abepura 2000, Wamena 2003, dan Paniai 2014. Kasus Abepura 2000 sudah disidangkan di Pengadilan HAM Ad Hoc di Makassar tahun 2004 yang berakhir dengan putusan membebaskan kedua terdakwa Brigjen Polisi Johny Wainal Usman dan Kombespol Drs. Daud Sihombing. Majelis hakim menyatakan bahwa keduanya tidak terbukti secara sah melakukan pelanggaran HAM.

---

[1] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[2] https://www.ntvnews.id/news/0128031/komnas-ham-soal-situasi-papua-2024-konflik-bersenjata-dan-kekerasan-dominasi-kasus

Kasus penembakan di Lapangan Karel Gobay, Paniai, pada 8 Desember 2014, yang menewaskan lima warga sipil, menjadi salah satu contoh paling tragis dari pelanggaran HAM di Papua. Proses hukum yang panjang dan berbelit-belit, yang berakhir dengan putusan bebas bagi Mayor Inf. Isak Sattu dalam persidangan di Makassar, telah menguatkan dugaan adanya impunitas dalam penanganan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kejadian ini, bersama dengan kasus-kasus serupa seperti Wasior dan Abepura, menunjukkan bahwa korban pelanggaran HAM di Papua seringkali tidak mendapatkan keadilan yang mereka layak terima.[3] Hal ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menghambat upaya pembangunan di Papua.



Kampanye Penyelesaian Kasus HAM Wasior Papua. (Dok. JPIC OFM Papua)

Lingkaran Kekerasan di Papua

Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua telah menciptakan lingkaran kekerasan yang berdampak buruk pada situasi HAM. Kekerasan yang meluas, pengungsian massal, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya menjadi bukti nyata kegagalan negara dalam melindungi warga sipil. Kebijakan keamanan yang represif justru memperparah situasi dan memicu siklus kekerasan yang sulit diputus. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak efektif dalam menyelesaikan konflik di Papua dan diperlukan solusi yang lebih

[3] Human Rights Watch. (2021). Indonesia: No Justice for Papua Abuse Victims. Lih. https://www.hrw.org/news/2021/12/08/indonesia-no-justice-papua-abuse-victims

komprehensif yang melibatkan dialog, pembangunan, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Akar Permasalahan dan Kesenjangan Hukum

Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, praktik di lapangan, khususnya di Papua, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan.[4] Pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap warga sipil, penangkapan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan berekspresi masih terus terjadi. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, seperti di Wasior, Abepura, dan Paniai, menjadi bukti bahwa mekanisme peradilan yang ada belum mampu memberikan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran HAM di Papua bukan hanya masalah pelanggaran hukum semata, tetapi juga terkait dengan akar permasalahan sejarah, politik, dan sosial yang kompleks.

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Korban pelanggaran HAM di Papua selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakpastian dan trauma. Mereka tidak hanya kehilangan nyawa orang yang mereka cintai, tetapi juga hak-hak dasar mereka untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran. Keinginan untuk mengetahui siapa pelaku dan mengapa peristiwa tragis itu terjadi merupakan hak mendasar setiap korban. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diharapkan dapat memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran, mendapatkan keadilan restoratif, dan memulihkan martabat mereka. Melalui KKR, diharapkan dapat terungkap sejarah yang sebenar-

[4] Bdk. Bagir Manan. (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Alumni, Bandung.

nya, pelaku dapat mengakui kesalahan, dan masyarakat dapat memulai proses penyembuhan dan rekonsiliasi.[5]

Pemerintahan Baru dan Harapan HAM di Indonesia

Indonesia memasuki babak baru dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM) setelah pemilihan umum tahun 2024 yang memilih Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Bagaimana perkembangan upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM? Adakah ruang atau harapan bagi penyelesaian kasus-kasus ini di bawah pemerintahan Presiden Prabowo saat ini? Pertanyaan ini menjadi bahan perenungan tidak hanya bagi korban pelanggaran HAM dan para pembela HAM di Indonesia, tetapi juga bagi setiap warga negara. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat, dan publik yang lebih luas.

Pembentukan Kementerian HAM

Kabinet baru pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Langkah ini menimbulkan pertanyaan apakah kementerian tersebut dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan HAM sebagai prioritas utama.

Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti kontroversi dan pro-kontra terkait rekam jejak Presiden Prabowo dalam isu HAM di masa lalu.[6] Kasus-kasus lama belum terselesaikan, sementara kasus-kasus baru terus terjadi di Tanah Papua. Pendekatan keamanan dan kebijakan militeristik yang diterapkan di Papua semakin memperburuk situasi HAM di wilayah tersebut.[7]

---

[5] Koran JUBI, tanggal 27-28 Maret 2024.

[6] Jones, A. (2022). *Human Rights and Security Policies in Papua*. Journal of International Relations, 56(3), 123-145.

[7] Smith, B. (2023). *Controversies and Human Rights Record of President Prabowo*. Human Rights Review, 65(2),

Perlunya Dialog Damai

Selain itu, hilangnya agenda dialog damai dari perbincangan elit politik semakin meredupkan harapan masyarakat Papua untuk mencapai situasi yang adil dan damai. Dialog damai penting untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM serta menciptakan perdamaian di Tanah Papua.[8] Hak Asasi Manusia harus dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dihormati oleh negara agar tercipta keadaan yang lebih baik bagi semua warga negara.



Kampanye Pembunuhan di Luar Hukum Tobias Silak oleh aparat keamanan di Yahukimo, Papua. (Dok. JPIC OFM Papua)

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya di Tanah Papua, diperlukan penguatan kelembagaan yang terkait dengan HAM, seperti mendukung penuh Kementerian HAM yang baru dibentuk agar dapat berfungsi secara efektif. Selain itu, penting untuk mendorong kembali agenda dialog damai antara pemerintah dan masyarakat Papua, guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Transparansi dan akuntabilitas juga harus dijamin dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme hukum yang adil dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pendidikan HAM di kalangan masyarakat

78-91.

[8] Wilson, C. (2024). *Dialogue and Peacebuilding in Papua: Challenges and Opportunities.* Peace and Conflict Studies, 48(1), 32-54.

luas akan membantu membangun budaya penghormatan terhadap HAM. Terakhir, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, lembaga agama, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, sangat penting untuk mendukung upaya penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Penutup

Dari berbagai data yang telah disajikan, terlihat jelas bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, terutama di Tanah Papua. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama bertahun-tahun belum mendapatkan penyelesaian yang memadai, dan kondisi ini diperburuk oleh pendekatan keamanan dan kebijakan militeristik yang terus berlanjut. Hilangnya agenda dialog damai dari perbincangan elit politik semakin menambah kompleksitas masalah HAM di Papua. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menegakkan HAM dan memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua, mendapatkan perlindungan dan keadilan yang mereka layak terima.

Kronik Penyelesaian Kasus HAM

22-23 Januari

Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Latifah Anum Siregar mengatakan pihaknya mencatat telah terjadi 96 kasus kekerasan maupun konflik bersenjata di Tanah Papua pada periode Januari hingga Desember 2023. Hal itu disampaikan Anum dalam peluncuran laporan tahunan situasi HAM di Tanah Papua tahun 2023 yang digelar secara daring pada Jumat (19/01). Dia mengatakan data ALDP tersebut dihimpun dari berbagai sumber dan dari hasil monitoring dan advokasi bersama dengan NGO yang ada di Tanah Papua, nasional, maupun NGO internasional (Koran Jubi).

29-30 Januari

Sepanjang 2023, Komnas HAM menerima 2.753 aduan dugaan pelanggaran HAM. Hal itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing di Jakarta, pada Kamis (25/01). Jumlah pengaduan yang diterima Komnas HAM pada 2023 sebenarnya lebih banyak, mencapai 5.301 aduan. Sihombing mengatakan dari 2.753 kasus dugaan pelanggaran HAM itu, jenis dugaan pelanggaran HAM yang paling banyak diadukan adalah ketidakprofesional prosedur aparat penegak hukum (613 aduan), dugaan pelanggaran HAM dalam konflik agraria (582 aduan) (Koran Jubi).

27-28 Maret

Para pembela HAM di Tanah Papua sedang mengupayakan agar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Tanah Papua bisa terbentuk. Tujuannya bukan untuk menghilangkan proses keadilan lewat peradilan, namun sebagai upaya minimal merehabilitasi jiwa dan menjamin kehidupan korban dan keluarganya. Keluarga dan korban pelanggaran HAM di Tanah Papua senantiasa dibayang-bayangi oleh pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab atas kematian anggota keluarganya? Pertanyaan yang menyisakan teka teki sepanjang hidupnya, bahkan melampaui satu dan dua generasi keluarganya *"Ada keluarga korban dan anak-*

anaknya yang masih mendengarkan cerita bagaimana keluarganya dibunuh, ditembak, dihabisin, menjadi korban kekerasan. Ada trauma yang diturunkan, ada sakit hati, ada ketidakpercayaan, ketidakadilan negara, sehingga minimal harus ada pengungkapan kebenaran, atau pelakunya meminta maaf kepada keluarga korban, memberikan rehabilitasi fisik, jaminan kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai bentuk mempertanggungjawabkan tindakannya," demikian Latifah Alhamid menjelaskan dengan lugas (Koran Jubi).

14 April

Komnas HAM menyampaikan keprihatinan atas peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang terus terjadi di Tanah Papua. Hal itu disampaikan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta pada Minggu (14/04). *"Komnas HAM menyatakan keprihatinan dan memberikan atensi terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua,"* ujarnya. Atnike mengatakan Komnas HAM mencatat 12 peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua yang menyasar anggota TNI/Polisi maupun warga sipil sepanjang Maret hingga April 2024. Atnike mengatakan belasan peristiwa itu mengakibatkan 4 warga sipil dan 5 anggota TNI/Polisi luka-luka, 5 anggota TNI/Polisi dan 3 warga sipil meninggal dunia dan 2 perempuan mengalami Tindak Pidana Kekerasan Seksual (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-prihatin-atas-kekerasan-dan-konflik-bersenjata-di-tanah-papua/).

13 Juni

Aktivis HAM menilai pengajuan tambahan anggaran khusus oleh Kementerian Pertahanan akan memperparah konflik di Tanah Papua. Kementerian Pertahanan seharusnya mendorong penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan anggaran khusus yang diajukan Kementerian Pertahanan untuk penyelesaian konflik Papua tentu akan digunakan untuk memperkuat pendekatan militer atau keamanan dalam penyelesaian konflik Papua. Sementara menurut Imparsial, kata Ardi, pendekatan militer yang dilakukan pemerintah selama ini telah gagal membawa perdamaian di Papua. *"Justru yang terjadi peningkatan kontak*

senjata dan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil," kata Ardi kepada Jubi via WhatsApp, Jumat (10/05). Pada 8 Mei 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto pada acara Program Kegiatan Bersama di Gedung Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta mengatakan Kementerian Pertahanan mengajukan anggaran tambahan khusus menangani konflik di Papua. Anggaran itu untuk membeli perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan prajurit TNI/Polri seperti pesawat, helikopter, dan sensor pendeteksi. Menurut Ardi Kementerian Pertahanan seharusnya tidak membuat kebijakan yang dapat mengeskalasi kekerasan di Papua, seperti pengajuan anggaran khusus Papua di bawah Kementerian Pertahanan. Seharusnya Kementerian Pertahanan mendorong departemen lain, seperti pendidikan, sosial, dan kesehatan untuk berperan lebih di Papua (https://jubi.id/polhukam/2024/anggaran-khusus-kementerian-pertahanan-dinilai-akan-memperparah-konflik-papua/).

29 Agustus

Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyatakan kondisi HAM di Tanah Papua buruk. Pemerintah Indonesia diminta untuk serius menyelesaikan persoalan di Tanah Papua melalui dialog. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan kondisi HAM yang buruk disebabkan beberapa hal, di antaranya konflik bersenjata yang terus mengorbankan warga sipil di Papua. Ramandey mengatakan kasus pembunuhan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning, di Bandara Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 5 Agustus 2024 menunjukkan semakin buruknya kondisi HAM di Papua. *"Peristiwa [pembunuhan pilot itu] menunjukan kepada masyarakat internasional secara umum situasi HAM [di Papua] buruk,"* kata Ramandey.

Ramandey mengatakan belum ada penanganan secara serius terhadap pengungsi Nduga maupun pengungsi Maybrat. Laporan pemantauan Komnas HAM pada Juli 2023 mencatat sebanyak 3.387 warga sipil Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya masih berada di pengungsian sejak 2021 (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-papua-kondisi-ham-di-tanah-papua-buruk/).

09 September

Mahasiswa Papua dan sejumlah komunitas mengeluarkan pernyataan bersama, terkait situasi Hak Asasi Manusia atau HAM dan demokrasi di Tanah Papua. Disebutkan bahwa pelanggaran HAM dan pembungkaman ruang demokrasi semakin meningkat. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai (Ipmanapandode) dan masyarakat adat, menolak kehadiran sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Meepago. Ipmanapandode juga meminta agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak membuat konflik horizontal di antara masyarakat adat, dan menolak operasi pertambangan Zoomlion di Kapiraya, Deiyai. Tak hanya Ipmanapandode, Solidaritas Peduli Alam dan Manusia di Tanah Papua (SPAM) juga menyikapi sejumlah persoalan di tanah ini (https://jubi.id/rilis-pers/2024/mahasiswa-sikapi-situasi-ham-dan-demokrasi-di-papua/).

12 September

- Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyatakan kondisi HAM di Tanah Papua buruk. Pemerintah Indonesia diminta untuk serius menyelesaikan persoalan di Tanah Papua melalui dialog. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan kondisi HAM yang buruk disebabkan beberapa hal, di antaranya konflik bersenjata yang terus mengorbankan warga sipil di Papua. Ramandey mengatakan kasus pembunuhan pilot helikopter PT Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning, di Bandara Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 5 Agustus 2024 menunjukkan semakin buruknya kondisi HAM di Papua. *"Peristiwa [pembunuhan pilot itu] menunjukan kepada masyarakat internasional secara umum situasi HAM [di Papua] buruk,"* kata Ramandey. Ramandey mengatakan belum ada penanganan secara serius terhadap pengungsi Nduga maupun pengungsi Maybrat. Laporan pemantauan Komnas HAM pada Juli 2023 mencatat sebanyak 3.387 warga sipil Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya masih berada di pengungsian sejak 2021 (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-papua-kondisi-ham-di-tanah-papua-buruk/).

- Puluhan mahasiswa dan pelajar. Mereka yang tergabung dalam komunitas pelajar dan mahasiswa Yahukimo ini meminta Komnas HAM, segera membentuk tim investigasi untuk diturunkan ke Yahukimo guna mengungkap pelaku dan motif penembakan terhadap almarhum Tobias Silak Staf Bawaslu Yahukimo. Aksi ini dilakukan di Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua yang berlokasi di Jalan Soa Siu, Dok V, Rabu (11/09) didatangi. Penembakan ini terjadi pada 21 Agustus 2024 lalu. *"Komnas HAM harus bentuk tim investigasi untuk turun ke Yahukimo, harus ungkap siapa pelaku penembakan terhadap dua orang ini,"* kata Kuasa Hukum, Imanuel Gobai yang juga Direktur LBH Papua (Cenderawasih Pos).

27 September

Komnas HAM RI mendorong pemenuhan hak-hak korban tindak Pidana Perempuan dan Anak, Pidana Perdagangan Orang di kepolisian. Dorongan Komnas HAM RI tersebut, dikirim melalui siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (27/09), setelah Polri membentuk satuan kerja baru, yaitu Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO). Berdasarkan Surat Telegram yang diterbitkan pada Jumat 20 September 2024, Brigjen Pol. Desy Andriani ditunjuk sebagai Direktur Tindak Pidana PPA-PPO. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Ketua Tim TPPO dan TPKS Komnas HAM RI, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya mengapresiasi pembentukan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO tersebut. *"Direktorat ini sangat dibutuhkan keberadaannya, mengingat perdagangan orang dan tindak pidana kekerasan seksual telah menjadi persoalan serius di Indonesia dan mengancam masyarakat, terutama perempuan dan anak,"* kata Anis (https://jubi.id/rilis-pers/2024/komnas-ham-dorong-pemenuhan-hak-korban-ppa-dan-ppo/).

03 Oktober

Penyelesaian kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil Orang Asli Papua semakin sering dilakukan dengan membayar denda adat berupa sejumlah uang. Cara penyelesaian seperti itu dikhawatirkan akan menguatkan praktik impunitas yang

melindungi aparat keamanan pelaku kekerasan dari jeratan hukum. Hal itu dinyatakan Ketua Tim Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Melchior Weruin di Kota Jayapura, Rabu (02/10). Weruin mencatat ada sejumlah kasus kekerasan terhadap warga sipil di Tanah Papua yang diduga dilakukan aparat keamanan, dan dugaan tindak pidana itu diselesaikan dengan membayar denda. Pada 17 September 2024, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah membayar denda senilai Rp 7,5 miliar untuk menyelesaikan kasus penembakan yang menyebabkan kematian tiga warga sipil di sana. Ketiga warga sipil yang meninggal dunia dalam kasus penembakan itu adalah Dominus Enumbi (Ketua Bamuskam asal Kampung Karubate), Pemerinta Morib (Kepala Kampung Dokome), dan Tonda Wanimbo (Bendahara Kampung Temu asal Distrik Ilamburawi). Melchior Weruin menyoroti pembayaran denda uang dalam penyelesaian kasus itu, dan menyatakan ada semakin banyak kasus dugaan kekerasan oleh aparat keamanan diselesaikan dengan membayar denda uang (https://jubi.id/polhukam/2024/kekerasan-aparat-keamanan-di-tanah-papua-makin-sering-diselesaikan-pakai-denda-uang/).

07 Oktober

Dewan Gereja-Gereja Dunia (*World Council of Churches)* membahas situasi HAM yang mengerikan di Tanah Papua. Sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung yang meliputi pembunuhan di luar hukum, pengungsian internal akibat konflik bersenjata, pembatasan terhadap kebebasan sipil, dan semakin banyaknya kasus-kasus perampasan tanah. Hal ini menjadi atensi Dewan Gereja Dunia bersama sejumlah organisasi-organisasi mitra saat menggelar acara untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke-57 yang bertajuk "Hak Asasi Manusia di Papua Barat" berlangsung di Jenewa, Swiss pada Selasa (01/10). Peter Prove, Direktur Komisi Gereja-gereja untuk Urusan Internasional DGD, menjadi moderator dalam diskusi tersebut. *"Acara kami berfokus pada situasi Hak Asasi Manusia di Papua Barat, yang menurut saya mungkin memenuhi syarat sebagai krisis Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan terburuk dan terlama yang belum pernah didengar oleh banyak orang dan kami belum pernah mendengarnya*

karena alasan yang sangat spesifik," kata Peter Prove menukil laman https://www.oikoumene.org. *"Ini bukan kecelakaan; ini adalah konsekuensi yang disengaja dari kurangnya akses yang diberikan Indonesia kepada perwakilan komunitas internasional ke wilayah tersebut,"* katanya (https://jubi.id/tanah-papua/2024/dewan-gereja-dunia-membahas-krisis-ham-yang-mengerikan-di-tanah-papua/).

19 Oktober

Komnas HAM RI menerima pengaduan masyarakat, atas peristiwa kontak tembak antara Satgas Pamtas Yonif 303/SSM dengan TPNPB-OPM pimpinan Kalenak Murib, di Kampung Pamebut, Distrik Yugumuak, Kabupaten Puncak, Jumat (03/03/2023). Peristiwa kontak tembak tersebut mengakibatkan delapan orang warga sipil menjadi korban, salah satunya perempuan bernama Tarina Murib, yang dinyatakan meninggal dunia. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, untuk menindaklanjuti aduan tersebut, pihaknya melakukan langkah pemantauan dan penyelidikan dengan melakukan langkah-langkah, antara lain, meminta keterangan Kodam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua, masyarakat Distrik Yugumuak dan Mage'abume, beberapa rumah sakit di Timika, Kapolres Puncak, Pj Bupati Puncak serta Tenaga Kesehatan (Nakes) Kabupaten Puncak pada 28 April 2024 sampai 1 Mei 2024. *"Selain permintaan keterangan, tim Komnas HAM juga mengumpulkan bukti-bukti tertulis yang dapat membuat terang peristiwa,"* katanya melalui siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Sabtu (19/10) (https://jubi.id/rilis-pers/2024/komnas-ham-terima-aduan-keluarga-tarina-murib/).

26 Oktober

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta mendorong penyelesaian kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua. Persoalan kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui dialog damai. Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro menyatakan Otonomi Khusus Papua telah dijalankan lebih dari 20 tahun, namun konflik dan

kekerasan masih rentan terjadi di Tanah Papua. Konflik dan kekerasan itu telah mengakibatkan korban jiwa dari pihak warga sipil, TNI/Polri, maupun kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. "*Situasi itu juga menyebabkan kerentanan sosial yang menghambat penikmatan dan perlindungan HAM, seperti sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan,*" kata Atnike dalam keterangan pers tertulisnya pada Jumat (25/10). Atnike mengatakan konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadinya menyebabkan pengungsi internal. Konflik dan kekerasan yang berkepanjangan itu menghambat akses warga di Tanah Papua terhadap hak ekonomi, sosial, budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainnya. Atnike mengatakan pemerintah pusat harus mendorong dan mendukung pemerintah daerah seluruh provinsi di Tanah Papua. Atnike mengatakan dukungan itu penting untuk secara efektif memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi konflik dan kekerasan (https://jubi.id/polhukam/2024/prabowo-gibran-diminta-selesaikan-konflik-bersenjata-di-tanah-papua/).

14 November

Front Justice for Tobias Silak yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat, meminta kepada Polda Papua untuk segera melakukan penyelidikan kasus penembakan Tobias Silak, pada Selasa (20/8/2024), di Yahukimo, Papua Pegunungan. Mereka juga meminta pihak kepolisian segera mengungkap siapa pelakunya dan menghukumnya. Keluarga korban, Rois Moh, berharap Polda Papua segera melakukan penyelidikan agar pelaku segera diadili dan diproses hukum. Dikatakannya, orang tua korban khususnya mama mendiang Tobias Silak sangat terpukul atas kejadian tersebut. "*Orang tua [korban] yang ada di Yahukimo saat ini dan kami keluarga, kondisinya tidak baik-baik. Mama selalu melakukan hal-hal yang tidak baik [pada dirinya sendiri]. Kami keluarga berharap kasus ini segera diatasi dan diselesaikan secepatnya, dan pelaku dihukum sesuai hukum di Indonesia. Keluarga hanya minta keadilan,*" katanya, saat jumpa pers di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (13/11) (https://jubi.id/polhukam/2024/front-justice-for-tobias-silak-desak-polda-papua-segera-lakukan-penyelidikan/).

21 November

Dewan Gereja Papua menyikapi teror molotov terhadap Kantor Redaksi Media Jubi Papua dan respon aparat keamanan menghadapi berbagai aksi damai yang memprotes apa yang mereka sebut sebagai 'rasisme berwajah pembangunan' di Tanah Papua. Dalam Surat Terbuka Dewan Gereja Papua menyikapi situasi terkini Tanah Papua di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Kamis (21/11/2024), Pdt Benny Giay mengatakan Dewan Gereja-gereja Papua juga merasa sangat prihatin terhadap situasi pembungkaman ruang demokrasi yang dihadapi rakyat Papua, yang perlahan menuju kepunahan ras Melanesia. *"Keprihatinan kami yang pertama adalah peledakan bom molotov di depan Kantor Redaksi Jubi tanggal 16 Oktober lalu, yang belum diungkap hingga saat ini. Ini penting kami angkat karena kejadian demikian ini bukan hal baru. Wartawan Jubi ini sudah lama jadi sasaran teror para pihak yang demikian. Apa motifnya? Apakah dalam rangka membungkam Jubi?"* katanya. Pendeta Giay juga mengingatkan teror terhadap Jubi setidaknya sudah terjadi dua kali berturut-turut yang ditujukan terhadap wartawan senior, pendiri dan Pemimpin Umum Media Jubi Papua, Victor Mambor, pada 21 April 2021 dan 23 Juni 2023. Peristiwa pertama yang dimaksud adalah perusakan mobil pribadi Victor Mambor oleh orang tak dikenal, dan peristiwa kedua teror bom di dekat kediamannya. Kedua kasus tersebut hingga kini belum diungkap (https://jubi.id/polhukam/2024/dewan-gereja-papua-sikapi-teror-molotov-di-kantor-jubi-dan-penanganan-demonstrasi-di-papua/).

12 Desember

Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka diminta untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM berat yang terjadi di Tanah Papua. Penyelesaian pelanggaran HAM berat itu sangat penting untuk memberikan rasa keadilan bagi Orang Asli Papua, khususnya bagi para korban dan keluarga korban. Direktur Yayasan Sekretariat Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau SKKMP, Theo Hesegem mengatakan hingga para terduga pelaku dalam kasus pelanggaran HAM berat Wasior Berdarah 2001 – 2002 dan Wamena Berdarah 2003 belum pernah diadili. *"Pemerintah segera*

menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM berat [di Tanah Papua] yang sudah dalam [daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat]. [Berbagai kasus] itu harus diselesaikan, dan] ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo," kata Hesegem kepada Jubi di Wamena Selasa (10/12). Hesegem mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM berat itu harus memperhatikan keinginan keluarga korban. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara sepihak sesuai keinginan pemerintah (https://jubi.id/polhukam/2024/prabowo-gibran-diminta-selesaikan-kasus-pelanggaran-ham-berat-di-tanah-papua/).

19 Desember

Pemerintah Indonesia dinilai tidak mempunyai keseriusan untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Tanah Papua. Pendekatan dialog damai harus terus didorong sebagai upaya menyelesaikan konflik di Tanah Papua, namun dorongan itu diabaikan pemerintah. Kepala Divisi Hukum Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, Andrie Yunus mengatakan peristiwa kekerasan berdimensi konflik bersenjata terus terjadi berulang di Tanah Papua. Andrie mengatakan pantuan KontraS Desember 2023 hingga November 2024 mencatat 51 peristiwa kekerasan berdimensi konflik bersenjata. Berbagai insiden itu menyebabkan 36 orang luka-luka dan 21 orang meninggal dunia. *"Kami menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki niatan serius dalam menyelesaikan konflik [bersenjata di Papua],"* kata Andrie kepada Jubi, pada Kamis (19/12) (https://jubi.id/polhukam/2024/pemerintah-indonesia-tidak-serius-selesaikan-konflik-bersenjata-di-tanah-papua/).

24 Desember

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI menyatakan penembakan dua warga sipil yang diduga dilakukan anggota Brimob di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan merupakan pelanggaran HAM. Pernyataan itu disampaikan Ketua Komnas HAM Pusat Atnike Nova Sigiro di Jakarta, Senin (23/12). *"Komnas HAM berpendapat peristiwa ini merupakan bentuk pelanggaran HAM,"* ujarnya. Pada 20 Agustus 2024, dua warga sipil menjadi korban penembakan

yang diduga dilakukan anggota Brimob di Yahukimo. Satu korban bernama Tobias Silak meninggal dunia karena tembakan itu. Seorang korban lainnya, Naro Dapla mengalami luka-luka. Atnike mengatakan Komnas HAM melakukan serangkaian pemantauan dan penyelidikan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua serta Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada 22 – 27 September 2024. *"Komnas HAM sudah berkoordinasi dan melakukan permintaan keterangan kepada para pihak, seperti Kapolda Papua, Kapolres Yahukimo, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat,"* ujarnya. Dari serangkaian hasil penyelidikan Komnas HAM, kata Atnike, peristiwa penembakan dua warga sipil sipil tersebut merupakan pelanggaran HAM dengan hak yang dilanggar yaitu hak hidup dan hak atas keadilan. Atnike mengatakan Tobias Silak dan Naro Dapla merupakan orang asli Papua asal Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-nyatakan-penembakan-tobias-silak-dan-naro-dapla-di-yahukimo-pelanggaran-ham/).

Kronik Hukum dan Keadilan

03-04 Januari

Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSHAM Papua Pendeta Matheus Adadikam mengatakan berdasarkan data ELSHAM Papua sepanjang 2023, mulai awal Januari hingga Desember 2023 banyak terjadi penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan aparat TNI/Polri di beberapa wilayah di tanah Papua. Wilayah-wilayah tersebut adalah Boven Digoel yang terjadi pada Januari, Wamena pada Februari, Kabupaten Puncak pada Maret, Nduga pada April, dan penyisiran di Yahukimo pada Maret. Kemudian pengungsian internal di daerah Paro, Nduga pada Februari pasca penyanderaan Pilot Susi Air, pasca penembakan yang dilakukan TPNPB di wilayah Ilaga Puncak pada Maret, dan penjarahan harta benda warga sipil yang dilakukan TNI di wilayah Kuyawage pada April (Koran Jubi).

10-11 Januari

- Direktur Eksekutif Lokataru Kantor Hukum dan HAM Haris Azhar dan mantan Koordinator KontraS Jakarta Fatia Maulidiyanti divonis bebas dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Haris dinilai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama (Koran Jubi).
- Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nduga menyerahkan ED alias Altau, anak buah Egianus Kogoya, Pimpinan TPN PB Kodap III Ndugama ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (09/01). *"Berkas perkaranya sudah lengkap, makanya kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk proses selanjutnya. Altau merupakan tersangka sejumlah tindak kriminal,"* kata Kepala Satuan Reskrim Polres Nduga, Iptu Jaya Bida Kedeng. Menurut Jaya, Altau diserahkan bersama sejumlah barang bukti, termasuk 1 kalung karet berwarna hitam, 1 kalung manik-manik warna hitam coklat dengan gantungan taring babi, 1 unit ponsel merek Vivo Y22 berwarna biru, dan 1 unit ponsel merek Nokia 105 berwarna biru (Koran Jubi).

21 Juni

Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua mempertanyakan kelanjutan kasus penyiksaan dan penembakan warga sipil di Kabupaten Puncak. Penyiksaan warga sipil di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Pegunungan, 03 Februari 2024, sempat viral di linimasa media sosial. Penyiksaan tersebut diduga dilakukan oleh Satgas Yonif 300/ Brajawijaya, Kodam lll/Siliwangi, yang mengorbankan tiga OAP di Distrik Omukia dan dua orang ditangkap di Kampung Eromaga, yakni Warinus Murib (tewas) dan Alianus Murib. Sedangkan satu OAP ditangkap di Kampung Kunga, Delfius Kogoya. Ketiganya dibawa ke Pos Gome dan mendapat penyiksaan, lalu diserahkan ke kepolisian setempat. Namun, mereka ditolak oleh kepolisian karena khawatir dengan kondisinya.

Ketiganya lalu dibawa ke RSUD llaga, tetapi Warinus Murib akhirnya tewas. Korban yang hidup selanjutnya dirawat oleh pihak keluarga. Penyiksaan terhadap salah satu korban kemudian viral lewat media sosial dan media massa pada 21 Maret 2024. Sebelumnya kabar itu dibantah dan Kapuspen TNl, Kogabwilhan lll dan Pangdam XVll/Cenderawasih, dengan alasan hoaks (https://jubi.id/polhukam/2024/paham-papua-pertanyakan-kelanjutan-kasus-penyiksaan-warga-sipil-di-puncak/).

13 September

Advokat Papua menilai bahwa kriminalisasi terhadap orang asli Papua atau OAP masih terjadi di tanah ini. Hal itu dibuktikan dengan penangkapan sewenang-wenang dua anak di bawah umur di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, atas nama Melianus Baye dan Beni Elopere. Disebutkan, Polres Yahukimo menangkap, menahan, menyiksa dan memaksakan dua anak itu, untuk mengaku telah menembak pesawat Wings Air ATR seri 600 PK WJT pada 17 Februari 2024 di bandara Nop Goliat Dekai. Mereka dijerat pasal 479f huruf (a) Juncto Pasal 56 KUHP. Terdakwa Melianus Baye sebelum ditangkap masih berstatus kelas 2 SMP YPPGI di Yahukimo. Anak berumur 16 tahun ini diperlakukan tidak manusiawi oleh satuan TNI yang melakukan Operasi Satgas Pamtas Mobile RI-PNG sejak 18 Agustus 2023. "*Lengan tangan terdakwa Melianus Baye disayat-sayat dengan pisau saat awal mula ditangkap di Kali Brasa. Kedua terdakwa diperlakukan tidak manusiawi hingga dijemput oleh Kepolisian Resor Yahukimo,*" kata penasehat hukum para terdakwa, Mersi F. Waromi dan Henius Asso, dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (13/9/2024). Dalam interogasi selama satu minggu di Polres Yahukimo, demikian siaran pers tersebut, kedua terdakwa dipukul, diikat kaki dan tangannya, disetrum, dan disuruh mengakui perbuatannya. Mereka diambil keterangannya tanpa didampingi penasehat hukum. Setelah itu mereka diterbangkan ke Jayapura. Selanjutnya ditahan di rutan Polda Papua sekitar 4 bulan. Hingga bulan Juni, Melianus dan Beni dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan disidangkan di Pengadilan Negeri Wamena–sejak 25 Juni 2024 hingga putusan bebas pada 10 September 2024 (https://jubi.id/rilis-pers/2024/advokat-nilai-masih-ada-kriminalisasi-terhadap-orang-papua/).



Aksi Damai Mahasiswa STFT Fajar TImur dalam perayaan Hari HAM 10 Desember 2018.
(Dok. JPIC OFM Papua)

BAB III

LINGKARAN SETAN KEKERASAN DI PAPUA: KONFLIK BERSENJATA TPNPB OPM VS TNI-POLRI

Oleh Alexandro Rangga OFM

Pengantar

Ketika membaca kronik dengan judul **Konflik Sipil dan Bersenjata**, kita akan menemukan adanya interkoneksi kompleks antara berbagai isu yang terjadi di Papua. Isu-isu tersebut saling terkait dan membentuk semacam lingkaran setan kekerasan. Selain konflik horisontal sosial, isu-isu yang lain seperti militerisasi, peredaraan senjata, penyiksaan warga sipil, usaha pembebasan sandera pilot Philip Mark Mehrtens, hingga gelombang pengungsi berakar pada konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri. Interkoneksitas setiap isu ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain sehingga memperparah konflik di Papua.

Pembacaan Kronik

Berdasarkan kronik yang ada, kasus yang paling sering muncul adalah konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri. Bentrokan berulang yang sering terjadi antara pasukan keamanan dan kelompok bersenjata mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Terhitung korban tewas dari TPNPB-OPM mencapai 51 orang, sedangkan dari pihak TNI-

Polri mencapai 55 orang (55 TNI dan 4 Polri). Berulang kali terjadi kasus warga sipil terjebak dalam baku tembak atau menjadi korban serangan tertarget. Tidak kurang dari 104 orang korban tewas dan banyak lainnya yang mengalami luka-luka. Selain itu, ada penargetan infrastruktur publik yang disengaja, seperti sekolah, rumah sakit, dan gedung pemerintah.[9] Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat sejak Januari hingga September 2024 ada 69 peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Menurut Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, peristiwa ini mengakibatkan 92 orang korban, di mana 40 orang mengalami luka-luka dan 52 orang meninggal dunia.[10]

Selain itu kasus penembakan dan penganiayaan terhadap warga sipil oleh oknum aparat keamanan, khususnya TNI juga tinggi. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai wilayah di Papua, seperti Puncak Jaya, Paniai, Yahukimo, dan lainnya. Di Puncak Jaya, kasus penyiksaan terhadap Definus Kogoya oleh anggota Yonif 300 Raider/Brawijaya menjadi sorotan nasional dan internasional. Video penyiksaan yang viral menunjukkan tindakan yang sangat keji dan melanggar kemanusiaan. Pihak TNI awalnya menyangkal kebenaran video tersebut, namun kemudian mengakui setelah dilakukan investigasi.[11] Masyarakat sipil, LSM, dan Komnas HAM mendesak agar pelaku penyiksaan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini sangat kuat indikasi tindak pidana penyiksaan (Pasal 333 KUHP) dan bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.**:** "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyebut video penyiksaan seorang warga sipil di dalam drum yang diduga dilakukan oleh anggota TNI memenuhi unsur pelanggaran HAM." Kasus penyiksaan terhadap Definus Kogoya memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat jika terbukti adanya pola dan sistematis dalam tindakan tersebut sehingga permintaan maaf saja

---

[9] Komnas HAM. (2024). Laporan Tahunan 2024. Jakarta: Komnas HAM.

[10] Cenderawasih Pos, 13 September 2024. Hingga 9 Desember 2024, Komnas HAM Papua mencatat, dari puluhan kasus kekerasan ini ada 114 orang menjadi korban. Sebanyak 71 orang tewas, 40 orang di antaranya merupakan warga sipil.Bdk. https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-papua-catat-71-orang-tewas-dalam-kasus-kekerasan-selama-2024-di-papua

[11] https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7260276/pomdam-tahan-8-oknum-prajurit-tni-aniaya-sadis-warga-papua-dalam-drum



Infografis Korban Penembakan Warga Sipil April 2024
(Dok. JPIC OFM Papua)

tidaklah cukup.[12] Di Paniai, terdapat beberapa kasus penembakan yang melibatkan anggota keamanan. Kasus penembakan terhadap dua polisi oleh TPNPB menunjukkan adanya konflik bersenjata yang kompleks. Sementara itu, kasus penembakan terhadap warga sipil oleh OTK menunjukkan adanya ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut. Di Yahukimo, kasus penembakan terhadap warga sipil oleh oknum anggota Brimob menunjukkan adanya pelanggaran prosedur baku tembak dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Selain itu, adanya dugaan salah sasaran dalam penembakan ini juga perlu diinvestigasi lebih lanjut. Kasus-kasus kekerasan lainnya juga terjadi di wilayah seperti Intan Jaya, Dekai, dan Jayawijaya. Modus operandinya bervariasi, mulai dari penembakan, penganiayaan, hingga perusakan.

Konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri juga berbanding lurus dengan jumlah pengiriman pasukan non-organik ke Papua. Praktik jual beli senjata pun masih terjadi di Papua, melibatkan aparat militer

[12] Cenderawasih Pos, 25 dan 27 Maret 2024.

maupun warga asing.[13] Imparsial menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Tanah Papua sepanjang tahun 2024. Jumlahnya mencapai 3.187 pasukan non-organik. Jumlah ini belum termasuk pasukan lainnya yang belum/tidak diketahui.[14] Muncul seruan evaluatif terkait pengiriman pasukan non-organik sebagai kelanjutan pendekatan keamanan di Papua. Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Andrie Yunus mengatakan bahwa pendekatan keamanan dengan mengirim pasukan TNI/Polri di Tanah Papua hanya akan meningkatkan eskalasi konflik bersenjata berdampak terhadap warga sipil.[15] Lebih jauh, Budi Hernawan PhD menyebutkan bahwa status konflik Papua menjadi tidak jelas karena pemerintah tidak mau mendeklarasikan dan membuat dasar hukum pengerahan pasukan ke Papua *"[Pengerahan pasukan] itu dasarnya apa? Itu yang perlu dikejar. Dasar peraturannya apa? Dasar hukumnya apa? Apakah DPR [RI] tahu atau tidak? [Tanpa kejelasan status, pengerahan pasukan] itu ilegal. Itu [di Papua sedang berjalan] Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. [Untuk menggelar] Operasi Militer Selain Perang harus ada Peraturan Presiden. Nah, ini [Peraturan Presiden] tidak ada. Kita punya [Peraturan Presidan soal operasi militer] di Ambon, di Aceh. Tapi dalam konflik Papua tidak pernah ada [Peraturan Presiden itu]. Sampai hari ini kan memang tidak ada pernyataan dari Presiden. Yang [punya] kewenangan untuk melakukan operasi militer adalah Presiden. Yang terjadi di lapangan ini apa? Mereka harus jelaskan, "* ujarnya.[16]

Efek domino konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri ialah gelombang pengungsian warga sipil yang baru khususnya di Oksop dan Tambrauw. Tercatat sebanyak 3.318 warga sipil dari Distrik Oksop mengungsi ke Oksibil dan ke hutan-hutan. Sementara itu, sekitar 106 warga sipil mengungsi dari Kampung Banfot, Distrik Fef dan Kampung

---

[13] Cenderawasih Pos, 02 April 2024.

[14] https://nasional.kompas.com/read/2024/12/10/16083181/imparsial-anggap-ribuan-pasukan-dikirim-ke-papua-selama-2024-ilegal. Bdk. Imparsial. (2024). Laporan Pengiriman Pasukan Non-Organik ke Papua. Jakarta: Imparsial.

[15] Koran Jubi, 05-06 April 2024. Bdk. https://jubi.id/polhukam/2024/pemerintah-indonesia-tidak-serius-selesaikan-konflik-bersenjata-di-tanah-papua/

[16] https://jubi.id/polhukam/2024/penambahan-pasukan-di-tanah-papua-tanpa-dasar-hukum-status-konflik-papua-jadi-kabur/



Para Pengungsi Internal dari Distrik Oksop, Pegunungan Bintang, Papua
(Dok. JPIC OFM Papua)

Bamuswaiman, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Total pada bulan Desember 2024 saja terdapat 3.424 warga sipil yang mengungsi.[17] Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang sedang berlangsung, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan. Gelombang pengungsi ini menambah panjang daftar titik pengungsi di Papua. Padahal pengungsi-pengungsi sebelumnya belum ditangani secara maksimal sebagaimana dikatakan oleh Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. *"Para pengungsi ini kehilangan akses pada makanan, kehilangan akses pada kesehatan dan rumah, atau tempat tinggal. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Hidup dalam keharusan untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk bertahan hidup,"* katanya.[18]

[17] https://jubi.id/rilis-pers/2024/konflik-bersenjata-menambah-jumlah-pengungsi-di-tanah-papua/
[18] https://jubi.id/polhukam/2024/riset-gereja-sudah-5-tahun-pengungsi-di-papua-tidak-mendapatkan-perhatian-negara/

Analisis Kritis

Berdasarkan hasil pembacaan kronik di atas, ada beberapa catatan kritis analitis. Pertama, baik konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri maupun isu-isu turunannya seperti tindakan penembakan, penganiayaan, dan penyiksaan memiliki delik hukum karena jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Delik hukum yang dapat dikenakan antara lain Tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Tindak pidana penyiksaan (Pasal 333 KUHP) hingga Pelanggaran HAM berat (Jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM). Kedua, konflik bersenjata antara TPNPB-OPM vs TNI-Polri mempunyai dampak yang luas dengan sebagian besar kasus melibatkan oknum anggota TNI dan mayoritas korban adalah warga sipil Papua. Ketiga, ada banyak reaksi dan tanggapan dari Pemerintah, DPRD, LSM dan Lembaga HAM akan tetapi implementasi rekomendasi pemerintah (dalam hal ini, Komnas HAM), CSO dan NGO seringkali terkendala. Pemerintah, khususnya TNI, bahkan juga telah mengambil langkah-langkah investigasi, namun masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Berdasarkan ketiga poin di atas, secara khusus dalam hal penanangan dan penegakan hukum, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Pertama, kesulitan dalam mengumpulkan bukti. Banyak kasus terjadi di daerah terpencil dengan akses yang terbatas. Hal ini menyulitkan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat. Sumber utama ialah aparat militer sehingga seringkali versi yang muncul di media massa maupun media sosial ialah versi aparat militer yang sulit dikonfirmasi dan diverifikasi. . “Akses yang terbatas ke daerah konflik seringkali membuat sulit bagi peneliti dan lembaga HAM untuk mengumpulkan bukti yang akurat dan menyeluruh. Hal ini menghambat upaya untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM dan membawa pelaku ke pengadilan.” Selain itu, ada banyak tekanan dari pihak-pihak tertentu dapat menghambat proses penyidikan dan peradilan. “Di daerah-daerah terpencil, seringkali tidak

ada saksi yang berani bersaksi karena takut akan ancaman dan intimidasi. Selain itu, bukti fisik juga seringkali sulit ditemukan atau diakses." Selain itu, "Interferensi politik dan tekanan dari kelompok-kelompok berkepentingan seringkali menghambat proses peradilan dan mencegah tercapainya keadilan bagi korban. Hal ini menciptakan iklim impunitas yang menguntungkan para pelaku pelanggaran HAM."[19] Kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kejadian-kejadian di masa lalu yang melibatkan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan telah menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di beberapa daerah konflik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang belum terselesaikan dan kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum adalah modal sosial yang sangat penting dalam membangun perdamaian. Namun, kepercayaan ini sulit dibangun kembali jika aparat terus melakukan pelanggaran HAM dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.[20]

Mengacu pada beberapa catatan kritis dan tantangan di atas, kita perlu memberi perhatian pada seruan Majelis Rakyat Papua Tengah akan pentingnya penyelesaian menyeluruh terkait konflik politik yang terjadi di tanah Papua demi menghindari korban dari semua pihak.[21] Oleh karena itu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai lingkaran setan kekerasan di Papua. Pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil. Pelaku kekerasan harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu. Karena pelakunya terutama adalah aparat militer, maka senada dengan hal ini ialah pentingnya reformasi sektor keamanan, termasuk peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Kedua, perlindungan bagi korban. Korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang

[19] Laporan Tahunan Amnesty International 2023

[20] Bdk. Mas Achmad Santosa, *Langkah-Langkah Pemulihan Kepercayaan Masyarakat Hukum: Terhadap Supremasi Hukum*, Jakarta : Indonesian Center for Enviromental Law., 2001.

[21] https://suarapapua.com/2024/05/27/mrp-papua-tengah-berharap-adanya-penyelesaian-konflik-papua-secara-menyeluruh/

memadai serta bantuan-bantuan restoratif lainnya, terutama ketika berbicara tentang pengungsi. Ketiga, mendesaknya dialog dan negosiasi. Ada ketidak-percayaan yang men-dalam antara pemerintah Indonesia dan banyak orang Papua, yang telah menghambat upaya untuk menemukan solusi jangka panjang atas konflik ter-sebut. Akan tetapi, Pe-merintah tetap harus membuka ruang dialog yang inklusif dengan semua pihak yang ber-kepentingan untuk men-



Infografis Korban Penembakan Warga Sipil
Agustus-Desember 2024
(Dok. JPIC OFM Papua)

cari solusi damai di Papua. Pengambilan sikap dan kebijakan yang *top-down* dalam kerangka nasionalisme sudah terbukti tidak efektif. Perlu pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi konflik di Papua, yang melibatkan aspek keamanan, politik, sosial, dan ekonomi.

Akhirnya, kasus penyanderaan dan upaya pembebasan pilot Susi Air adalah cerminan dari konflik yang lebih besar di Papua. Kasus penyanderaan pilot Susi Air selama hampir dua tahun menunjukkan betapa kompleksnya konflik di Papua. Meskipun berbagai upaya negosiasi telah dilakukan oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan pihak internasional, penyelesaian damai sangat sulit dicapai. Kelompok penculik, dalam hal ini TPNPB-OPM, menjadikan sandera sebagai alat tawar-menawar untuk mencapai tujuan politik mereka. Meskipun pilot akhirnya berhasil dibebaskan, akar permasalahan konflik di Papua belum terselesaikan. Ini menandakan bahwa dibutuhkan komitmen jangka

panjang dari semua pihak untuk mencari solusi yang lebih mendasar dan berkelanjutan.

Penutup

Lingkaran setan kekerasan di Papua telah berlangsung terlalu lama dan berakar pada kompleksitas akar penyebab konflik di Papua. Akar penyebab Konflik di Papua bukan masalah hitam-putih sederhana, tetapi memiliki banyak sisi, meliputi keluhan historis, eksploitasi sumber daya alam Papua dan kesenjangan ekonomi, serta marginalisasi politik dengan banyak aktor dan dinamika kepentingan yang berkelindan. Untuk memutus lingkaran setan ini, diperlukan keberanian untuk mengubah pendekatan serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Langkah-langkah konkret yang harus diambil meliputi dialog inklusif, penegakan hukum yang adil, pembangunan yang berpusat pada masyarakat, dan jaminan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan Papua yang lebih baik.

Kronik Konflik Sipl dan Bersenjata

04 Januari

- Kendati situasi dan kondisi di Kampung Karya Bumi Besum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura sudah kondusif, namun ratusan warga Besum belum bisa kembali ke rumahnya. Pasalnya, belum ada kesepakatan dengan masyarakat terutama keluarga korban, sehingga anak-anak, wanita dan lansia masih berada di Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Sementara sejumlah aparat keamanan masih berjaga-jaga di Kampung Karya Bumi Besum. Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen mengatakan dari pendataan awal yang dilakukan, satu unit kantor balai kampung dibakar, pasar pagi dibakar, 21 unit rumah yang dirusak dan dijarah, delapan unit rumah yang dibakar, satu unit sepeda motor dibakar, 22 unit mobil dirusak, serta 41 unit sepeda motor yang mengalami kerusakan akibat tindakan anarkis dari massa (Cenderawasih Pos).
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap konflik diantara masyarakat yang terjadi di Kampung Muai Distrik Hubikiak Kabupaten Jayawijaya bisa segera berakhir dan masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. PJ Gubernur Papua pegunungan Velix Vernando Wanggai menyatakan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan turut prihatin dan berduka terkait insiden yang terjadi sejak 1 januari kemarin yang berimbas hingga terjadinya penyerangan yang menewaskan dua orang warga dan juga ada korban luka yang masih dirawat di RSUD Wamena (Cenderawasih Pos).
- Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemda Jayawijaya mulai salurkan bantuan pangan kepada korban Penyerangan di Kampung Muai Distrik Hubikiak, dimana bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian material. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor menyatakan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari perintah Pj. Gubernur Papua Pegunungan oleh karena itu pihaknya bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan langsung mengambil langkah untuk menyediakan bantuan tersebut (Cenderawasih Pos).

- Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Dedi Hardono memberi ketegasan atas kejadian yang terjadi di Kampung Besum Distrik Namblong Kabupaten Jayapura. Ia menyatakan bahwa TNI tidak akan menutup-nutupi kesalahan yang dibuat oknum anggota jika memang bersalah. Namun jika ternyata ada tindakan yang dilakukan mengharuskan untuk membela diri maka pihaknya akan mempelajari kasusnya lebih dulu. Ini disampaikan usai mengunjungi langsung situasi keamanan di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura pasca pengrusakan dan pembakaran rumah warga dan fasilitas publik. Danrem menyebut, situasi di wilayah tersebut sudah kondusif. Aparat dari pihak TNI dan Kepolisian telah melakukan penjagaan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan (Cenderawasih Pos).

03-04 Januari

- Pemerintah Kabupaten Jayapura menyalurkan bahan pangan ke pengungsi Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong. Mereka mendata ada 501 keluarga mengungsi ke Kampung Nimbokrang, Kampung Benyom Jaya I, dan Kampung Benyom Jaya II. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura Jan Willem Rumere mengatakan bahan pangan itu merupakan stok tahun lalu. Bantuan tersebut dikelola oleh dapur umum yang dibangun pemerintah kampung setempat (Koran Jubi).
- Kepolisian Daerah Papua Barat telah menggelar Operasi Petik Bintang di Maybrat selama tahun lalu. Mereka akan mengevaluasi pelaksanaannya untuk menjamin kondusifitas keamanan di Maybrat. Kepala Polda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Edison Isir menyatakan sejumlah metode pengamanan mesti dievaluasi, termasuk pelaksanaan Operasi Petik Bintang 2023. Namun, dia memastikan metode baru tidak bakal jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Operasi Petik Bintang 2023 telah memulangkan 55 pengungsi ke Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Jauh. Mereka mengungsi hampir dua tahun akibat konflik bersenjata. Operasi Petik Bintang 2023 juga menangkap sejumlah buron yang diduga menjadi pelaku sejumlah

aksi penyerangan di Maybrat. Penangkapan itu, di antaranya terhadap terduga penembak rombongan Panglima Kodam Kasuari, dan terduga penyerang Pos Koramil Kisor (Koran Jubi).

05 Januari

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua menyebut Pemkab Jayapura bertanggung jawab terhadap pemulihan situasi pasca konflik di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong. *"Yang bertanggung jawab atas pemulihan situasi di Namblong adalah Pemda setempat, tidak bisa diserahkan kepada anggota TNI. Penyelesaiannya kepada otoritas sipil yakni Pemda segera melaksanakan kewajibannya untuk memberi perhatian kepada para pengungsi, paling tidak kebutuhan dasar masyarakat,"* terang Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, Kamis (04/01) (Cenderawasih Pos).
- Pihak Polresta Manokwari, Papua Barat berhasil mengungkap 24 kasus penjualan senjata api rakitan dan organik sepanjang tahun 2023. Kapolresta Manokwari Kombes Pol Rivadin Benny Simangunsong, di Manokwari, Rabu (03/01) mengatakan, senjata api rakitan yang disita berjumlah 22 pucuk dan senjata api organik sebanyak dua pucuk. *"Senjata api rakitan terdiri dari 17 pucuk laras panjang dan lima pucuk pistol. Sedangkan senjata organik dua pucuk pistol,"* katanya. Ia mengatakan, pada pengungkapan 22 pucuk senjata rakitan tanpa izin tersebut, pihaknya menangkap enam tersangka. Sedangkan dua pucuk senjata organik, pihaknya telah mengamankan satu tersangka. Saat ini seluruh tersangka telah menjalani proses hukum (Koran Jubi).

06 Januari

Kelompok Kriminal Bersenjata menembak seorang anggota TNI bernama Sertu La Alfiadin di Distrik Taganombak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Jumat (05/01). *"Memang benar seorang prajurit TNI telah gugur dan jenazahnya sedang dalam proses evakuasi ke Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya,"* kata Dandim 1714 Letkol Inf Irawan (Cenderawasih Pos).

08 Januari

Puluhan truk dinas dari Polres Jayapura dan Brimobda Polda Papua mengantar ratusan pengungsi yang mengamankan diri akibat konflik sosial yang terjadi pada 01 Januari 2024. Proses pemulangan tersebut dilakukan secara bergantian, mengangkut para pengungsi dari Posko di Distrik Nimbokrang untuk kembali ke kediaman mereka di Kampung Karya Bumi Besum. Pemulangan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sehari sebelumnya antara Forkopimda, Tokoh Adat, Masyarakat dan keluarga korban alm. Daud Bano, serta aspirasi dari dewan adat Grime Nawa Sadrak Wamebu. Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen membenarkan bahwa pemulangan dilakukan sebagai bagian dari upaya perdamaian (Cenderawasih Pos).

08-09 Januari

Sidang pemeriksaan saksi ketiga dalam perkara perdagangan senjata api yang didakwakan kepada pilot asal Papua, Anton Gobay di Pengadilan Zaranggani, Filipina, pada Jumat (05/01) ditunda karena saksi tidak menghadiri persidangan. Anton Gobay kini menunggu sidang penetapan nilai uang jaminan yang akan digelar pada 29 Februari 2024. Anton Gobay adalah seorang pilot asal Papua yang ditangkap polisi Filipina pada 07 Januari 2023, karena kedapatan memiliki 10 pucuk senjata api ilegal. Polisi menyebut senapan tersebut akan dimasukkan ke Papua. Anton Gobay menyatakan ketidakhadiran saksi ketiga itu memberi peluang baginya untuk meminta pengadilan menetapkan uang jaminan dalam perkaranya, karena kesaksian dua saksi terdahulu tidak kuat membuktikan kesalahan Gobay (Koran Jubi).

09 Januari

Kondisi Papua dimana masih kerap terkadi konflik sosial baik antara sesama OAP maupun OAP dengan masyarakat non-Papua dirasa perlu dibentuk tim penanganan konflik sosial. Tim penanganan konflik sosial sendiri bisa mengacu pada UU No. 7 Tahun 2012 dan dilakukan Pemprov Papua dan lewat Perdasi Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Konflik

Sosial melalui Badan Kesbangpol Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pansus DPR Papua Jhon Gobay, Senin (08/01) (Cenderawasih Pos).

10-11 Januari

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nduga menyerahkan ED alias Altau, satu anak buah Egianus Kogoya, Pimpinan TPNPB Kodap III Ndugama ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (09/01) (Koran Jubi).

11 Januari

Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di wilayah Distrik Ilu Kab. Puncak Jaya, Aparat Gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Polsek Ilu, Koramil 02 Ilu dan Satgas Yonif Raider 753/AVT menggelar kegiatan patroli dialogis diseputaran Distrik Ilu dan sekitarnya, Rabu (10/01). Dalam pelaksanaan kegiatan patroli gabungan yang dipimpin oleh Danramil 02 Ilu Kapten Chb. Heri Purwanto. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara melalui Kabag Ops Kompol R. Ahmad Hari Junianto saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pasca rentetan kejadian menonjol di wilayah hukum Distrik Ilu dan sekitarnya, aparat gabungan TNI Polri siang tadi menggelar kegiatan patroli dialogis. Lanjutnya, adapun sasaran dalam pelaksanaan kegiatan tadi yakni razia senjata api maupun senjata tajam serta para personel juga menyambangi tempat-tempat yang memang dianggap rawan akan gangguan Kamtibmas (Cenderawasih Pos).

15-16 Januari

Panglima Tertinggi West Papua Army atau WPA, Damianus Magai Yogi sebagai penanggung jawab dari tiga sayap militer, yakni TPNPB, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), menyatakan siap perang jika Pemerintah Indonesia tidak menghargai Orang Asli Papua atau OAP. Yogi menilai perlakuan NKRI terhadap rakyat West Papua sangat biadab (Koran Jubi).

20 Januari

- Pada Jumat (19/01) malam sekitar pukul 19.00 WIT salah satu anggota Satgas Damai Cartenz bernama Bripda Alfandi Steve Karamoy

tertembak dan dinyatakan gugur. Aksi penembakan ini dilakukan oleh KKB wilayah Intan Jaya yang dipimpin oleh Apen Kobogau dengan status Wakil Pangkodap VIII. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Ops Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno menjelaskan bahwa serangan KKB ini diduga berasal dari belakang Tower BTS Telkomsel, di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Akibat kontak tembak tersebut membuat tiga desa di Intan Jaya yakni Desa Wandoga, Bilogasi dan Yokatapa mengalami ketakutan akibat trauma (Cenderawasih Pos).

- Untuk memastikan situasi aman dan terkendali belasan personel Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz-2024 yang dipimpin Dansektor, Iptu Muhammad Kasim Lating, Kamis (18/01) melaksanakan patroli dan sambang di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Kegiatan patroli diawali dengan arahan dari Bripka Fotani Rahmat Zai kepada rekan-rekannya yang mengingatkan komitmen untuk menjaga keamanan di Kiwirok sembari mengingatkan personel agar menjaga keselamatan selama pelaksanaan tugas berlangsung. Setelah arahan tim kemudian berkeliling di sekitar Pasar Distrik Kiwirok. Pengamatan lapangan menyatakan bahwa situasi saat ini berjalan normal dan kondusif (Cenderawasih Pos).

22 Januari

- Kontak tembak antara TNI Polri dan KKB/TPNPB di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, masih berlangsung sejak Jumat (19/01) hingga Minggu (21/01) kemarin. Dalam baku tembak yang berlangsung selama tiga hari itu, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang terkena serpihan peluru. Mereka adalah anggota Brimob, Bripda Alfandi Steve Karamoy meninggal dunia akibat di tembak pada Jumat (19/01). Sementara warga sipil bernama Yusak Sondegau yang dikabarkan meninggal akibat tertembak pada Minggu (21/01). Sedang warga lainnya bernama Apriani Sani terkena serpihan peluru di bagian tangan kiri. Menurut salah satu satu warga yang namnya enggan dikorankan, akibat dari kontak tembak ini masyarakat yang berasal dari Desa Mamba, Sambili, Yokatapa, Waboagapa, Bilogai dan Kumpalagupa memilih untuk mengungsi

ke tempat yang aman. Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA) Demianus Magai Yogi mengaku jika serangan yang dilakukan kepada aparat sebagai bentuk penolakan mereka atas eksploitasi Blok Wabu yang berada di Intan Jaya serta penentuan nasib sendiri (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

- Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024 AKBP Bayu Suseni saat dikonfimasi membenarkan berdasarkan laporan yang diterima dari Polres Intan Jaya memang ada gangguan dari KKB yang mengakibatkan rumah dinas ASN Pemkab Intan Jaya ludes terbakar. Lanjut Kasatgas Humas, sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan adanya korban jiwa dari kejadian ini (Cenderawasi Pos).

23 Januari

- Kondisi Kabupaten Intan Jaya masih memanas. Ini disusul aparat gabungan TNI Polri berhasil menembak 3 anggota KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Minggu (21/01) lalu. Biasanya setelah penembakan ini akan ada aksi balasan lainnya yang patut diantisipasi. Tiga anggota KKB tersebut diyakini terlibat dalam penyerangan terhadap pos aparat keamanan sebelumnya. TNI Polri menyebut bahwa 3 anggota KKB yang ditembak aparat gabungan TNI Polri itu adalah Oni Kobogau, Jaringan Belau dan Agustia. Mereka bagian dari kelompok Yoswa Maisani yang dipimpin oleh Gusby Waker. Hanya belum diketahui apakah ketiganya tewas atau hanya terluka (Cenderawasih Pos).
- Status Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah dinyatakan siaga pasca kontak tembak yang menyebabkan satu anggota Brimob Bripda Alfandi Steve Karamoy, tewas tertembak pada Jumat (19/01) lalu. Komisi Nasional HAM mengingatkan aparat keamanan dalam melakukan operasi harus terukur dan memiliki indikator yang tepat. Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menjelaskan, indikator yang harus dipedomani dalam melakukan operasi penegakan hukum yakni, pertama orang yang disasar sudah diidentifikasi paling tidak nama dan ciri-cirinya. Kedua, orang tersebut sedang memegang

senjata yang bisa mengancam aparat yang sedang bertugas atau masyarakat sipil yang lain (Cenderawasih Pos).

24 Januari

- Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani menyatakan aparat gabungan TNI Polri, Minggu (21/01) menembak tiga terduga anggota TPNPB di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno menyatakan seorang warga sipil dan seorang personil Brimob (Yusak Sondegau dan Briptu Anumerta Alfando Steve Karamoy) yang meninggal dunia adalah akibat tembakan TPNPB. Keterangan berbeda disampaikan Komandan Operasi Umum West Papua Army (WPA), Gusby Wakerwa. Wakerkwa menyatakan bahwa TNI Polri yang menembak Yusak Sondegau (40). Menurut Wakerkwa Yusak Sondegau adalah warga sipil (Cenderawasih Pos).
- Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan Yusak Sondegau (40) yang meninggal dunia dalam kontak senjata antara TPNPB dan TNI Polri di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah merupakan warga sipil. Ramandey mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak TPNPB bahwa Yusak Sondegau bukan anggota mereka. Menurut Ramandey seseorang bisa dikatakan adalah anggota TPNPB apabila pengakuan mereka dan bukti petunjuk, misalnya memiliki senjata api (Koran Jubi).

25 Januari

Konflik di Intan Jaya yang terjadi sejak 19 Januari lalu hingga 23 Januari kemarin akhirnya dibedah oleh Kodam XVII Cenderawasih, Pangdam XVII Cenderawasi, Mayjen TNI Izak Pangemanan menyampaikan bahwa ada dua isu yang memancing KKB di Intan Jaya bereaksi dan melakukan serangan yang cukup intens. Yang pertama terkait isu yang menyebut bahwa dari pembangunan patung Tuhan Yesus nantinya diisi bom. Bom ini jika meledak maka bisa memusnahkan seluruh masyarakat di Intan Jaya. Lalu yang kedua berkaitan dengan

eksploitasi tambang di Blok Wabu. Pangdam menjelaskan bahwa isu tersebut tidak benar sebab sebelumnya pihak TNI juga membangun patung Salib di Gereja Antiokia, kemudian membangun Gereja di Mamba dan semua aman. Lalu soal Blok Wabu yang dikatakan hendak dieksploitasi, pihaknya sudah mengecek dan ternyata ini juga tidak benar (Cenderawasih Pos).

26-27 Januari

- Pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah perlu memikirkan solusi lain, untuk mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua. Pendekatan militer bukan satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik bersenjata di Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, yang bergejolak sejak 19 Januari lalu. Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia dan keamanan DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, banyak warga sipil, TNI Polri dan TPNPB OPM yang menjadi korban kekerasan bersenjata di Intan Jaya. *"Saya berpandangan, penyelesaian konflik bersenjata di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan tidak dengan kebijakan keamanan seperti saat ini*" (Koran Jubi).
- Kepolisian Daerah Papua maupun Kodam XVII/Cenderawasih belum merekomendasikan aktivitas penerbangan sipil ke Bandar Udara Bilogai di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Penerbangan sipil ke Intan Jaya terhenti sejak eskalasi konflik bersenjata di Intan Jaya pada 19 Januari 2024 lalu. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada Kamis (25/01). *"TNI Polri belum membolehkan aktivitas penerbangan membawa masyarakat Intan Jaya sampai situasi betul-betul kondusif dan dikendalikan aparat keamanan setempat,"* kata Fakhiri (Koran Jubi).

27 Januari

- Lembaga Bantuan Hukum Papua meminta TNI Polri dan TPNPB wajib menerapkan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1949, demi melindungi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata wilayah

tersebut. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay menyebut perlindungan terhadap HAM tetap berlaku dalam situasi konflik bersenjata sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang ikut serta Negara Republik Indonesia dalam seluruh Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. Emanuel meminta agar Kapolda Papua segera tuntaskan proses penyelidikan kasus penembakan Yusak Sondegau dan proses hukum pelakunya. Ketua Komnas HAM RI dan Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua harus segera membentuk tim investigasi untuk melakukan investigasi atas kasus penembakan Yusak Sondegau. PMI harus segera membangun posko pengungsian dan memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi akibat konflik bersenjata sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 (Cenderawasih Pos).

- Intensitas saling menyerang antara Satgas Damai Cartenz dengan KKB terus meningkat. Pasukan yang dipimpim Kombes Pol. Faizal Ramadhani kembali berhasil menembak seorang anggota KKB dalam perisitiwa baku tembak pada Selasa (23/01) pukul 16.27 WIT di Pos Tower Tigamajigi, Sugapa, Intan Jaya. Dalam baku tembak itu, seorang anggota KKB, Harisatu Nambagani berhasil dilumpuhkan. Di tempat yang terpisah, Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, TPNPB OPM mendesak Pemda Intan Jaya untuk mendorong agar pasukan TNI Polri ditarik dari Intan Jaya. Bila Pemda Intan Jaya tidak melakukan upaya tersebut, TPNPB akan menargetkan setiap penjabat Pemda Intan Jaya untuk dieksekusi (Cenderawasih Pos).
- Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku dengan terpaksa menghentikan sementara penyaluran BBM ke wilayaha Kabupaten Intan Jaya. Hal ini disebabkan karena memanasnya situasi yang terjadi di wilayah Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Petra Niaga Regional Papua Maluku, Edi Mangun mengatakan, pengiriman BBM

terakhir ke Kabupaten Intan Jaya pada 18 Januari 2021, sebelum terjadi penembakan (Cenderawasih Pos).

29-30 Januari

Keluarga korban meninggal dunia Yusak Sondegau pada Minggu (21/01) di Bilogai, Intan Jaya, Papua Tengah yang ditembak mati menegaskan, almarhum adalah seorang warga sipil. Hal itu ditegaskan Digy Sondegau, orang tua almahrum Yusak Sondegau sekaligus membantah pernyataan Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan pada Rabu (24/01). "*Yusak Sondegau adalah murni masyarakat sipil. Saat ini dia sebagai aparat kampung Buwisiga, distrik Homeya, Intan Jaya. Jadi apa yang disampaikan Pangdam itu pembohongan publik,"* kata Digy Sondegau kepada Jubi melalui selulernya, Jumat (26/01) (Koran Jubi).

30 Januari

Dandim 1705/Nabire Letkol Inf Doni Firmansah mengakui seorang prajurit dari Yonif 330/ TD yang sedang bertugas pengamanan di Kantor Bupati Intan Jaya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, Senin (29/01) tertembak saat kontak tembak dengan KKB. Saat pengamanan rapat Forkopimda Kabupaten Intan Jaya yang dipimpin Penjabat Bupati Intan Jaya, KKB melakukan penembakan hingga terjadi kontak tembak (Cenderawasih Pos).

01 Februari

Kodam XVII Cenderawasih kembali menegaskan bahwa kabar terkait penyerangan Pos TNI di Titigi, Intan Jaya dan menewaskan seorang anggotanya adalah kabar bohong. Yang terjadi adalah prajurit tersebut terkena recoil set atau terkena pantulan peluru saat KKB menembak pagar kantor Bupati Intan Jaya. Kelompok Kriminal Bersenjata dinyatakan masih gemar menyampaikan informasi bohong kepada publik. Ini termasuk perkembangan terakhir situasi di wilayah Intan Jaya yang mulai kondusif dan warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, tegas Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan (Cenderawasih Pos).

02 Februari

Polisi mengklaim situasi di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, mulai membaik pasca kontak tembak yang terjadi di daerah tersebut sejak Januari lalu. *"Situasi Sugapa, Kabupaten Intan Jaya mulai membaik. Masyarakat pun mulai beraktivas seperti biasa,"* ucap Kapolres Intan Jaya, AKBP Afrizal Asri, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (01/02). Kapolres mengaku jika setiap hari anggota rutin melaksanakan patroli dialogis ke pasar untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang beraktivitas. Sementara itu, disinggung terkait warga yang masih mengungsi di Intan Jaya, Kapolres menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi jika masih ada warga yang mengungsi (Cenderawasih Pos).

03 Februari

Empat orang pemuda yang sejak awal dicurigai gerak geriknya terpaksa diamankan oleh aparat keamanan TNI Polri. Selain menemukan minuman keras, aparat juga mendapati jika mereka membawa amunisi termasuk tas bercorak bintang kejora. Keempatnya yakni SN (21), DIA (21), EZ (22) dan TW. Mereka diamankan di Kampung Bilogai Distrik Sugapa, Intan Jaya pada Rabu (31/01) sekitar pukul 18.00 WIT. Ini Seperti yang disampaikan Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan bahwa keempatnya masih diperiksa untuk mengetahui asal muasal amunisi tersebut (Cenderawasih Pos).

05 Februari

Kelompok Kriminal Bersenjata membakar Puskesmas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. KKB pimpina Jacky Murib ini membakar Puskesmas saat aparat keamanan TNI Polri sedang melaksanakan patroli gabungan. Kejadian ini terjadi Sabtu (03/02) sekitar pukul 12.11 WIT. Kapolres Puncak, Kompol I Nyoman Punia, menyatakan bahwa sebelumnya, aparat menerima laporan bahwa Puskesmas Omukia di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, telah menjadi sasaran pembakaran oleh KKB wilayah Kepala Air. Aparat TNI Polri segera merespons dengan menuju ke Puskemas Omukia untuk melakukan pengecekan. Dan saat

itu terdengar suara termbakan dari belakang Puskesmas Omukia hingga terjadi kontak tembak antara personil TNI Polri dengan KKB Kepala Air. Kontak tembak ini mengakibatkan seorang anggota KKB, Warinus Murib tewas ditempat (Cenderawasih Pos).

07-08 Februari

- Kontak tembak antara TPNPB dan TNI Polri terjadi di Lapangan Terbang Baya Biru, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah. Dalam peristiwa itu, seorang polisi dan seorang warga sipil terluka. *"Kejadian tadi pagi sekitar pukul 06.50 Waktu Indonesia Timur (WIT). Polisi yang menjadi korban tembak bernama Aiptu Manurung, sementara warga sipil Benyamin Banua (53),"* kata Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo di Kota Jayapura, Selasa (06/02). Menurut Benny, baku tembak terjadi saat pesawat akan mendarat, yang mana pada saat itu aparat keamanan sedang melakukan penjagaan di sekitar Lapter dan ditembaki dari arah gunung (Koran Jubi dan Cenderawasih Pos).
- Wakil Sementara Kepala Penerangan Kodam XVII/ Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan mengatakan dua prajurit TNI yang tertembak di Jalan Siep Asso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (05/02) merupakan anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa Komando Rayon Militer atau Koramil 1715-06/Dekai. Hal itu dinyatakan Candra terkait penyerangan yang dilakukan oleh TPNPB di dekat Markas Koramil 1715-06/ Dekai. *"Benar terjadi penyerangan dan penembakan yang dilakukan TPNPB,"* kata Candra di Kota Jayapura, Selasa (06/02). Menurut Candra, ada tiga korban yang terluka. *"Mereka adalah warga sipil yang tertembak berinisial DN, dan dua prajurit TNI adalah Sertu RSA dan Praka SAL. Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 20.45 WP,"* jelasnya. Letkol Candra mengatakan ketiga korban penyerangan TPNPB saat ini sudah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Marthen Indey Kota Jayapura (Koran Jubi).

12-13 Februari

- Kepala Polda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengatakan kondisi keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah mulai kondusif pasca penembakan dan pembakaran sejumlah fasilitas pemerintah oleh kelompok TPNPB. *"Intan Jaya sudah mulai kondusif ya. Saya minta Kepolisian Resor Intan Jaya untuk perkuat sekaligus mempersiapkan pengamanan di sana,"* kata Fakhiri di Kota Jayapura, Jumat (09/02). Kapolda juga sudah komunikasi dengan Pejabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, untuk meminta Penjabat Bupati Intan Jaya Apolos Bagau turun langsung melakukan pendekatan ke masyarakat. Upaya itu diharapkan akan membuat pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 bisa berjalan aman, damai, dan lancar (Koran Jubi).
- Penerbangan menuju Bandar Udara Bilogai di Sugapa, Ibu kota Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah telah dibuka kembali setelah situasi keamanan di Intan Jaya dinilai kondusif. Sebelumnya, penerbangan menuju Bilogai itu ditutup karena eskalasi konflik bersenjata di Intan Jaya yang terjadi sejak 19 Januari 2024. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat (09/02) (Koran Jubi).

13 Februari

Proses hukum terhadap salah satu anggota KKB Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka hingga kemarin masih terus dilakukan. Yang terakhir adalah Pengadilan Negeri Kelas IIA Wamena, Kabupaten Jayawijaya akhirnya membacakan putusan atas semua perbuatan yang dilakukan Kopi Tua. Pengadilan menyatakan bahwa Kopi Tua terbukti secara sah melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana dan kejahatan dimuka umum. Ia pun dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Kasus ini mencuat pada tanggak 4 November 2022 dimana ketika itu Penihas Heluka terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Pratu Eka Johan Kaize di Perum Pemda (Cenderawasih Pos).

19 Februari

Aksi penembakan pesawat sipil yang dilakukan KKB berlanjut. Belum selesai pengungkapan kasus penembakan pesawat Asian One di Beoga, Puncak, kasus lain kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Yahukimo dimana sebuah pesawat Wings Air W 1646 ATR 700 PK WGT ditembak saat proses landing. Kejadian ini terjadi di Bandara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 17 Februari 2024. Dari informasi, aksi penembakan dilakukan dari arah Kali Brasa. Ini juga bukan kali pertama penembakan pesawat yang dilakukan dari arah Kali Brasa melainkan selama ini lokasi kali tersebut kerap digunakan untuk pelintasan KKB kemudian melakukan penembakan terhadap pesawat yang melintas. Korban dari serangan pesawat ini adalah Pratu Ongen R. Dori, anggota Kodim 1715 Yahukimo yang mengalami luka lecet pada leher sebelah kiri akibat serpihan kaca. Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani menyatakan bahwa pesawat terkena tembakan di sisi sebelah kiri yang menembus ke dalam badan pesawat. *"Pihak keamanan, termasuk personel Operasi Damai Cartenz-2024, Brimob Yon D, dan Polres Yahukimo, tengah melakukan penyisiran di sekitar area Kali Brasa ujung Bandara untuk menindak tegas KKB yang melakukan penembakan,"* tutur Ka Ops Damai Cartenz-2024 (Cenderawasih Pos).

23 Februari

Proses penyidikan terhadap anggota KKB atas nama Alenus Tabuni alias Kobuter, anak buah Goliath Tabuni, terus berlanjut. Tersangka sebelumnya berhasil diamankan oleh Satgas Ops Damai Cartenz-2024 pada Minggu 18 Februari 2024, di depan Puskesmas Distrik Ilaga Kabupaten Puncak. Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi Damai Cartenz-2024, AKBP. Bayu Suseno mengatakan, saat ini tersangka Alenus Tabuni alias Kobuter telah dipindahkan dari Ilaga Kabupaten Puncak ke Kabupaten Mimika, pada Kamis (22/02) (Cenderawasih Pos).

04 Maret

Jenazah Almarhum Nelon Sani, yang menjadi salah satu korban dari aksi kelompok kriminal bersenjata, Sabtu (02/03) akhirnya diterbangkan

ke Intan Jaya untuk dimakamkan. Sebelumnya korban sempat dirawat di Mimika. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo menyampaikan dari hasil laporan Polres Mimika bahwa sebelum diberangkatkan menuju Kabupaten Intan Jaya untuk jenazah telah menjalani serangkaian pemeriksaan medis di RSUD Kabupaten Mimika. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Nelon Sani mengalami luka tembak di bagian lengan kiri yang tembus ke perut (Cenderawasih Pos).

04-05 Maret

Aparat gabungan TNI Polri dengan TPNPB di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Jumat (01/03), terlibat baku tembak. Akibatnya seorang prajurit TNI Raider 330, Prada David, dan warga sipil bernama Nelon Sani (16), tertembak. *"Prada David terkena tembakan di bagian perut bagian samping tembus rompi tubuh depan. Sedangkan Nelon Sani (16) terkena tembakan pada lengan kiri tembus perut,"* kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, di Kota Jayapura, Sabtu (02/03). Kontak tembak terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, sekitar 130 meter dari Kantor Bupati Intan Jaya (Koran Jubi).

06-07 Maret

Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz, menangkap seorang anggota TPNPB wilayah Puncak bernama Jukius Tabuni (32), Sabtu (02/03). Tabuni adalah terduga perampasan senjata api milik anggota Pos Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Udara Bandara Aminggaru, Ilaga, pada 01 Februari 2024. Setelah merampas senjata api jenis SS1-V1 dan satu buah magazen berisi 20 butir peluru kaliber 5.56 mm milik Pos KP3 Udara Bandara Aminggaru, Ilaga, pelaku langsung melarikan diri ke Kampung Mundidok, Distrik Gome. Kampung Mundidok merupakan salah kampung basis TPNPB (Koran Jubi).

06 Maret

Setelah dilakukan penangkapan terhadap salah satu angota KKB bernama Jukius Tabuni, penyidik kepolisian langsung melakukan pendalaman dan mengecek dokumentasi catatan kriminal yang ada kaitannya antara Jukius dengan KKB. Hasilnya ternyata tidak meleset,

ia terlibat sejumlah kasus kriminal bersenjata bahkan yang belum lama ini terjadi. Jukius Tabuni ditangkap Satgas Ops Damai Cartenz-2024 di depan Kios Serba Murah, Kampung Kago Distrik Ilaga, Sabtu, 02 Maret 2024. *"Ia memiliki berbagai peran dalam aksi-aksi penyerangan yang dilakukan oleh KKB di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah,"* kata Ka Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol. Faizal Ramadhani, Senin (04/03) (Cenderawasih Pos).

20-21 Maret

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dibawa komando Lerimayu Enumbi berhasil merampas dua pistol dan menembak dua anggota TNI dari Satgas Elang di Kamoung Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Minggu (17/03). Sebby Sambo setelah di hubungi melalui layanan Whatsapp, Senin (18/03) mengatakan bahwa pihaknya telah menembak mati Sertu Ismunandar dan merampas dua pucuk pistol jenis sig sauer milik TNI Polri. Sambom mengatakan, penembakan di Puncak Jaya dilakukan oleh anggota TPNPB Lerimayu Enumbi dan Eli Telengge (Koran Jubi).

21 Maret

Setelah sebelumnya seorang prajurit TNI gugur di Puncak Jaya, kini dua anggota Polisi anggota pos Polisi Ndeotadi 99 Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai juga gugur usai diserang KKB. Kejadian itu terjadi pada Rabu (20/03) di Ndeotadi, Paniai. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, dua anggota Polri yakni Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit Sayuri tertembak dan gugur dalam tugas. Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani menjelaskan penyerangan terjadi saat personel sedang menjalankan pengamanan Hellypad 99 yang menyebabkan 2 personel tertembak dan 2 pucuk Senpi AK-47 dicuri (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

06 April

Kontak tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Operasi Damai Cartenz, Satgas Amole dan Satgas Nanggala dengan KKB di kawasan Kali Kabur, Mile 69 Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua

Tengah Kamis (04/04) kemarin. Konflik ini mengakibatkan dua KKB yakni Abubakar Kogoya dan Demianus Magay tewas. Kaops Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Ramadhani mengakui, saat kontak tembak dua KKB tertembak. *"Tim gabungan juga mengamankan barang bukti berupa senjata api laras pendek jenis sig sauer beserta 1 magasen dan amunisinya,"* jelas Kombes Pol. Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya. (Cenderawasih Pos).

08 April

Salah seorang korban dari warga sipil itu ialah Ronal Ronaldus Duwitau, 13 tahun. Dia tewas dalam kontak tembak antara Satuan Brimob Polri dengan kelompok TPNPB di Yokatapa, Distrik Sugapa pada Senin (08/04). Saat pertempuran itu, Ronal bersama Nepina Duwitau berlindung di rumah mereka untuk mengamankan diri. Namun, sebuah peluru mengenai kepala Ronal hingga dia tewas. Peluru lain juga mengenai telapak tangan kiri Nepina. Bocah berusia 6 tahun tersebut pun kehilangan jempolnya akibat tembakan (https://jubi.id/polhukam/2024/warga-tuntut-pengosongan-pos-militer-di-sugapa-intan-jaya/).

09 April

TPNPB terlibat baku tembak dengan aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Senin (08/04) kemarin. Konflik bersenjata ini mengakibatkan dua anak SD, Nepina Duwitau (6 tahun) dalam kondisi koma dan Nando Duwitau (12 tahun) meninggal Dunia. Kapolres Intan Jaya, AKBP Afrizal Asri membenarkan peristiwa baku tembak tersebut. Menurutnya, kontak tembak terjadi Senin (09/04) sekira pukul 14.00 WIT, dimana kejadian tersebut bermula ketika TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, Pimpinan Undius Kogoya melakukan penyerangan dan penembakan ke arah pos Brimob Satgas Operasi Damai Cartenz di samping Bank Papua, pada Senin (08/04). Sementara itu Juru bicara TPNPB, Sebby Sembom juga mengakui adanya kontak senjata di Kabupaten Intan Jaya antara kelompok TPNPB dan Aparat keamanan (TNI Polri) (Cenderawasih Pos).

10 April

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak pernah tinggal diam dengan kejadian belakangan ini, baik kasus rudapaksa terhadap dua perempuan yang dilakukan sekelompok pria, bersamaan dengan aksi unjuk rasa Anti Milterisme di kawasan Jayanti, Nabire, Jumat, 05 April 2024 maupun tertembaknya dua anak, Nando Duwitau (13) dan Nopina Duwitau (6), saat kontak tembak aparat keamanan dengan kelompok bersenjata TPNPB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin (08/04). Ribka Haluk di Kota Jayapura, Selasa (09/04) mengatakan dua peristiwa itu mendapat perhatian serius dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah dengan mengunjungi para korban, memberikan bantuan hingga menanggung seluruh biaya rumah sakit bagi Nopina Duwitau. *"Jadi tidak benar jika ada tanggapan bahwa Pemprov Papua Tengah melakukan pembiaran terhadap dua kasus itu,"* katanya. Menurut Haluk pasca kejadian ia bersama Forkopimda merespon cepat dengan mengunjungi korban rudapaksa yang dirawat di rumah sakit, menjenguk satu korban anak kecil yang terkena lemparan batu dalam aksi unjuk rasa berujung ricuh tersebut (https://jubi.id/polhukam/2024/ribka-haluk-pemerintah-tidak-diam-dengan-kejadian-di-papua-tengah/).

12 April

Perubahan istilah dari KKB atau KST (Kelompok Kriminal Bersenjata atau Kelompok Separatis Teroris) kembali menjadi OPM oleh TNI dikhawatirkan makin memicu kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua. Perubahan istilah itu juga dinilai turut memberi pengakuan kepada OPM sebagai entitas politik dan membuka jalan penyelesaian persoalan di Papua. Pandangan itu disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah pada Jumat (12/04). *"Kami berharap penggunaan istilah tidak makin memicu situasi di Tanah Papua makin memburuk,"* kata Anis kepada Jubi via pesan WhatsApp. Pada April 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Moh Mahfud MD mengumumkan bahwa Pemerintah RI menetapkan TPNPB OPM sebagai organisasi teroris. Berselang tiga tahun, pada 10 April 2024,

Panglima TNI Agus Subiyanto mengumumkan TNI mengembalikan istilah penyebutan KKB dan KST sebagai Organisasi Papua Merdeka (https://jubi.id/polhukam/2024/perubahan-istilah-kkb-jadi-opm-dikhawatirkan-picu-kekerasan-dan-konflik-bersenjata/).

15 April

- Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 Wilayah Yahukimo berhasil melumpuhkan 2 anggota KKB kelompok Kopi Tua Heluka dan kelompok Yotam Bugiangge pada Kamis (11/04) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Ops Damai Cartenz 2024 Kombes Pol. Faizal Ramadhani saat dikofirmasi mengatakan, KKB yang pertama berhasil dilumpuhkan aparat adalah Afrika Heluka, anggota KKB aktif kelompok Yahukimo pimpinan Kopi Tua Heluka. Afrika diketahui kerap menebar terror di Yahukimo bahkan ia disinyalir terlibat dalam pembunuhan dua warga sipil belum lama ini (Cenderawasih Pos).
- Pasukan TPNPB Kodap XIII Kegepanipo Paniai mempublish aksi pembunuhan Daramil 1703-04 Aradide, Paniai Letda Inf Oktovianis Sogalrey. Komando Daerah Pertahanan XIII Kegepa Nipouda Paniai di bawah Pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, Mayor, Osea Satu Boma bersama pasukannya menyerang korban di Jl Trans Paniai Intan Jaya. Dari video yang dikirim diketahui aksi ini terjadi Kamis (11/04) sekitar pukul 17.00 WIT dimana korban melintas menggunakan motor kemudian ditembak oleh tiga KKB (Cenderawasih Pos).
- Legislator Papua, Lauranzus Kadepa mengingatkan aparat keamanan mengutamakan keselamatan warga sipil saat mengejar pelaku penembakan yang menewaskan Danramil Aradide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Letda Inf Oktovianus Sogalrey pada Kamis (11/04). Anggota komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia dan keamanan DPR Papua itu mengatakan, sudah menjadi tugas aparat keamanan melakukan penegakan hukum dan mengejar pelaku. Akan tetapi, dalam upaya penegakan hukum itu keselamatan warga sipil mesti diperhatikan. Jangan sampai upaya penegakan

hukum yang dilakukan aparat keamanan berimbas terhadap warga sipil di sekitar wilayah kejadian, yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu (https://jubi.id/polhukam/2024/pengejaran-penembak-danramil-aradide-mesti-utamakan-keselamatan-warga-sipil/).

17 April

Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas terhadap OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan *CoFounder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)* Khairul Fahmi. Penentuan sikap itu akan menjadi dasar TNI/Polri untuk melakukan operasi besar dalam menumpas OPM. "*Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya,"* kata Fahmi di Jakarta, Selasa (16/04) kemarin. Dikatakan pula oleh Fahmi bahwa kesatuan sikap harus ditunjukkan mulai dari dukungan politik yang digulirkan legislatif (Cenderawasih Pos).

22 April

Kelompok separatis teroris (KST) yang oleh TNI kini disebut sebagai OPM terus menebar teror di wilayah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Kali ini, menyerang pos TNI di Kampung Paro, Distrik Kenyam. Dalam kontak tembak dengan Komando Operasi TNI Habema (Kops Habema) tersebut, dua anggota OPM terluka. Informasi itu disampaikan TNI melalui keterangan resmi yang diterima Jawa Pos, Sabtu (20/04). *"Menindaklanjuti penyerangan tersebut, Koops Habema melaksanakan penindakan terhadap OPM. Dua orang anggota OPM tertembak, namun berhasil melarikan diri,"* imbuhnya (Cenderawasih Pos).

26 April

Salah satu anggota OPM bernama Setam Same yang pernah melakukan penyerangan terhadap Pos Koramil Kisor Tahun 2021 memilih menyerahkan diri. Ini dilakukan pada Rabu (24/04) di Kampung Kisor Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya. Penyerahan diri Setam Same sebagai DPO kasus penyerangan Pos Ramil Kisor Tahun 2021 berdasarkan LP Nomor: LP/157/IX/2021/ RES Sorsel

tanggal 2 September 2021. Penyerangan Posramil Kisor tersebut dilakukan oleh OPM Kelompok Goliath Tabuni oleh sekitar 50 orang yang telah mengakibatkan 4 orang personel TNI-AD gugur (Cenderawasih Pos).

02 Mei

- Pasukan TPNPB Komando Wilayah Pertahanan VIII Intan Jaya menyatakan telah menyerang pos polisi pada hari Selasa (30/04) dan melakukan kontak senjata dengan TNI Yonif 209 serta Polri. Dalam kontak senjata ini TPNPB Kodap VIII Intan Jaya mengklaim telah menembak mati seorang anggota intelijen. Kontak tembak ini terjadi pada pukul 07.30 WIT. *"Dalam hal ini Panglima Kodap VIII Intan Jaya Brigjen Undius Kogeya dan pasukannya bertanggungjawab atas serangan tersebut,"* kata Jubir TPNPB, Sebby Sembom, Rabu (01/05). Mereka menuntut agar TNI Polri segera meninggalkan Intan Jaya. *"TNI Polri segera kosongkan pemukiman warga sipil agar saat terjadi baku tembak tidak menimbulkan korban jiwa dari warga sipil,"* kata Sebby. Pernyataan ini dibantah Kasatgas Humas Damai Cartenz, AKBP Bayu Suseno (Cenderawasih Pos).
- Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom dalam siaran pers yang diterima Jubi pada Jumat (02/05) menyebutkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Panglima Komando Wilayah Pertahanan VIII Intan Jaya Brigadier General Undius Kogoya dan pasukannya, mereka mengklaim telah melakukan penembakan terhadap Mobil Patroli TNI Polri dan berhasil menembak empat aparat keamanan Indonesia. Sambom juga menyebutkan pihaknya telah membakar bangunan Sekolah Dasar di Kampung Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, karena bangunan sekolah itu digunakan oleh militer dan polisi Indonesia, dan juga anggota TNI menjadi guru di sekolah tersebut. *"TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya Brigjen Undius Kogoya bertanggung jawab atas tewasnya empat anggota TNI Polri beserta satu mobil belakang kosong,"* katanya (https://jubi.id/polhukam/2024/tpnpb-bakar-gedung-sd-di-kampung-pogapa-klaim-tembak-4-prajurit-tni/).

03 Mei

- Kepala Penerangan Kodam XVII/ Cenderawasih Letnan Kolonel Inf Chandra Kurniawan mengatakan anggota OPM menyerang dan menembaki prajurit Satgas Yonif 527/BY yang sedang berpatroli di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Penyerangan terhadap prajurit Yonif 527/ BY yang sedang berpatroli itu terjadi pada Rabu (01/05), namun tidak ada prajurit yang terluka. *"Sesaat setelah anggota OPM melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak,"* kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua. Ia menjelaskan insiden penyerangan itu bermula saat mobil patroli kewilayahan yang ditumpangi prajurit Satgas Yonif 527/BY melintas di pertigaan kampung Bibida, tiba-tiba ditembaki anggota OPM dan selanjutnya terjadi kontak tembak. Patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM (Cenderawasih Pos).
- Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri menilai bahwa ada upaya yang dilakukan KKB untuk terus melakukan kekacauan di Intan Jaya. Ini bisa dilihat dari rangkaian aksi mulai dari menembak warga sipil kemudian membakar bangunan sekolah dan berulang kali melakukan kontak tembak. Di sini aparat memang tidak merespon aktif melainkan menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan tindakan tegas dan terukur. Hanya Kapolda menyayangkan karena KKB justru merusak fasilitas umum maupun mengorbankan masyarakat sipil yang tidak berdosa. Iapun meminta jika KKB ingin beradu tembak sebaiknya jangan di dalam kota karena nyawa masyarakat sipil menjadi sangat rawan. Kapolda menegaskan untuk berhadapan dengan aparat di lokasi yang bebas dari warga sipil. *"Untuk Intan Jaya kemarin malam kami sudah rapatkan dan saat ini tim sedang mempersipakn helikopter untuk ke Intan Jaya guna mengantisipasi jika eskalasi meningkat*" (Cenderawasih Pos).

04 Mei

Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan untuk mengendalikan situasi di Intan Jaya Polda telah mengirimkan pasukan Brimob untuk melakukan penegakan hukum. Dipertegas bahwa pasukan yang didatangkan ini tak lagi sekedar memberikan pengamanan melainkan penegakan hukum yang artinya para pelaku yang terus menebar teror akan dikejar. *"Hingga Kamis kemarin masih ada gangguan tembakan dan kami akan segera dorong perbantuan dan Jumat ini kami berharap ada yang sudah landing perkuatan untuk melakukan penindakan. Yang diturunkan dari Satgas Damai Cartenz dan dari TNI. Ini untuk penegakan hukum,"* kata Kapolda kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (03/05) (Cenderawasih Pos).

06 Mei

- Pasca aparat keamanan gabungan TNI Polri merebut Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya dari OPM, proses evakuasi jenazah Alexsander Parapak yang tewas ditembak OPM akhirnya berhasil dilakukan ke Timika. Evakuasi dilakukan Sabtu, (04/05). Sebelumnya pada tanggal 30 April 2024 yang lalu, OPM pimpinan Keni Tipagau melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeyo dan mengakibatkan seorang remaja bernama Alexsander Parapak meninggal dunia. Proses evakuasi jenazah diakui sempat terhambat karena Homeyo cukup jauh dari Intan Jaya jika ditempuh lewat jalur darat (Cenderawasih Pos).
- Aksi KKB belakangan ini mulai aneh-aneh. Selain membakar sekolah ada juga tindakan lain yang meresahkan. KKB disebut oleh pihak kepolisian telah melakukan perampasan barang elektronik milik beberapa warga jemaat yang sedang menjalankan ibadah. KKB ini merupakan kelompok dari wilayah Distrik Borme, Kabupaten Pegunungan Bintang dan kejadian tersebut terjadi Minggu (05/05) sekira pukul 11.00 WIT di Pegunungan Bintang. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan saat jemaat sedang melaksanakan ibadah Minggu pagi, datang empat orang KKB dengan membawa satu pucuk senjata

api, dan melakukan pengancaman kemudian merampas barang elektronik milik jemaat yang sedang beribadah (Cenderawasih Pos).

10 Mei

Personel Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dampingi tim Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Nduga melimpahkan berkas salah satu anggota KKB bernama Epson Nirigi ke Kejari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Selasa (07/05). Kasat Reskrim Polres Nduga, Iptu Jaya Bida Kedeng dalam keterangannya menjelaskan, pelimpahan tersangka dilakukan setelah berkas penyidikan dinyatakan P21 atau lengkap oleh Jaksa. *"Sebelumnya kami periksakan dulu kesehatan tersangkanya sebelum dilakukan tahap dua dan setelah semua aman dan lengkap akhirnya kemarin (07/05) kami limpahkan ke kejaksaan,"* kata Iptu Jaya Bida Kedeng dalam rilisnya Rabu (08/05). Setelah tahap dua, kini Epson tinggal menunggu waktu untuk selanjutnya diajukan dalam sidang di pengadilan. Sementara itu Kronologi operasi Damai Cartenz Kombes Pol Faizal Ramadhani menyebutkan, Epson Nirigi merupakan anggota aktif KKB dari Kodap III Ndugama dan merupakan anak buah dari Egianus Kogoya yang terlibat dalam sejumlah aksi kriminal hingga diterbitkannya, Laporan Polisi dan DPO dari Polres Nduga. *"Penangkapan dilakukan di Hotel Lavela In, jalan Kalimutu, Kota Mimika, saat yang bersangkutan sedang mengikuti rapat Rekapitulasi suara Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah,"* ucap Ka Ops (Cenderawasih Pos).

11 Mei

- Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengaku mendapat laporan dari Kodap VIII Intan Jaya bahwa aparat TNI dan Polri telah melakukan penyerangan menggunakan helicopter dari udara pada tanggal 04-05 Mei 2024. Sebby Sambom, Jubir TPNPB dalam pernyataanya mengatakan, penyerangan TNI dan Polri itu dilakuka berkaitan dengan penyerangan pihak TPNPB Kodap VIII di kampong Pogapa distrik Homeo Kabupaten Intan Jaya pada 30 Maret hingga 5 Mei 2024. *"Penyerangan menggunakan helicopter itu dilakukan dalam misi pengejaran terhadap pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, akibat dari*

penyerangan kami terhadap TNI-Polri di kampung Pogapa, distrik Homeo, Kabupaten Intan sejak 30 Maret hingga 5 Mei 2024 yang mengakibatkan satu intel tertembak," jelas Sebby pada 10 Mei 2024 (https://suarapapua.com/2024/05/11/tpnpb-intan-jaya-mengaku-mendapat-serangan-udara-aparat-tni-dan-polri/).

- Setelah satu bulan jadi buronan, terduga pelaku penembak Danramil 1703-4/Aradide, Lettu (Anumerta) Oktovianus Sogalrey berhasil ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz di Paniai, Sabtu (11/05). Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Humas Operasi Damai Cartenz 2024 AKBP Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan terduga berinisial AN (30 tahun) sempat membawa kabur ponsel milik korban. *"Pada Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 10.40 WIT, Satgas Operasi Damai Cartenz telah berhasil mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Almarhum Danramil 1703-4/Aradide, Lettu (Anm.) Oktovianus Sogalrey yang tertangkap tengah membawa kabur telepon genggam milik korban,"* kata AKBP Bayu, Sabtu (11/05). AKBP Bayu menjelaskan, identitas yang ditangkap berinisial AN, 30 tahun. Ia tercatat sebagai warga Kampung Widimeida, Kabupaten Paniai. Ia berjenis kelamin laki-laki, lahir di Widimeida, 6 Juli 1991. Sejumlah barang bukti, kata AKBP Bayu, telah disita Satgas Damai Cartenz. Salah satunya ponsel dengan 'sim card' milik korban. Aparat juga menyita sebilah senjata tajam dan buku rekening bank dari terduga pelaku. *"Adapun sejumlah barang bukti yang diamankan di antaranya satu buah telepon genggam dengan nomor kartu SIM milik almarhum Danramil Aradide Lettu (Anumerta) Oktovianus Sogalrey, 1 buah parang, 1 set kunci L, 1 buah buku rekening BRI, dan 1 buah tas samping berwarna biru-hitam,"* ujar AKBP Bayu (https://jubi.id/polhukam/2024/satgas-damai-cartenz-tangkap-an-terduga-pembunuh-danramil-aradide-paniai/).

13 Mei

Pelaku penembakan Danramil Aradide, Letda Oktovianus Sogalrey akhirnya berhasil ditangkap. Pelaku berinisial AN ditangkap pada Sabtu (11/05) di Paniai dan langsung dilakukan penahanan dan pemeriksaan. Jika dilihat dari waktu kejadian dan waktu penangkapan maka genap

1 bulan pelaku menjadi buron. Kasatgas Humas Damain Cartenz, AKBP Bayu Suseno menyampaikan bahwa AN ditangkap oleh Satgas Damai Cartenz pada pukul 10.40 WIT. Saat ditangkap AN masih membawa HP dan nomor kontak milik korban, Letda Oktovianus. *"Pelaku kelahiran 6 Juli 1991, K di Kampung Widimeida, Kabupaten Panial dan barang bukti yang diamankan yakni 1 buah telepon genggam dengan nomor kartu SIM milik almarhum Danramil Aradide, Lettu (Anm) Oktovianus Sogalrey, 1 buah parang, 1 set kunci L, 1 buah buku rekening BRI dan 1 buah tas samping berwarna biru hitam dan 1 buah HP dengan sim card atas nama Oktovianus Sorgaley,"* beber Bayu. Bayu Suseno menyampaikan bahwa pelaku saat ini sedang dilakukan pendalaman lebih lanjut di Mako Polres Paniai (Cenderawasih Pos).

17 Mei

Kelompok Kriminal Bersenjata dari kelompok Undius Kogoya pimpinan Lewis Kogoya dan Enos Tipagau membunuh seorang warga sipil bernama Boki Ugipa masyarakat Kampung Engganengga. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, saat ditemui di ruang kerjanya membenarkan kejadian tersebut. Kabid Humas mengatakan kejadian berawal dari informasi seorang warga Kampung Pogapa yang melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polres Intan Jaya, pada Selasa (14/05). Setelah ditelusuri, korban Boki Ugipa ditembak oleh KKB di sekitar Kaki Bukit Kualagi pada Rabu (01/05) sekitar pukul 19.30 WIT (Cenderawasih Pos).

21 Mei

- Satgas Operasi Damai Cartenz kembali berhasil menangkap salah satu anggota KKB wilayah Puncak. Pria tersebut bernama Lupa Waker yang dianggap salah satu anggota yang cukup sadis. Lupa Waker alias Lupa Walo ditangkap di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Minggu (19/05). Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol. Faizal Ramadhani mengatakan, Lupa Waker merupakan anggota KKB aktif wilayah Puncak dan yang bersangkutan termasuk dalam DPO (Cenderawasih Pos).

- Satuan Tugas Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti kembali kontak tembak dengan kelompok OPM di hutan Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Komandan Satgas Yonif 133/ YS Letkol Inf Andhika Ganessakti mengatakan tidak ada korban jiwa akibat dari kontak senjata itu, namun pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang miliki OPM (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Pasca kontak tembak antara KKB dengan aparat keamanan di Paniai, Polisi menemukan senjata api genggam jenis FN di lokasi pembakaran beberapa kios di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Senjata ini diyakini milik Masyarakat Kogoya yang tewas saat kontak tembak pada Rabu (22/05). Kapolres Paniai, AKBP Abdus Syukur Felani mengungkapkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh salah seorang warga yang juga merupakan pemilik kios yang dibakar oleh KKB. *"Barang bukti berupa senpi jenis FN ditemukan oleh saksi saat sedang mengecek sisa-sisa bangunan kios miliknya. Saksi segera melaporkan penemuan tersebut kepada aparat kepolisian yang berada di lokasi,"* jelas Kapolres Abdus Syukur Felani, Jumat (24/05) (Cenderawasih Pos).

27 Mei

Majelis Rakyat Papua Tengah berharap adanya penyelesaian menyeluruh terkait konflik politik yang terjadi di tanah Papua. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari korban dari semua pihak. Pernyataan itu disampaikan Beny Wenior Pakage, Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah menanggapi kontak tembak antara aparat TNI-Polri dan TPNPB OPM yang terjadi di Madi Paniai pada, Selasa (21/05). Dalam kontak tembak itu, satu anggota TPNPB tertembak dan meninggal dunia, dan sejumlah kios dan gedung sekolah terbakar. Sejauh ini belum diketahui pelaku pembakaran kios dan gedung sekolah tersebut (https://suarapapua.com/2024/05/27/mrp-papua-tengah-berharap-adanya-penyelesaian-konflik-papua-secara-menyeluruh/).

31 Mei

Dua aksi beruntun dilakukan TPNPB di dua kabupaten berbeda pada waktu berbeda. Di Intan Jaya, pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya membakar satu alat berat milik PT Gunung Selatan yang tengah digunakan untuk membangun jalan di kampung Galunggama, distrik Sugapa. Sebby Sambom, juru bicara Komnas TPNPB OPM, mengutip laporan dari lapangan, menjelaskan, tindakan pembakaran alat berat yakni Excavator tersebut dilakukan pasukannya pada hari Selasa (28/05). *"Berdasarkan laporan yang kami terima, dalam aksi pembakaran alat berat itu pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya dan TNI-Polri terlibat baku tembak selama satu jam. Tetapi tidak ada korban jiwa dalam baku tembak itu,"* kata Sebby melalui siaran persnya, Jumat (31/05) (https://suarapapua.com/2024/05/31/satu-excavator-dibakar-satu-intel-ditembak-mati/).

12 Juni

Pihak TPNPB dari Kodap VIII Intan Jaya mengaku bertanggung jawab atas penembakan seorang warga yang diketahui bernama Rusli (40) yang berprofesi sebagai supir taksi. Kejadian itu terjadi di Kampung Kopo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah pada, Selasa (11/06). Belakangan diketahui bahwa mobil yang dikendarai supir tersebut terbakar dan supirnya dalam keadaan tersungkur di dalam mobil. Pangkodap VIII Intan Jaya, Brigjen Undius Kogoya mengakui bertanggung jawab atas penembakan seorang supir taksi, yang menurut Undinus adalah anggota TNI yang menyamar sebagai supir taksi di kampung Kopo, Paniai. *"Hal itu kami lakukan sebagai bentuk pembalasan terhadap satu anggota pasukan elit TPNPB Kodap VIII Intan Jaya yang tertembak pada tanggal 21 Mei 2024 di Paniai,"* kata Undinus pada, Selasa (11/06) (https://suarapapua.com/2024/06/12/tpnpb-mengaku-bertanggung-jawab-dalam-aksi-kontak-tembak-di-paniai-dan-yahukimo/).

21 Juni

Kelompok bersenjata TPNPB Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya disebut Polri sebagai dalang dalam penembakan warga sipil di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Selasa (11/06). Akibat aksi

kriminal itu, aparat keamanan gabungan dari Satgas Damai Cartenz, Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua melakukan operasi penegakan hukum yang tegas dan terukur sejak 14 Juni 2024 sampai dengan 17 Juni 2024, dan berhasil menduduki markas TPNPB pimpinan Undius Kogoya, di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai. *"Kelompok Undius Kogoya dikenal sering melakukan aksi kekerasan terhadap warga sipil di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai. Kelompok ini sering kali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan, termasuk juga melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum sehingga merugikan masyarakat setempat,"* kata Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno di Kota Jayapura, Senin (17/06). Berdasarkan data, 21 kejahatan yang dilakukan kelompok Undius Kogoya terdiri dari 11 aksi penembakan, 2 aksi penyerangan, 4 aksi kontak tembak, dan 4 aksi pembakaran. "*Aksi-aksi itu mengakibatkan 7 orang tewas di antaranya warga sipil dan 2 anggota TNI, kemudian 6 orang mengalami luka-luka. Terakhir, TPNPB pimpinan Undius Kogoya melakukan penembakan dan pembakaran terhadap warga sipil di Paniai,"* ujarnya (https://jubi.id/polhukam/2024/satgas-damai-cartens-beberkan-21-kejahatan-tpnpb-undius-kogoya/).

06 Juli

Manajemen Markas Pusat Komando TPNPB OPM mengeluarkan pernyataan tertulis kepada pers pada Kamis (04/07) yang menyebutkan telah melakukan kontak tembak dengan militer Indonesia atau TNI selama dua hari di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Jumat-Sabtu (28-29/06). Juru bicara TPNPB Sebby Sambom dalam siaran pers itu menyebutkan pada kontak tembak hari kedua, Sabtu (29/06) sekitar pukul 3 sore yang berlangsung selama 50 menit. *"Mengakibatkan gugurnya satu prajurit TPNPB atas nama Teten Murib,"* katanya. Sebby Sambom menjelaskan telah menerima laporan resmi dari Panglima Daerah TPNPB-OPM Kodap XVIII Ilaga, Puncak, Papua, Brigadir Jenderal Penny Murib bahwa sejak Kamis, 27 Juni 2024 terjadi pengedropan pasukan militer Indonesia dari Timika ke Ilaga dengan senjata, bom, dan logistik perang. Pasukan itu memasuki Kabupaten Puncak untuk menuju ke Distrik Oneri (https://jubi.

id/polhukam/2024/kontak-tembak-dengan-tni-tpnpb-umumkan-seorang-prajuritnya-meninggal/).

08 Juli

Satuan Tugas Damai Cartenz-2024 telah menembak hingga tewas Basoka Lawiya, anggota TPNPB OPM di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Minggu (07/07). Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Polisi Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi Jubi.id pada Senin (28/07) membenarkan adanya penembakan terhadap seorang anggota TPNPB di Kampung Topo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire pada pukul 17.55 Waktu Papua. *"Iya benar, Basoka Lawipa dilumpuhkan aparat karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap aparat gabungan Satgas Damai Cartenz, Polres Nabire, dan Polsek Topo,"* kata Faizal menjawab Jubi.id melalui pesan WhatsApp. Menurut Brigjen Faizal, Lawiya merupakan anggota kelompok TPNPB Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya pimpinan Undius Kogoya. Kelompok Undius Kogoya, katanya, belakangan melakukan aksi kriminal di Kabupaten Paniai dan Intan Jaya (https://jubi.id/polhukam/2024/satgas-damai-cartenz-tembak-hingga-tewas-seorang-anggota-tpnpb-opm/).

09 Juli

Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom menyatakan TPNPB Komando Daerah Pertahanan Sinak Brigadir Jenderal Militer Murib dan Panglima Kodap Mayor Kalenak Murib bertanggung jawab atas penembakan pesawat sipil yang sedang melakukan pengedropan pasukan dan logistik militer Indonesia dari Nabire di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak pada Senin (08/07) pukul 12.40 Waktu Papua. Sambom mengatakan Manajemen Markas Pusat komnas TPNPB telah menerima laporan resmi dari Mayor Kelenak Murib, Komandan Operasi TPNPB Kodap Sinak, Kabupaten Puncak pada pukul 04.00 sore. *"Kami telah melakukan penembakan terhadap sebuah pesawat sipil pada Senin, 8 Juli 2024 tepat jam 12.40 siang di Bandar Udara Sinak, karena pesawat tersebut sedang melakukan pengedropan pasukan dan logistik militer Indonesia dari Nabire ke wilayah operasi TPNPB di Sinak,"* katanya melalui siaran pers yang diterima Jubi.id pada Senin (08/07) sore

(https://jubi.id/polhukam/2024/pesawat-ditembak-di-sinak-mrp-minta-aparat-tidak-gunakan-pesawat-sipil/).

17 Juli

- Dilaporkan pada, Selasa 16 Juli 2024 pukul 20.00 WIT malam terjadi penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah. Diduga pelaku penembakan adalah aparat TNI dari Satgas 753 di Mulia, Puncak Jaya. Mereka yang tertembak adalah Tonda Wanimbo, kepala kampung Kalome Distrik Mepogolok, Pemerintah Murib, kepala kampung Dokkome dan Dominus Enumbi, warga sipil. Selain itu dilaporkan sejumlah warga lainnya yang mengalami luka tembak yang belum diidentifikasi identitasnya (https://suarapapua.com/2024/07/17/breaking-news-tiga-warga-sipil-tertembak-mati-di-mulia/).
- Pihak ULMWP mengutuk tindakan perikemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui aparatus sipil dan TNI Polri di tanah Papua sejak 61 tahun pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP mengatakan, peryataan itu disampaikan pihaknya berkaitan dengan Mukahdima UUD Indonesia yang menyebutkan 'penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadialan". *"Tetapi faktanya Pemerintah Indonesia mempratekan praktek penjajahan dan tindakan tidak perikemanusiaan dan keadilan terhadap orang Melanesia di West Papua,"* kata Markus Haluk dalam pernyataannya kepada Suara Papua, Rabu (17/07) (https://suarapapua.com/2024/07/17/ulmwp-kutuk-tindakan-tidak-berperikemanusiaan-negara-di-west-papua/).
- Gustaf Kawer, Direktur Perhimpunan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, mengatakan, dengan adanya penembakan tiga warga sipil di Mulia, kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada 16 Juli 2024, menunjukkan adanya sikap penghinaan terhadap masyarakat Papua di Puncak Jaya. *"Dengan adanya situasi penembakan yang terjadi lagi, seolah-olah masyarakat sipil di Puncak Jaya adalah binatang buruan yang situasinya memprihatinkan. Peristiwa seperti ini terjadi berulang-ulang tanpa penyelesaian. Kita baru saja dikejutkan oleh*

video viral kekerasan TNI dari Yonif 300/Braja Wijaya Kodam Siliwangi terhadap 3 masyarakat sipil, yang mana salah satunya disiksa di dalam drum, yang terjadi awal tahun ini," ujar Kawer dalam pernyataannya kepada Suara Papua, Rabu (17/07). Menurutnya, perulangan kekerasan terhadap masyarakat sipil di Puncak Jaya dan daerah-daerah konflik di Tanah Papua disebabkan karena minimnya penegakan HAM dan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan (TNI/Polri).

- Aktivis HAM, Yan Christian Warinussy menjadi korban penembakan OTK di Manokwari, Papua Barat, Rabu (17/07). Dari informasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, diketahui penembakan itu terjadi usai Yan keluar dari bank. *"Kejadian bermula ketika Yan Christian Warinussy keluar dari Bank Mandiri, tiba-tiba ada tembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Pelaku mengendarai mobil Avanza berwarna hitam dan berhasil melarikan diri,"* tulis koalisi dikutip Jumat (19/07) (https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kronologi-aktivis-papua-yan-warinussy-ditembak-usai-keluar-dari-bank?page=all).

23 Juli

- Masyarakat adat dari Dewan Adat Papua atau DAP Wilayah Domberai dan Kepala Suku Meyah di Manokwari meminta MRP Provinsi Papua Barat membentuk Tim Pansus. Tim ini untuk mengungkap kasus penembakan yang marak terjadi di Manokwari, Papua Barat, akhir-akhir ini. Dalam kurun waktu sepekan ini, terjadi dua kasus penembakan di Kota Manokwari. Salah satu korban yakni Advokat Senior Yan Christian Warinussy SH, pada Rabu (17/07). Sementara yang terbaru, seorang ibu rumah tangga (IRT) ditembak di bagian dada pada Senin (22/07) pagi, di Kampung Dobut, Distrik Manokwari Selatan. *"Kami mendukung kepolisian agar segera menangkap pelaku penembakan terhadap Advokat Senior Yan Christian Warinussy,"* kata Musa Mandacan, Kepala Sub Suku Besar Meyah di Manokwari, Senin (22/07) (https://jubi.id/tanah-papua/2024/marak-penembakan-mrp-papua-barat-diminta-bentuk-pansus/).

- Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Tanah Papua, pada 22-24 Juli 2024, dianggap tidak berguna, karena masih banyak perempuan dan anak yang sedang mengungsi. Kunjungan Jokowi ke-19 kali ini dilakukan untuk merayakan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40. Kepala Departemen Perempuan dan Anak United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Iche Morip mengatakan, kunjungan Jokowi adalah upaya pencitraan di mata internasional dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui operasi-operasi militer di Tanah Papua. Kekerasan negara telah berlangsung lama sejak 1962-2024, yang mengakibatkan ribuan juta jiwa orang asli Papua terbunuh dan mengungsi di berbagai tempat di tanah Papua. Di era 10 tahun kepemimpinannya, kata dia, Jokowi tidak memberikan rasa aman dan damai bagi orang asli Papua, bahkan Jokowi tidak memiliki visi dan road map, untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di tanah Papua. *"Malahan terus memaksakan pemekaran provinsi, kota dan kabupaten di tanah Papua, serta melakukan pendropan militer besar-besaran di wilayah konflik,"* kata Morip seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Jubi di Jayapura, Papua, Selasa (23/07). Menurut dia, konflik bersenjata antara militer Indonesia dan TPNPB yang menewaskan warga sipil tidak dapat diselesaikan oleh Jokowi. Dampak yang memprihatinkan adalah ribuan jiwa pengungsi di tanah Papua tanpa akses kemanusiaan dari organisasi HAM nasional dan internasional, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan melakukan investigasi independen di tanah Papua.

25 Juli

Keamanan dan ketertiban umum di kota Manokwari, Papua Barat, semakin terganggu dengan insiden penembakan dari OTK. Peristiwa yang menimpa advokat senior Yan Christian Warinussy memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Mananwir Paul Finsen Mayor, anggota DPD RI mendesak Kapolda Papua Barat untuk segera mengumumkan identitas pelaku penembakan terhadap Yan Christian Warinussy, pembela HAM di Tanah Papua. *"Kami meminta Kapolda Papua Barat untuk segera mengumumkan kepada publik nama pelaku yang diduga melakukan percobaan*

pembunuhan berencana itu. Situasi di Manokwari semakin tidak kondusif dan pengumuman pelaku dapat menenangkan masyarakat kita," ujar Paul melalui keterangan pers diterima suarapapua.com, Selasa (23/07). Mananwir Paul menyatakan, penundaan pengumuman identitas pelaku bisa memicu masalah baru dan merusak citra kepolisian daerah. Yan Christian Warinussy ditembak oleh OTK pada 17 Juli 2024 (https://suarapapua.com/2024/07/25/kapolda-papua-barat-didesak-segera-ungkap-pelaku-penembakan-advokat-senior-papua/).

01 Agustus

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM Kodap XVI mengklaim menembak mati dua aparat militer Indonesia dan membakar sebuah truk pada 31 Juli 2024 di Kampung Massi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Serangan itu dilakukan atas pendropan pasukan dan logistik militer Indonesia di Tanah Papua dan Yahukimo. Pernyataan itu disampaikan Sebby Sambom, juru bicara TPNPB dari Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM, Kamis 1 Agustus 2024. *"Manajemen markas pusat Komnas TPNPB OPM telah menerima laporan resmi dari Komandan Operasi TPNPB OPM Batalyon Yamue, Dejang Heluka pada Kamis 1 Agustus 2024 tepat jam 01.00 malam melalui telepon bahwa pasukan TPNPB OPM Kodap XVI Yahukimo dibawah pimpinan Dejang Heluka telah menembak mati dua anggota militer Indonesia dan membakar sebuah mobil truk di kabupaten Yahukimo saat melakukan operasi,"* kata Sebby Sambom dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara Papua, Kamis (01/08). Kata Sebby, TPNPB Kodap XVI Yahukimo dibawah komando Brigjend Elkius Kobak bertanggungjawab atas penembakan itu. *"Atas kejadian pada 31 Juli 2024 itu, komandan Batalyon Yamue dan Panglima TPNPB OPM Kodap XVI Yahukimo beserta jajarannya siap bertanggungjawab,"* ujarnya (https://suarapapua.com/2024/08/01/tpnpb-yahukimo-klaim-tembak-mati-dua-anggota-militer-indonesia/).
- Pihak TPNPB OPM melakukan serangan terhadap pos militer Indonesia di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Mereka mengklaim serangan ini mengakibatkan satu prajurit TNI

tewas, satu luka-luka, dan kendaraan militer berlapis baja mengalami kerusakan. Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB OPM mengeluarkan siaran pers yang menyatakan bahwa Enos Tipagau, Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya dari Batalyon Angin Bula, melaporkan kejadian tersebut melalui telepon pada Rabu, 31 Juli 2024, pukul 20.30 WIT. Dalam laporan tersebut, Tipagau mengakui bahwa serangan dilakukan pada pukul 13.00 WIT dan TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. *"TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya siap bertanggung jawab atas penyerangan terhadap aparat militer Indonesia yang sedang melakukan tugas pengamanan negara di Pos Militer Kampung Titigi,"* tegas Enos Tipagau dalam laporannya yang disampaikan melalui Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sembom kepada Jubi melalui siaran pers (https://jubi.id/rilis-pers/2024/tpnpb-opm-serang-pos-militer-indonesia-di-intan-jaya-seorang-prajurit-tni-diklaim-tewas-dan-kendaraan-militer-rusak/).

- Pada Rabu (31/06) terjadi kasus pembacokan yang dilakukan OTK yang mengakibatkan korban tewas. Korban bernama Abdul Muzakir tewas usai mengalami sejumlah luka bacok. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.20 WIT di ruas jalan Kampung Massi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dijelaskan ketika itu sekira Pukul 12.20 WIT terdengar bunyi tembakan sebanyak 4 kali mengarah pada alat berat exsavator dan langsung dibalas personel pengamanan jalan yang memang sedang berjaga. Dan tak jauh dari lokasi terdengar tembakan lagi dimana saat itu korban hendak turun dari truknya (Cenderawasih Pos).
- Manajeman Markas Pusat Komnas TPNPB OPM menyatakan telah melakukan penyerangan ke salah satu pos TNI dan mengklaim berhasil menewaskan salah satu prajurit. Tak hanya itu, satu kendaraan lapis baja yang dimiliki juga ditembus peluru. Aksi ini disampaikan oleh Enos Tipagau, Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya dari Batalyon Angin Bula melalui via telepon kepada Jubir TPNPB, Sebby Sembom. "*TPNPB Kodap VIII Intan Jaya*

siap bertanggung jawab atas penyerangan terhadap aparat militer (TNI) yang sedang melakukan tugas pengamanan negara di Pos Militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya," kata Sebby, Rabu malam (Cenderawasih Pos).

02 Agustus

Perkembangan kasus tewasnya seorang sopir bernama Abdul Muzakir yang diduga dibunuh oleh KKB hingga Kamis (01/08) kemarin masih terus diselidiki. Polisi menduga jika pelaku adalah KKB pimpinan Elkius Kobak. Pasalnya Elkius selama ini dikatakan meski diam, namun sesekali ia kerap muncul dan menebar terror. *"Dugaan kami ke situ, sebab ia (Elkius) selama ini memang tidak muncul tapi kalau muncul biasa langsung buat gangguan,"* beber Kapolres Yahukimo, Heru. Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan dari informasi yang diperoleh, insiden ini terjadi ketika korban Abdul Muzakir, yang merupakan supir truk, sedang dalam perjalanan menuju Kampung Masi untuk mengambil kayu (Cenderawasih Pos).

05-06 Agustus

- Pilot Selandia Baru Glen Malcolm Conning (50) dilaporkan dibunuh oleh KKB di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (05/08). Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, Conning dibunuh saat helikopter milik PT Intan Angkasa Service yang dikendarainya mendarat di Distrik Alama (https://www.kompas.com/tren/read/2024/08/06/121500365/kronologi-pilot-selandia-baru-dibunuh-kkb-di-mimika-helikopter-ikut-dibakar0.
- Seorang pilot berkebangsaan New Zealand bernama Mr Glen Malcolm Conning dikabarkan tewas usai dianiaya KKB. Kelompok Kriminal Bersenjata melakukan pembunuhan terhadap pilot Helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service., Mr. Glen Malcolm Conning (50) berkebangsaan Selandia Baru dan membakar Helikopter Jenis IWN, MD.500 ER PK, di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (05/08). Sementara, enam penumpang yang sebelumnya dikabarkan hilang dan tidak diketahui kabarnya

akhirnya ditemukan selamat. Kabar menimpa pilot pesawat heli ini, pertama kali diketahui oleh rekan sesama pilot, Geoffrey Foster yang terbang dengan tujuan yang sama. Saksi melihat dari atas ketinggian bahwa helikopter yang dipiloti Glen Malcolm Conning sedang disandera oleh orang tak dikenal. Ia melihat Helikopter Glen telah mendarat dengan posisi baling-baling berhenti (Cenderawasih Pos).

07 Agustus

Jenazah pilot helikopter milik PT. Intan Angkasa Air Service, Mr. Glen Malcolm Conning (50) akhirnya berhasil dievakuasi dari Distrik Alama ke Timika, Selasa (06/08) kemarin. Pantauan Cenderawasih Pos, Tim evakuasi yang terdiri dari aparat gabungan TNI Polri yang mengevakuasi jenazah pilot tersebut saat tiba di Landasan Udara (Lanud) Yohanes Kapiyau Timika sekitar pukul 13.14 WIT. Jenazah Glen Malcolm Conning selanjutnya dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk dilakukan penanganan medis di ruang jenazah. Setibanya di ruang jenazah, Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha mengatakan bahwa jenazah korban akan menjalani visum terlebih dahulu (Cenderawasih Pos).

08 Agustus

Komnas HAM akan lakukan investigasi terkait pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Bahkan, Komnas HAM Papua menduga pembunuhan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu direncanakan. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian serius Komnas HAM. *"Karena Maret 2024, Komnas HAM sudah memberi peringatan agar perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa orang asing, pilotnya tidak boleh terbang ke wilayah-wilayah rawan konflik pasca adanya penyanderaan,"* kata Kepala Komnas HAM Frits Ramandey dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (07/08) (Cenderawasih Pos).

14 Agustus

- Pada Selasa, (13/08) sekitar pukul 14.55 WIT di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, seorang pekerja proyek bernama Gustam

Kailimang tewas ditembak. Polisi mengklaim pelaku penembakan adalah KKB pimpinan Lewis Kogoya. *"Bunyi tembakan terdengar dari arah Kampung Wandoga setelah personil Pasasgat menerbangkan drone untuk memantau area. Dari pantauan drone tersebut, terlihat satu korban tergeletak di area bawah Sungai Wabu,"* kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam pres rilisnya, Selasa malam (Cenderawasih Pos).

- Komisi Nasional TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya, mengklaim tembak mati seorang yang diduga intelijen TNI Polri. Penembakan tersebut diinformasikan kepada Jubi melalui siaran pers pada Rabu (14/08). Pihak TPNPB Kodap VIII Intan Jaya siap bertanggung jawab atas penembakan terhadap terduga militer Indonesia, yang bekerja sebagai pekerja proyek jalan di Intan Jaya, hingga meninggal dunia pada Selasa (13/08), sekitar pukul 11.05 siang, waktu setempat (https://jubi.id/rilis-pers/2024/tpnpb-klaim-tembak-mati-terduga-intel-di-intan-jaya/).

15 Agustus

- Kepolisian Resor Mimika bersama Satgas Ops Damai Cartenz telah menetapkan Perinta Kola Lokbere Alias Malas Lokbere Alias Malas Gwijangge yang tergabung dalam KKB Pimpinan Perek Jelas Kogoya sebagai pelaku pembunuhan Pilot PT Intan Angkasa Air Service, Glen Malcolm Conning di Distrik Alama, Mimika, Papua Tengah pada Senin 05 Agustus 2024 lalu dalam DPO (Cenderawasih Pos).
- Hasil penyisiran yang dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz yang diterjukan ke Distrik Alama telah melakukan olah TKP selama 2 hari di lokasi kejadian tempat dimana sang pilot Glen ditemukan. Tidak hanya dilakukan olah TKP, Satgas Ops Damai Cartenz juga melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap KKB di Distrik Alama dengan ditemukan sebuah rumah kosong yang berada di ujung bandara. Diduga rumah kosong itu yang digunakan KKB Perintakola Lokbere Alias Malas Lokbere Alias Malas Gwijangge untuk tinggal di Distrik Alama selama 1 minggu terakhir. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar bahwa rumah kosong tersebut merupakan bekas

koperasi yang sudah tidak digunakan lagi. Hal ini diperkuat dengan temuan di dinding rumah terdapat gambar-gambar senjata, gambar bendera papua merdeka dan dokumen KKB lainnya. Berdasarkan hasil olah TKP tersebut, maka Satgas Ops Damai Cartenz 2024 menduga kuat bahwa penyanderaan dan penembakan yang mengakibatkan pilot Glen meninggal dunia dilakukan oleh Perek Jelas Kogoya (Cenderawasih Pos).

19 Agustus

Tim Gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 berhasil menangkap dan mengamankan salah satu DPO KKB Nduga, Rife Kerebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, di Kabupaten Nduga, Papua Tengah Sabtu, (17/08). Penangkapan ini terjadi pada pukul 04.30 WIT. Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan tersebut. Brigjen Pol. Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa Rife Kerebea adalah anggota KKB Nduga yang dipimpin oleh Egianus Kogoya dan terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024, Kombes Pol. Bayu Suseno, menambahkan bahwa penangkapan ini dilakukan berdasarkan laporan polisi LP/ B/47/X/2023/ SPKT/Polres Yahukimo/Polda Papua, pada 16 Oktober 2023 lalu, tentang pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali EI, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo serta DPO tertera Nomor: DPO/30/ XI/2023/ Reskrim, tanggal 08 November 2023 (Cenderawasih Pos).

22 Agustus

Yahukimo bergejolak menyusul dua warga sipil diduga ditembak aparat, di sekitar Pasar Lama tepatnya depan Mako Polres Yahukimo, Jalan Jend Sudirman Km 1 Distrik Dekai, Selasa (20/08), sekira pukul 21.00 WIT. Dari data yang diterima Cenderawasih Pos, akibat penembakan itu Tobias Silak (22) tewas dengan luka tembak di bagian kepala dan pelipis kiri. Sementara Naro Nabla (17) mengalami luka tembak pada lengan sebelah kanan serta paha sebelah kanan dan dalam kondisi sadar. Tobias kesehariannya bekerja di Bawaslu Yahukimo sebagai staf pendukung.

Keluarga Korban, David Sabolim saat dikonfirmasi Cenderawasih menerangkan sebelum penembakan itu, Tobias sempat masuk kerja di Kantor Bawaslu dan pulang ke rumah sekira pukul 14.25 WIT. Bahkan, sempat bermain bola hingga kemudian pada pukul 17.50 WIT almarhum mencari informasi terkait penerimaan CPNS di penyedia voucher sekitar Dekai. *"Almarhum pulang usai mencari informasi terkait penerimaan CPNS tahun 2024, namun setiba di depan Pos Brimob ia tertembak,"* ucap David saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos. Usai penembakan itu lanjut David, almarhum langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Namun nyawanya tidak tertolong lagi. David mengatakan kematian Tobias diketahui pihak keluarga sekira pukul 21.10 WIT, setelah pihak rumah sakit tak bisa lagi menyelamatkan nyawanya (Cenderawasih Pos).

23 Agustus

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengecam penembakan dua warga sipil yang diduga dilakukan anggota Brimob di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal itu disampaikan Koordinator Sub Komisi Pemajuan Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Anis Hidayah di Jakarta pada Jumat (23/08).

"Komnas HAM mengecam penembakan yang diduga dilakukan aparat [kepolisian] yang mengakibatkan warga meninggal dunia," kata Anis. Pada Selasa (20/08), dua warga sipil menjadi korban penembakan diduga dilakukan anggota Brimob di Yahukimo. Satu korban bernama Tobias Silak meninggal dunia karena tembakan itu. Seorang korban lainnya, Naro Dapla mengalami luka-luka. Anis mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Komnas HAM mendorong semua pihak untuk menjaga situasi HAM di Papua agar tetap kondusif (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-kecam-penembakan-warga-sipil-di-yahukimo/).

11 September

Dua anak atas nama Melianus Baye dan Beni Elopere, yang dijadikan tersangka kasus penembakan pesawat Wings Air ATR 71 seri 600 PK

WJT pada 17 Februari 2024 di Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, dinyatakan bebas. Mereka telah ditangkap dan ditahan di rumah tahanan Polres Yahukimo selama satu minggu. Kemudian dipindahkan ke Polda Papua kurang lebih 4 bulan, kemudian dipindahkan ke Lapas Wamena. Terdaftar di Register Pengadilan Negeri Wamena dengan Nomor Perkara 41/Pid.Sus/2024/PN Wmn atas Nama Melianus Baye dan Nomor Perkara 42/Pid.Sus/2024/PN Wmn atas nama Beni Elopere dengan sidang Perdana tanggal 25 Juni 2024 agenda Dakwaan. Dalam dakwaan identitas para terdakwa tercantum 19 tahun sedangkan tanggal, bulan dan tahun tidak diketahui. *"Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kami para terdakwa menyatakan keberatan dan akan mengajukan keberatan kami atau eksepsi dan kami meminta untuk diperiksakan umur para terdakwa yang terindikasi masih anak di bawah umur dengan usia 16 tahun,"* demikian dikutip dari siaran pers Penasehat Hukum Mersi Waromi kepada Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (11/09) (https://jubi.id/rilis-pers/2024/dua-tersangka-penembakan-pesawat-wings-air-di-yahukimo-bebas/).

12 September

Peristiwa penembakan terjadi lagi di Kabupaten Lanny Jaya pada Selasa (10/09) malam, mengakibatkan salah satu anggota Polres Lanny Jaya, Brigpol Johan Herik Sibarani (32) meninggal dunia dan satu warga sipil, Adi Fallo (20) mengalami luka tembak dan sekarang masih rawat di RSUD Tiom. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo, mengatakan kondisi saat ini di Kampung Dukom, Distrik Tiom dan Kampung Dugime Distrik Niname Kabupaten Lanny Jaya sudah kondusif dan aktifitas masyarakat sudah kembali normal. Hal itu disampaikan Kombes Benny kepada wartawan di Mapolda Papua lama, Kota Jayapura Rabu (11/09) sore. Dugaan sementara pelaku penembakan tersebut kata Kombes Benny adalah anggota KKB. Namun ia tidak menjelaskan lebih detail terkait dengan asal kelompok tersebut dikarenakan masih dalam proses penyelidikan (Cenderawasih Pos).

13 September

Komnas HAM RI Perwakilan Papua mencatat sejak Januari hingga September 2024 ada 69 peristiwa kekerasan yang terjadi di Tanah Papua. Menurut Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, peristiwa ini mengakibatkan 92 orang korban dimana 40 orang mengalami luka luka dan 52 orang meninggal dunia. Pihaknya mengaku prihatin mengingat hingga kini kekerasan bersenjata masih terus terjadi dan berpeluang jumlah korban akan terus bertambah. Apalagi proses penegakan hukum juga belum sesuai harapan. Frits menyebut belum diselesaikannya kasus tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala, misalnya jika pelakunya adalah Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) maka itu belum bisa diamankan meski masuk dalam DPO. Lalu jika pelakunya adalah oknum aparat yang menembak maka hal tersebut juga sulit diselesaikan (Cenderawasih Pos).

19 September

Dua hari disandera, Karyawan PT. Jayakarta Jasa Bakti bernama Dika akhirnya dibebaskan pada Rabu (18/09) pagi. Sebelumnya yang bersangkutan dilaporkan disandera oleh OPM kelompok Sinak, Senin (16/09) malam. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito mengatakan dalam pembebasan Dika melibatkan masyarakat setempat (Cenderawasih Pos).

20 September

Keluarga Tobias Silak, korban meninggal akibat tembakan yang diduga dilakukan anggota Brimob Polres Yahukimo pada Selasa, 20 Agustus 2024 malam, meminta Komnas HAM RI segera melakukan investigasi mendalam atas peristiwa itu. David Sobolim yang mewakili keluarga Tobias Silak dan korban lainnya yang luka berat, Naro Dapla mengatakan pihaknya sudah mendatangi dan beraudiensi dengan Komnas HAM Perwakilan Papua pada 11 September 2024 dan Polda Papua pada 18 September 2024 agar segera menginvestigasi dan mengusut kasus tersebut. *"Sekarang kami tunggu tim Komnas HAM datang dari Jakarta untuk turun ke Yahukimo melakukan investigasi dan mengukap pelakunya,"* kata Sobolim kepada Jubi via WhatsApp, Kamis (19/9/2024). Sobolim

menyampaikan, keluarga dan kerabat kedua korban telah membentuk 'Front Justice for Tobias Silak'. Front Justice for Tobias Silak telah menyampaikan pengaduan dan meminta pendampingan hukum kepada LBH Papua di Jayapura. *"Kami memilih LBH Papua untuk mendampingi keluarga korban, Front Justice for Tobias Silak, dan simpatisan untuk mencari keadilan atas pembunuhan keluarga kami,"* katanya. Sobolim mengatakan keluarga korban mengingatkan bahwa Tobias Silak adalah warga sipil dan bekerja sebagai staf di Bawaslu (Badan Pengawas Pemlu) Kabupaten Yahukimo (https://jubi.id/polhukam/2024/keluarga-korban-tobias-silak-minta-komnas-ham-segera-lakukan-investigasi/).

27 September

Orang tak dikenal melakukan penembakan kepada personel Polsek Ilu, Polres Puncak Jaya saat melintas kali Pagargom Distik Kolome Kabupaten Puncak Jaya, Kamis (26/09) sekitar pukul 16.10 WIT. Kabid Humas Polda Papua Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi membenarkan kejadian tersebut.*"Pada kejadian tersebut, satu anggota kami, Personel Polsek Ilu Briptu Kiki Supriyadi, gugur dalam tugas,"* jelas Kombes Benny dalam siaran persnya, Kamis (26/09) (Cenderawasih Pos).

30 September

Pihak Komnas HAM masih melakukan analisis atas hasil penyelidikan kasus penembakan terhadap dua warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal itu disampaikan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Pusat, Uli Parulian Sihombing di Jakarta, pada Senin (30/09). *"Komnas HAM [masih] mengumpulkan, menganalisis fakta-fakta [hasil penyelidikan atas kasus penembakan tersebut]. [Kami akan] merekomendasikan [hasil penyelidikan] kepada para pihak,"* ujarnya. Pada 20 Agustus 2024, dua warga sipil menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan anggota Brimob di Yahukimo. Satu korban bernama Tobias Silak meninggal dunia karena tembakan itu. Seorang korban lainnya, Naro Dapla mengalami luka-luka. Uli mengatakan Komnas HAM melalui Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua dan Tim Kerja

Pemantauan telah melaksanakan penyelidikan kasus penembakan itu pada 23-26 September 2024. Penyelidikan itu dilakukan untuk membuat terang peristiwa dan menemukan ada tidaknya pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut (https://jubi.id/polhukam/2024/komnas-ham-analisis-hasil-penyelidikan-kasus-penembakan-2-warga-sipil-di-yahukimo/).

01 Oktober

Ancaman TPNPB yang disampaikan Jubirnya, Sebby Sembom bahwa memastikan akan kembali melakukan penyanderaan langsung direspon Satgas Operasi Damai Cartenz 2024. Pihak Satgas Operasi Damai Cartenz menyatakan justru akan melakukan pengejaran terhadap KKB yang selama ini menebar teror. Pernyataan itu disampaikan Kaops Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani melalui Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 KBP Bayu Suseno. Kata Bayu patroli mobile akan lebih intens dilakukan di setiap tempat-tempat umum terutama bandara. "*Kami tingkatkan kegiatan patroli dan pengamanan bandara perintis dan pengejaran dipastikan masih dilakukan,"* jelas Bayu. Kombes Bayu mengatakan hal itu dikarenakan adanya ancaman baru dari TPNPB pasca bebasnya pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens pada, Sabtu (21/09) lalu (Cenderawasih Pos).

09 Oktober

Pada Senin (07/10) kembali seorang prajurit TNI Pratu Ilham Jaya gugur usai terjadi aksi kontak tembak. Kontak tembak ini terjadi antara Satgas 509 Pos Titigi dengan TPNPB OPM wilayah Titigi, Intan Jaya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.15 WIT. Peristiwa ini berawal saat Satgas tindak Brimob Operasi Damai Cartenz (ODC) 2024 melaporkan lewat HT yang menyatakan personel Satgas 509 yang berada di Pos Kampung Titigi tengah melakukan kontak tembak. *"Kemudian pada pukul 11.17 WIT, termonitor lagi lewat HT personel satgas tindak Bri mob ODC bahwa ada satu korban yang tertembak. "Personel mendapat laporan HT jika ada anggota Pratu Ilham Jaya yang tertembak,"* jelas Kapen kogab Wilayah III, Kol Inf Winaryo dalam siaran persnya, Selasa (08/10) (Cenderawasih Pos).

12 Oktober

Pada Jumat (04/10) di wilayah Paro, Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, terjadi kontak tembak antara tim gabungan TNI-Polri dengan KKB yang menyebabkan salah seorang anggota TNI Yonif 411/ Pandawa, Serda Muhammad Bagus Heriawan (26) gugur. Tak sampai disitu, selang tiga hari setelah penembakan terhadap Serda Bagus, KKB kembali berulah, pada Senin (07/10) dengan melakukan aksi kontak tembak antara Satgas 509 Pos Titigi yang mengakibatkan salah seorang anggota TNI dari Satgas 509 Pos Titigi, Pratu Ilham Jaya dinyatakan gugur (Cenderawasih Pos).

17 Oktober

Keluarga korban penembakan, Yan Cristian Warinussy, menggelar aksi bisu di lokasi penembakan di Jalan Yos Sudarso Sanggeng, Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/10), menuntut keadilan dan pengungkapan pelaku oleh pihak kepolisian.

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes setelah tiga bulan berlalu tanpa kejelasan atas kasus tersebut. Yan Warinussy dan istrinya, Merry Wambrauw, melakukan aksi damai dengan memegang poster yang menuliskan tuntutan mereka. Poster-poster tersebut menyatakan bahwa pelaku penembakan adalah individu profesional dan sulit dijangkau oleh hukum. Satu poster berbunyi, *"Oknum Pelaku Pasti Negara, Profesional terlatih dan sulit disentuh oleh Hukum – Polisi,"* sementara poster lainnya bertuliskan, *"Sudah 3 Bulan 17 Juli 2024 hingga 17 Oktober 2024."* Metusalak Awom, seorang advokat di Manokwari, mengkritik aparat penegak hukum yang dinilainya tidak responsif terhadap kasus ini. Ia menyatakan bahwa hukum di Manokwari seolah tidak berlaku adil, khususnya dalam penanganan kasus penembakan terhadap rekannya, Yan Warinussy (https://jubi.id/domberai/2024/aksi-bisu-yan-warinussy-dan-istri-tuntut-polisi-ungkap-pelaku-penembakan/).

19 Oktober

Proses penyidikan terhadap pimpinan West Papua Army (WPA) wilayah Paniai nampaknya tak main-main. Jemmy Magai Yogi pada Rabu

(16/10) dipindahkan ke Polda Papua. Ini untuk memaksimalkan proses penyidikan termasuk memastikan tak ada gangguan yang terjadi saat dilakukan penyidikan. Jemmy yang merupakan Kepala Staf Angkatan Darat West Papua Army (WPA) Divisi II Pemka IV Paniai tiba di Markas Polda Papua, pada Jumat (18/10) sekitar pukul 14.30 WIT. Kedatangannya dikawal ketat oleh Satgas Ops Damai Cartenz 2024 setelah sebelumnya diterbangkan dari Timika. Seperti diketahui sebelumnya penangkapan KKB Jemmy Magai Yogi dilakukan pada Rabu, (16/10) lalu di depan Kantor DPRD Kabupaten Dogiyai, Papua Pegunungan (Cenderawasih Pos).

21 Oktober

- Satgas Ops Damai Cartenz 2024 berhasil menangkap satu jaringan KKB Enes Dapla bersama dua rekannya di Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu (19/10). Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, membenarkan penangkapan tersebut. Dalam keterangannya, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa Enes Dapla dan dua rekanya ditangkap bersama uang rampasan yang diduga berasal dari kepala kampung. Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi. Hanya disini kepala kampung tidak ikut terlibat mengingat uang tersebut adalah hasil rampasan (Cenderawasih Pos).
- Satgas Ops Damai Cartenz 2024, berhasil menangkap seorang pria bernama Maais Herlik Imburi di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (19/10). Diketahui Maais Herlik Imburi merupakan pelaku penyuplai amunisi kepada pimpinan TPNPB OPM. Penangkapan Maais Herlik Imburi ini dilakukan di Nabire dan dibenarkan oleh Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani. Brigjen Faizal, menjelaskan bahwa Maais ditangkap di Nabire berdasarkan hasil pengembangan pemeriksaan penyidik Satgas Ops Damai Cartenz-2024 terhadap Pimpinan KKB (Cenderawasih Pos).

23 Oktober

Kasus penembakan warga sipil kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya. Penembakan yang dilakukan oleh OTK itu terjadi di Distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Senin (21/10) yang mengakibatkan salah seorang warga sipil tewas tertembak. Polres Puncak Jaya telah melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi yang mengetahui terjadinya penembakan tersebut guna mengidentifikasi pelaku dan motif kekerasan menggunakan senjata api yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, saat dikonfirmasi telah membenarkan peristiwa penembakan tersebut. *"Pukul 18.50 WIT keponakan korban yang bernama Noval (17) datang melapor ke Mako Polres Puncak Jaya bahwa telah terjadi penembakan di dalam kios kompleks Kuburan 7, Kamp. Pagaleme, Distrik Pagaleme Kabupaten Puncak Jaya,"* ucap Kabid Humas Polda Papua melalui siaran persnya, Selasa (22/10). Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menjelaskan bahwa saat sebelum kejadian tersebut, ada dua (2) orang berdiri di depan Kios dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi menyuruh korban untuk menutup kios, tetapi tidak dihiraukan oleh korban. *"Pada saat saksi sedang menunduk untuk mengambil uang di dalam karton guna dihitung, tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api sebanyak 3 kali yang mana saat itu langsung mengenai korban Jamaluddin Alias Dg Eppe dan korban langsung terkapar disamping kursi dengan wajah yang sudah berlumuran darah,"* jelas saksi yang disampaikan Kapolres (Cenderawasih Pos).

25 Oktober

Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 menangkap Mozes Rumbrapuk (34), tersangka pemasok senjata dan amunisi untuk TPNPB OPM di Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan, penangkapan terhadap pemasok senjata itu, dilakukan di Jalan Merdeka, Karang Mulya, Nabire, Jumat (25/10), sekitar pukul 08.58 WIT. Rumbrapuk ditangkap sebagai bagian dari pengembangan kasus, yang sebelumnya melibatkan pelaku lain, yakni

Otto Burdam (https://jubi.id/rilis-pers/2024/pemasok-senjata-tpnpb-di-nabire-ditangkap/).

04 November

Seorang pekerja kayu bernama Stevan Wakari (48) di Kali Wabu, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ditembak oleh KKB pimpinan Enos Tipagau. Ada dua korban namun saat korban pertama ditembak, satu korban lainnya Jeki Maramis (28) spontan melarikan diri menelusuri hutan dan bersembunyi. Meski demikian ia mengalami luka pada bagian telapak kaki kiri dan luka lecet pada bagian punggung dan tangan kiri. Untungnya ia selamat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengutip keterangan saksi korban Jeki yang menyebut bahwa ketika itu dirinya sedang mengasah rantai mesin gergaji tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata api dua kali yang mengenai korban Stevan Wakari. Saat itu jarak pelaku dengan korban kurang lebih 5 meter. Melihat korban tertembak, saksi langsung melarikan diri ke hutan dan bersembunyi (Cenderawasih Pos).

07 November

Seorang pemuda berinisia MR (34) yang diduga jaringan KKB, diamankan di Nabire, Papua Tengah oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Penangkapan dilakukan di Jalan Merdeka, Karang Mulya, Nabire pada Jumat, (25/10) sekiar pukul 08.58 WIT. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengungkapkan bahwa MR ditangkap setelah timnya melakukan pengembangan kasus yang sebelumnya melibatkan pelaku lain yakni OB (Cenderawasih Pos).

22 November

Pada Kamis (21/11), dua orang tukang ojek meregang nyawa ditembak OTK. Aparat keamanan menduga jika pelaku adalah KKB atau anggota OPM pimpinan Kelenak Murib. Dijelaskan bahwa kejadian tewasnya dua tukang ojek ini terjadi Kamis (21/11) sekitar pukul 16.30 WIT di Kampung Weni, Distrik Mage'abume, Kabupaten Puncak. Terungkap setelah ada warga mendatangi Polsek Sinak dan melapor jika dirinya mendapati informasi dari tetangganya yang berteriak setelah

mengetahui ada dua sosok tukang ojek yang diduga dari Mulia tergeletak tak bernyawa. Saksi juga mendengar warga menyebut jika ada KKB yang menembak warga usai mengantar dua pemuda ke Puncak. Ketika itu saksi menyebut jika korban sementara masih berada di TKP dan hingga kini dan belum dievakuasi. Hanya saja pihak aparat keamanan belum mengantongi identas dua korban tersebut dan pelaku juga masih diselidiki (Cenderawasih Pos).

28 November

- Dua orang personel TNI AU dilaporkan tertembak dalam insiden penembakan helikopter di Distrik Hoya, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (26/11) pagi. Berdasarkan data yang diperoleh Cenderawasih Pos, kedua personel TNI AU yang tertembak masing-masing berinisial Letda Pnb MF dan Pratu W. Kapolres Mimika AKBP I Komang Budhiarta membenarkan penembakan tersebut kepada wartawan saat ditemui di Hotel Swiss-Bell Timika. Kapolres mengatakan, informasi terkait penembakan tersebut didapatkan dari otoritas keamanan yang ada di Distrik Jila. "*Ada gangguan sedikit tapi ini masih baru informasi awal, belum tahu, kita harus cek dulu. Jadi heli dari Penerbad ditembak oleh OTK,*" jawab Kapolres. Kapolres melanjutkan, terkait dengan motif serta waktu penembakan kata Kapolres belum dapat dipastikan sebab belum ada informasi yang jelas mengenai insiden tersebut. Kapolres mengungkapkan, pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman guna memastikan penembakan terhadap helikopter milik AU itu (Cenderawasih Pos).
- Penangkapan terhadap KKB hingga kini terus dilakukan. Aparat keamanan dari Satgas Ops Damai Cartenz 2024 nampaknya sudah menandai satu persatu anggota KKB. Yang terbaru adalah penangkapan KKB Puncak Jaya Oni Enumbi alias Mamberamo alias Bumiwalo. Penangkapan dilakukan di area Warung Biru, depan Polres Puncak Jaya, Kota Mulia Rabu (27/11) sekitar pukul 11.15 WIT. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, mengonfirmasi bahwa Oni Enumbi merupakan KKB Puncak Jaya yang berada di bawah pimpinan Ternus Enumbi. *"Penangkapan Oni*

Enumbi dilakukan berdasarkan DPO/S34/04/IV/2024/Reskrim tanggal 25 April 2024 dan laporan polisi nomor LP/A/03/III/2024/Res Puncak Jaya/ Polda Papua, terkait penembakan dan pembunuhan terhadap personel Satgas Elang," ungkap Kombes Pol. Bayu Suseno (Cenderawasih Pos).

30 November

Pasca ditangkap oleh Satgas Ops Damai Cartenz 2024, Rabu (27/11) lalu, anggota KKB Puncak Jaya Oni Enumbi alias Mamberamo alias Bumiwalo kini diamankan Satgas Ops Damai Cartenz untuk dilakukan pemeriksaan intensif oleh penyidik. Penangkapan terhadap Oni Enumbi dilakukan berdasarkan DPO/S-34/04/IV/2024/Reskrim anggal 25 April 2024 dan Laporan Polisi nomor LP/A/03/ III/2024/Res Puncak Jaya/ Polda Papua, terkait penembakan dan pembunuhan terhadap personel Satgas Elang. Ia masuk dalam DPO Polres Puncak Jaya karena terlibat dalam penembakan dan pembunuhan personel Satgas Elang tanggal 17 Maret lalu di Kampung Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Sementara itu Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2024, Kombes Bayu Suseno mengatakan Oni Enumbi merupakan anggota biasa dalam struktur TPNPB dan tidak mempunyai jabatan penting atau strategis dalam organisasi tersebut (Cenderawasih Pos).

05 Desember

Personel polisi dari Polres Yalimo tengah menyelidiki aksi penembakan seorang sopir oleh OTK di Distrik Abenaho, Kampung Wilak, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada Rabu (04/12), dan dari peristiwa penembakan tersebut telah terjadi kontak tembak antara Satgas 323/BP, Satgas Mandala V dengan TPNPB. *"Benar, tepat pada hari Rabu, 4 Desember 2024, Pukul 12.10 WIT, anggota Sat Intelkam Polres Yalimo mendapatkan informasi via telepon bahwa telah terjadinya Penembakan di Distrik Abenaho, KM. 76, Kabupaten Yalimo,"* kata Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, seperti dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Kamis (05/12). Kapolres Yalimo, Kompol Joni Samonsabra mengatakan, telah terjadi penembakan kepada 3 mobil sopir lajuran berjenis truck di

kampung Wilak KM 76, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, oleh OTK. *"Akibatnya, satu orang meninggal dunia, dan sementara korban masih dievakuasi oleh anggota personil yang melaksanakan pengamanan di Distrik Abenaho,"* katanya (https://jubi.id/rilis-pers/2024/polisi-selidiki-kasus-penembakan-sopir-di-yalimo/).

16 Desember

Seorang warga sipil di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah bernama Yulius Sani, ditemukan tewas, karena diduga diculik dan ditembak oleh oknum TNI dari Satgas Pos Holomama Yonif 509/SB. Kejadian yang menimpa warga sipil bernama Yulius Sani itu, terjadi di sepanjang bangunan kantor pemerintahan Kabupaten Intan Jaya, Minggu (08/12). Peristiwa nahas yang menimpa warga sipil bernama Yulius Sani itu, dilaporkan keluarga korban, Fhery Sani, melalui siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Senin (16/12). *"Korban adalah anak dari almarhum Kris Abugau dan ibu Oktopinan Nambagani. Korban lahir di Mamba pada 1 Juli 2008, dan pernah sekolah di SD Inpres Mamba. Kemudian putus sekolah dan tidak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya,"* kata Fhery Sani. Menurut Fhery Sani, korban adalah benar-benar warga sipil, yang berdomisili di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Korban tidak pernah keluar dari rumah dan tidak pernah juga bergabung dengan kelompok siapa pun. Fhery Sani mengatakan, Yulius Sani selalu tinggal bersama keluarga di Kampung Mamba. Kesehariannya membantu mama tuanya (bibi) untuk berkebun. Kadang-kadang ia juga ikut bersama teman-temannya menjadi tukang ojek. *"Kami keluarga korban tahu bahwa pada 4 September 2024 korban sempat ditangkap dan diinterogasi oleh Satgas Yonif/sb 509 di Pos Mamba bersamaan dengan tiga pemuda yang tinggal di Kampung Mamba,"* kata Fheri Sani.

"Pada waktu itu semua masyarakat kampung datang bermohon untuk dibebaskan. Namun, Satgas Yonif/BY 509 tetap melakukan interogasi terhadap korban, termasuk tiga teman lainnya," lanjutnya (https://jubi.id/rilis-pers/2024/warga-sipil-di-intan-jaya-diduga-tewas-karena-ditembak-tni/).

Kronik Pengungsian Internal Papua

08 April

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri dan diarahkan untuk melakukan kerjasama dengan Provinsi Papua Pegunungan terkait penanganan anak-anak pengungsi dari Kabupaten Nduga yang ada di wilayah Wamena dan sekitarnya. Pejabat Bupati Jayawijaya Sumule Tumbo menyatakan kemarin pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan Mendagri lewat Zoom meeting, dan Pemda Jayawijaya diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait penanganan anak-anak dari Pengungsi Nduga. "*Kalau kita perhatikan secara data tadi ada 1128 anak dari Kabupaten Nduga yang ada di Wamena, sementara jumlah yang sudah ditangani oleh pemerintah Jayawijaya 717 anak yang tersebar mulai dari Paud, TK, SD, SMP, SMA/ SMK,*" ungkapnya Sabtu (06/04) kemarin (Cenderawasih Pos).

22 April

Human Rights Monitor dalam laporannya pada April 2024 menyatakan setidaknya 76.919 orang asli Papua masih menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata. Namun demikian, sekitar dua ribu hingga tiga ribu orang pengungsi internal di Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya dilaporkan telah kembali ke kampung halaman mereka. Pengungsi internal dari Maybrat yang telah kembali ke kampung halaman mereka dilaporkan hidup di bawah penjagaan ketat aparat keamanan, dan akses terhadap layanan pemerintah di daerah tersebut masih terbatas. Sementara, pengungsian internal terbaru telah terjadi di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah sejak pembunuhan sejak Dandramil Aradide di Kabupaten Paniai pada 11 April 2024 menjadi korban penembakan anggota TPNPB dari wilayah tersebut. Sejauh ini belum ada data pengungsi terbaru dari tentang kondisi yang dihadapi oleh pengungsi internal di Kabupaten Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Nduga, dan Puncak dalam enam bulan terakhir (https://suarapapua.com/2024/04/22/hrm-melaporkan-terjadi-pengungsian-internal-di-paniai/).

07 Juni

Sekitar 1000-an orang asal Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, telah mengungsi selama hampir enam tahun tanpa tahu kapan bisa pulang di kampung asalnya. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan seribuan pengungsi Nduga itu sedang berada di Kampung Sekom, Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya sejak tahun 2019 pasca konflik bersenjata di wilayah mereka. *"Saya bersama teman-teman pembela HAM pada 4 Mei lalu mendatangi lokasi pengungsian yang ada di Sekom, kunjungan kami untuk melihat kondisi masyarakat yang ada di sana selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah setempat,"* ucap Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos. Menurut Frits, hampir enam tahun masyarakat Nduga mengungsi di sekitar Wamena pasca konflik bersenjata yang ada di daerah mereka. Dengan demikian, harus ada yang dilakukan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak-hak mereka sebagai pengungsi. *"Mereka ini keluar dari tanah kelahirannya akibat adanya konflik yang berkepanjangan dan tak pernah usai,"* kata Frits. Lanjut Frits, beberapa diantara mereka sudah membangun honai dan rumah semi permanen di Kampung Sekom (Cenderawasih Pos).

04 September

- Hasil riset terhadap kebutuhan pengungsi internal Papua di 4 wilayah pengungsian yaitu Maybrat, Sorong, Wamena dan Nabire menunjukkan ada empat kebutuhan internal pengungsi yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Riset yang didukung oleh tiga lembaga gereja, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Dewan Gereja Papua Barat (DGP), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) ini diluncurkan pada Selasa (03/09) di gedung PGI Salemba Raya 10, Jakarta Pusat, dengan tema Pengungsian Internal di Tanah Papua. Menurut data berbasis responden yang dihimpun oleh Surya Anta Ginting dan Beka Ulung Hapsara, ada empat kebutuhan pengungsi internal di Tanah Papua. Sebanyak 97 persen pengungsi kekurangan makanan, 87 persen kekurangan pelayanan kesehatan, faktor penghambat ekonomi sebanyak 81 persen, dan hampir semua anak-anak atau nol persen tidak mendapatkan layanan pendidikan

atau sekolah (https://jubi.id/polhukam/2024/pengungsi-internal-papua-butuh-makanan-sehat-layanan-kesehatan-akses-ekonomi-dan-pendidikan/).

- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan sudah 5 tahun para pengungsi di Papua tidak mendapatkan perhatian dari negara sama sekali. Ini merujuk pada hasil riset pengungsi di Tanah Papua yang dikerjakan tiga lembaga gereja di Indonesia. *"Para pengungsi ini kehilangan akses pada makanan, kehilangan akses pada kesehatan dan rumah, atau tempat tinggal. 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Hidup dalam keharusan untuk berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain hanya untuk bertahan hidup,"* katanya pada diskusi Launching Hasil Riset Pengungsi Internal di Tanah Papua yang digelar di Kota Jayapura, Selasa, 3 September 2024. Riset tersebut merupakan kolaborasi tiga lembaga gereja di antaranya Konferensi Waligereja Indonesia, Dewan Gereja Papua, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau GPI. Diskusi ini disiarkan langsung lewat kanal Youtube Yakoma PGI, di Kota Jayapura, Provinsi Papua (https://jubi.id/polhukam/2024/riset-gereja-sudah-5-tahun-pengungsi-di-papua-tidak-mendapatkan-perhatian-negara/).

14 Desember

Lembaga Bantuan Hukum Papua menyatakan, konflik bersenjata antara TNI Polri melawan TPNPB sepanjang Desember 2024, menambah jumlah pengungsian. Direktur LBH Papua Emanuel Gobay mengatakan, masa persiapan Natal bagi masyarakat sipil Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Tambrauw berselimut konflik bersenjata. *"Kondisi konflik bersenjata tersebut secara langsung telah mengganggu kedamaian masyarakat sipil Papua di beberapa kampung, sehingga mereka harus meninggalkan rumah kediaman mereka, selanjutnya mengungsi ke berbagai tempat yang aman,"* kata Gobay melalui siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Sabtu (14/12). Gobay menyebutkan data pengungsi akibat konflik bersenjata di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tercatat sebanyak 3.318 warga sipil dari Distrik Oksop. Sementara itu,

di Kabupaten Tambrauw sekitar 106 warga sipil dari Kampung Banfot, Distrik Fef dan Kampung Bamuswaiman, Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya. Dilaporkan telah mengungsi pasca penembakan dan pembakaran kantor distrik Bamusbama. "*Dari jumlah tersebut, apabila digabungkan maka secara umum pada ,bulan Desember 2024 tercatat ada 3.424 orang masyarakat sipil Papua yang menjadi pengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI-Polri melawan TPNPB,"* katanya (https://jubi.id/rilis-pers/2024/konflik-bersenjata-menambah-jumlah-pengungsi-di-tanah-papua/).

18 Desember

Imparsial menyatakan, operasi militer di Tanah Papua hanya mengorbankan warga sipil dan pengungsian besar-besaran. Menurut Imparsial, sejumlah warga sipil dari Kampung Bumbakon, Mimin, Oksop, Alutbakon, Oktumi, Atenor, dan Ngangom, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, meninggalkan rumah mereka dan terpaksa mengungsi ke hutan dan distrik lain sejak 8 Desember 2024. Para pengungsi dilaporkan sedang kesulitan mendapatkan bahan makanan dan pasokan air minum. Gelombang pengungsian tersebut, disebabkan karena warga merasa ketakutan akibat operasi militer, yang mengerahkan personel militer secara mendadak pada 4 Desember 2024. *"Hal ini (operasi militer) mengejutkan dan menimbulkan kecemasan bagi warga Distrik Oksop, yang merasa terganggu dengan kehadiran aparat, dalam jumlah besar di wilayah mereka,"* kata Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, seperti dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Rabu (18/12). Apalagi, lanjut Ardi, bagi perempuan dan anak-anak yang tidak pernah mendengar bunyi tembakan senjata di sekitar kampungnya. Imparsial memandang, operasi militer yang melakukan aksi penyisiran oleh anggota TNI, dilakukan dengan tidak manusiawi dan tidak mengindahkan prinsip hukum humaniter (https://jubi.id/rilis-pers/2024/imparsial-sebut-operasi-militer-di-tanah-papua-sebabkan-pengungsian-massal/).

31 Desember

Tentara Nasional Indonesia diduga melarang warga Kampung Mimin, Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang yang dalam situasi mengungsi, kembali ke kampung halamannya. Warga meminta agar tentara keluar dari kampung halaman mereka. Hal itu disampaikan Vikaris Paroki Gereja Katolik Roh Kudus Mabilabol Oksibil Pastor Kletus Togodli Pr, pada Senin (30/12). *"[Warga] Kampung Mimin [kembali dari pengungsian] tidak bisa masuk [ke kampung mereka],"* kata Togodli. Togodli mengatakan warga Kampung Mimin sempat mengungsi, karena takut dengan kehadiran TNI pada akhir November 2024. Togodli mengatakan warga kampung lain yang ikut mengungsi saat itu dari Kampung Oksop, Kampung Atenar, Kampung Oktumi dan Kampung Alutbakon di Distrik Oksop. Mereka mengungsi ke hutan dan Oksibil ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang. "*327 warga yang mengungsi ke Oksibil sudah pulang semua. Lalu [warga] Atenar dan Alutbakon ini sebagian warga masih [mengungsi] di hutan, sebagian sudah ada di kampung. Data jumlah umat yang ada di hutan ini belum bisa pastikan karena posisi warga ini di balik gunung yang jauh-jauh semua. [Warga] Kampung Oksob dengan Oktumi aman [dan] masyarakat semua [sudah] ada di kampung,"* ujarnya. Adapun alasan TNI melarang warga Mimin kembali ke kampungnya, menurut Togodli, karena kampung tersebut diklaim masuk zona merah. *"Alasan mereka, Kampung Mimin itu yang menjadi incaran mereka [ada anggota] TPNPB di kampung itu, jadi kampung itu menjadi kampung merah,"* ujar Togodli kepada Jubi melalui panggilan telepon. Togodli mengatakan saat ini warga Kampung Mimin harus menumpang tinggal di rumah kerabat mereka di Kampung Kampung Oksop, Kampung Atenar, Kampung Oktumi dan Kampung Alutbakon. Togodli mengatakan ada sekitar delapan warga Kampung Mimin memilih mengungsi ke Distrik Okbab (https://jubi.id/headline/2024/tni-diduga-larang-warga-mimin-pulang-kampung/).

Kronik Penyiksaan Warga Sipil

23 Maret

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diminta segera menyelidiki video viral di media sosial yang memperlihatkan tindakan penyiksaan sadis terhadap warga sipil oleh sejumlah oknum prajurit TNI. Peristiwa kekerasan tersebut diminta segera diusut tuntas. Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua, menyatakan, penyiksaan terhadap warga sipil yang terjadi di salah tempat di kabupaten Puncak Papua itu harus segera ditangani dan Komnas HAM diminta menurunkan tim investigasi. *"Komnas HAM tidak perlu menunggu lagi untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan penyiksaan itu. Komnas HAM pusat dan Komnas HAM Papua segera membentuk tim investigasi dan turun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penyiksaan yang lagi viral itu,"* ujar Gobay, Jumat (22/03) (https://suarapapua.com/2024/03/23/komnas-ham-ri-didesak-selidiki-kasus-penyiksaan-warga-sipil-papua-di-puncak/).

25-26 Maret

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitihan, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum LP3BH Manokwari, Yan Cristian Warinussy mendesak Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto segera mencopot Panglima Kodim XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, karena dinilai telah membohongi publik atas pernyataannya terkait video dugaan penyiksaan warga sipil Papua oleh sejumlah prajurit TNI adalah hasil editan. *"Karena (Pangdam XVII/Cenderawasih) tidak berkata jujur dan cenderung melakukan pembohongan public, serta berupaya melakukan impunitas terkait dugaan panganiyaan warga sipil oleh sekitar lima orang oknum anggota TNI dari Satuan Yonif Raider 300/Brajawijaya pada awal bulan Februari 2024,"* kata Warinussy di Manokwari, Provinsi Papua Baratm Sabtu (23/03). Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom menyatakan warga yang disiksa prajurit TNI bukan anggota TPNPB, melainkan warga sipil (Koran Jubi).

25-26 Maret

Kepolisian Daerah Papua mengirim 1 peleton personel Brimob ke Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, untuk mengejar TPNPB yang menembak dua polisi hingga tewas. Hal ini dinyatakan Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Kota Jayapura, Sabtu (23/03). Fakhiri mengatakan personel yang akan ditugaskan ke Paniai berasal dari batalion Brimob Timika. Pleton Brimob itu akan langsung bergabung dengan anggota Polisi yang ada di Paniai. Fakhiri menegaskan, keberadaan Pos Polisi Ndeotadi 99 Baya Biru adalah untuk mengamankan aktivitas masyarakat, baik Orang Asli Papua maupun non Papua. Menurutnya, pos polisi itu bukan untuk mengamankan area pertambangan yang selama ini jadi pembicaraan luas (Koran Jubi).

25 Maret

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Papua, menyebut video penyiksaan seorang warga sipil di dalam drum yang diduga dilakukan oleh anggota TNI memenuhi unsur pelanggaran HAM. *"Sesuai dengan mekanisme Komnas HAM, kami memasukan ini dalam pengaduan proaktif. Kasus penyiksaan ini masuk dalam data pengaduan nomor 37 tercatat dalam pengaduan resmi Komnas HAM,"* kata Frits Ramandey, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM RI Perwakilan Papua (Cenderawasih Pos).

26 Maret

Beredarnya potongan video aksi kekerasan terhadap salah satu warga yang dilakukan oleh beberapa orang yang menggunakan atribut militer yang beredar secara luas di media sosial, kembali mendapat respon negatif dari pihak Kodam XVII/Cenderawasih. Kodam nampaknya tak bisa diam dengan video yang mengundang emosi tersebut sehingga langsung dilakukan pendalaman terkait keakuratan video tersebut apakah benar atau tidak. *"Pangdam XVII/Cenderawasih telah memberikan atensi untuk melakukan pendalaman atau mengidentifikasi video tersebut apakah benar atau tidak. Setelah dilakukan langkah itu, ternyata benar terbukti keaslian video tersebut,"* jelas Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/

Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan saat dikonfirmasi, Minggu (24/03) (Cenderawasih Pos).

27 Maret

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, telah menyampaikan permintaan maafnya atas kasus penyiksaan yang menimpa Definus Kogoya oleh prajurit Yonif 300 Raider/Brawijaya. Hanya saja, Komnas HAM Papua menilai langkah yang tepat adalah TNI harus mengakui perbuatan anggotanya atas penyiksaan yang dilakukan di Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Februari lalu. *"Kita tidak membutuhkan permintaan maaf, yang dibutuhkan adalah proses hukumnya berjalan dan pengakuan TNI atas penyiksaan yang dilakukan,"* ucap Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (26/03). Frits meminta TNI memberikan akses kepada Komnas HAM untuk bisa memintai keterangan terhadap pelaku penyiksaan Definus Kogoya, sehingga proses penyidikan ini indenpenden imparsialitas (Cenderawasih Pos).

28 Maret

Video aksi penyiksaan yang diduga dilakukan oleh TNI anggota Yonif Raider 300/Brawijaya di Pos Gome, Kabupaten Puncak 03 Februari 2024 menjadi perhatian dan keprihatinan bersama termasuk Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP). Korbannya adalah Definus Kogoya, yang TNI menduganya sebagai anggota TPNPB. Pada awal video diketahui oleh publik, terjadi penyangkalan yang dilakukan oleh pihak TNI yakni Pangdam XVII Cenderawasih. Direktur ALDP Latifah Anum Siregar, menyebut penyangkalan ini mengingatkan kita peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay tanggal 10 November 2001, bahkan Komandan Kopasus Tribuana di Hamadi, menyelenggarakan Konferensi Pers di markasnya sehari setelah peristiwa dan menyatakan bahwa dirinya dan institusinya tidak terlibat (Cenderawasih Pos).

30 Maret

Komisi Nasional HAM bakal memintai keterangan 13 anggota Yonif 300 Raider/Brawijaya. Terkait dengan penyiksaan yang dilakukan TNI kepada seorang pria dalam drum. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menyampaikan pihaknya juga bakal memintai keterangan dua korban yang masih hidup termasuk keluarganya yang ada di Puncak, Provinsi Papua Tengah. *"Dalam waktu dekat kami terbang ke Puncak, setelah itu ke Yonif 300 Raider/Brawijaya, untuk memintai kete- rangan terhadap kasus penyiksaan itu,"* kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Jumat (29/03) (Cenderawasih Pos).

01 April

- Menindaklanjuti hasil identifikasi video yang sempat ramai dibicarakan terkait kekerasan oknum aparat TNI terhadap warga sipil di Kabupaten Puncak beberapa waktu lalu, tim investigasi pelan namun pasti mulai menemukan banyak keterangan. Ini juga sebagai bentuk komitmen penegakan hukum terhadap aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Prajurit TNI. Tim Investigasi Kodam XVII/ Cenderawasih dipimpin Dandim 1717/Puncak, Letkol Inf Jonathan Nidio Aprimanda. Tim ini telah melaksanakan rangkaian investigasi di Distrik Gome, Ilaga Kabupaten Puncak dan kini masuk hari ketujuh. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan menjelaskan bahwa sebelumnya sejak hari pertama, tim investigasi masih bekerja dan memperoleh banyak kemajuan (Cenderawasih Pos).

03 April

Komite Nasional Papua Barat Wilayah Mamberamo Tengah mendesak DPRP dan MRP membentuk Pansus kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Puncak yang diduga dilakukan oleh oknum aparat TNI di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang berebar luas di media sosial pada 21 Maret 2024. *"Kami mendesak kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua [DPRP] yang melibatkan Majelis Rakyat Papua untuk segera membentuk Pansus pengungkapan kasus penganiayaan warga sipil Papua*

di Puncak," tukas Ravis Polona, Ketua KNPB Wilayah Mamberamo Tengah pada, Selasa (2/4/2024).Selain itu, pihaknya mendesak Komnas HAM RI dalam menangani kasus kekerasan di tanah Papua melibatkan semua stakeholder untuk investigasi, baik gereja, LSM, lembaga kemanusiaan serta pemerhati HAM (https://suarapapua.com/2024/04/03/dprp-dan-mrp-diminta-membentuk-pansus-pengungkapan-kasus-penganiayaan-di-puncak/).

04 April

Solidaritas Rakyat Anti Militerisme dan Peduli HAM di Tanah Papua menggelar aksi mimbar bebas di Lampu Merah Remu, kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (04/04). Aksi solidaritas bertajuk "Hentikan Operasi Militer Ilegal di Papua, Praktek Penyiksaan Terhadap Rakyat Sipil Papua, Tangkap dan Adili Pelaku" itu dilakukan terkait dengan rentetan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak Januari hingga Maret 2024. Melfin Kareth, koordinator aksi menyatakan, aksi damai yang diadakan hari ini bertujuan menyikapi kasus penyiksaan oleh oknum prajurit TNI dari Satgas Yonif Raider 300/Brajawijaya Kodam Siliwangi terhadap masyarakat sipil di kabupaten Puncak yang viral di media sosial. *"Penyiksaan terhadap warga sipil di Puncak itu pelanggaran HAM. Kami bersama kawan-kawan Solidaritas Rakyat Anti Militerisme dan Peduli HAM Tanah Papua akan terus kawal kasus ini,"* ujar Melfin (https://suarapapua.com/2024/04/04/pelaku-penyiksaan-harus-diadili-desakan-copot-pangdam-cenderawasih-terus-disuarakan/).

05 April

Teror di Kabupaten Yahukimo berlanjut. Jika sebelumnya seorang pengantar galon bernama Jhonsep Salempang tewas setelah dibacok Orang Tak Dikenal, kini seorang ASN yang menjadi korban. Korban bernama Yosep Pulung dilaporkan tewas usai ditikam di bagian perut sebelah kanan. Ia sempat dievakuasi ke Sentani namun nyawanya tak tertolong. Yosep sendiri bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo. Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengatakan kejadian terjadi pada Kamis (04/04) sekitar pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai Sarendala, Kabupaten Yahukimo (Cenderawasih Pos).

08 April

- Beredarnya video viral di media sosial terkait dengan anggota KKB yang ditangkap oleh TNI justru dilepaskan oleh Polres Puncak Jaya dibantah pihak Polres Puncak Jaya. Video ini ditegaskan bahwa itu adalah hoax ataupun berita yang tidak benar. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, saat dikonfirmasi terkait kebenaran video tersebut, Minggu (07/04). AKBP Kuswara mengatakan bahwa video terkait dengan anggota KKB yang ditangkap oleh TNI justru dilepaskan oleh Polisi itu tidak benar dan hanya ingin menjatuhkan institusi Polri khususnya Polres Puncak Jaya serta ingin memecah belah sinergitas TNI Polri yang saat ini sudah terjalin dengan baik di Puncak Jaya. AKBP Kuswara menjelaskan sampai saat ini tidak pernah terjadi penangkapan anggota KKB di wilayah hukum Puncak Jaya (Cenderawasih Pos).
- Penyidik Propam mengambil langkah cepat melakukan penyidikan terhadap tiga personel Polres Keerom yang terlibat dalam kasus tertembaknya seorang warga sipil bernama Aliki Balinggen di Arso Pir di Keerom, Selasa lalu. Disini alasan yang terungkap adalah tembakan dengan tujuan terpaksa melumpuhkan karena situasi saat itu sifatnya terpaksa. *"Tim dari Propam sudah melakukan pemeriksaan dan dikatakan bahwa sebelumnya sudah dilakukan tembakan peringatan 3 kali ke udara tapi korban tetap berupaya maju seraya mengayunkan parangnya kepada Aiptu Imam Basori hingga tembakan melumpuhkan dikeluarkan,"* jelas Ipda Heri, BKO Polres Keerom melalui ponselnya Ahad (07/04) (Cenderawasih Pos).

04 Juni

Komnas HAM mengklaim tren kekerasan di tanah Papua terus meningkat meski telah adanya DOB. Hal ini dibarengi dengan senjata yang moderen begitu juga dengan bentuk bentuk operasi dari segi kuantitas dan kualitas. Bahkan, Komnas HAM Papua mencatat, sepanjang Januari hingga Juni tahun 2024 ada 41 kasus kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah di tanah Papua. Puluhan kasus kekerasan tersebut didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan

tunggal) sebanyak 25 kasus, penganiayaan sebanyak 10 kasus dan pengerusakan sebanyak 7 kasus. Dimana satu peristiwa bisa menimbulkan lebih dari satu tindakan kekerasan. *"Dari jumlah kasus kekerasan tersebut, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 8 kasus, diikuti Paniai dan Yahukimo sebanyak 6 kasus,"* terang Kepala Komnas HAM, Frits Ramandey dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (03/06). Lanjut Frits, kemudian ada Kabupaten Puncak sebanyak 5 kasus, Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing sebanyak 3 kasus, Puncak Jaya, Keerom dan Jayawijaya masing-masing sebanyak 2 kasus dan Dogiyai, Jayapura, Mimika dan Maybrat masing-masing sebanyak 1 kasus (Cenderawasih Pos).

13 Juni

Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengecam pembunuhan seorang warga sipil di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah yang terjadi belum lama ini. Dimana aksi pembunuhan yang dilakukan OPM itu dinilai melanggar nilai-nilai dan prinsip HAM. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyatakan pihaknya memberi perhatian serius pada kasus ini. *"Kami meminta Kapolda Papua melakukan proses penegakan hukum secara cepat, tepat, jujur, terbuka dan adil sesuai prinsip HAM. Secepatnya para pelaku harus ditangkap dan diadili sesuai mekanisme hukum yang berlaku guna menjawab keresahan masyarakat serta memberikan rasa adil kepada keluarga korban,"* ucap Frits, dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Kamis (13/06). Selain itu, Komnas HAM juga juga meminta pemerintah daerah dan kepolisian memberikan jaminan keamanan bagi warga di Paniai (Cenderawasih Pos).

03 September

Kepolisian Resort Dogiyai saat ini tengah menangani kasus penembakan yang dilakukan oleh OTK. Dari penembakan tersebut menyebabkan satu penumpang truk bernama Omar terkena luka tembak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo membenarkan kejadian tersebut. Benny mengatakan kejadian terjadi pada, Minggu

(01/09) sekitar pukul 16.05 WIT di jalan Trans Nabire Enatorali Km 192 (Cenderawasih Pos).

12 September

Lembaga Bantuan Hukum Papua mendampingi keluarga korban menjumpai Komnas HAM Papua meminta agar kasus penembakan terhadap Tobias Silak (22) dan Naro Dapla (17) di pos Brimob Sekla, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (20/08) lalu, segera dilakukan investigasi lapangan. David Sobolim, keluarga dari almarhum Tobias Silak, menyatakan, peluru yang digunakan oknum anggota Brimob untuk menembak saudaranya telah salah sasaran hingga menghilangkan nyawa saudaranya, tetapi tidak ada keadilan bagi keluarga dan korban. Karena itu, ia minta diinvestigasi demi mengungkapkan kebenarannya dan keluarga korban mendapatkan keadilan serta pelaku wajib diadili." Tobias Silak adalah korban salah tembak atas perintah Polres Yahukimo. Kami keluarga dan 12 suku di Yahukimo sedang menunggu keadilan dan menolak untuk temui Polres Yahukimo. Kami mau LBH dan Komnas HAM ke sana sama-sama melakukan investigasi, sehingga pelaku segera diadili dan korban mendapatkan keadilan," ujar David saat ditemui Suara Papua, Rabu (11/09) kemarin (https://suarapapua.com/2024/09/12/keluarga-korban-minta-komnas-ham-investigasi-kasus-penembakan-tobias-dan-naro-di-dekai/).

20 September

Insiden tewasnya seorang pelajar akibat tertembak senapan di Kampung Bagia Pir III, pada Rabu (11/09) lalu masih menjadi sorotan masyarakat khususnya wilayah PIR. Terlebih pihak keluarga yang merasa kehilangan atas kehilangan anak yang dianggap penurut. Mereka meminta pihak kepolisian segera mengungkap pelakunya karena bisa saja ada tindakan lain yang diambil pihak keluarga jika menemukan pelaku (Cenderawasih Pos).

02 Oktober

Konflik warga yang terjadi di wilayah Kabupaten Jayawijaya hingga Selasa (01/10) masih berlanjut. Empat hari lamanya bentrok yang terjadi antara warga yang berasal dari Kabupaten Lanny Jaya dan warga Kabupaten Nduga. Belum ada kesepakatan untuk melakukan perdamaian sementara jumlah korban jiwa dari kedua belah pihak sampai dengan siang kemarin mencapai 5 orang. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polres Jayawijaya untuk hari pertama saat awal mula bentrokan tersebut terdapat dua orang dari kelompok masyarakat Lanny Jaya dan akhirnya dibalas dengan melakukan penyerangan terhadap perumahan warga Nduga yang ada di Wamena. Akibatnya tiga orang warga Nduga meninggal dunia. Sementara untuk hari ke tiga, dua kelompok masa ini hanya saling bersiaga satu dengan lainnya guna mengantisipasi apabila ada serangan yang dilakukan dari salah satu pihak (Cenderawasih Pos).

Kronik Militer

08 Januari

Sebanyak 30 personel Polri dari Polda Papua tiba di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel, Sabtu (06/01), sebagai bagian dari Operasi Mantap Brata 2024 untuk memperkuat pengamanan Pemilu 2024. Kedatangan mereka menggunakan pesawat Trigana pada Pkl. 09.10 WIT dan diterima langsung oleh Kapolres Boven Digoel, AKBP I Komang Budiartha. Kapolres Boven Digoel AKBP I Komang menyampaikan bahwa penambahan personel ini diharapkan dapat memberikan kekuatan tambahan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah tersebut (Cenderawasih Pos).

16 Februari

Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB yang bertugas pengamanan di wilayah perbatasan Papua Selatan melalui Binter Kitorang Basudara terus berupaya untuk membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga yang tinggal di pwdalaman perbatasan Papua

Selatan, Kamis (15/02). Berbagai upaya telah dilakukan Satgas dalam mengatasi berbagai kesulitan masyarakat, baik itu pendidikan, peningkatan ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan yang terdapat dalam Program Binter Kitorang Basudara. Dansatgas Letnan Kolonel Inf.Agus Satrio Wibowo mengungkapkan, melalui Binter Kitorang Basudara di dalamnya terdapat program unggulan yaitu kampung Pancasila, Kampung Sehat, Kampung Damai dan Kampung Sejahtera, ini merupakan upaya Satgas dalam membantu pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang tinggal diwilayah terpencil perbatasan Papua Selatan (Cenderawasih Pos).

01 Maret

Di tengah konflik kekerasan yang masih terjadi di Papua hingga kini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi Habema. Koops Habema ini bertujuan menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua. Juru Bicara JDP, Yan Cristian Warinussy, mengatakan pembentukan Koops Habema menunjukan sikap negara yang melihat Papua sebagai wilayah konflik yang tidak dibarengi dengan langkah langkah kemanusiaan (Cenderawasih Pos).

04 Maret

Aksi Penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok oknum anggota TNI dari Batalyon 756/Wimane Sili (WMS) ke Polres Jayawijaya mengakibatkan kerugian materil. Mulai dari ruangan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 8 kaca jendela, Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) 8 kaca nako, dan ruangan kasat Lantas Polres Jayawijaya 2 kaca jendela. Dari informasi yang dihimpun media ini kejadian berawal dari adanya laporan dari masyarakat bahwa ada keributan di Pilamo Futsal yang dilakukan oleh oknum TNI selanjutnya personel penjagaan Polres Jayawijaya melaporkan permasalahan tersebut kepada Subdenpom Wamena (Cenderawasih Pos).

06-07 Maret

Sejumlah 5 prajurit TNI anggota Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili ditetapkan sebagai tersangka penyerangan dan pengrusakan Markas Polres Jayawijaya. Hal itu dinyatakan Pangdam XVII/ Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan di Kota Jayapura, Selasa (05/03). Izak menyatakan kasus itu ditangani Detasemen Polisi Militer Wamena (Koran Jubi).

05-06 April

Pemerintah Indonesia perlu melakukan evaluasi atas kebijakan pendekatan keamanan di Tanah Papua. Pendekatan dialog damai dinilai paling tepat, guna menyelesaikan konflik bersenjata di Tanah Papua. Kepala Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, Andrie Yunus mengatakan pendekatan keamanan dengan mengirim pasukan TNI/Polri di Tanah Papua hanya akan meningkatkan eskalasi konflik bersenjata berdampak terhadap warga sipil. Hasil pemantauan KontraS banyak terjadi kasus konflik bersenjata dan penyiksaan yang dialami oleh warga sipil. Rentetan peristiwa tersebut menyebabkan 67 korban luka-luka dan 41 korban meninggal dunia. Sementara pemantauan KontraS dari Januari hingga Februari 2024 terjadi 7 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil. Akibatnya 6 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia (Koran Jubi).

16 April

Kepolisian Daerah Jambi mengirim 100 personel Satuan Brimob (Satbrimob) untuk pengamanan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Papua. Keberangkatan tersebut dalam rangka tugas Operasi Amole tahun 2024 BKO Polda Papua. Keberangkatan 100 personel Satbrimob Polda Jambi ini merupakan bagian dari Upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua (Cenderawasih Pos).

27 April

Perubahan penyebutan nama KKB menjadi OPM bakal berdampak terhadap pendekatan di Papua. Hal ini dikatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. *"Sangat. Saya sampaikan*

tidak ragu kami dalam melangkah," kata Maruli saat menjawab pertanyaan wartawan di Pantai Pandawa, Kabupaten Badung, Bali, dikutip dari Antara, Jumat (26/04). Dia mengatakan, kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 05 April 2024 mengubah penyebutan nama KKB menjadi OPM berdampak pada kinerja TNI, khususnya yang bertugas di daerah Papua untuk mengambil tindakan di lapangan. Dia mengatakan, selama ini anggota TNI yang bertugas di Papua masih ragu-ragu dalam memutuskan mengambil suatu tindakan terhadap anggota KKB, khususnya kesulitan membedakan antara yang menjadi anggota KKB dari yang bukan anggota kelompok tersebut (Cenderawasih Pos).

08 Mei

- Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca mengatakan bahwa Operasi Damai Cartenz 2024 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari gangguan OPM. Menurut Asops Kapolri, pihaknya melakukan supervisi ke Mako Batalyon B Pelopor di Timika dalam rangka mengecek langsung pelaksanaan Operasi Damai Cartenz 2024. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa Operasi Damai Cartenz 2024 ini sangat berhasil dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan anggota OPM aktif. *"Kami telah melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap OPM pada sembilan wilayah, dan tentunya penegakan hukum ini dilakukan secara tegas dan terukur,"* katanya (Cenderawasih Pos).
- Kolonel Inf. Wempi Ramandei, kini menjabat sebagai Komandan Korem 174/Anim TI Waninggap. Pelantikan Wempi Ramandei sebagai Danrem 174/ATW tersebut dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, M. Han, di Aula Tonny Rompis, Makodam XVII/Cenderawasih, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin (06/05) (Cenderawasih Pos).

13 Juni

Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM menilai pengajuan tambahan anggaran khusus oleh Kementerian Pertahanan akan memperparah konflik di Tanah Papua. Kementerian Pertahanan seharusnya mendorong penyelesaian konflik Papua melalui dialog damai. Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan anggaran khusus yang diajukan Kementerian Pertahanan untuk penyelesaian konflik Papua tentu akan digunakan untuk memperkuat pendekatan militer atau keamanan dalam penyelesaian konflik Papua. Sementara menurut Imparsial, kata Ardi, pendekatan militer yang dilakukan pemerintah selama ini telah gagal membawa perdamaian di Papua. *"Justru yang terjadi peningkatan kontak senjata dan kekerasan yang merugikan masyarakat sipil,"* kata Ardi kepada Jubi via WhatsApp, Jumat (10/05) (https://jubi.id/polhukam/2024/anggaran-khusus-kementerian-pertahanan-dinilai-akan-memperparah-konflik-papua/).

07 Agustus

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menata ulang strategi pertahanan mereka di Tanah Papua. Kebijakan itu menyusul penembakan terhadap Glen Malcolm Conning, pilot berkebangsaan Selandia Baru oleh kelompok bersenjata di Mimika, Senin lalu. Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan tidak ada tentara maupun polisi di lokasi penembakan tersebut padahal jaraknya dari pusat keramaian hanya 20 kilometer. Karena itu, mereka akan menata ulang strategi pertahanan di Tanah Papua sehingga semua lokasi rawan mudah terpantau oleh aparat keamanan. *"[Akses] menuju lokasi kejadian bukan mudah. Medan dan kondisi cuacanya juga menyulitkan personel [keamanan untuk] sampai ke lokasi tersebut,"* kata Maruli, saat kunjungan kerja di Padang, Sumatra Barat, Rabu (07/08).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto dalam kesempatan terpisah memastikan situasi keamanan saat ini tetap kondusif di Tanah Papua. Aparat akan bertindak sesuai kewenangan dan prosedur hukum untuk menjaga kondusivitas keamanan

demi kepentingan nasional (https://jubi.id/nasional-internasional/2024/tni-ad-tata-ulang-penempatan-pasukan-di-tanah-papua/).

23 Agustus

Pucuk pimpinan Kodam XVII Cenderawasih bergeser. Pangdam ke 40, Mayjen TNI Izak Pangemanan kini menjabat sebagai Wadan Kodiklatad dan menyerahkan tongkat komando kepada Mayjen TNI Rudi Puruwito. Proses pergantian ini dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Aula Jenderal Besar A.H Nasution, Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (20/08). Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito sebelumnya menjabat Pangdivif 1 Kostrad. Dan Mayjen TNI Izak Pangemanan kini mendapat amanah baru sebagai Wadan Kodiklatad (Cenderawasih Pos).

19 September

Penambahan pasukan militer di Tanah Papua untuk mengatasi gerakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB dinilai berlangsung secara masif dan telah serupa operasi militer. Akan tetapi, pemerintah tidak mau mendeklarasikan dan membuat dasar hukum pengerahan pasukan itu. Akibatnya, pengerahan pasukan di Tanah Papua itu menjadi operasi militer ilegal dan status konflik Papua tidak jelas. Penilaian itu disampaikan pakar Hukum Humaniter, Budi Hernawan PhD saat dihubungi pada Rabu (19/09). *"[Pengerahan pasukan] itu dasarnya apa? Itu yang perlu dikejar. Dasar peraturannya apa? Dasar hukumnya apa? Apakah DPR [RI] tahu atau tidak? [Tanpa kejelasan status, pengerahan pasukan] itu ilegal,"* kata Budi. Menurut Budi, jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, maka yang terjadi saat ini telah menyerupai Operasi Militer Selain Perang. *"Itu [di Papua sedang berjalan] Operasi Militer Selain Perang untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata. [Untuk menggelar] Operasi Militer Selain Perang harus ada Peraturan Presiden. Nah, ini [Peraturan Presiden] tidak ada. Kita punya [Peraturan Presidan soal operasi militer] di Ambon, di Aceh. Tapi dalam konflik Papua tidak pernah ada [Peraturan Presiden itu],"* ujar Dosen STF Driyarkara Jakarta tersebut. Jika mengacu kepada pertimbangan hukum Mahkamah Pidana Yugoslavia,

demikian menurut Budi, secara de facto konflik Papua telah berkembang menjadi konflik bersenjata non-internasional. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat terus mengerahkan dan menambah pasukan militer maupun aparat keamanan di Tanah Papua. Menurutnya, operasi militer telah berlangsung, namun pemerintah tidak mengakui tengah menjalankan operasi militer di Tanah Papua. *"Sampai hari ini kan memang tidak ada pernyataan dari Presiden. Yang [punya] kewenangan untuk melakukan operasi militer adalah Presiden. Yang terjadi di lapangan ini apa? Mereka harus jelaskan,"* kata Budi (https://jubi.id/polhukam/2024/penambahan-pasukan-di-tanah-papua-tanpa-dasar-hukum-status-konflik-papua-jadi-kabur/).

23 September

Danlantamal XI, Laksma TNI Joko Andriyanto, melaksanakan upacara penerimaan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG sektor Selatan Yonif 144/JY. Satgas Yonif Pamtas Yonif 144/JY akan menggantikan Yonif 111/Karma Bakti yang purna tugas. Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan, bertindak sebagai ispektur upacara dengan Komandan Upacara Danyonif 144/JY, Letkol Inf Eko Siswanto di Pelabuhan Umum Yos Sudarso Merauke, Papua Selatan, Sabtu (21/09). Ratusan para prajurit tersebut tiba dengan KRI dr. Soeharso (SHS). Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan menyampaikan selamat datang kepada Satgas Pamtas RI-PNG 144/IY. Karena itu, lanjutnya, diperlukan kehadiran TNI untuk menjaga kedaulatan negara, mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pembangunan dan melindungi masyarakat di wilayah Papua (Cenderawasih Pos).

05 Oktober

Pembentukan Batalyon Infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah di Papua, untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah menjadi kekhwatiran tersendiri bagi masyarakat di wilayah Papua Selatan, terutama di Merauke. Kekhawatiran itu muncul dari masyarakat adat Malind, Maklew, Mayo Bodol, Khimaima, dan Yei, diKabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang sedang terancam dan terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan pangan

dan energi melalui proyek cetak sawah baru, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol yang akan menggunakan tanah adat, dusun dan hutan adat seluas lebih dari 2 juta hektare. Koordinator Forum Masyarakat Adat Malind Anim Kondo-Digoel, Simon Balagaize mengatakan praktik PSN Merauke melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional, Pemda, perusahaan swasta, Jhonlin Group, First Resources Group, KPN Corp. "Di hadapan Pj Gubernur Papua Selatan, masyarakat adat Maklew di Distrik Ilwayab, Tubang dan Okaba. Telah menyatakan penolakan mereka terhadap proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang menggusur tanah, dusun dan hutan adat mereka yang menjadi sumber kehidupan mereka" (Cenderawasih Pos).

11 Oktober

Sebanyak 100 personel Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarat diberangkatkan dalam penugasan sebagai Satgas Amole Tahap II 2024 di wilayah Papua. Upacara pemberangkatan dipimpin Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, Kamis (10/10). Mereka memiliki misi mulia. Yakni menjaga keamanan dan stabilitas objek vital nasional yang berperan besar dalam perekonomian negara. Mereka akan bertugas selama tujuh bulan ke depan (Cenderawasih Pos).

10 Desember

Imparsial menyebut bahwa pemerintah mengirim ribuan pasukan ilegal ke Tanah Papua sepanjang tahun 2024. Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menegaskan bahwa status daerah operasi militer (DOM) Papua resmi dicabut setelah reformasi. *"Kami mencatat sepanjang tahun 2024 ini Pemerintah setidaknya telah mengirimkan 3.187 pasukan non-organik ke Tanah Papua. Hal ini belum ditambah dengan jumlah pasukan yang tidak diketahui jumlah pastinya",* ujar Ardi pada Selasa (10/12) (https://nasional.kompas.com/read/2024/12/10/16083181/imparsial-anggap-ribuan-pasukan-dikirim-ke-papua-selama-2024-ilegal).

Peredaran Senjata Api

02 Februari

Nasib sial dialami seorang anggota Polres Puncak saat tengah melakukan tugas. Senjata yang diletakkan di dalam truk bagian depan dirampas oleh orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik menarik dan perlawanan namun pelaku berhasil merebut kemudian melarikan diri. Dari kejadian ini langsung direspon tim gabungan dengan melakukan pengejaran dan saat itulah terjadi baku tembak dengan KKB. Tak ada korban dari insiden tersebut. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny menyampaikan bahwa perampasan senjata anggota Polisi terjadi saat petugas sedang melayani masyarakat di Kompleks Pasar Ilaga, Kampung Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis (01/02) (Cenderawasih Pos).

03 Februari

Pasca perampasan senjata api yang dialami salah satu personel KP3 Udara di Kompleks Pasar Ilaga, Kabupaten Puncak, Kamis (01/02), pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan senjata dan pelaku. Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri menegaskan bahwa polisi tidak akan mengendurkan upaya pengejaran terhadap pelaku perampasan senjata tersebut. Mereka akan terus meningkatkan pengamanan dan berusaha untuk mengambil kembali senjata tersebut. Kapolda juga sampaikan bahwa dalam pengejaran agar tidak dilakukan secara berlebihan sehingga masyarakat juga bisa lebih tenang (Cenderawasih Pos).

01 April

Buah penelusuran informasi yang dilakukan unit rekrim Polsek Jayapura Selatan akhirnya berhasil mengamankan seorang pria berinisial RM beserta sebuah senjata api. RM dibekuk di kos-kosannya di seputaran Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor D Mackbon mengatakan, penangkapan ini berawal saat Polsek Jayapura Selatan mendapat laporan pada 24 Februari 2024 bahwa ada

seorang warga PNG berinisial RM memiliki senjata api rakitan beserta amunisi (Cenderawasih Pos).

02 April

Kasus barter ganja dengan senpi yang dilakukan seorang warga PNG berinisial RM hingga kemarin terus dilakukan pengembangan. Pasalnya senpi yang dimiliki RM ini diperoleh dari seorang pria berinisial ML yang notabene warga yang berdomisili di Papua Barat. Lalu jauh sebelum RM diamankan ML telah lebih dulu kabur sehingga dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang. Polisi masih membangun koordinasi dengan pihak kepolisian di Papua Barat menyusul domisili ML diketahui dari Papua Barat. *"Dari hasil penyidikan yang dilakukan terhadap RM pengakuannya perbuatan barter narkoba dengan senpi ini baru pertama kali dilakukan,"* kata Kasat Reskrim Polresta, Kompol Agus Ferinando Pombos, Senin (01/04) (Cenderawasih Pos).

05 Juni

Satgas Ops Damai Cartenz 2024 berhasil menggagalkan upaya jual beli senpi di Distrik Depapre. Pelaku yang ditangkap adalah MO. Ia ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura pada Senin (03/06) pukul 18.07 WIT. Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi mengatakan MO ditangkap saat hendak melakukan transaksi jual beli senjata di Depapre. *"Dapat kami menjelaskan bahwa, MO bertujuan menjual 1 puncuk senjata Api pendek kepada SK yang merupakan anggota KKB dengan jabatan sebagai Kepala Staf Kodap I wilayah Tabi,"* ujar Faisal, Selasa (04/06) (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Hasil pengembangan yang dilakukan oleh Satgas Ops Damai Cartenz terhadap seorang pria berinisial MO yang kedapatan melakukan jual beli senjata api di Depapre akhirnya berhasil mengungkap satu pelaku lainnya. Setelah menangkap MO, kini aparat berhasil membekuk pelaku lainnya yakni PO. Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Kombes Pol Faizal Ramadhani melalui Kasatgas Humas, AKBP Bayu Suseno menjelaskan

bahwa pelaku MO diamankan pada Senin (03/06) pukul 18.07 WIT sedangkan PO diamankan sehari kemudian (Cenderawasih Pos).

10 Juni

Seorang oknum anggota Polisi bernama Aske Mabel berpangkat Bripda dilaporkan telah "membobol" gudang senjata di Mapolres Yalimo. Sebanyak 4 pucuk senjata api laras panjang jenis AK China dibawa kabur ke hutan. Kejadian ini terjadi pada Minggu (09/06) pukul 04.00 WIT. Berdasarkan laporan yang tersebar diketahui awalnya Bripda Aske Mabel mendatangi SPKT Polres Yalimo dalam keadaan, mabuk menggunakan pakaian preman sambil membawa tas ransel besar. Bripda Aske masuk ke ruangan kantor Lantas tempat penyimpanan senjata inventaris penjagaan SPKT Polres Yalimo dengan alasan Cas HP. Ternyata dia justru mengisi senjata ke dalam tas ransel sebanyak 3 pucuk dan satu pucuk dipegang (Cenderawasih Pos).

Kronik Penyanderaan Pilot Philips Mark

01 Februari

Sebuah pernyataan yang cukup mengejutkan terkait kondisi pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens disampaikan Jubir TPNPB Sebby Sembom. Ia menyampaikan bahwa sang pilot akan dibebaskan, hanya saja untuk waktunya masih menunggu keputusan dari pimpinan TPNPB Ndugama, Egianus Kogoya. Sebby menyampaikan sang pilot akan dibebaskan dan diserahkan kepada lembaga independen internasional dan bukan kepada pemerintah Indonesia (Cenderawasih Pos).

06 Februari

Selandia Baru menyerukan pembebasan pilot Susi Air, Philip Mehrtens yang adalah warga Negara Selandia Baru yang sudah setahun lebih disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya di Papua. Dilansir dari EFE News pada Senin (05/02), Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters menegaskan negaranya mendesak fraksi kelompok bersenjata OPM itu segera membebaskan pilot Susi Air tersebut. *"Kami sangat*

mendesak mereka yang menahan Philip untuk segera membebaskannya dan tanpa membahayakan nyawanya. Kami juga menyesalkan tindakan Indonesia yang begitu lambat dalam menangani kasus penyanderaan ini. Penahanannya yang terus menerus tidak akan menguntungkan siapa pun," ujar Peters (Cenderawasih Pos).

09 Februari

Duta Besar Selandia Baru, Kevin Jeffry Burnet menemui langsung Polda Papua dan Kodam XVII/ Cenderawasih dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip. Pada kesempatan ini Dubes Kevin mendapatkan penjelasan langsung dan mempercayakan sepenuhnya kepada aparat. Pertemuan tersebut mencerminkan upaya bersama antara negara Indonesia dan negara Selandia Baru dalam menangani situasi penyanderaan tersebut dan memastikan keselamatan pilot Philip Mark Merhtens. Sementara pertemuan di Kodam XVII Cenderawasih juga dilakukan dihari yang sama. Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan didampingi Para Pejabat Utama Kodam menerima kunjungan Kevin Jeffery Burnett. Pangdam menyampaikan bahwa Dubes Selandia Baru ingin mengkonfirmasi langsung sejauh mana upaya pembebasan Pilot Susi Air Capt Phillip Mark Mahrtens (Cenderawasih Pos).

09-10 Februari

Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan, pada 07 Februari 2024 genap satu tahun penahanan pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip MarkMehrtens, yang ditahan TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan III Ndugama Darakma, di bawah Pimpinan Panglima Daerah, Brigadir Jenderal Egianus Kogeya pada tanggal 7 Februari 2023. *"Dalam rangka satu tahun penahanan, TPNPB-OPM menyandera pilot asal Selandia Baru sesungguhnya bukan merupakan target utama, melainkan jaminan atas pelanggaran Pemerintah Indonesia mengizinkan penerbangan sipil memasuki di wilayah perang antara Pasukan TPNPB dan Militer Indonesia,"* kata Sebby Sambom (Koran Jubi).

19 Februari

Hampir satu tahun Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Merthens disandera KKB. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak TNI/Polri, sayangnya perjuangan itu belum membuahkan hasil. Menurut Guru Besar Ilmu Sosiologi Pedesaan, Universitas Cendrawasih Ave Lefaan pembebasan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu, tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan. Namun butuh peran Pemerintah Daerah. Bahkan menurutnya pemerintah Daerah harusnya berperan penting membebaskan Marthen Philips. Sebab pemerintah daerah yang sangat memahami kondisi dan juga masyarakat yang ada. Hal itupun perlu dilakukan dengan pendekatan yang humanis atau kemanusian. *"Penyandraan Pilot Susi Air ini bukan saja masalah secara nasional, tapi ini berkaitan dengan nama bangsa Indonesia dikanca internasional, jadi butuh pendekatan humanis, dan itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah,"* ujarnya Sabtu (17/02) (Cenderawasih Pos).

02 Maret

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengakui, proses pembebasan sandera berkebangsaan Selandia Baru sejak tanggal 07 Februari 2023 lalu hingga kini masih terus berlanjut. Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri di Jayapura, mengatakan sejumlah pihak baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta Pemda Nduga masih terus berupaya membantu membebaskan sandera. *"Semua pihak harus bersabar karena prosesnya terus berlanjut berproses dengan mengedepankan negosiasi,"* katanya. Irjen Pol. Fakhiri mengakui, negosiasi tetap dikedepankan oleh para tokoh termasuk Penjabat Bupati Nduga karena mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan sehingga diharapkan sandera segera dibebaskan (Cenderawasih Pos).

04 Maret

Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan, terkait pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mehrtens aparat keamanan Selandia Baru masih mempercayai Indonesia untuk membebaskannya. *"Saya juga dan Pangdam pasti sama. Kita mengatakan tidak usah pakai pihak ketiga yang*

memanfaatkan kondisi Papua," tegas Irjen Pol. Mathius kepada wartawan di Mimika, Sabtu (02/03) kemarin (Cenderawasih Pos).

06 Maret

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan mengungkapkan bahwa pihaknya tidak butuh waktu lama untuk melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens yang sudah setahun lebih disandera oleh KKB. Cukup dengan mengerahkan kekuatan pasukan TNI maka dengan waktu yang sangat cepat semua akan selesai. *"Kalau mau dibebaskan dengan kekuatan pasukan bagi kami itu tidak sulit. Cepat saja itu tapi bukan itu yang kami inginkan,"* kata Pangdam di Makodam XVII Cenderawasih. Meski dikatakan tidak sulit jika mengerahkan kekuatan pasukannya namun Izak Pangemanan menyampaikan bahwa bukan itu jalan terbaik. Ia tak ingin ada korban dari warga sipil atau bahkan sandera itu sendiri. *"Kami menghindari munculnya korban-korban yang tidak perlu*" (Cenderawasih Pos).

12 Maret

Sudah 13 bulan berlalu, namun Pilot Susi Air Capten Philip Mark Merten, belum juga dibebaskan pasca disandera KKB pimpinan Egianus Kogeya di Paro, Nduga, Papua, Februari 2023. Salah satu Pembela HAM di Tanah Papua, Theo Hesegem, menyebut pembebasan Pilot Susi Air membutuhkan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan TPNPB. *"Tim negosiasi pembebasan pilot dibutuhkan orang orang indenpenden dan terpercaya, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bermasalah dan pihak yang merasa dirugikan,"* ucap Theo, dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/03). Menurut Theo, setelah Pilot disandera, Pemerintah Pusat hingga daerah telah melakukan berbagai upaya pembebasan Pilot Susi Air. Mulai dari pengiriman pasukan, loby hingga sampai pembentukan tim negosiasinya. Bahkan juga menunjuk perorang sebagai person. Hanya saja, hingga saat ini upaya itu tidak berhasil. Justru ada yang mengalami korban jiwa dari masyarakat sipil hingga TNI-Polri (Cenderawasih Pos).

06 April

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui hingga kini Pemda Nduga dan gereja Kingmi terus membantu membebaskan sandera berkebangsaan Selandia Baru yang ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Menurutnya, Pemda Nduga masih berupaya melakukan negosiasi dengan kelompok penyandera, demikian pula dengan tim dari gereja Kingmi. *"Penjabat Bupati Nduga beberapa hari lalu telah melaporkan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan,"* kata Kapolda Papua Irjen Pol Fakhiri kepada Antara, di Jayapura Jumat (05/04) kemarin. Dijelaskan, pihaknya akan terus berupaya melakukan pendekatan dan negosiasi guna membebaskan sandera dari KKB dalam keadaan selamat. Terlibatnya Pemda Nduga dan Gereja karena para penyandera merupakan warga daerah itu sehingga diharapkan dengan pendekatan kekeluargaan maka prosesnya akan cepat (Cenderawasih Pos).

20 September

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka mengajukan proposal pembebasan Pilot Susi Air, Marten Philips beberapa hari lalu dan telah dipublish ke beberapa media sosial. Menurut Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura Anthon Raharusun, permintaan tersebut tidak perlu direspon. Pasalnya ini sebagai bentuk komitmen negara menolak atas tindakan TPN OPM dalam memperjuangkan ideologi Papua Merdeka seperti yang mereka dengungkan selama ini. Tawaran tersebut menunjukan bahwa tindakan TNPB-OPM selama ini tidak merepresntasikan perjuangan mereka tentang ideologi Papua merdeka, namun lebih berorientasi pada bisnis (Cenderawasih Pos).

23 September

Perjalanan panjang drama penyanderaan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens setelah 07 Februari 2023 oleh KKB di Wilayah Nduga pimpinan Egianus Kogoya akhirnya berakhir. Pilot kebangsaan New Zealand tersebut dibebaskan pada Sabtu (21/09) usai 19 bulan berada dalam kendali KKB. Pembebasan ini cukup mengejutkan banyak pihak

mengingat 2 minggu sebelumnya Jubir TPNPB, Sebby Sembom telah mempublish proposal pembebasan Philips yang diklaim telah disetujui oleh Egianus. Ia bahkan menyatakan jika proposal tersebut adalah buah koordinasinya selama ini dengan Egianus. Namun siapa sangka, sang pilot tiba-tiba dibebaskan begitu saja bahkan tanpa harus terjadi pertumpahan darah (Cenderawasih Pos).



Kamp Pengungsi Warga Dari Distrik Oksop yang berada di Kota Oksibil.
(Dok. JPIC OFM Papua)

BAB IV

KORUPSI = AMBIL APA YANG BUKAN *KO PU* MILIK = MENCURI

Oleh David Dapi OFM

Pengantar

Papua sepanjang tahun 2024 kembali menjadi sorotan terkait maraknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga dana bantuan sosial. Skandal ini mengungkap kelemahan dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan serta memperlihatkan dampak langsung yang merugikan masyarakat. Dengan nilai kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah, praktik korupsi ini menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Catatan kritis ini bertujuan untuk menyoroti pola-pola korupsi yang terjadi, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, dan menganalisis dampak sistemik dari tindakan tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Selain itu, catatan ini juga menawarkan rekomendasi strategis untuk mendorong pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Kronik Tindakan Pidana Korupsi di Papua Tahun 2024

Awal tahun 2024, Kepolisian Daerah Papua Barat menyelamatkan uang negara senilai Rp20,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat. Barang bukti berupa uang tunai, tanah, mobil, dan rumah tersangka menjadi bagian dari nilai penyitaan ini, menandai awal tahun dengan upaya konkret pemberantasan korupsi.

Kasus korupsi di lingkup pemerintah daerah mendominasi. Di Kabupaten Boven Digoel, dugaan penyimpangan dana kunjungan kerja DPR tahun 2018 sebesar Rp1,2 miliar menyeret Bendahara Sekretariat Dewan (Setwan) sebagai tersangka. Di Kabupaten Sorong, pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dan tim BPK Papua Barat.



Infografis Kronik Kasus Korupsi Januari-Mei 2024
(Dok. JPIC OFM Papua)

Di sektor tenaga kerja, korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) senilai Rp800 juta di Papua Barat mengakibatkan penahanan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bendahara terkait, menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana pegawai.

Korupsi di sektor pendidikan juga menjadi perhatian.

Di Kabupaten Manokwari, pengadaan seragam SD dan SMP tahun 2020 dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar menyeret mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan beserta dua rekanan sebagai tersangka. Di Kabupaten Merauke, penyalahgunaan dana honorarium untuk guru honorer mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Di Kabupaten Mappi, pengelolaan dana hibah sebesar Rp35,8 miliar untuk Akademi Kebidanan Yaleka Maro merugikan negara Rp8,5 miliar, dengan para terdakwa dituntut hukuman penjara hingga enam tahun.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021, yang seharusnya menjadi kebanggaan, terungkap sebagai ladang korupsi. Dengan anggaran senilai Rp10 triliun dan realisasi yang hanya mencapai Rp8 triliun, berbagai pertanyaan muncul. Empat tersangka dari berbagai bidang, termasuk bendahara umum dan koordinator transportasi, kini menghadapi proses hukum, dengan miliaran rupiah hasil korupsi disita, namun pengembangan kasus terus berlangsung.

Korupsi dana desa juga mencoreng citra pengelolaan keuangan di tingkat lokal. Di Desa Puweri, Distrik Supiori Utara, penyalahgunaan dana desa tahun 2022 menyebabkan kerugian negara Rp480 juta, dengan kepala desa setempat menghadapi konsekuensi hukum. Di sektor infrastruktur, korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mamberamo Tengah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4,4 miliar, dengan modus manipulasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban yang berulang.

Analisis Korupsi Transaktif

Berdasarkan laporan-laporan tentang korupsi di atas, semua kasus korupsi tersebut termasuk dalam tipe korupsi transaktif (*transactive corruption*). Korupsi transaktif menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dengan aktif diusahakan tercapainya penerimaan keuntungan.[22] Dalam korupsi ini, kedua pihak sadar bekerja sama untuk mencapai

[22] Berdasarkan tipologinya, korupsi dapat dibadi dalam tujuh tipe yaitu: korupsi transakstif (*transanctive corruption*), korupsi yang memeras (*exortive corruption*), korupris investif (*inverstive corruption*), korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi defensif (*defensive corruption*), korupsi otogenik (*autogenic corruption*), dan korupsi dukungan (*supprotive corrupsion*). S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi,* Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1987, hal. ix-x.

tujuan tertentu yang menguntungkan mereka. Contohnya, pemberi mungkin memberikan uang suap, hadiah, atau fasilitas kepada penerima, yang sebagai balasannya memberikan keuntungan seperti perizinan, kontrak, atau penghapusan kewajiban tertentu.

Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, korupsi birokrasi juga dipandang merajalela. Kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan umumnya adalah korupsi transaktif, misalnya pemberian hadiah atau gratifikasi.[23] Karakteristik utama dari korupsi transaktif adalah sifat timbal balik dan kesepakatan eksplisit atau implisit antara kedua pihak, di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena masing-masing memperoleh keuntungan. Hal ini membuat korupsi transaktif sering kali lebih terorganisir dan sulit dideteksi karena kedua belah pihak cenderung menjaga kerahasiaan transaksi mereka.

Dampak Kasus Korupsi

Korupsi yang terjadi di berbagai sektor di Papua tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat[24]. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi:

1. Penurunan Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kasus seperti pengondisian hasil audit BPK di Kabupaten Sorong dan korupsi dana PON XX menunjukkan keterlibatan pejabat publik dalam manipulasi keuangan negara. Ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, dan menghambat upaya kolaborasi dalam pembangunan daerah.[25]

---

[23] S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi. Sebuah Pejelajahan dengan Data Kontemporer,* Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1987, hal. 16.

[24] Kasus-kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2024 ini termasuk dalam beberapa ciri korupsi seperti yang diungkapkan oleh Alatas yaitu: 1). Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan, 2). Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umum, 3). Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus, 4). Dilakukan dengan rahasia, 5). Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, 6). Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. S. H. Alatas, *The Sociology of Corruption,* Singapore: Times International, 1980, ed. 1., hal. 13-14.

[25] Bdk. ulasan dalam S. H. Alatas, *The Sociology of Corruption,* hal. 13-14.

2. Gangguan Layanan Publik

Korupsi di sektor pendidikan, seperti pengadaan seragam sekolah di Manokwari dan penyalahgunaan dana honorarium guru di Merauke, berdampak langsung pada layanan pendidikan. Siswa kehilangan hak atas fasilitas dasar, sementara guru honorer mengalami ketidakadilan. Ini menciptakan ketimpangan dan menurunkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.[26]

3. Infrastruktur yang Tidak Optimal

Proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan di Mamberamo Tengah, menunjukkan bagaimana korupsi mengurangi kualitas fasilitas publik. Dengan dana yang diselewengkan, masyarakat harus menghadapi infrastruktur yang buruk atau tidak selesai, menghambat mobilitas dan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. [27]

4. Penurunan Kesejahteraan Ekonomi

Kasus-kasus seperti korupsi dana desa di Supiori dan penyalahgunaan dana bansos di Keerom secara langsung merampas hak masyarakat atas dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dana bansos yang seharusnya digunakan untuk modal usaha dan pengentasan kemiskinan justru diselewengkan, memperburuk kesenjangan ekonomi di daerah tersebut.[28]

5. Kerugian pada Identitas Budaya dan Agama

Kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika mencederai nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Papua. Gereja yang seharusnya menjadi simbol spiritual dan persatuan justru menjadi ajang korupsi, menimbulkan rasa kecewa dan frustrasi di kalangan umat beragama.[29]

---

[26] Bdk. ulasan dalam S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi,* Jakarta: LP3ES anggota IKAPI, 1987, hal. 202-203.
[27] S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, hal. 216-217.
[28] S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, hal. 222.
[29] Bdk. S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi,* hal. 212.

6. Ketidakadilan Sosial

Masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan kaum miskin, menjadi korban utama dampak korupsi. Sementara pejabat dan elit menikmati keuntungan pribadi, masyarakat luas harus menanggung beban ekonomi dan sosial akibat hilangnya dana publik.[30]

7. Hambatan Pembangunan Daerah

Papua adalah salah satu wilayah dengan alokasi dana pembangunan terbesar di Indonesia. Namun, tingginya tingkat korupsi menghambat pembangunan daerah. Proyek besar seperti PON XX, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal, malah menjadi contoh penyalahgunaan anggaran. Kasus korupsi ini sering melibatkan komplotan, di mana efek komplotan dalam korupsi seperti tangkai anggur, dengan pemerintah atau pengusaha sebagai tangkainya. Untuk membasmi korupsi, perlu memutuskan tangkainya terlebih dahulu.[31]

Korupsi Dalam Pandangan Kitab Suci dan Dokumen Gereja Katolik

1. Pandangan Kitab Suci tentang Korupsi

Kitab Suci Perjanjian Lama selalu melihat dosa dalam konteks hubungan manusia dengan Allah, dan ciri terdalam dari dosa adalah penolakan manusia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Dosa sangat erat hubungannya dengan kesalahan moral. Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan atau kesalahan moral. Melalui tindakan korupsi, seseorang jatuh pada ketiadaan rasa tanggungjawab dalam relasi sosialnya dengan sesama dan relasi personalnya terhadap Allah.[32]

Kisah kejatuhan manusia pertama dalam Kej 3:1-24 merupakan indikasi dari tindakan 'korupsi' manusia yang menyalahgunakan kehendak bebas untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah

[30] Bdk. S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, hal. 216.
[31] Bdk. S. H. Alatas, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, hal. 206.
[32] Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid I*, Yogyakarta: Kanisius, 2006, hal. 325.

untuk tidak makan buah di tengah taman. Dalam konteks ini korupsi berarti seseorang mengambil apa yang bukan hak miliknya dengan tahu dan mau.

Kitab Keluaran juga menyinggung tentang praktek korupsi yang berkaitan erat dengan isi sepuluh perintah Allah yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai (Kel. 20:1-17). Hal ini terutama tercermin dalam perintah ketujuh, "Jangan mencuri" (Kel. 20:15), dan perintah kesepuluh, "Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu" (Kel. 20:17). Larangan dalam perintah ketujuh mengajak orang untuk tidak memperkaya diri. Sendangkan larangan dalam perintah sepuluh mengajak orang untuk berlaku adil terhadap sesama.[33]

Perjanjian Baru melihat dosa selalu terkait dengan pelanggaran terhadap nilai cinta kasih (Luk. 7:47; 1 Yoh. 4:7), penolakan terhadap kebenaran (Yoh. 8:44; Rm. 1:18, 25), serta tindakan penggelapan atau kebohongan, baik terhadap sesama maupun terhadap Allah (Rm. 11:30-32; Ef. 5:6). Korupsi menjadi salah satu contoh nyata dari penggelapan atau kebohongan tersebut. Para pelaku korupsi kerap mencari cara atau alasan untuk membenarkan dan memuluskan tindakan mereka yang tidak bermoral.

Praktik korupsi juga dapat membawa manusia pada tindakan penjualan, penghinaan, bahkan berakhir dengan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Yudas kepada Yesus. Yudas rela menjual Yesus kepada para imam kepala (bdk. Mat. 26:14-16). Ia mengkhianati relasinya dengan Yesus dan para murid yang lain demi keuntungan pribadi. Yudas memilih meninggalkan rahmat cinta kasih, kebenaran, dan keselamatan yang ditawarkan melalui hubungan itu, demi sebuah kepuasan dan keuntungan dirinya sendiri.[34]

---

[33] J. Boersema, *Etika Kristen*, Jakarta: STT Setia, 2014, hlm. 40.
[34] Karl-Heinz Peschke, *Etika Kristiani Jilid I,* hal. 331.

2. Katekismus Gereja Katolik (KGK)

- **KGK 2409-2411** berbicara tentang prinsip-prinsip moral yang mendasari keadilan sosial dan cara manusia mengelola harta benda, baik publik maupun pribadi. Dalam konteks ini, korupsi dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap keadilan karena melibatkan tindakan ketidakjujuran yang merugikan orang lain.
  1) **Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab.** Gereja menekankan bahwa keadilan sosial mengharuskan setiap individu dan institusi menghormati hak orang lain atas sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup layak. Harta benda, baik milik pribadi maupun publik, memiliki tujuan sosial, yaitu mendukung kesejahteraan semua orang, bukan hanya individu tertentu.
  2) **Korupsi sebagai tindakan Pencurian dan Ketidakjujuran.** Korupsi dianggap sebagai bentuk pencurian karena mengambil sesuatu yang bukan miliknya, baik itu uang, fasilitas, atau keuntungan yang seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama. Hal ini sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk kepentingan pribadi, dengan mengabaikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
  3) **Pelanggaran terhadap Hak Orang Lain.** Tindakan korupsi mencuri hak orang lain, misalnya hak atas pelayanan yang adil, kesempatan kerja, atau akses terhadap sumber daya yang seharusnya dimiliki bersama. Korupsi merusak tatanan masyarakat dengan memperburuk ketimpangan sosial dan memperlambat pembangunan yang adil.
  4) **Tanggung Jawab Moral.** Gereja mengajarkan bahwa setiap tindakan ketidakjujuran dalam pengelolaan harta benda, termasuk korupsi, adalah dosa yang harus dihindari. Gereja juga menyerukan pertobatan pribadi dan reformasi struktural untuk menghapus praktik ini, sehingga keadilan dan kebaikan bersama dapat diwujudkan.

- **KGK 1905-1927** berbicara tentang konsep kebaikan bersama dan tanggung jawab moral setiap individu serta institusi, terutama pemerintah, untuk memeliharanya. Kutipan ini menyoroti pentingnya melawan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, karena hal tersebut bertentangan dengan kebaikan bersama.
    1) Kebaikan Bersama sebagai Tujuan Utama. KGK mendefinisikan kebaikan bersama sebagai kumpulan kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mencapai pemenuhan dirinya secara penuh. Kebaikan bersama mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, kesejahteraan sosial, dan perdamaian serta keamanan bagi semua.
    2) Tanggung Jawab Pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan kebaikan bersama melalui kebijakan yang adil, penggunaan sumber daya yang tepat, dan penegakan hukum. Kekuasaan harus dilihat sebagai pelayanan, bukan alat untuk kepentingan pribadi. Ketika kekuasaan disalahgunakan, kebaikan bersama akan terganggu.
    3) Penyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi. Korupsi melibatkan penggunaan otoritas untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kebaikan bersama karena menciptakan ketidakadilan, memperburuk kemiskinan, dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi publik. Penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi, menghambat distribusi yang adil atas sumber daya, mempersulit akses terhadap kebutuhan dasar, dan merusak keadilan sosial.
    4) Panggilan untuk Melawan Korupsi. Gereja menegaskan perlunya menentang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kebaikan bersama. Tindakan nyata meliputi reformasi sistem pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan komitmen untuk membangun masyarakat yang adil dan transparan.

3. Dokumen Ajaran Sosial Gereja: *Evangelii Gaudium* Artikel 60

Dalam dokumen ini, Paus mengecam korupsi sebagai kejahatan yang merusak masyarakat dan menyebutnya sebagai salah satu dosa struktural yang menghambat pembangunan dan keadilan sosial.

a) Korupsi sebagai Kejahatan yang Merusak

Korupsi bukan hanya tindakan individu yang salah, tetapi juga praktik sistemik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi menciptakan ketidakadilan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Hal ini berdampak buruk pada stabilitas masyarakat dan memperburuk penderitaan orang miskin.

b) Korupsi sebagai Dosa Struktural

Paus menggambarkan korupsi sebagai dosa yang tidak hanya melibatkan individu tetapi juga berakar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi sering kali menjadi bagian dari sistem yang tidak adil dan sulit diubah tanpa reformasi besar. Korupsi mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat ke tangan segelintir orang, menghambat pembangunan terutama di komunitas yang paling membutuhkan. Korupsi menghancurkan keadilan sosial karena mengorbankan hak-hak orang kecil dan memperburuk ketidaksetaraan.

Paus Fransiskus menyerukan pertobatan individu dan transformasi struktural untuk memberantas korupsi. Gereja dan masyarakat diminta bekerja sama menciptakan sistem yang lebih transparan, adil, dan berfokus pada kebaikan bersama. Dalam terang ajaran Gereja, korupsi tidak hanya melanggar keadilan dan moralitas tetapi juga bertentangan dengan kasih Kristiani. Korupsi menempatkan kepentingan pribadi di atas kebaikan bersama, melukai martabat manusia dan solidaritas sosial.

Penutup

Kasus korupsi di Papua sepanjang tahun 2024 menunjukkan perlunya upaya serius dalam pemberantasannya. Lemahnya pengawasan dalam pengelolaan dana publik dan pentingnya memperkuat integritas di semua lini pemerintahan sangat terlihat. Tindakan tegas terhadap pelaku dan upaya pengembalian kerugian negara adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Korupsi mencederai martabat manusia sebagai makhluk yang secitra dengan Allah. Orang yang melakukan korupsi merusak hubungannya dengan Allah dan sesamanya. Manusia harus mampu mempertimbangkan apa yang baik dan buruk, dan menjauhi tindakan seperti mencuri dan korupsi.

Daftar Pustaka

Alatas, S. H. 1980. *The Sociology of Corruption,* Singapore: Times International.

_____. 1987. *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi.* Jakarta: LP3ES anggota IKAPI.

_____. 1987. *Sosiologi Korupsi. Sebuah Pejelajahan dengan Data Kontemporer,* Jakarta: LP3ES anggota IKAPI.

Boersema, J. 2014. *Etika Kristen*. Jakarta: STT Setia.

Coetzer, W. & L. E. Snell. 2013. "A Pratical-Theological Perspective on Corruption: Towards a Solution-Based Approach in Practice" dalam *Acta Theologica* 33(1). Hal. 29-53.

Embuiru, H. 2014. *Katekismus Gereja katolik*, (terjemahan dari edisi Jerman dan yang disetujui oleh KWI) Ende: Nusa Indah.

Fransiskus. 2014. "Evangelii Gaudium" dalam *Seri Dokumen Gerejawi No. 94,* (Ed. Martin Harun, & T. Krispurwana Cahyadi) Jakarta: DOKPEN KWI.

Peschke, Karl-Heinz. 2006. *Etika Kristiani Jilid I,* Yogyakarta: Kanisius.

Kronik Kasus Korupsi

05-06 Januari

Kepolisian Daerah atau Polda Papua Barat menyelamatkan uang negara senilai Rp 20,5 miliar pada tahun lalu. Uang tersebut berasal dari pengungkapan kasus dugaan korupsi di KONI Papua Barat. Kepala Polda Papua Barat Irjen Pol. Johny Edizon Isir mengatakan mereka telah menyita uang tunai dan sejumlah aset dari salah seorang tersangka sebagai barang bukti. Nilai total sitaan tersebut sebesar Rp 20,5 miliar. "*Penyidik menyita uang tunai, tanah, mobil, dan rumah di Kawasan Sowi Marampa, Distrik Manokwari Selatan. Nilai total penyitaan itu, Rp 20,5 miliar,"* kata Isir, Kamis (04/01) (Koran Jubi).

24 Januari

Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten Boven Digoel berinisial MMT diduga melakukan korupsi terhadap dana kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Boven Digoel tahun 2018 sebesar Rp 1,227 miliar. MMT yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Resor Boven Digoel itu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke atau tahap 2 karena berkas pemeriksaan tersangka dinyatakan lengkap atau P.21, pada Senin (22/01) (Cenderawasih Pos).

31 Januari

Proses pengkondisian pemeriksaan BPK Perwakilan Papua Barat terkuak dalam sidang pembacaan dakwaan Yan Piet Moso selaku mantan penjabat bupati Sorong, Mantan Kepala BPKAD Efer Segidifat dan staf keuangan Maniel Syatfle. Mantan penjabat Bupati Sorong Yan Piet Moso dan mantan kepala BPKAD Efer Segidifat serta staf BPKAD Maniel Syafle didakwa bersama-sama memberikan uang sebanyak Rp 450 Juta kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Papua Barat untuk mengkondisikan hasil pemeriksaan keuangan Kabupaten Sorong Tahun 2022-2023. Dakwaan itu disampaikan dalam Sidang perdana yang dipimpin Berlinda Ursula Mayor yang juga merupakan ketua Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Manokwari Papua Barat. Sidang dihadiri Jaksa penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Tim Kuasa Hukum, sedangkan tiga terdakwa mengikut sidang secara virtual dari rutan Salemba cabang KPK, Rabu (31/1/2024). *"Bahwa terdakwa Yan Piet Moso selaku pejabat Bupati Sorong, bersama Sam dengan Efer Segidifat dan Maniel Syafle sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada tangga 17 Oktober dan 30 Oktober dan tanggal 11 November 2023 bertempat di depan hotel Meridien dan Hotel Royal Mamberamo serta Mes Pemkab Sorong di kilo meter 24 Aimas memberi uang sejumlah Rp450 juta kepada penyelenggara negara yaitu Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab tim pemeriksa kepatuhan atas belanja daerah tahun 2022-2023 pada Pemkab Sorong,"* kata Taufik Nugroho, Tim Jaksa Penuntut umum KPK saat membacakan dakwaan (https://jubi.id/polhukam/2024/pengkondisian-hasil-temuan-bpk-terkuak-dalam-dakwaan-korupsi-mantan-penjabat-bupati-sorong/).

20 Februari

Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi melakukan penggeledahan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat untuk melengkapi alat bukti penyidikan kasus dugaan korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP). Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Abun Hasbullah Syambas, di Manokwari, mengatakan dokumen yang disita sebagai alat bukti tambahan meliputi surat permintaan pembayaran TPP periode Oktober-November 2023. Anggaran tersebut, kata dia, sudah dicairkan 100% atau senilai 800 juta atau perbulan 400 juta oleh Bendahara Pengeluaran Disnakertrans Papua Barat yang berinisial AN (Cenderawasih Pos).

04-05 Maret

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat, Frederik DJ Saidui ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Pegawai TPP tahun 2023. Frederik ditetapkan sebagai tersangka dengan Nomor: TAP.01/R.2/ Fd.1/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 setelah memenuhi panggilan dan diperiksa sejak pukul 10.00 Wit di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. DJ menjalani pemeriksaan langsung

menggunakan rompi tahanan jaksa dengan posis tangan diborgol kemudian diangkut dengan mobil tahanan menuju Lapas kelas II B Manokwari (Koran Jubi).

18 Maret

- Setelah melalui proses persidangan kurang lebih 3 bulan, Kejaksaan Negeri Merauke akhirnya membacakan tuntutan kepada 2 terdakwa dalam kasus dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Mappi tahun 2014-2017 kepada Akbid Yaleka Maro Cabang Mappi sebesar Rp 35,8 miliar yang merugikan negara sebesar Rp 8,5 miliar. Kedua terdakwa tersebut adalah pengelolah dana hibah dari Pemkab Mappi lewat Dinkes Kabupaten Mappi, Liberata Setitit dan Pengelola Yayasan Akademi Kebidanan Yaleka Maro Merauke, Titus Tambaip. Kasi Pidsus Donny Stiven Umbora mengungkapkan bahwa untuk terdakwa pertama Liberata Setitit dituntut selama 6 tahun penjara dan terdakwa Titus Tambaip dituntut selama 4 tahun penjara (Cenderawasih Pos).
- Bendahara pengeluaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi-Disnakertrans Papua Barat ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Papua Barat usai menjalani pemeriksaan di ruangan Pidana Khusus Kejati Papua Barat, akibat diduga melakukan tindak pidana korupsi dana TPP tahun 2023. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar mengatakan penyidik melakukan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Bendahara pengeluaran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat. *"Penetapan tersangka dan penahanan seorang berinisial AHHN yang bertugas sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas dimaksud (Disnakertrans),"* kata Harli Siregar, Senin (18/03). Kejati menyebut bendahara nonaktif di Disnakertrans Papua Barat itu bakal menjalani penahanan selama 20 hari di lembaga kemasyarakatan kelas IIB Manokwari sebagai tahanan titipan Jaksa. AHHN diduga bersama dengan eks kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi melakukan tindak pidana korupsi dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) tahun 2023 (https://jubi.id/domberai/2024/

diduga-korupsi-bendahara-disnakertrans-papua-barat-akhirnya-ditahan-jaksa/).

16 April

Hasil penyidikan yang dilakukan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Papua terkait kasus dugaan korupsi dana Bansos di Kabupaten Keerom pada APBD tahun anggaran 2018 akhirnya menetapkan Sekda Kabupaten Keerom, Trisiswanda Indra sebagai tersangka. Ini tak lepas dari dugaan tindak pidana korupsi kasus modal usaha senilai Rp18,2 miliar (Cenderawasih Pos).

18 April

Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap suami penyanyi dangdut Zaskia Gotik, Sirajudin Machmud, untuk hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika. *"Agenda pembuktian dakwaan dari tim jaksa, hari ini (18/04) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, tim jaksa akan menghadirkan saksi-saksi, diantaranya Sirajudin Machmud,"* kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta pada Rabu (17/04). Ali berharap yang bersangkutan bersikap kooperatif dan hadir memenuhi panggilan tim jaksa KPK. Lebih lanjut Ali menerangkan Sirajudin dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Budiyanto Wijaya dan kawan-kawan. *"Karena ini adalah panggilan kedua bagi yang bersangkutan tersebut untuk hadir di sidang, maka KPK ingatkan untuk kooperatif hadir,"* ujarnya. Untuk diketahui, KPK pada 22 September 2023 telah melakukan penahanan terhadap empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. Empat tersangka tersebut terdiri atas tiga pihak swasta, yakni Budiyanto Wijaya (BW), Arif Yahya (AY), Gustaf Urbanus Patandianan (GUP), dan seorang pegawai negeri sipil bernama Totok Suharto (TS) (https://jubi.id/nasional-internasional/2024/kpk-panggil-sirajudin-machmud-jadi-saksi-sidang-korupsi-gereja-kingmi-di-timika/).

19 April

- Sekelompok pemuda pada Kamis (18/04) ke Polda Papua. Maichel Awom selaku Koordinator Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) menjelaskan pihaknya sengaja datang kemudian membentangkan spanduk untuk mempertanyakan perkembangan kasus korupsi. *"Kami mempertanyakan sejauh mana proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kesekretariatan DPRD Tolikara tahun anggaran 2016-2017 yang telah kami laporkan sejak Oktober 2023 lalu,"* kata Awom usai aksi (Cenderawasih Pos).
- Kasubdit Tipikor Direskrimsus Polda Papua AKBP Leonardo Yoga mengakui, empat orang tersangka dari dua kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, telah diserahkan ke jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Dia menjelaskan, dua kasus korupsi yang ditangani yaitu dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana pekerjaan peningkatan ruas jalan jalur III Kobakma sepanjang 9,9 kilometer dengan anggaran Rp 2,6 miliar dengan kerugian negara mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. Kasus pembangunan jalan lingkar kantor Bupati Mamberamo Tengah yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mamberamo Tengah TA. 2021 sepanjang 13 kilometer dengan anggaran Rp 4,6 miliar dan kerugian negara mencapai Rp 3,3 miliar (Cenderawasih Pos).

26 April

Mahkamah Agung mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan tim jaksa KPK, atas vonis lepas Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Kasasi tersebut berkaitan dengan kasus dugaan korupsi mega proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Jalan Agimuga, Mile 32, Mimika, Papua Tengah. Hal itu juga dibenarkan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (25/04). Pihak KPK mengapresiasi putusan tersebut, bahwa perbuatan penipuan Eltinus Omaleng adalah korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap 1 TA 2015 di Kabupaten Mimika sesuai apa yang dibuktikan dan dituntut Tim Jaksa ketika proses

persidangan di Pengadilan Tipikor pada PN Makassar (Cenderawasih Pos).

01 Mei

Lima auditor atau pemeriksa yang bekerja di BPK Perwakilan Papua Barat dan Kepala Kesekretariatan BPK Papua Barat Kasman Alwi dihadirkan pada sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Pengadilan Tipikor Manokwari, Selasa (30/04). Sidang berakhir pukul 9 malam. Mereka terungkap bagi-bagi uang di dalam kamar hotel ketua tim pemeriksa (auditor) David Patasaung. Uang tunai yang diberikan David Patasaung kepada lima auditor BPK Papua Barat setelah kegiatan selesai itu berkisar antara Rp 75 juta hingga Rp 80 Juta. Keenam saksi yang dihadirkan, selain Kasman Alwi adalah lima auditor, yaitu Faradilah Sudirman, Ardiansyah, Nurul Adiyati Rahma, Arlina Jakob, dan Rescie Pratama Batti. Mereka mengungkapkan pemberian uang tunai dari David Patasaung. Sidang tersebut merupakan lanjutan dugaan korupsi pengkondisian hasil BPK yang diduga dilakukan terdakwa Patrice Sihombing (kepala Perwakilan BPK Papua Barat), Abu Hanifa (pengendali teknis), dan David Patasaung (ketua Tim Pemeriksa Kepatuhan Belanja Daerah tahun 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sorong dan Instansi teknis lainnya). Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Helmin Somalay SH MH dengan Hakim Anggota Pitayartanto SH dan Hermawanto SH itu terungkap bagi-bagi uang dilakukan di Hotel Mamberamo Sorong. Bagi-bagi uang itu terjadi setelah dilakukan 'exit meeting' pemeriksaan Bansos pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Kelima saksi mengakui menerima uang di kamar hotel David Patasaung (https://jubi.id/polhukam/2024/terungkap-di-persidangan-bagi-bagi-uang-di-kamar-hotel-pada-5-auditor-bpk-papua-barat/).

16 Mei

Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut empat terdakwa kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua Tengah, dengan pidana penjara selama dua tahun hingga empat tahun lebih. Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan keempat terdakwa tersebut,

yakni mantan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mimika 2015-2020 Totok Suharto, Direktur PT Waringin Megah Arif Yahya, Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima Gustaf Urbanus Pantadianan, serta Site Engineer PT Geo Inti Spasial Budiyanto Wijaya (Cenderawasih Pos).

17 Mei

Trisiswanda Indra mengajukan praperadilan terhadap Kapolda Papua di Pengadilan Negeri Jayapura, Kamis (16/05) kemarin. Diketahui, praperadilan yang diajukan Sekda Keerom itu terkait penetapan tersangka dugaan korupsi dana Bansos oleh Kapolda Papua. Hal ini dikonfirmasi Kuasa Hukum Trisiswanda Indra, yakni Anton Raharusun, Kamis (16/05) kemarin. Kata Anton, tujuan dari prapid ini untuk menguji keabsahan atas tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, hingga penyitaan aset terhadap Trisiswanda oleh penyidik Polda Papua (Cenderawasih Pos).

21 Mei

Sidang kasus dugaan pengkondisian hasil temuan BPK dengan terdakwa eks Kepala BPK Patrice Sihombing dan dua auditor yakni Abu Hanifa serta David Patasaung menghadirkan tiga saksi dari Pemda Kabupaten Sorong, Selasa (21/05). Tiga saksi yang dihadirkan dalam sidang itu adalah Sekda Kabupaten Sorong (secara online), Sekwan DPRD Kabupaten Sorong dan Kepala BKD Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pemeriksaan ketiga saksi itu masih terkait proses Entri meeting dan exit meeting sebelum dilakukan pemeriksaan khusus BPK di Kabupaten Sorong akhir 2023. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Helmin Somalay dan Hakim Anggota Pitayartanto serta Hermawanto, Sekertaris DPRD Kabupaten Sorong Nimbrot Sesa mengaku pada akhir 2023 setidaknya terdapat pembagian uang dengan jumlah Rp 35 juta kepada Pimpinan DPRD sedangkan Rp 20 juta kepada para anggota, dengan total semuanya 25 Anggota DPRD untuk kegiatan Paripurna LHP BPK. *"25 Anggota DPRD untuk pimpinan 35 juta dan untuk Anggota 20 Juta,"* kata Nimbrot menjawab pertanyaan JPU dari Komisi

Pemberantasan Korupsi. Nimrot mengatakan uang itu diberikan dua kali, yaitu setelah rapat paripurna LHP BPK untuk Tahun 2022, dan setelah sidang Paripurna APBD pada September 2023. Uang itu dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Kabupaten Sorong. *"Pengesahan APBD 2023 jumlah uang sekitar Rp 875 juta, diberikan dengan pembagian sesuai kesepakatan mereka (Anggota Dewan),"* kata Nimrot Sesa ketika ditanya Hakim Anggota (https://jubi.id/domberai/2024/sekwan-sorong-beberkan-kronologi-bagi-bagi-uang-terima-kasih-kepada-para-anggota-dewan/).

30 Mei

Eltinus Omaleng resmi diberhentikan dari jabatannya Bupati Mimika. Pemberhentian itu dipastikan di dalam surat nomor 100.2.1.3-1124 tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah. Eltinus Omaleng diberhentikan karena harus menjalani proses hukum atas kasus tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua Tengah (Cenderawasih Pos).

13 Agustus

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Manokwari menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 200 juta terhadap Patrice L Sihombing. Mantan Kepala BPK Papua Barat tersebut dinyatakan bersalah dalam perkara suap untuk memanipulasi hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sorong 2022-2023. (https://jubi.id/polhukam/2024/eks-ketua-bpk-papua-barat-divonis-2-tahun-penjara/).

02 September

Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari, Papua Barat, menetapkan tiga tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan seragam sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari tahun 2020. Para tersangka tersebut adalah ND, mantan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, serta dua rekanan pengadaan, yakni SR dan OGO. Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar tujuh jam, ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Negeri

Manokwari. Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Teguh Suhendro, dalam keterangan pers pada Senin (02/09), menjelaskan bahwa pada tahun 2020, Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 1 miliar untuk pengadaan seragam bagi siswa SD dan SMP. *"Anggaran pengadaan seragam SD sebesar Rp 596.546.280 dan seragam SMP sebesar Rp 524.851.250,"* jelas Teguh (https://jubi.id/domberai/2024/eks-plt-kadis-pendidikan-manokwari-dan-dua-rekanan-tersangka-korupsi-seragam-sekolah-ditahan-kejari/).

03 September

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Merauke berinisial SB ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Merauke dalam kasus dugaan korupsi. Tersangka dinilai telah melawan hukum atas penyalahgunaan kewenangannya berupa tidak melakukan pengujian dan penelitian atas kebenaran dokumen pertanggungjawaban keuangan pada dana honorarium kepada guru tidak tetap bidang sekolah dasar (Cenderawasih Pos).

04 September

Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya mempublish perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pada event PON XX Papua. Tercatat ada empat orang yang kemudian dijadikan tersangka. Asisten Pidana Khusus, Nixon Mahuse menyampaikan bahwa setelah penetapan ini, tiga dari empat tersangka langsung dijebloskan ke Lapas Abepura. Sementara satu tersangka lainnya masih mangkir. Pihak kejaksaan menyatakan akan melakukan upaya paksa. *"Ada tiga yang sudah di dalam lapas, ada dua di Lapas Abepura dan ada satu di Lapas Salemba, Jakarta sedangkan satu tersangka lainnya masih mangkir,"* beber Nixon kepada wartawan, Selasa (03/09). Empat tersangka tersebut adalah TR, RD, RL dan VP dimana masing-masing tersangka memiliki jabatan seperti bendahara umum, koordinator bidang transportasi, bidang II Umum maupun koordinator bidang venue. Kasus dugaan korupsi ini menggunaan anggaran dalam pelaksanaannya

sebesar Rp 10 triliun namun oleh para tersangka hanya direalisasi kan Rp 8 triliun (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

Kejaksaan Negeri Merauke melimpahkan berkas pemeriksaan dan barang bukti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke TB ke Pengadilan Tipikor Jayapura. Pelimpahan berkas dan barang bukti itu dilakukan langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Merauke Donny Stiven Umbora Senin (07/10) kemarin. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Sulta D. Sitohang melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Merauke Donny Stiven Umbora, membenarkan pelimpahan berkas dan barang bukti dari perkara mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ke Pengadilan Tipikor. Pelimpahan berkas dan barang bukti tersebut setelah berkas pemeriksaan tersangka telah dinyatakan lengkap atau P.21 (Cenderawasih Pos).

11 Oktober

Proses penyidikan kasus dugaan korupsi PON XX Papua tahun 2021 lalu berlanjut. Beberapa waktu terakhir usai penyidik mengumumkan 4 tersangka, kasus ini sempat hening dan tak ada kabar namun pada Kamis (10/10), penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua akhirnya merilis sejumlah uang hasil sitaan. "*Ada sejumlah uang yang berhasil disita dari penangungjawab bidang dan kami pastikan kasus ini masih akan terus dikembangkan,*" kata Aspidsus, Nixon Mahuse tadi malam. Dikatakan sebelumnya fokus penyidik adalah menuntaskan laporan Pra Peradilan yang diajukan oleh salah satu tersangka, RL. Namun gugatan tersebut ditolak sehingga pokok perkara tetap dilanjutkan (Cenderawasih Pos).

22 Oktober

Polres Supiori menggelar press release terkait pengungkapan kasus korupsi dana desa di Desa Puweri, Distrik Supiori Utara. Kapolres Supiori AKBP Marthin W. Asmuruf bersama Kasat Reskrim IPDA Daniel Zeth Rumpaidus memberikan keterangan terkait penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2022 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp

480 juta. Tersangka dalam kasus ini berinisial DY, yang menjabat sebagai Kepala Desa Puweri. Modus operandi yang dilakukan DY adalah tidak transparan dalam pengelolaan dana desa dan menyimpan semua dana tanpa melibatkan bendahara atau perangkat desa lainnya (Cenderawasih Pos).

24 Oktober

Pengembangan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana PON Papua XX terus berlanjut. Sedikit demi sedikit uang yang disalah_ gunakan ini mulai ditemukan dan dikembalikan. Setelah sebelumnya berhasil menyita Rp 6,4 miliar kemudian beberapa hari lalu berhasil menyita sebesar Rp 3 miliar. Kini Kejati Papua kembali menyita uang senilai Rp 978 juta dari tersangka berinisial RL. Aspidsus Kajati Papua, Nixon Mahuse mengatakan uang ratusan juta itu disita dari salah seorang vendor berinisial A. Hal ini disampaikan Nixon saat mengelar pres rilis di kantor Kejati Papua, Rabu (23/10) (Cenderawasih Pos).

25 Oktober

Kasus dugaan Korupsi Bansos Keerom senilai Rp 18,2 Miliar telah memasuki babak baru. Kasus yang menjerat mantan Sekda Keerom kini telah dilimpahkan ke Kejati Papua, setelah TI sebagai pelaku resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua. Aspidsus Kajati Papua Nixon Mahuse mengatakan perkembangan kasus Sekda Keerom hingga saat ini telah mencapai tahap pemeriksaan saksi. Seperti diketahui saksi dalam kasus tersebut sebanyak 36 saksi salah seorang saksi yang merupakan keluarga dari tersangka (Cenderawasih Pos).

29 Oktober

Sidang kasus Korupsi dana Bansos yang menjerat mantan Sekda Keerom, Trisiswanda Indra sedang bergulir di Pengadilan Negeri Jayapura. Senin (29/10) kemarin. Sidang perkara ini dipimpin Hakim Ketua, Lidya Winero, didampingi dua hakim anggota lainnya dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU. Adapun saksi yang dihadirkan oleh JPU ini bernama Yakonias Patrik Arin. Yakonias sendiri mantan Ketua

Tim Verifikasi dana Bansos tahun anggaran 2018. Sekaligus ketika itu dia menjabat sebagai Kasubag BKAD Kabupaten Keerom. Yakonias Patrik Arin menjelaskan proses pencairan dana Bansos, Kabupaten Keerom untuk Tahun Anggaran 2018 sepenuhnya tanggungjawab bupati (Cenderawasih Pos).

09 November

Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Kantor Setda Provinsi Papua, pada Senin (04/11). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua. Upaya paksa penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan korupsi yang sebelumnya menjerat mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe. KPK sebelumnya menyebut uang makan dan minum Lukas Enembe mencapai Rp 1 miliar per hari. *"Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi,"* ucap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (08/11) (Cenderawasih Pos).



Petugas menggiring tersangka korupsi jalan raya Mogoy-Mardey, menuju mobil tahanan kejaksaan, Manokwari, Selasa (10/12/2024).
(Dok. Jubi/Adlu)

BAB V

DI BALIK NOKEN: MENYINGKAP REALITAS PEMILU 2024 DI PAPUA

Oleh Yuliana Langowuyo

Pengantar

Upaya membangun sistem Pemilu yang bersih dan berintegritas di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Mulai dari penyelenggara Pemilu yang harus senantiasa menjaga netralitas dan profesionalisme, hingga partisipasi aktif masyarakat yang membutuhkan edukasi yang memadai. Selain itu, para peserta pemilu, baik partai politik maupun calon, juga perlu berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam kaitannya dengan Pemilu, Papua selalu menjadi sorotan karena konflik yang muncul di tengah pesta demokrasi serta keunikan sistem pemungutan suaranya, salah satunya adalah sistem noken. Sistem ini mencerminkan kearifan lokal dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik yang semakin kompleks, sistem noken juga menghadapi berbagai tantangan. Pertanyaan mengenai efektivitas, keadilan, dan relevansi sistem noken dalam konteks demokrasi modern menjadi semakin relevan, terutama di tengah konflik yang sering terjadi di beberapa wilayah di Papua.

Asas LUBER JURDIL

Asas Langsung. Asas langsung mengamanatkan pemilih untuk memberikan suara secara pribadi tanpa perwakilan. Kronik 2024 menunjukan bahwa karena situasi konflik bersenjata di Papua, membuat proses pemilu secara langsung, dimana pemilih datang langsung ke tempat pemungutan suara dan memberikan hak suaranya, tidak bisa dilakukan dengan partisipasi semua pemilih yang mempunyai hak suara. Wilayah konflik bersenjata di Papua, seperti Intan Jaya, Nduga yang masyarakatnya mengungsi ke wilayah lain di Papua, apakah hak mereka untuk memilih tetap mereka terima, apakah mereka sungguh datang ke tempat penungutan suara? Papua juga memiliki kekhususan yaitu sistem noken, yang dengan sendirinya bertolak belakang dengan asas ini.

Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 mengatur mekanisme teknis pemungutan suara menggunakan sistem noken. Dalam sistem ini, KPPS menyediakan noken sebagai kotak suara, atau kelompok pemilih dapat membawa noken sendiri. Sebelum hari pemilihan, masyarakat bermusyawarah di bawah pimpinan kepala suku untuk menentukan kandidat pilihan bersama, yang diikuti oleh pemilih terdaftar dalam DPT di satu TPS. [35]

Asas Umum. Asas umum dalam pemilu menekankan pelibatan seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan memiliki hak pilih. Asas ini menjamin kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Namun, situasi yang tidak kondusif di beberapa wilayah di Papua menyebabkan tidak semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan.

Contoh kasus yang tercatat dalam kronik 2024, saat perselisihan antar massa pendukung anggota Caleg, pelaksanaan pencoblosan di Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah sempat terganggu. Data kepolisian menyebut ada enam distrik yang terpaksa melakukan pencoblosan susulan karena situasi keamanan tidak mendukung. *"Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, saat dikonfirmasi membenarkan aksi saling serang tersebut. Dijelaskan bahwa*

[35] Berita diakses pada tanggal 10 Februari 2025 pada link https://www.cnbcindonesia.com/research/20240214111941-128-514124/11-wilayah-di-papua-pemilu-pakai-sistem-noken-begini-cara-mainnya



Petugas KKPS dan PPD mengangkut kotak suara dan logistik Pilkada 2024 lainnya ke atas mobil saat hendak didistribusikan dari Kantor Distrik Kamuu, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah ke kampung-kampung di Distrik Mauwa
(Dok. Jubi Papua)

konflik antar warga ini melibatkan pendukung Caleg di beberapa distrik, diantaranya Distrik Wonwi, Distrik Dokome, Distrik Yaimo, Distrik Pagaleme, Distrik Mulia, Distrik Yambi, Distrik Irimuli, Distrik Muara dan Distrik illu. Lanjutnya, ada 62 orang yang terluka akibat pertikaian tersebut". [36] Situasi konflik yang sarat intimidasi menyebarkan ketakutan yang menurunkan tingkat partisipasi publik dalam pemilihan umum.

Asas Bebas. Asas bebas menjamin pemilih dapat memberikan suara tanpa paksaan dari pihak mana pun, sehingga bebas menggunakan hak pilihnya. Namun kronik Pemilu 2024 menunjukkan adanya kasus di mana masyarakat Papua tidak dapat memilih secara bebas. Intervensi dari pihak-pihak berkepentingan, termasuk intimidasi dari kontestan pemilu maupun petugas penyelenggara di lapangan, sangat dirasakan oleh para pemilih.

"Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima laporan pada tanggal 19 Februari 2024 bahwa terjadi pengancaman terhadap dua Pengawas TPS di Distrik Waibu. Pengancamnya diduga warga setempat. Ketua Bawaslu

[36] Cenderawasih Pos tanggal 16-17 Februari 2024

Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas mengatakan pengancaman itu membuat kedua Pengawas TPS trauma. Mereka sampai menangis seharian. Rumbewas tidak menjelaskan bentuk intimidasi terhadap kedua Pengawas TPS tersebut. Dia hanya mengatakan tindakan itu dikategorikan kekerasan fisik dan verbal". [37]

"Ratusan simpatisan salah satu Caleg dari Distrik Wame melakukan penyerangan ke Kantor DPRD Jayawijaya, tempat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Jayawijaya Senin,11 Maret. Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan Polres Jayawijaya".[38]

Di Papua, tindakan yang menghilangkan **rasa bebas** memilih, berupa ancaman, intimidasi, kekerasan fisik, dapat terjadi dan dialami bukan hanya oleh pemilih yang mempunyai hak suara, tetapi juga dialami oleh petugas penyelenggara Pemilu yang ada di lapangan.

Asas Rahasia. Suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia. Sistem noken, menghilangkan nilai asas ini. Karena tidak ada rahasia lagi, karena sudah ada kesepakatan bersama untuk hak suara diberikan kepada siapa? Mulai dari calon presiden, calon legislatif, calon gubernur dan bupati.

Meskipun sistem noken tidak berlaku di seluruh wilayah Papua dan hanya berlaku di hanya di 11 wilayah di Tanah Papua, tetapi cara ini perlu dibahas secara mendalam tentang kekuatan dan juga kelemahannya. Sistem noken, menghilangkan nilai kerahasiaan. Tidak ada rahasia, para pemilih mau memilih kandidat siapa, karena semua dibicarakan dan diputuskan bersama. Proses ini juga tidak dapat dipastikan keadilannya, karena dapat dipastikan bahwa kelompok yang berkuasa yang akan mengatur/mengarahkan kepada siapa suara kelompok harus diberikan.

Asas Jujur. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya. Asas ini menjadi sangat sulit diukur, karena

[37] Koran JUBI 22-24 Februari 2024
[38] Koran JUBI tanggal 12 Maret 2024

potensi kecurangan terasa sangat nyata dan muncul dalam kasus-kasus kecurangan pemilu. Nilai kejujuran yang harusnya dipegang teguh oleh kandidat atau kontestan pemilihan umum, dan juga para petugas penyelengara pemilu sangat kurang, terlihat dalam banyaknya kasus penyelewengan hasil pemilihan umum. Mulai dari kasus "serangan fajar" yang masih terus terjadi dan sepertinya sudah dianggap sebagai hal yang "normal", Ketika kertas suara dibeli dengan rupiah, pemilih, menggunakan hak pilihnya bukan karena keputusan pemilih sendiri berdasarkan hati nurani, tetapi karena suaranya dibeli.

Asas Adil. Penyelenggara pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum. Melihat banyaknya kasus pelanggaran pemilu di Papua, seperti yang ada dalam kronik 2024, sekaligus menjadi jawaban, bahwa pemilihan umum di Papua, belum berlangsung secara adil. Kelompok kontestan yang mempunyai modal banyak, relasi dan koneksi kuatlah yang bisa menjadi pemenang dalam pesta yang harusnya demokratis.

"Seorang ASN berinisial S tertangkap tangan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke, Papua Selatan atas dugaan money politik pada Rabu 14 Februari sekitar pukul 02.00 dini hari, di areal Kelapa Lima, Merauke. Dari tangan yang bersangkutan diamankan sejumlah uang dan alat peraga surat suara dimana dalam surat suara tersebut tercantum nama Caleg yang diminta dipilih.[39] Kasus ini, hanya salah satu contoh, dari sekian banyak kasus yang terjadi saat pemilu, di seluruh tanah Papua. Politik uang, menjadi penyakit kronis yang merusak nilai keadilan dalam asas pemilihan umum.

Plus Minus Sistem Noken

Sistem noken, tas anyaman khas Papua, tidak hanya berfungsi sebagai wadah tetapi juga sebagai simbol identitas dan kearifan lokal. Dalam konteks pemilu, noken digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan suara masyarakat secara kolektif. Sistem noken, sebagai representasi dari nilai-nilai kearifan lokal Papua, memiliki peran penting dalam memperkuat identitas dan kohesi sosial masyarakat. Namun,

[39] Koran JUBI tanggal 16-17 Februari 2024

penerapannya dalam konteks pemilu modern menimbulkan dilema. Di satu sisi, sistem ini menghormati tradisi dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dalam konteks konflik yang sering terjadi di Papua, menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu. Selain itu, prinsip 'satu orang satu suara' yang menjadi dasar demokrasi modern, sulit diterapkan secara penuh dalam sistem noken, sehingga berpotensi mengabaikan hak-hak individu.

Penggunaan sistem noken dalam pemilu di Papua mencerminkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh daerah ini. Konflik, akses terbatas, dan perbedaan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pelaksanaan pemilu yang demokratis. Pada Pemilu 2024, sebanyak sebelas kabupaten di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan masih menggunakan sistem noken sebagai metode pemilihan. Komisi Pemilihan Umum melalui keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilhan Umum mengumumkan 11 wilayah yang mengikuti pemilu dengan Sistem Noken adalah Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Intan Jaya, Kab. Paniai, Kam Deiyai, Kab Dogiay untuk provinsi Papua Tengah. Kab. Nduga, Kab. Yahukimo, Kab. Jayawijaya, Kab. Lanny Jaya, Kab. Maberamo Tengah, Kab. Tolikara, untuk Provinsi Papua Pegunungan (tidak semua distrik).[40]

Menarik untuk dicatat bahwa sebagian besar wilayah yang menerapkan sistem noken di Papua juga merupakan daerah konflik aktif. Dengan adanya konflik bersenjata, militerisasi, dan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, muncul pertanyaan mendasar: Apakah pelaksanaan pemilu di wilayah-wilayah ini benar-benar mencerminkan kehendak rakyat? Mengingat kondisi keamanan yang tidak stabil dan potensi manipulasi suara, sulit untuk memastikan bahwa sistem noken yang diterapkan di daerah konflik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ada kekhawatiran bahwa sistem ini justru dimanfaatkan

[40] Berita diakses pada tanggal 10 Februari 2025; https://www.cnbcindonesia.com/research/20240214111941-128-514124/11-wilayah-di-papua-pemilu-pakai-sistem-noken-begini-cara-mainnya

untuk kepentingan politik tertentu, mengabaikan hak-hak politik masyarakat, dan memperburuk polarisasi di tengah masyarakat.

Konflik di Papua karena pemilu telah terjadi beberapa kali. Salah satu contoh kasus konflik adalah pada pilkada di Puncak Jaya, Papua Tengah. Konflik ini terjadi karena perbedaan sistem pemilihan, di mana sistem noken yang digunakan di Papua Pegunungan berbeda dengan sistem ikat yang digunakan di Papua Tengah. Dalam sistem ikat, pengambilan keputusan untuk memilih kandidat tertentu dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin kepala suku. Perbedaan sistem ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik di antara masyarakat.

"*Ribuan masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua (AM-OAP) Papua Tengah yang berasal dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya melakukan aksi demonstrasi damai di Jalan Merdeka, persis di persimpangan SMA YPPK Adhi Luhur dan SMP YPPK St. Antonius Nabire terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Tengah. Aksi tersebut menuntut hasil kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 terutama di enam kabupaten yang yang sistem pemilu menggunakan noken yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak namun diakui bahwa suara akar rumput tak memberikan hak pilih kepada calon legislatif terutama buat calon DPR RI.* [41]

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi penggunaan sistem noken dalam pemilihan umum di beberapa daerah di Papua, penting untuk diingat bahwa sistem ini tetap membutuhkan pengawasan dan evaluasi yang ketat. Baik Peraturan KPU maupun putusan Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya menjaga integritas dan keabsahan pemilu, termasuk dalam konteks penggunaan sistem noken. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem noken harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh pemilih terjamin, proses pemilu berjalan dengan adil dan transparan, serta mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan.

[41] Koran JUBI, 15 Maret 2024

Penutup

Pemilihan umum di Papua, khususnya yang menggunakan sistem noken, menyajikan tantangan unik dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun sistem ini memiliki akar budaya yang kuat, namun implementasinya dalam konteks modern menghadapi berbagai kendala. Potensi manipulasi suara, kurangnya transparansi, dan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik menjadi beberapa masalah utama. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat sipil. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak pilih, serta pengawasan yang ketat terhadap proses pemilu menjadi langkah-langkah krusial. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem noken dan melakukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam jangka panjang, solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan pemilu di Papua tidak hanya terletak pada perbaikan sistem pemilu semata, tetapi juga pada upaya membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta penyelesaian konflik yang berkepanjangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, dan adil di seluruh wilayah Papua.

Kronik Pemilihan Umum

01 Februari

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Papua, menyebut wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata di Tanah Papua berpotensi menjadi ancaman di Pemilu mendatang. Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan pemetaan Komnas HAM wilayah yang memiliki basis kelompok sipil bersenjata diantaranya Kabupaten Nduga, Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Lanny Jaya, Dogiyai, Paniai dan Maybrat. Lanjut Frits, daerah yang jumlah penduduknya terbanyak juga berpotensi terjadi gesekan seperti Mimika, Wamena, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Sorong dan Manokwari. Menurut Frits, potensi kerawanan Pemilu juga diperkuat dengan KPU dan Bawaslu yang minim melakukan sosialisasi ke masyarakat (Cenderawasih Pos).

02-03 Februari

Sekitar 15.000 prajurit TNI akan mengamankan pemilu 14 Februari 2024 di enam provinsi di Tanah Papua. Lima belas ribuan TNI tersebut terdiri dari sekitar 10 ribu untuk wilayah teritorial Komando Daerah Militer atau Kodam XVII/Cenderawasih dan lima ribu untuk wilayah teritorial Kodam XVIII/Kasuari. *"Untuk prajurit organik yang disiapkan di seluruh Papua (Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah) ada sebanyak 4.579, sedangkan Satgas ada 6.300. Tentunya kami harapkan pelaksanaan Pemilu di Papua berlangsung aman, damai dan lancar,"* kata Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen Izak Pangemanan di Kota Jayapura, Kamis (01/02) (Koran Jubi).

02 Februari

Komandan Korem 174/ ATW Brigjen TNI Agus Widodo, menjamin pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di wilayah teritorial Korem 174/ATW yang meliputi 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mimika, Papua Tengah akan berlangsung aman dan kondusif. *"Kami TNI dan Polri telah memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Pemilu Serentak pada*

tanggal 14 Februari 2024 akan berlangsung aman dan kondusif," tegas Danrem Agus Widodo pada apel gelar pengamanan Pemilu di Makorem 174/ ATW, Tanah Miring Merauke, Kamis (01/02) (Cenderawasih Pos).

03 Februari

Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan mengalami kekurangan surat suara sebanyak 12.761 lembar. Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengungkapkan kekurangan 12.761 surat suara tersebut terungkap setelah dilakukan penyortiran dan pelipatan, ditemukan adanya surat suara yang cacat dan rusak. *"Jadi kekurangan ini merupakan surat suara yang rusak dari 4 kabupaten cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan yang dilaporkan KPU kabupaten kepada kami,"* jelas Theresia Mahuze saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (02/02). Adapun logitik surat suara yang mengalami kekurangan yaitu surat suara DPR RI dari kebutuhan sebanyak 376.442 lembar yang baru terpenuhi 373.458 lembar atau masih kekurangan 1.984 lembar (Cenderawasih Pos).

07 Februari

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke melayangkan surat klarifikasi ke KPU Kabupaten Merauke terkait dugaan hilangnya 612 lembar surat suara DPR RI saat dilakukan sortir terhadap surat suara tersebut. *"Kami mengajukan surat ke KPU Kabupaten Merauke meminta klartifikasi terkait dugaan hilangnya 612 lembar surat suara DPR RI,"* kata Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke Agustinus Mahuze kepada wartawan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke, Selasa (06/02). Menurut dia, dugaan hilangnya 612 lembar surat suara DPR RI tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke saat pelipatan dan sortir dilakukan (Cenderawasih Pos).

09 Februari

Sebanyak 60 personel Batalyon D Satuan Brimob Polda Papua ditugaskan melakukan pengamanan Pemilu di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Apel pergeseran pasukan (Serpas) 60 personel yang akan BKO ke Polres Yahukimo tersebut dipimpin Danyon D Sat Brimob Polda Papua Merauke Mayor Suparmin di Lapangan

Upacara Mako Batalyon D Sat Brimob Polda Papua Merauke, Rabu (07/02). Diketahui bahwa hingga saat ini Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah di Papua yang sampai saat ini masih bergejolak. Sejumlah warga sipil maupun aparat keamanan menjadi korban kekerasan dari KKB. Karena itu, saat Serpas tersebut Danyon Mayor Suparmin mengingatkan seluruh anggotanya untuk selalu waspada (Cenderawasih Pos).

12 Februari

Majelis Rakyat Papua gelar deklarasi Pemilu damai dan mengeluarkan Keputusan perlunya keberpihakan dan perlindungan hak Politik OAP pada Pemilu serentak 2024. Hal ini berlandaskan pada Keputusan MRP No.2/MRP/2024 yang disampaikan anggota MRP perwakilan utusan wilayah adat Sarmi, Andreas Gustaf Meset pada acara deklarasi Pemilu damai di Aula Hotel Rivior Sarmi, Sabtu (10/02) (Cenderawasih Pos).

15 Februari

- Komite Nasional Papua Barat Konsulat Indonesia menilai Pemilu 2024 tidak akan mengubah nasib rakyat Papua. Hal itu disampaikan Ketua KNPB Konsulat Indonesia Hiskia Meage di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (13/02). *"Pemilu tidak ada harapan untuk merubah nasib bangsa Papua,"* ujarnya. Meage mengatakan saat ini banyak rakyat Papua yang masih berada di daerah pengungsi akibat konflik bersenjata di berbagai wilayah Tanah Papua. Meage menilai kampanye Pemilu damai di Papua hanyalah pembohongan publik, sebab Papua belum sepenuhnya aman dari konflik (Koran Jubi).
- Empat Kabupaten di Provinsi Papua, dipastikan bakal melakukan pemungutan suara susulan Pemilu Pilpres dan Caleg lantaran logistik yang belum juga tiba di lokasi akibat terkendala cuaca. Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, menyebut empat Kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom. Untuk Kabupaten Keerom sendiri kata Steve, terdapat di Distrik Towe, Kampung Milki dengan 200 DPT, sementara di Kabupaten Sarmi terdapat di

Distrik Apawer Hulu dengan jumlah 10 kampung. Untuk Kabupaten Waropen terdapat di Distrik Kirihi satu kampung dan di Kabupaten Mamberamo Raya berada di Distrik Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roufair (Cenderawasih Pos).

- Proses pencoblosan dalam Pemilu 2024 yang dilakukan di Kota Jayapura banyak dikeluhkan. Tak sedikit warga yang mengaku tak bisa memilih dengan berbagai alasan. Kecurigaan muncul telah terjadi kecurangan di berbagai TPS. Yang paling banyak dikeluhkan adalah saat tiba di TPS ternyata surat suara sudah digunakan oranglain. *"Saya bingung dan kecewa sebab didaftar hadir pemilih ternyata nama saya sudah ada yang tandatangan dan sudah pasti bukan tandatangan saya,"* kata Ribka, salah satu pemilih di TPS 005 Kelurahan Wanho, Distrik Abepura. Insiden kurang mengenakan lainnya dialami dua wartawan di TPS 025 Kelurahan Waimhorok, Distrik Abepura saat melakukan peliputan pencoblosan. Meski telah menunjukan ID Card Pers namun tidak lantas membuat keduanya bisa bekerja leluasa, bahkan keduanya sempat diusir karena dianggap tidak membawa surat tugas dari kantor (Cenderawasih Pos).
- Sebanyak 259 orang Warga Binaan di Lapas Narkotika Kelas II Jayapura, Doyo Lama, Sentani, Kabupaten Jayapura tidak bisa mencoblos. Hal ini dikatakan Kepala Lapas Narkotika Kelas II Jayapura, Doyo Lama, Sentani, Samaludin Bogra, melalui Kepala Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Doyo Lama, Sentani Deni Zora Artami kepada wartawan Cenderawasih Pos, Rabu (14/02) kemarin. Dikatakan 259 orang WB Lapas Narkotika Kelas II Jayapura tidak bisa mencoblos di Pemilu 20204 karena mereka tidak terdata di DPT yang belum tervalidasi data kependudukannya. Sedangkan yang bisa mencoblos karena sudah masuk di DPT KPU berjumlah 240 orang (Cenderawasih Pos).

16-17 Februari

- Seorang ASN berinisial S tertangkap tangan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke, Papua Selatan atas dugaan *money* politik pada Rabu (14/02)

sekitar pukul 02.00 dini hari, di areal Kelapa Lima, Merauke. Dari tangan yang bersangkutan diamankan sejumlah uang dan alat peraga surat suara dimana dalam surat suara tersebut tercantum nama Caleg yang diminta dipilih (Koran Jubi).

- Pemungutan suara 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayawijaya banyak menimbulkan perbincangan, mulai dari keterlambatan penyebaran logistic ke setiap TPS, warga pemilih yang kesulitan mencari TPS hingga ada TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara. Yance Tenoye, dari Tim Peduli Demokrasi Jayawijaya mengatakan saat hari pencoblosan diduga ada sekitar 70% dari 100 TPS dikelurahan Wamena tidak dilaksanakan pemungutan suara. Yance mempertanyakan kinerja atau sikap Bawaslu Jayawijaya terkait dengan pemilihan di Distrik Wamena Kota dari 100 TPS yang banyak tidak melaksanakan pemungutan suara (Koran Jubi).
- Pelaksanaan Pemilu 2024 di 9 daerah Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, diklaim berjalan relatif aman dan lancar. Sembilan daerah operasi Damai Cartenz 2024 meliputi tiga provinsi yakni Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah, yang terdiri dari Kabupaten Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Mimika, Jayawijaya dan Jayapura. *"Sepanjang pelaksanaan hingga pasca pemungutan suara Pemilu relatif berjalan baik dan lancar serta tidak ada gangguan-gangguan dari kelompok TPNPB maupun Kelompok Kriminal Politik,"* kata Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani di Kota Jayapura, Kamis (15/02). Ia mengatakan, secara menyeluruh, kondisi keamanan di Tanah Papua aman terkendali, mulai dari pelaksanaan pendistribusian logistik sampai dengan proses pemungutan suara Pemilu (Koran Jubi dan Cenderawasih Pos).
- Lantaran perselisihan antar massa pendukung anggota Caleg, pelaksanaan pencoblosan di Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah sempat terganggu. Data kepolisian menyebut ada 6 distrik yang terpaksa melakukan pencoblosan susulan karena situasi keamanan tidak mendukung. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, saat dikonfirmasi membenarkan aksi saling serang tersebut. Dijelaskan bahwa konflik antar warga ini melibatkan pendukung Caleg di beberapa

distrik, diantaranya Distrik Wonwi, Distrik Dokome, Distrik Yaimo, Distrik Pagaleme, Distrik Mulia, Distrik Yambi, Distrik Irimuli, Distrik Muara dan Distrik illu. Lanjutnya, ada 62 orang yang terluka akibat pertikaian tersebut (Cenderawasih Pos).

- Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius Fakhiri membenarkan adanya pesawat Caravan Asian One yang ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Milawak, Beoga, Kabupaten Puncak Provinsi Papua Tengah Jumat (16/02) pagi. Diduga penembakan tersebut ada kaitannya dengan proses penghitungan surat suara khususnya untuk Caleg. Karenanya ia meminta para Caleg yang maju kemudian merasa keberatan dengan hasil bisa menempuh cara-cara yang bermartabat. *"Ini semua berkaitan dengan suara tapi kami pastikan ini hanya untuk mengganggu proses yang sedang berjalan. Tapi saya sudah perintahkan kepada Kapolsek untuk mengawal agar segera memindahkan hasil ke kabupaten jika sudah selesai,"* jelas Fakhiri di Mapolda Papua (Cenderawasih Pos).

19 Februari

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya, Yoakim Mujizau, membantah logistik Pemilu dirampas KKB. *"Informasi perampasan logistik adalah Hoax, itu tidak terjadi. Saya sendiri bersama anak buah bahkan ada aparat Polisi juga yang mengantar logistik dari Kampung Sugapa Lama ke Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya,"* ucap Yoakim saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, (18/02) tadi malam. Yoakim tak menampik bahwa logistik tersebut dijaga oleh KKB, hanya saja soal isu perampasan itu yang tidak dibenarkan. Termasuk adanya penghadangan pada (13/02) sore, namun sudah dinegosiasikan sehingga logistik Pemilu bisa didistribusikan ke Ditrsik Hitadipa dengan aman (Cenderawasih Pos).

22-24 Februari

Bawaslu Kabupaten Jayapura menerima laporan pengancaman terhadap dua Pengawas TPS di Distrik Waibu. Pengancamnya diduga warga setempat. Ketua Bawaslu Kabupaten Jayapura Zacharias Rumbewas mengatakan pengancaman itu membuat kedua Pengawas

TPS trauma. Mereka sampai menangis seharian. *"Intimidasinya luar biasa. Mereka sampai ketakutan dan trauma. Ini sudah berhari-hari dialami, dan korban hanya tinggal menangis karena ketakutan,"* kata Rumbewas, Senin, 19 Februari 2024. Rumbewas tidak menjelaskan bentuk intimidasi terhadap kedua Pengawas TPS tersebut. Dia hanya mengatakan tindakan itu dikategorikan kekerasan fisik dan verbal (Koran Jubi).

22-24 Februari

Logistik untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayawijaya telah tiba di Wamena, Rabu (21/02). Logistik tiba di Bandara Wamena sekitar pukul 14.30 WP dengan menggunakan pesawat kargo maskapai Rimbun Air dengan pengawalan Polres Jayawijaya, termasuk saat dinaikkan ke truk sampai menuju kantor KPU Jayawijaya. Ketua KPU Jayawijaya, Tinus Wuka mengatakan logistik PSU yang akan digunakan untuk Distrik Wamena di tiga kelurahan, Sinakma 2 TPS, Sinapuk 16 TPS, dan Wamena Kota 72 TPS, ditambah Kampung Musaima II dan Distrik Hubikiak sebanyak 4 TPS (Koran Jubi).

01-02 Maret

Pertikaian antar massa pendukung Caleg Pemilihan Umum 2024 terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Selasa (27/02). Bentrok itu menyebabkan seorang warga bernama Supir Murib (60) meninggal dunia. Sejumlah bangunan serta kendaraan bermotor di sana dibakar massa. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi di Kota Jayapura pada Rabu (28/02) membenarkan adanya peristiwa itu. Ia mengatakan bentrok antarwarga itu terjadi di Kampung Wuyukwi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya (Koran Jubi).

02 Maret

- Diduga dipicu karena keributan yang terjadi di kantor Bawaslu yang melibatkan warga kampung yang tidak terima soal hasil Pemilu, Polisi yang melakukan pengamanan justru menjadi sasaran. Sekelompok massa mendatangi kantor Bawaslu di Elelim kemudian

melakukan penyerangan kepada petugas. Ini terjadi di Kampung Landikma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo, Kamis (29/02) kemarin. Wakapolres Yalimo Unding Alimuddin menyampaikan bahwa insiden ini diduga berawal dari keributan di Kantor Bawaslu yang melibatkan masyarakat dari Kampung Landikma, Distrik Abenaho yang merasa keberatan hasil pleno di Distrik Abenaho. Jadi sekelompok massa dari Distrik Abenaho tiba di Kantor Bawaslu dengan menggunakan tiga mobil dan membawa senjata tajam dan membuat keributan (Cenderawasih Pos).

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Papua, Desi Wanggai menyebutkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada pada November 2024 di daerah tersebut sebesar Rp 90 miliar. *"Kami telah menganggarkan tahap pertama sebesar 40 persen atau Rp26 miliar melalui APBD Perubahan 2023 dan pada 2024 kami anggarkan 60 persen atau Rp64 miliar,"* kata Desi Wanggai di Jayapura, Kamis (29/02). Menurut Wanggai, mekanisme pencairan anggaran pilkada di daerah itu terbagi di mana 50 persen akan dicairkan lima bulan sebelum pilkada kemudian 10 persen sebulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 (Cenderawasih Pos).

04-05 Maret

- Agenda pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kantor DPRD Jayawijaya, Jumat (01/03) siang, harus batal lantaran sejumlah massa dari Distrik Asotipo mendatangi kantor DPRD dengan membawa berbagai alat tajam. Massa aksi mencari Panitia Pemilihan Distrik Asotipo dan membuat keributan. Massa melakukan penganiyaan terhadap seorang komisioner KPU Jayawijaya, Alpius Asso. Sejumlah kaca dan pintu kantor DPRD Jayawijaya juga rusak. Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, mengatakan massa yang mendatangi kantor DPRD Jayawijaya ingin mencari PPD Asotipo, tetapi dihadang oleh anggota Brimob yang mengamankan jalannya rencana pleno. Namun kelompok pemuda berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dan melihat ada komisioner KPU, lalu melakukan penganiayaan (Koran Jubi).

- Keributan yang diiringi suara rentetan tembakan sempat terjadi saat rekapitulasi suara tingkat Distrik Nabire pada Sabtu (02/03) Pkl. 13:36 WIT, di Kantor Distrik Nabire Kota. Menurut Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, suasana segera terkendali dan aparat mengambil tindakan terukur dengan menembakan peluru hampa. Melansir berita di situs RRI. co.id pada 2 Maret 2024, sempat beredar video berdurasi satu menit sembilan detik di berbagai grup whatsapp terkait insiden tembakan yang terjadi di Distrik Nabire kota saat digelarnya rapat rekapitulasi suara di Kantor Distrik Nabire, Kabupaten Nabire (Koran Jubi).

05 Maret

- Pada Minggu (03/03) sekitar Pkl. 18.16 WIT, Kantor KPU Yahukimo diserang oleh massa Caleg. Massa Caleg meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Setelah selesai menyampaikan dan hendak menyuruh massa pulang, tiba-tiba massa melemparkan batu ke arah personel gabungan TNI-Polri. Dari kejadian tersebut, 1 ASN bernama Harun Siep (36) mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan akibat lemparan batu (Cenderawasih Pos).
- Akibat sengketa Pemilu yang belum terselesaikan dua kubu dari Partai PPP dan Nasdem bentrok di Kampung Yokobak Distrik Nogi Kabupaten Lanny Jaya, Minggu (03/03). Bentrok ini mengakibatkan satu korban atas nama Netinus Jigibalom terkena panah (Cenderawasih Pos).

06 Maret

- Hari ketiga pleno KPU Kabupaten Merauke, Kepolisian Resor Merauke menurunkan 180 personel untuk mengamankan jalannya pleno tersebut. Kapolres menjelaskan bahwa personel yang dilibatkan pengamanan dari Polres Merauke dan Brimob Merauke ini kemungkinan akan berlanjut untuk pengamanan rapat pleno KPU tingkat Provinsi Papua Selatan. *"Diharapkan kepada personel Polri yang dilibatkan pengamanan agar dapat melaksanakan tugas ini dengan iklas dan penuh rasa tanggung jawab,"* tambahnya (Cenderawasih Pos).

- Aksi demo kembali terjadi di Depan Kantor DPRD Jayawijaya, dimana demo tersebut ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya untuk membatalkan hasil pleno 4 distrik yang telah dilakukan sebelumnya, aksi tersebut memicu KPU Jayawijaya juga membatalkan pelaksanaan pleno yang untuk hari Selasa (05/03). Dalam aksi demo tersebut koordinator lapangan Simson Asso meminta untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya memberikan penjelasan terkait perbedaan hasil perolehan suara tingkat distrik dengan hasil suara yang dibacakan oleh PPD. Mereka juga menuntut kepada Bawaslu dan KPU agar menindaklanjuti kecurangan-kecurangan dilakukan oleh Festus Asso dan Iwan Asso dalam yang melakukan penghilangan suara dari Caleg lain kepada Festus Asso yang mengakibatkan masalah di beberapa distrik (Cenderawasih Pos).

12 Maret

Ratusan simpatisan salah satu Caleg dari Distrik Wame melakukan penyerangan ke Kantor DPRD Jayawijaya, tempat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU Jayawijaya Senin (11/03). Simpatisan yang diduga dari salah satu Caleg berjumlah sekitar 200 orang melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan yang bertugas mengamankan pleno tingkat Kabupaten di Kantor DPRD Kabupaten Jayawijaya, sehingga ada 14 orang yang langsung diamankan Polres Jayawijaya. Kapolres Jayawijaya AKBP, Heri Wibowo ketika dikonfirmasi membenarkan adanya penyerangan tersebut, dimana aksi itu terjadi setelah pleno tingkat kabupaten untuk Distrik Wame di skorsing oleh komisioner KPU, kemudian masyarakat yang berjumlah kurang lebih 200 orang memaksa masuk ke dalam kantor DPRD selanjutnya langsung melakukan penyerangan dengan menggunakan panah, kertapel dan batu terhadap personel yang melakukan pengamanan (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

13 Maret

Seribuan orang asli Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Orang Papua di Provinsi Papua Selatan menggelar aksi demo damai

di lingkaran Brawijaya Merauke, Selasa (12/03). Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya 'Kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP' dan sebagainya. Orasi dilakukan secara bergantian. Salah satu orator, Theodor Tawaru mengatakan bahwa orang Papua memiliki kasih yang sangat besar. Hanya saja kasih yang tulus tersebut sering disalahgunakan. "*Karena itu, hari ini terpaksa kami turun ke jalan. Kami turun ke jalan untuk menyuarakan hak-hak politik kami"* (Cenderawasih Pos).

15 Maret

Ribuan masyarakat yang menamakan Aliansi Masyarakat Orang Asli Papua Tengah yang berasal dari Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya melakukan aksi demonstrasi damai di Jalan Merdeka, persis di persimpangan SMA YPPK Adhi Luhur dan SMP YPPK St. Antonius Nabire terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Tengah. Aksi tersebut menuntut hasil kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 terutama di enam kabupaten yang yang sistem pemilu menggunakan noken yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak namun diakui bahwa suara akar rumput tak memberikan hak pilih kepada calon legislatif terutama buat calon DPR RI (Koran Jubi).

06 April

Perkara tindak pidana Pemilu, pada kasus operasi tangkap tangan (OTT) di TPS 30 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura masuk pada tahap tuntutan JPU. Dalam surat tuntutan yang dibacakan JPU di PN Jayapura pada, Kamis (04/04) malam, 4 orang terdakwa masing-masing dituntut 6 bulan penjara, sementara satu diantaranya 5 bulan penjara. Menanggapi hal itu Kuasa Hukum Terdakwa, Albar Yusuf, menilai tuntutan JPU tersebut sangat tidak berdasar. Sebab perbuatan para terdakwa yang diduga melanggar pasal 516 dan 517 UU Pemilu tersebut bukan bagian dari tindak pidana, tetapi hanya pelanggaran administratif. Karena itu, tidak semestinya perkara itu

dibawa sampai ke Pengadilan, namun hanya diselesaikan pada tingkat Bawaslu. Apalagi Bawaslu telah memberikan sanksi tegas atas kasus itu berupa sanksi administratif berupa pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan pada Sabtu 24 Februari 2024 lalu (Cenderawasih Pos).

27 April

Jaksa Penuntut Umum Kejari Jayapura mengeksekusi Terpidana Tindak Pidana Pemilu, Onhes Jems Youwe ke Rutan Kelas II Jayapura, Jumat (26/04). Kajari Jayapura melalui Kasi Intel Bertho Sohilait, mengatakan eksekusi Terpidana Tindak Pidana Pemilu ini dilakukan berdasarkan Putusan Negeri Jayapura Nomor: 108/Pid.Sus/2024/ PN Jap. Tanggal 18 April 2024 lalu. Adapun dalam putusan tersebut menyatakan terdakwa Onhes Jems Youwe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Atas pertimbangan itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Onhes Jems Youwe dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari, kemudian pidana denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah). Apabila Terpidana tidak dapat membayarkan denda senilai yang diputuskan maka diganti dengan denda kurungan selama 5 (lima) hari (Cenderawasih Pos).

03 Juni

Buntut dari persoalan lama hasil Pemilu, dua kelompok suku di Kabupaten Nduga, terlibat konflik. Dari konflik yang terjadi tak jauh dari halaman Kantor DPRD Nduga tersebut seorang pria bernama Lingganus Gwijangge tewas. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Adi Prabowo mengatakan, personel Polres Nduga saat ini masih fokus menangani pertikaian antar kelompok masyarakat di Kenyam, Nduga. Pertikaian antar kedua kelompok masyarakat kembali terjadi buntut dari kesepakatan pembagian hak suara saat pemilu yang menggunakan sistem noken. *"Peristiwa tersebut kembali terjadi pada Sabtu (01/06) sekitar pukul 15.00 WIT di depan Kantor DPRD Kabupaten Nduga,"* ucap Kabid Humas (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Oknum Komisioner KPU Kabupaten Asmat Mikhael C. Takanyuai dan Kasubag Teknis Sekretariat KPU Asmat Juwita Clara Iriani yang didakwa dalam kasus pengalihan suara Caleg di Kabupaten Asmat dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk terdakwa Michael dituntut selama 1 tahun penjara denda Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan. Sementara terdakwa Juwita dituntut selama 1 tahun 3 bulan penjara, denda Rp 10 juta subsidair 3 bulan kurungan. Oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), kedua terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 dimana bunyi dari pasal tersebut yakni setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan seorang peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan atau perolehan suara menjadi berkurang diancam dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta. Atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum dari terdakwa Juwita Clara Irian yakni Frederika Korain, Relika Tambunan dan Edi Amoye mengajukan pembelaan terhadap terdakwa (Cenderawasih Pos).

05 Agustus

Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan memutuskan untuk menunda pleno penetapan kursi hasil Pemilu 2024. Ini setelah KPU Papua Pegunungan menerima surat dari KPU RI mengingat ada surat teregister dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI yang mana ada gugatan Parpol yang diterima. Pleno tersebut bakal dijadwalkan kembali usai mendapatkan surat rekomendasi dari KPU RI. Ketua KPU Papua Pegunungan, Daniel Jingga menyatakan terkait dengan pleno penetapan kursi dan penetapan calon terpilih untuk DPR Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada Kamis (01/08) akhirnya ditunda (Cenderawasih Pos).

13 Agustus

Ratusan warga asal Kabupaten Tolikara melakukan aksi longmars dan membakar ban di seputaran Jalan Hom-Hom Wamena menuju ke Kantor KPU Provinsi Papua Pegunugan guna menyampaikan aspirasinya

Senin (11/08). Hal ini dipicu dari menjelang pendaftaran bupati dan wakil bupati, KPU RI memberhentikan sementara ketua dan dua anggota KPU Tolikara. Dalam aksi tersebut, massa menuntut 5 hal yang perlu direalisasikan oleh KPU Papua Pegunungan, dan harus dilakukan dalam waktu singkat sebab mereka ingin mendirikan tenda dan bermalam di depan kantor KPU untuk menunggu hasil dari tuntutan mereka kepada KPU RI. Untuk tuntutan pertama Forum Lintas Masyarakat dan Pemuda Bersatu se Kabupaten Tolikara menuntut kepada KPU RI dan KPU Papua Pegunungan, KPU Provinsi Papua Pegunungan bertanggungjawab atas pemberhentian sementara ketua dan dua anggota KPU Tolikara karena apa yang dilaporkan kepada KPU RI tidak benar. Kedua, Kami meminta KPU RI segera mengaktifkan kembali Ketua dan dua komisioner KPU Tolikara karena menghambat pendaftaran pilkada yang sementara akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Ketiga apabila ketua dan dua komisioner KPU Tolikara tidak aktif kembali dalam waktu dekat ini massa akan kejar dan mengancam ketua KPU Papua Pegunungan (Cenderawasih Pos).

15 Agustus

Buntut aksi demo yang dilakukan sekelompok masyarakat pada Senin (11/08) yang meminta pada KPU Provinsi Papua Pegunugan untuk mengaktifkan kembali ketua dan dua komisioner KPU Tolikara berujung pembakaran Kantor KPU Papua Pegunungan yang berada di Jl Hom hom Wamena. Kejadian itu terjadi Rabu (14/08) sekitar Pkl. 07.30 WIT. Pembakaran kantor KPU itu sesuai dengan aspirasi yang disampaikan pada poin kelima yakni KPU RI harus bertangungjawab apabila ada masalah yang terjadi terhadap kantor KPU Papua Pegunungan. Dan tepat dua hari kemudian massa melakukan pembakaran. Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo mengatakan dari pembakaran tersebut pihaknya telah mengamankan puluhan orang asal Kabupaten Tolikara ke Polres Jayawijaya namun setelah dikembangkan ternyata jumlahnya berubah menjadi 85 orang (Cenderawasih Pos).

31 Agustus

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan secara resmi menyerahkan dokumen pernyataan orang asli Papua dari bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, Jumat (30/08). Penyerahan dokumen ini dilakukan Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze diterima Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu disaksikan Pansus MRP Papua Selatan yang akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Penyerahan dokumen ke MRP ini setelah KPU Provinsi Papua Selatan menutup pendaftaran Bapaslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Diketahui, ada 4 Bapaslon yang telah mendaftar dan diterima KPU Provinsi Papua Selatan yakni Bapaslon Darius Gebze-Petrus Safan, Bapaslon Apolo-Safanpo, Paskalis Imadawa, Bapaslon Romanus Mbaraka-Albertus Muyak dan Bapaslon Nikolaus Kondomo-Bidin Kurita (Cenderawasih Pos).

24 September

Guna mengantisipasi perkembangan situasi saat proses demokrasi Pilkada 2024, sebanyak 4000 personel Polda Papua disiapkan untuk melakukan pengamanan. Ini disampaikan Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo menanggapi adanya kelompok massa yang masuk pada malam penetapan Minggu (22/09) malam. Benny menyampaikan semua masih terkontrol dan kembali kondusif. Selain itu tidak ada upaya penambahan personel. *"Untuk personel pengamanan di kantor KPU Papua tidak ada penambahan,"* ujar Kombes Benny saat dihubungi Cenderawasih Pos, Senin (23/09). Diketahui Polda Papua telah mengerahkan sekitar 4000 personel Polri untuk pengamanan Pilkada 2024. Jumlah tersebut kata Kombes Benny sesuai dengan Surat Perintah Kapolda Papua. *"4000 Personel itu telah kita dibagi dan diberangkatkan ke dalam empat wilayah tugas masing-masing yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan,"* jelas Kombes Benny (Cenderawasih Pos).

04 Oktober

Menjelang Pilkada Serentak 2024, Polda Papua telah mempersiapkan ribuan personel yang handal dan matang dari segi pengalaman, fisik hingga pengetahuan. Kombes Pol. Sugandi mengatakan anggota Polri yang bertugas dalam rangkaian pengamanan Pilkada 2024 diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan. Tak hanya kesiapan fisik itu, anggota yang bertugas untuk pengamanan Pilkada juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup tentang Pemilu (Cenderawasih Pos).

10 Oktober

Adanya informasi Pilkada serentak 2024 di beberapa wilayah di Tanah Papua diprediksi tidak berjalan dengan normal. Hal itu disebabkan adanya isu potensi keberadaan KKB yang bisa "dipakai" oleh Paslon tertentu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey dalam keterangan persnya kepada wartawan, pada Senin (30/09). Frits meminta para Paslon kepala daerah di Tanah Papua tidak melibatkan KSB yang berpotensi melakukan kekerasan dalam pesta demokrasi mendatang. Menangapi dengan adanya informasi itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendalami ada isu tersebut (Cenderawasih Pos).

02 November

Komnas HAM RI fokus melakukan pemantauan tahapan Pilkada serentak 2024 di Tanah Papua. *"Papua menjadi salah wilayah yang menjadi fokus pemantauan Komnas HAM RI karena konflik yang sering terjadi saat pilkada memang sangat tinggi,"* kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM RI Pramono Ubaid Tanthowi di Jayapura, Jumat (01/11), Menurut Pramono, Komnas HAM RI juga telah membentuk tim yang akan bekerja memantau penyelenggaraan pemilihan umum 2024 pada titik-titik yang menjadi fokus (Cenderawasih Pos).

22 November

Dalam rangka mengamankan Pilkada Serentak di Kota Jayapura, Polresta Jayapura Kota akan menambahkan 100 personel yang tergabung

pasukan Bawah Kendali Operasi. Hal itu diungkapkan Polresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Victor D. Mackbon, saat menghadiri apel gelar pasukan di Taman Imbi Pusat Kota Jayapura Kamis (21/11) pagi (Cenderawasih Pos).

22 November

Sebanyak 300 personel Brimob dari Mabes Polri, Kamis (21/11) tiba di Jayapura untuk membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah Papua. Kepala Biro Operasi Polda Papua, Kombes Pol I Ketut Gede Wijatmika di Jayapura, Kamis mengakui, ratusan personel Brimob itu telah tiba dan akan digeser sesuai dengan rencana. Anggota Brimob itu akan didistribusikan ke beberapa wilayah strategis di wilayah hukum Polda Papua untuk membantu pengamanan selama Pilkada Serentak 2024. Personel tersebut dibagi yakni ke Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan sebanyak 98 personel dari Resimen IV Pelopor di bawah pimpinan Iptu Agus Kuncara. Kemudian Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebanyak 94 personel dari Resimen IV Pelopor yang dipimpin Danmen IV Paspor Kombes Ahmad Arief Sophian Sedangkan sisanya 108, akan ditempatkan di wilayah lainnya sesuai rencana tugas operasional, kata Kombes I Ketut Wijatmika (Cenderawasih Pos).

25 November

- Kepolisian Daerah Papua Barat menggeser 50 personel untuk mengawal distribusi logistik maupun pengamanan Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak. Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Fakfak, mengatakan distribusi logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Fakfak menuju 17 distrik dilakukan sejak Sabtu (23/11). Guna mendukung kelancaran tahapan Pilkada 2024 di daerah itu, pihak kepolisian setempat senantiasa bersinergi dengan jajaran TNI untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas penyelenggara Pemilu (Cenderawasih Pos).
- Sebagai bagian dari upaya memastikan kelancaran proses pemungutan suara di Pulau Numfor, Kapolres Biak Numfor, AKBP Ari

Trestiawan secara resmi melepas pasukan pengamanan kotak suara di Mapolres Biak Numfor. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mengawal distribusi logistik Pemilu dari Pulau Biak ke Pulau Numfor. Pulau Numfor memiliki 49 TPS yang tersebar di lima distrik. Sebanyak total 38 personel dikerahkan untuk mendukung distribusi logistik sekaligus mengawal jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Biak Numfor menekankan pentingnya pengamanan selama seluruh tahapan Pemilu berlangsung (Cenderawasih Pos).

27 November

Polresta Jayapura Kota terjunkan personelnya untuk amankan 575 TPS di Pilkada pada 27 November. Hal itu disampaikan Kapolresta Kombes Pol. Victor D. Mackbon usai memimpin pelaksanaan apel pengecekan dan pergeseran personel pengamanan TPS pada Operasi Mantap Praja Cartenz-2024 di Lapangan Karang depan PTC Entrop, Senin (25/11). Kapolresta menegaskan ke setiap personelnya bahwa mereka yang lakukan pengamanan pada masing-masing TPS adalah garda terdepan (Cenderawasih Pos).

28 November

Diduga karena perebutan suara yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya memicu konflik dua kelompok massa pendukung. Situasi sempat mencekam lantaran dua kelompok akhirnya saling serang menggunakan panah dan busur. Ada tiga orang menjadi korban akibat benda tajam. Bahkan ada salah satu warga yang terkena panah persis di bagian mata sebelah kanan. Untungnya kejadian ini tak berlangsung lama karena aparat kepolisian langsung turun ikut melerai konflik tersebut. Kejadian ini terjadi di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya sekitar Pkl. 08.45 WIT mengakibatkan tiga orang mengalami luka serius dan sejumlah rumah dibakar. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan ketiga korban telah di evakuasi dari Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya menuju Bandara Sentani untuk dilarikan ke RSUD Dok II Jayapura, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut (Cenderawasih Pos).

29 November

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua menyampaikan bahwa secara keseluruhan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua telah selesai pada, Rabu (27/11). Namun, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyebut masih ada catatan penting yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan pemungutan suara kali ini. Ada beberapa distrik yang akhirnya dilakukan Pemilu susulan. *"Masih ada catatan penting dari sembilan kabupaten/kota itu ada kabupaten yang melaksanakan pemungutan suara itu secara serentak tetapi juga ada yang melaksanakan pemilihan susulan karena banyak faktor,"* jelas Steve Dumbon saat menggelar confrensi pers di Kantor KPU Papua, Kamis (28/11) siang. Steve mengatakan ada enam Kampung di Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi akan menyelenggarakan pemilihan susulan. Itu karena distribusi logistik terkendala cuaca dan surutnya air sungai sehingga menyebabkan perahu atau kapal tak bisa melintas. Steve menyebut enam kampung di Distrik Apawer Hulu, 7 Kabupaten Sarmi yang akan menyelenggarakan pemilihan susulan diantaranya kampung Tamaja (1 TPS), Airoran (1 TPS), Sasawapece (1 TPS), Maniwa (1 TPS), Bina (1 TPS), dan Kampung Borabora (2 TPS). *"Enam Kampung tersebut yang tidak dapat mengikuti pemilihan di tanggal 27 November kemarin, nanti akan dilakukan pemilihan susulan,"* ungkapnya (Cenderawasih Pos).



Korina Ayer [Kanan] didampingi pendamping, sedang merabah template braille berisi kertas suara pada Pilkada Papua 2024, 27 Novemember 2024 di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Papua.
(Dok. Jubi/Yuliana Lantipo)

BAB VI

KONFRONTASI DAN REPRESI TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI PAPUA 2024

Oleh Goklian PH Lumban Gaol OFM

Pengantar

Salah satu hakikat manusia adalah mengekspresikan dirinya melalui kata-kata dan tindakan untuk dipahami oleh orang lain, serta mengerti orang lain dengan cara mendengarkannya. Hal ini dikenal sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi (Kramer 2021: 25).[42] Di Papua, kebebasan berpendapat dan berekspresi sepanjang tahun 2024 masih ditanggapi dengan sangat konfrontatif dan represif. Respon aparat yang konfrontatif dan represif terhadap orang-orang Papua yang menyampaikan pendapat di muka umum, tentu saja menimbulkan pertanyaan: ada apa dengan orang atau tanah Papua sehingga senantiasa diperlakukan demikian?

Pemetaan Kronik

Pada tahun 2024, berbagai fakta terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua terbagi menjadi lima bagian besar. Pertama, masyarakat Papua dari berbagai elemen menyampaikan aspirasi mereka melalui demonstrasi dan aksi damai dengan berbagai tema. Kedua, respon aparat yang konfrontatif dan represif dalam menghadapi demonstrasi

[42] Kramer, Matthew H., 2021, *Freedom of Expression as Self-Restraint*, Oxford: Oxford University Press.

masyarakat Papua yang mengekspresikan pendapatnya di muka umum, sering kali diwarnai dengan tindakan keras dan penekanan terhadap para demonstran. Ketiga, intimidasi terhadap pegiat media juga terjadi, seperti insiden pelemparan bom molotov ke kantor redaksi media Jubi, yang menunjukkan upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Keempat, ada penambahan pasukan dan pembentukan pasukan khusus untuk menangani gerakan-gerakan masyarakat Papua, termasuk penambahan personel dari berbagai kesatuan yang menunjukkan intensifikasi operasi keamanan di Papua. Kelima, kegiatan militer telah masuk dalam wilayah sipil, dengan pelibatan militer dalam operasi-operasi di wilayah perbatasan dan pedalaman Papua yang sering kali berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Semua ini mencerminkan kompleksitas situasi kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua sepanjang tahun 2024.

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Ada sejumlah peristiwa kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh berbagai elemen dengan bermacam tema yang terjadi di Papua ini.

- **2 April**: Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FRPAM) melakukan demonstrasi di Kota Jayapura terkait video kekerasan yang melibatkan oknum TNI.
- **5 April**: Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua melaksanakan aksi damai di beberapa titik di Nabire, Papua Tengah.
- **10 Juni**: Mahasiswa Papua melakukan aksi demo di Renon, Denpasar, Bali, mendukung perjuangan masyarakat adat suku Awyu dan Moi dalam mempertahankan tanah dan hutan adat.[43]
- **15 Agustus**: Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memperingati Perjanjian New York 1962 dengan aksi demonstrasi di Mimika dan beberapa titik di Kota Jayapura. Pendemo mempertanyakan keabsahan Perjanjian New York yang dianggap tidak melibatkan orang Papua.

[43] https://jubi.id/nasional-internnasioanl/2024/aksi-selamatkan-hutan-papua-di-bali-diadang-polisi)



Massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memadati kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Jumat (15/11/2024). Mereka dengan tegas menolak program transmigrasi ke Papua oleh Presiden Prabowo Subianto.
(Dok. Jubi Papua)

- **30 September**: Solidaritas Mahasiswa Papua memperingati 62 tahun Roma Agreement dengan aksi demonstrasi di Jayapura, menentang kolonialisme di Papua.
- **19 Oktober**: Solidaritas Anti Terorisme (Solat) Papua menggelar aksi protes terhadap pelemparan bom molotov di Kantor Jubi, menuntut penangkapan pelaku aksi teror tersebut.
- **2 Desember**: Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) menggelar aksi peringatan 1 Desember di Kota Makassar. Aksi ini diwarnai represi, namun tidak ada rencana pengibaran bendera Bintang Kejora.[44]
- **17 Desember**: Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua menggelar demonstrasi damai di depan Mapolda Papua, meminta pengungkapan kasus pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Jubi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan kritikan keterlambatan penanganan kasus bom molotov, *'62 Hari Bom*

[44] https://jubi.id/polhukam/2024/penjelasan-mahasiswa-dibalik-bentrokan-aksi-peringatan-1-desember-di-makassar/

Molotov di Kantor Redaksi Jubi'. Spanduk itu juga bertuliskan '*153 hari penembakan Christian Yang Warinussy'*. *'Kami tidak diam'*. Massa aksi juga membawa payung hitam yang ditempel tulisan '*Tangkap Pelaku Bom Molotov'*. Ada juga pamflet berisi kritikan *'Di Hutan Cepat Tapi di Kota Lambat'*, *'Jurnalis Diteror Bukan Pura-Pura, Polisi Bekerja Kura-Kura'*. *Ada juga tulisan kritikan 'Macam Diam Ka? Sunyi Adalah Tanda Persetujuan'*, *'Kalau Pelaku Tidak Diungkap Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura Kota Mundur dari Jabatan'*.[45]

2. Respon Aparat terhadap Kebebasan Berpendapat

Menghadapi berbagai kegiatan kebebasan berpendapat dan berekspresi di Tanah Papua, sebagian besar respon aparat adalah konfrontatif dan represif:

- Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon, menyatakan bahwa pihaknya memberi ruang untuk aksi demo selama sesuai aturan. Namun, jika aksi mengganggu ketertiban umum atau hak orang banyak, maka akan dibubarkan. "Bila memenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku menurut Undang-undang maka aksi tersebut akan kami ijinkan dan fasilitasi agar tidak mengganggu ketertiban umum, namun jika dalam melakukan aksinya nanti mengganggu ketertiban umum atau kepentingan hak orang banyak, maka sudah tentu akan ditangani sesuai SOP kami. Bubarkan," tegas Kapolresta.
- Sebanyak 62 orang dari Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FMRPAM) ditangkap dan ditahan di Sentani. "Kami secara paksa diangkut ke truk dalmas dengan cara didorong. Dan beberapa orang dapat pukul tapi tidak sampai berdarah," kata koordinator lapangan aksi FMRPAM, Kenias Payage. Kepala Kepolisian Resor Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen, menyatakan massa diamankan karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

[45] https://jubi.id/polhukam/2024/jurnalis-dan-pembela-ham-unjuk-rasa-di-polda-papua-sebut-pengusutan-kasus-molotov-di-kantor-jubi-lambat/

- Polisi membubarkan demonstrasi Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua di Nabire, Papua Tengah. Yohanes Giyai mengungkapkan bahwa "Kami dihadang oleh pihak kepolisian dan mereka membubarkan massa aksi secara brutal menggunakan tembakan peringatan yang disertai gas air mata." Sebanyak 16 orang diamankan dan satu orang luka berat di bagian kepala.
- Polisi membubarkan aksi demo Mahasiswa Papua di Renon, Denpasar, Bali. Sebelum pernyataan sikap dibacakan, polisi mendorong massa dan menembakkan gas air mata. Beberapa orang mengalami luka-luka, dan empat mahasiswa serta seorang aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali ditahan, namun kemudian dibebaskan. [46]
- Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha mengatakan bahwa KNPB telah memasukkan surat pemberitahuan terkait aksi peringatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962, namun tidak diberikan izin. "Dalam surat itu mungkin mereka akan orasi di DPRD saja," ujar Kapolres. Langkah-langkah antisipasi termasuk meminta cadangan dari Brimob Batalyon B Pelopor, Polda Papua.
- Kepolisian membubarkan demo KNPB pada tanggal 15 Agustus di beberapa titik di Kota Jayapura. Polisi menyatakan bahwa aksi tanpa ijin dan terindikasi melakukan tindakan anarki.
- Solidaritas Mahasiswa Papua melakukan aksi demontrasi memperingati 62 tahun Roma Agreement di Jayapura. Karena aksi ini tidak mengantongi izin dan dianggap mengganggu aktivitas warga, aparat meminta mahasiswa untuk menggelar aksi di depan kampus.
- Aksi Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) di Makassar dihadang oleh aparat kepolisian. "Massa aksi keluar dari Asrama Papua yang dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap), kemudian kita diadang di depan pagar. Massa aksi menerobos dan berhasil sampai di pintu utama, kemudian diadang lagi oleh pihak kepolisian dengan tameng," kata Ferdy Tekege. Negosiasi tidak berhasil, dan massa aksi berhasil menerobos berikade meski mendapat pukulan tongkat pemukul.

[46] https://jubi.id/nasional-internnasioanl/2024/aksi-selamatkan-hutan-papua-di-bali-diadang-polisi

- Sekelompok oknum anggota TNI dari Batalyon 756/Wimane Sili (WMS) melakukan penyerangan ke Polres Jayawijaya, mengakibatkan kerugian materil. Kejadian ini bermula dari keributan di Pilamo Futsal oleh oknum TNI.

3. Intimidasi terhadap Media

Selain tindakan konfrontatif dan represif terhadap orang-orang yang melakukan aksi kebebasan berpendapat dan berekspresi, tindakan terorisme juga dialami oleh pegiat media di Tanah Papua. Kantor redaksi media Jujur Bicara, atau lebih dikenal dengan nama Jubi, dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada Rabu dini hari, 16 Oktober 2024. Kantor Jubi terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. "Dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor terbakar dan rusak," ucap Pemimpin Redaksi (Pemred) Jubi, Jean Bisay, melalui siaran pers pada hari yang sama. Jean mengatakan pelemparan bom molotov itu dilakukan oleh dua orang tak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bom tersebut dilemparkan dari pinggir jalan di depan Kantor Redaksi Jubi, membuat api berkobar di antara dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor. "Api sempat membakar sebagian bagian depan mobil Toyota Avanza dan Toyota Calya itu, tetapi akhirnya dipadamkan oleh dua karyawan Jubi dan sejumlah saksi mata," tuturnya.[47]

4. Penambahan pasukan dan pembentukan pasukan khusus

Pada tahun 2024, terdapat beberapa peristiwa penting terkait penambahan pasukan, pembentukan pasukan khusus, dan tindakan kekerasan oleh aparat di Papua:

- **6 Januari**: Sebanyak 30 personel Polri dari Polda Papua tiba di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel, sebagai bagian dari Operasi Mantap Brata 2024 untuk memperkuat pengamanan Pemilu 2024.

[47] https://www.tempo.co/hukum/kantor-redaksi-jubi-di-jayapura-papua-dilempar-bom-molotov-277941



Aksi Damai Solidaritas untuk pengungkapan kasus terror bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi, 16 Oktober 2024.
(Dok. Jubi Papua)

- **1 Maret**: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi (Koops) Habema untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di Papua. Juru Bicara JDP, Yan Cristian Warinussy, menyebut pembentukan Koops Habema menunjukkan negara melihat Papua sebagai wilayah konflik tanpa langkah kemanusiaan.
- **16 April**: Kepolisian Daerah Jambi mengirim 100 personel Satuan Brimob (Satbrimob) untuk pengamanan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Papua dalam rangka Operasi Amole 2024.
- **8 Mei**: Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca menyatakan bahwa Operasi Damai Cartenz 2024 bertujuan melindungi masyarakat dari gangguan OPM. Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Kombes Pol Faizal Ramadhani menyatakan bahwa operasi ini berhasil dalam mengungkap kasus-kasus yang melibatkan anggota OPM. *"Kami telah melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan terukur terhadap OPM pada sembilan wilayah, dan tentunya penegakan hukum ini dilakukan secara tegas dan terukur,"* katanya
- **21 September**: Danlantamal XI, Laksamana TNI Joko Andriyanto, melaksanakan upacara penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG sektor Selatan Yonif 144/JY yang akan menggantikan Yonif 111/Karma Bakti

yang purna tugas. Ratusan prajurit tiba dengan KRI dr. Soeharso (SHS).

- **10 Oktober**: Sebanyak 100 personel Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diberangkatkan dalam penugasan sebagai Satgas Amole Tahap II 2024 di Papua untuk menjaga keamanan dan stabilitas objek vital nasional.

5. Kegiatan Militer di Wilayah Sipil

Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 111/KB bertugas mengamankan wilayah perbatasan Papua Selatan melalui program Binter Kitorang Basudara. Mereka berupaya membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada warga pedalaman perbatasan Papua Selatan pada Kamis (15/02). Berbagai upaya telah dilakukan Satgas dalam bidang pendidikan, peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan kesehatan yang termasuk dalam Program Binter Kitorang Basudara. Dansatgas Letnan Kolonel Inf. Agus Satrio Wibowo mengungkapkan bahwa program unggulan seperti Kampung Pancasila, Kampung Sehat, Kampung Damai, dan Kampung Sejahtera adalah upaya Satgas untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil perbatasan Papua Selatan (Cenderawasih Pos, 16 Februari).

Catatan analitis

Hukum di Indonesia telah mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 Pasal 28E menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa "hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat mencakup hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak setiap orang untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran, terlepas dari pembatasan." Secara universal, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga dinyatakan dalam Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 1, yang menyatakan bahwa "semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan." Pasal 19 DUHAM juga menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas."

Undang-undang dan ketentuan-ketentuan di atas menegaskan bahwa setiap orang diberikan hak dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi tanpa gangguan dan tanpa pembatasan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak setiap orang yang harus dihargai dan dijamin oleh negara. Merujuk pada fakta tahun 2024 terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi di Tanah Papua, hak ini tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Pasal 28E, UU No. 12 Tahun 2005, serta DUHAM Pasal 1 dan Pasal 19. Respon-respon negara melalui aparat keamanan terhadap orang-orang yang mengekspresikan kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat konfrontatif dan represif. Pelarangan atau pembatasan untuk melaksanakan kebebasan berpendapat dan berekspresi serta respon kasar dan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang menyampaikan pendapat terjadi sepanjang tahun 2024. Para pegiat media, seperti Jubi, juga mendapatkan serangan teror melalui pelemparan bom molotov ke Kantor Jubi pada Oktober 2024.

Dengan penambahan pasukan di berbagai tempat di Tanah Papua, pelaksanaan operasi-operasi TNI-POLRI seperti Operasi Mantap Brata di Merauke, Operasi Amole, Operasi Damai Cartenz, serta pembentukan Pasukan Khusus (Komando Operasi/KOOPS) menunjukkan pendekatan kekerasan dan militerisme di Tanah Papua. Pengamat Militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Made Supriatma mengatakan bahwa operasi militer di Papua tidak memiliki hasil dalam penyelesaian konflik

di Papua. "Faktanya adalah 58 tahun lebih Indonesia berperang di Papua dan tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah ini secara militer."

Lebih jauh, wajah militerisme semakin terasa di Tanah Papua. Ranah-ranah sipil seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat mulai dimasuki oleh aparat militer. Program Binter Kitorang Basudara di perbatasan Papua Selatan, di mana Satgas melakukan pengobatan gratis, mengajar di sekolah, dan peningkatan ekonomi, menunjukkan tren yang semakin terasa di Tanah Papua. Apakah ini keberuntungan atau malapetaka bagi orang Papua?

Penutup

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2 menyebutkan bahwa Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. Rumusan undang-undang ini dengan jelas menyatakan fungsi dan tugas negara terhadap warganya. Fakta kebebasan berpendapat dan berekspresi selama tahun 2024 menunjukkan ketidakhadiran negara terhadap warganya. Pendekatan konfrontatif dan represif, pengerahan pasukan, dan pembentukan pasukan khusus menjadi sinyal bahwa negara tetap melakukan pendekatan keamanan di Papua. Pendekatan ini telah dilaksanakan selama 58 tahun, namun hingga kini persoalan di Papua belum selesai. Maka, pendekatan-pendekatan damai, persuasif, serta dialog perlu menjadi alternatif untuk menghadapi hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi di Tanah Papua.

Kronik Kebebasan Berekspresi: Teror Jurnalis dan Aktivis Papua Merdeka

05-6 Januari

Badan Pengurus KNPB Wilayah Yahukimo, Senin (01/01) telah melangsungkan pelantikan badan pengurus baru KNPB sektor Solbi. Ketua BPW KNPB Yahukimo, John Suhun melalui rilisnya yang diterima Jubi pada Kamis (04/01), menyampaikan pelantikan pengurus baru pada sektor Solbi berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Sekretaris Umum KNPB wilayah Yahukimo, Nifal Enggalim, dengan struktur baru sektor Solbi yang diketuai oleh Menggel Soma dan Wakil Ketua, Meni Balingga (Koran Jubi).

02 April

Rencana aksi demo damai yang dilakukan Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FRPAM) pada Selasa (02/04) ditanggapi Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon. la menyatakan bahwa pihaknya memberi ruang untuk aksi demo selama semua sesuai aturan. Bahkan pihaknya bisa memfasilitasi jika kelompok tersebut memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku di NKRI. Hanya saja jika aksi yang dilakukan nantinya mengganggu ketertiban umum atau kepentingan hak orang banyak tentunya akan dibubarkan. *"Bila memenuhi syarat formil sesuai peraturan yang berlaku menurut Undang-undang maka aksi tersebut akan kami ijinkan dan fasilitasi agar tidak mengganggu ketertiban umum, namun jika dalam melakukan aksinya nanti mengganggu ketertiban umum atau kepentingan hak orang banyak, maka sudah tentu akan ditangani sesuai SOP kami. Bubarkan,"* tegas Kapolresta Senin (01/04) siang. Kapolresta menerangkan, aksi keramaian yang akan diaspirasikan kelompok tersebut masih terkait video kekerasan yang viral akhir-akhir ini dengan pelaku oknum TNI (Cenderawasih Pos).

03-04 April

Sebanyak 62 orang dari Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FMRPAM), yang hendak melakukan aksi damai di

Sentani ditangkap dan ditahan sejak pukul 7 pagi pada Selasa (02/04). Ratusan anggota TNI/Polri menggunakan tujuh mobil Dalmas polisi, tiga kendaraan milik TNI, dua mobil Water Canon, tiga mobil patroli polisi dan sebagian menggunakan motor. Sebagian dari massa kemudian diangkut paksa oleh aparat TNI/Polri saat melakukan orasi di kawasan lampu merah Sentani. *"Kami secara paksa diangkut ke truk dalmas dengan cara didorong. Dan beberapa orang dapat pukul tapi tidak sampai berdarah,"* kata koordinator lapangan aksi FMRPAM, Kenias Payage. Padahal, kata Payage, pihaknya hanya melakukan aksi secara damai. Mereka hanya mau menyatakan aspirasi di depan umum terkait darurat militer di Tanah Papua. Kepala Kepolisian Resor Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen menyatakan massa diamankan, karena dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang beraktivitas. Pihaknya akan segera melepaskan massa aksi tersebut setelah melakukan identifikasi terhadap mereka (Koran Jubi).

03 April

Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militer (FMRPAM) menggelar demonstrasi di beberapa titik di Kota Jayapura, Selasa (02/04) kemarin. Beberapa titik tersebut yakni di Perumnas II Waena, Kampus USTJ, Gapura Uncen bawah dan Lingkaran Abepura. Sekitar pukul 09.00 WIT aparat yang berjaga-jaga di lokasi aksi melakukan pembubaran paksa. Dalam melakukan pembubaran paksa tersebut polisi mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan para pendemo membuat mereka berlarian melewati rumah-rumah penduduk (Cenderawasih Pos).

05 April

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon mengungkapkan bahwa potensi aksi demo yang dilakukan seperti beberapa hari lalu di Uncen oleh kelompok mahasiswa yang anti militeristik diprediksi masih mungkin dilakukan. Hasil pemantauan dan analisa yang dilakukan aparat kepolisian menyebutkan bahwa isu anti militeristik ini memang sedang digoreng sana sini dan sedang diupayakan untuk terus terjadi protes. Meski demikian Kapolres menegaskan bahwa pihaknya

tidak melarang dilakukan aksi selama semua sesuai prosedur dan tidak dipaksakan. Namun jika tetap dipaksakan maka diyakini kondisinya masih akan sama seperti sebelumnya dimana ada bentrok dan ada yang terluka. *"Kami prediksi bahwa aksi serupa masih bisa dilakukan karena memang tujuannya itu. Terus menyuarakan soal anti militeristik dan dilakukan diberbagai daerah. Tapi semua kan ada aturannya,"* kata Kapolresta menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos, Kamis (04/04) kemarin di Polsek Muara Tami (Cenderawasih Pos).

06 April

Aparat keamanan membubarkan aksi demo yang digelar oleh Front Rakyat Peduli Hak Asasi Manusia Papua di beberapa titik di Nabire, Papua Tengah, Jumat (05/04) kemarin. Aksi damai tersebut dilaksanakan di depan RSUD Nabire, Pasar Karang, dan Pasar SP 1 Nabire. Penanggung jawab aksi FRPHAMP Nabire, Yohanes Giyai mengakui adanya pembubaran aksi massa oleh aparat kepolisian di beberapa titik. *"Kami dihadang oleh pihak kepolisian dan mereka membubarkan massa aksi secara brutal menggunakan tembakan peringatan yang disertai gas air mata,"* ungkap Yohanes Giyai. Selain membubarkan aksi massa, aparat kepolisian juga mengamankan beberapa orang. Seperti di depan RSUD Siriwini menurutnya sebanyak 16 Orang diangkut ke Polres Nabire. *"Dimana satu orang luka berat di bagian kepala dan sebagian luka ringan,"* kata Yohanes Givai (Cenderawasih Pos).

15 Agustus

Kepolisian Resor Mimika kini tengah disiagakan untuk mengantisipasi aksi peringatan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang rencananya akan dilakukan oleh KNPB, 15 Agustus 2024. Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha mengatakan, KNPB telah memasukkan surat pemberitahuan terkait dengan aksi tersebut. Namun, kata Kapolres pihaknya tidak memberikan izin. *"Dalam surat itu mungkin mereka akan orasi di DPRD saja,"* ujar Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha, kepada wartawan di Markas Komando Polres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Mimika, Papua Tengah, Rabu (14/08). Terkait langkah-

langkah antisipasi, Kapolres menyebut telah meminta cadangan dari Brimob Batalyon B Pelopor, Polda Papua. Kapolres menegaskan, pihaknya sudah mendeteksi pos-pos yang nantinya dijadikan titik antisipasi (Cenderawasih Pos).

16 Agustus

Aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok massa dari KNPB akhirnya, Kamis (15/08) digelar. Sejumlah kabupaten dilakukan aksi demo termasuk di Kota Jayapura. Untuk Jayapura sendiri dilakukan di empat titik mulai dari Perumnas III, Lingkaran Abepura, Gapura Uncen Abepura dan Buper Waena. Hanya dari jumlah massa terlihat jika aksi ini hanya dilakukan oleh tim militant yang dimiliki KNPB padahal sebelumnya sudah banyak undangan dan selebaran yang dibagikan termasuk lewat media social. Disini pendemo mempertanyakan kembali keabsahan "kawin paksa" New York Agreement yang dikatakan tidak melibatkan orang Papua kala itu. Perjanjian inilah yang akhirnya menjadi akar dimana Papua bisa bergabung dengan Republik Indonesia. Demo di empat titik ini juga dilakukan pembubaran paksa. Hal tersebut tak lepas dari para pendemo melakukan aksi tanpa mengantongi ijin dari aparat kepolisian termasuk terindikasi melakukan tindakan anarki (Cenderawasih Pos).

12 Juni

Polisi menghadang mahasiswa Papua saat melakukan aksi di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Aksi yang dilakukan pada Senin (10/06) untuk mendukung perjuangan masyarakat adat suku Awyu dan Moi dalam mempertahankan tanah dan hutan adatnya. Sebelum pernyataan sikap dibacakan, polisi mendorong massa aksi dan menembakkan gas air mata. Lima orang dari pihak masaa berinisial HM, SG, MA, LM dan IK mengalami luka-luka karena ditendang dan dipukul oleh oknum polisi. Sedangkan 4 lainnya, berinisial AM, MK, MA dan HM dibawa ke Polsek Renon dengan menggunakan mobil Dalmas. Sekitar empat puluh menit kemudian massa aksi mendatangi Polsek Renon. Mereka menuntut agar empat mahasiswa Papua dan seorang aktivis LBH Bali yang ditahan polisi segera dibebaskan. Polisi akhirya membebaskan empat mahasiswa

Papua dan satu aktivis LBH Bali yang ditahan (https://jubi.id/nasional-internnasioanl/2024/aksi-selamatkan-hutan-papua-di-bali-diadang-polisi).

01 Oktober

Memperingati 62 tahun Roma Agreement, sejumlah mahasiswa Uncen Jayapura yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua melakukan aksi demontrasi di Gapura Uncen dan Perumnas III Waena, Senin (30/09). Mahasiswa membentangkan spanduk yang bertuliskan *"Roma Agreement Ilegal di Papua, Lawan kolonialisme di West Papua dan RIP Hukum Indonesia"*. Hanya saja karena aksi ini tidak mengantongi izin dan dianggap mengganggu aktifitas warga akhirnya aparat keamanan yang langsung turun berupaya meinta mahasiswa untuk menggelar di depan kampus. Akhirnya dari semula digelar di putaran Taksi Perumnas III massa kemudian bergeser ke depan gapura pintu masuk kampus Uncen atas dan disitulah orasi dilanjutkan (Cenderawasih Pos).

16 dan 17 Oktober

- Kantor redaksi media Jujur Bicara atau lebih populer dengan nama Jubi dilempari bom molotov oleh orang tak dikenal pada Rabu dini hari, 16 Oktober 2024. Kantor Jubi tepatnya berada di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua. *"Dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor terbakar dan rusak,"* ucap Pemimpin Redaksi Jubi Jean Bisay melalui siran pers, Rabu, 16 Oktober 2024. Jean mengatakan pelemparan bom molotov itu dilakukan oleh dua orang tak dikenal yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan di depan Kantor Redaksi Jubi. Lemparan bom molotov itu membuat api berkobar di antara dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor. *"Api itu sempat membakar sebagian bagian depan mobil Toyota Avanza dan Toyota Calya itu, api akhirnya dipadamkan dua karyawan Jubi dan sejumlah saksi mata."* tuturnya. Jean menyebut Kepolisian Sektor Kota (Polsek) Heram sudah datang dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Kantor Redaksi Jubi pada Rabu pagi. Polisi, kata Jean, menduga bom yang dilemparkan ini merupakan

bom molotov, lantaran kepolisian menemukan sejumlah serpihan pecahan botol kaca yang diduga bom molotov, dan bekas keset kain perca yang dijadikan sebagai sumbunya. Kepala Kepolisian Sektor Kota Heram, Iptu Bernadus mengkonfirmasi penjelasan Jean. *"Ini adalah bom molotov, yang dipergunakan di Kantor Redaksi Jubi,"* ucapnya. "Terkait bahan-bahan, kita menunggu Tim Labfor," jelas Bernandus saat mengamankan kantor Redaksi Jubi dan menunggu kedatangan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) pada Rabu, 16 Oktober 2024. Berdasarkan keterangan saksi mata, sebelum pelemparan bom molotov terjadi pada pukul 03.15 WP, kedua orang pelaku itu beberapa kali terlihat mondar mandir di depan Kantor Redaksi Jubi sejak Selasa sekitar pukul 23.00 WP. *"Dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku celana, jaket, masker, dan helm berwarna hitam,"* ucap Jean. Kemudian, menurut Jean, sekitar sekitar pukul 02.00, kedua pelaku berhenti di bawah pohon mangga yang berada di dekat kantor redaksi Jubi, mengamati keadaan di sana, lalu pergi Hingga akhirnya, sekitar pukul 03.15, kedua pelaku datang lagi, berhenti di depan pagar Kantor Redaksi Jubi, dan melemparkan dua bom molotov tersebut. Benda pertama meledak, menimbulkan kobaran api, benda kedua membuat kobaran api semakin membesar. *"Kedua pelaku sempat panik dan kesulitan menyalakan sepeda motor. Tapi kami juga takut, jadi kami tidak mendekat. Kami lalu pukul tiang listrik dan pagar untuk membangunkan warga,"* ucap Jean mengulang cerita saksi mata (https://www.tempo.co/hukum/kantor-redaksi-jubi-di-jayapura-papua-dilempar-bom-molotov-277941).

- Kantor media Jujur Bicara atau Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua menjadi sasaran teror. Kantor Redaksi diduga dilempari bom molotov pada Rabu (16/10) sekitar pukul 03.15 WIT. Dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman kantor terbakar dan rusak. Pelemparan bom molotov ini diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Bom itu dilemparkan dari pinggir jalan dan membuat api berkobar. Api membakar bagian depan mobil Toyota Avanza dan, Toyota Calya itu dan untungnya api akhirnya dipadamkan

dua karyawan Jubi. Pada Rabu pagi, polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara. Memeriksa dan mendokumentasikan sejumlah serpihan pecahan botol kaca yang diduga bom molotov. Kepala Kepolisian Sektor Kota Heram, Iptu Bernadus Ick mengatakan benda yang menyebabkan bagian dari kedua mobil operasional Jubi terbakar itu memang bom molotov. *"Ini adalah bom molotov, yang dipergunakan di Kantor Redaksi Jubi,"* kata Iptu Bernadus Ick saat mengamankan Kantor Redaksi Jubi dan menunggu kedatangan Tim Laboratorium Forensik (Labfor) (Cenderawasih Pos).

- Pihak Komnas HAM Perwakilan Papua meminta jaminan komitmen dari Polda Papua dalam pengusutan tuntas kasus pelemparan Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi pada Rabu, (16/10). Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey saat ditemui di lokasi kejadian. Frits menyebut bahwa polisi harus segera menyelesaikan kasus ini karena menyangkut nyawa serta ancaman bagi kebebasan pers di Tanah Papua (Cenderawasih Pos).

19 Oktober

Kepolisian Daerah Papua membentuk tim khusus untuk mengusut dan mengungkap kasus tersebut teror bom molotov di Kantor Redaksi Jubi Papua, 16 Oktober 2024. Seperti diketahui, dari hasil rekaman kamera CCTV tampak dua orang terekam mengendarai sepeda motor dan berhenti pas depan kantor Jubi kemudian melempar sebuah benda yang kemudian terjadi ledakan dan muncul api. Ledakan dan api ini kemudian membakar dua unit mobil operasional milik redaksi Jubi. "*Kami masih melakukan penyelidikan, kita serius menangani masalah ini dan dari Polda sudah membentuk tim khusus bersama Polresta,"* ujar Kapolda Papua, Irjen. Pol. Petrus Patrige Rudolf Renwarin kepada Wartawan, Jumat (18/10) di Mapolda Papua (Cenderawasih Pos).

22 Oktober

- Kantor Redaksi Jubi Papua pasca insiden pelemparan molotov memastikan akan melawan semua bentuk teror yang menghantui

dan tetap konsisten dalam kerja pers. Kasus terakhir pada 16 Oktober lalu juga menambah panjang rentetan kekerasan terhadap jurnalis di Papua. Bercermin dari berbagai aksi teror ini, dibentuklah Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua. Koalisi ini diketuai oleh Lucky Ireeuw yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jayapura. Lewat wadah ini juga Jubi akan melakukan perlawanan. "*Pembentukan koalisi ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis yang masih terancam oleh bentuk-bentuk kekerasan dan intimidasi,"* kata Chandry Suripaty, Jubir Koalisi di Kantor Jubi, Waena, Senin (21/10) (Cenderawasih Pos).

- Solidaritas Anti Terorisme (Solat) Papua menggelar aksi protes terhadap kasus pelemparan bom molotov di Kantor Jubi, Rabu (14/10) lalu. Koordinator aksi, Mesak Dogomo, mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap tindakan terorisme yang terjadi di tanah Papua, terutama yang menimpa Media Jubi baru baru ini. Melalui aksi tersebut pihaknya mendesak aparat kepolisian dalam hal ini Polda Papua, untuk segera menangkap pelaku aksi teror tersebut. Karena aksi teror terhadap media Jubi ini bagian dari upaya pembungkaman demokrasi, tapi juga kebebasan pers dalam mengawal jalannya pembangunan di Papua. *"Kami minta Polda Papua segera menangkap Pelaku, aksi teror di Kantor Jubi, karena tindakan ini membungkam kebebasan Pers di tanah Papua,"* tegasnya disela sela aksi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (19/10) lalu (Cenderawasih Pos).

03 Desember

Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) menggelar aksi peringatan 1 Desember di Kota Makassar pada Senin, (02/12). Berdasarkan keterangan mahasiswa, aksi diwarnai represi. Ferdy Tekege, anggota FSMP-PRP, mengaku bahwa Forum Solidaritas bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) tidak pernah melakukan ataupun berencana melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora pada aksi tersebut. Aksi mereka diadang oleh

aparat kepolisian sejak keluar dari asrama mahasiswa, Senin (02/12). *"Massa aksi keluar dari Asrama Papua yang dipimpin oleh koordinator lapangan (korlap), kemudian kita diadang di depan pagar. Massa aksi menerobos dan berhasil sampai di pintu utama, kemudian diadang lagi oleh pihak kepolisian dengan tameng, akan tetapi massa menerobos lagi kedua kalinya, kemudian massa aksi dikurung dengan mobil komandan melintang di jalan bersamaan dengan polisi yang mengadang, akan tetapi massa aksi berhasil menerobos tanpa melepaskan tali komando,"* tutur Ferdy Tekege saat dihububgi Jubi dari Dogiyai, Papua Tengah, melalui layanan pesan, Senin (02/12). Tekege mengaku setelah menembus kepungan polisi, massa aksi berjalan sekitar dua menit dan diadang kembali oleh aparat kepolisian beratribut lengkap dengan tameng, tongkat pemukul dan helm. Jalan juga dihalangi oleh mobil barigade polisi, tambahnya. Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Forum Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Peduli Rakyat Papua (FSMP-PRP) bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) membentangkan spanduk aksi sambil berhadapan dengan aparat kepolisian, Senin (02/12).

Kemudian lanjut Tekege massa aksi duduk dan berusaha bernegosiasi dengan pimpinan polisi. Negosiasi tidak berhasil, dan massa aksi bersikukuh menerobos berikade. *"Tepat saat itu massa aksi dipukul dengan tongkat pemukul, akan tetapi masa aksi berhasil menerobos,"* katanya (https://jubi.id/polhukam/2024/penjelasan-mahasiswa-dibalik-bentrokan-aksi-peringatan-1-desember-di-makassar/).

17 Desember

Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua yang terdiri dari para jurnalis dan pembela HAM menggelar demonstrasi damai di depan Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Papua, di Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/12). Mereka meminta Polda Papua segera mengungkap kasus pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Jubi yang terjadi pada 16 Oktober 2024. Aksi demonstrasi dimulai pukul 11.00 Waktu Papua. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan kritikan keterlambatan penanganan kasus bom molotov, *'62 Hari Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi'*. Spanduk itu juga bertuliskan '*153 hari penembakan*

Christian Yang Warinussy'. 'Kami tidak diam'. Massa aksi juga membawa payung hitam yang ditempel tulisan '*Tangkap Pelaku Bom Molotov'*. Ada juga pamflet berisi kritikan *'Di Hutan Cepat Tapi di Kota Lambat', 'Jurnalis Diteror Bukan Pura-Pura, Polisi Bekerja Kura-Kura'. Ada juga tulisan kritikan 'Macam Diam Ka? Sunyi Adalah Tanda Persetujuan', 'Kalau Pelaku Tidak Diungkap Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura Kota Mundur dari Jabatan'* (https://jubi.id/polhukam/2024/jurnalis-dan-pembela-ham-unjuk-rasa-di-polda-papua-sebut-pengusutan-kasus-molotov-di-kantor-jubi-lambat/).

18 Desember

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Papua menilai perlu koordinasi antara Polda Papua dengan Kodam XVII Cenderawasih untuk mengungkapkan pelaku teror bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi). Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey di Jayapura mengatakan teror bom di Kantor Redaksi Jubi dilakukan oleh orang yang sudah terlatih dan memiliki jaringan, sehingga membutuhkan koordinasi dan keberanian dalam mengungkapkan siapa pelaku peristiwa tersebut. "*Bukti dan petunjuk dalam kasus ini sudah cukup untuk mengungkap secara cepat, dan jika sekarang masih dalam tahapan pembuktian maka harus dijelaskan kepada publik pembuktian seperti apa karena ini teror bom,"* katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa, 17 Desember 2024. Menurut Ramandey, jika pihak kepolisian sudah menyampaikan perkembangan kasus ini kepada kejaksaan itu berarti sudah mengarah kepada pelaku teror bom molotov. "*Sehingga yang terpenting sekarang ialah membutuhkan koordinasi antara Polda Papua dan Kodam XVII Cenderawasih untuk mengungkapkan siapa pelakunya karena ini terkait dengan pesan teror yang menyebar ketakutan,"* ujarnya (https://www.tempo.co/hukum/62-hari-berlalu-pelaku-teror-bom-molotov-di-kantor-redaksi-jubi-tak-kunjung-terungkap--1183179).

Kronik Politik Papua Merdeka

02 Februari

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjend TNI Izak Pangemanan mengemukakan bahwa publik harus memahami bahwa isu Papua Merdeka

hanya diciptakan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Di Papua ada yang berjuang mensuport tim yang ada di luar namun yang di luar justru hidup lebih enak dan tidak sebanding dengan yang dilakukan di dalam negeri. Pangdam bahkan menyatakan bahwa tidak mungkin PBB akan ke Papua untuk membahas soal dekolonisasi Papua. "*Itu sudah ditutup, tidak ada lagi pembahasan Papua merdeka di PBB. Tim kami sudah mengecek semuanya. Bohong kalau ada yang mengatakan PBB membahas isu Papua,"* tegas Mayjend Izak usai memimpin gelar pasukan pengamanan Pemilu di Makodam XVII Cenderawasih, Kamis (1/2) (Cenderawasih Pos).

02 Februari

Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri menyampaikan agar Sebby Sembom yang selama ini menyatakan diri sebagai juru bicara TPNPB OPM atau aktivis Papua merdeka untuk menghentikan tindakan-tindakan yang selalu membohongi masyarakat. Apa yang selalu disampaikan oleh Sebby kebanyakan berisi kebohongan. Menjual isu Papua untuk mencari keuntungan pribadi (Cenderawasih Pos).

09-10 Februari

Struktur kerja ULMWP periode 2023-2028 secara resmi dikukuhkan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu (07/02). Pengukuhan itu secara organisasi dituangkan dalam berita No: 02/SE/ULMWP/II/2024. Acara Presiden Eksekutif ULMWP, Manase Tabuni mengatakan telah mengukuhkan struktur kerja 12 departemen, misi, dan fungsional ULMWP. Tabuni meminta semua pengurus yang telah dikukuhkan bekerja keras untuk menyelamatkan orang Papua dari ancaman genosida, ekosida dan etnosida. Tabuni mengatakan pengukuhan awalnya direncanakan di Taman Budaya Expo Waena, Kota Jayapura, pada Rabu pagi. Akan tetapi, kepolisian menjaga ketat lokasi kegiatan di Expo (Koran Jubi).

06-7 Maret

Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni mengatakan, beberapa inisiatif lokal diusulkan untuk membantu Jakarta menyelesaikan keluhan masyarakat Papua secara damai dan bermartabat. Namun, Pemerintah

Indonesia selalu mengabaikan tawaran orang asli Papua dari rezim ke rezim di Jakarta. Ini mengandung pertanyaan serius bagi orang Papua karena negara terus melakukan kekerasan terhadap orang Papua. *"Orang Papua meminta agar negara menuntut kemerdekaan, referendum, dialog, Jeda kemanusiaan dll. Semua tawaran orang Papua ditolak oleh pemerintah Indonesia, banyaknya intervensi kebijakan publik yang dilakukan oleh rezim-rezim di Jakarta secara berturut-turut cenderung bersifat ambigu dalam menangani pemberontakan Papua Barat, padahal permintaan orang Papua untuk referendum,"* katanya dalam siaran Pers yang diterima Jubi, Senin (04/03) (Koran Jubi).

02 Mei

United Liberation Movement for West Papua menggelar aksi demo damai 01 Mei di Gapura Uncen Abepura, Rabu (01/05) kemarin. Demo ini dilakukan sebagai peringatan hari aneksasi Indonesia terhadap Papua Barat 01 Mei 1963. Dalam surat pernyataan yang dibacakan Sekretaris ULMWP Markus Haluk, bahwa Papua Barat (West Papua) sesungguhnya bukan bagian dari wilayah Republik Indonesia, karena secara historis Papua Barat bukan bagian dari Hindia Belanda. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Selain itu aneksasi 01 Mei 1963 dilakukan tanpa pernah meminta keterlibatan dan persetujuan rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Namun pemerintah Indonesia mengurus administrasi dan mulai menempatkan pasukan-pasukan meliternya dalam jumlah besar di seluruh tanah Papua (Cenderawasih Pos).

19 Agustus

Komite Nasional Papua Barat beserta masyarakat adat Papua dan berbagai organisasi di Sorong Raya, menggelar aksi memperingati New York Agreement, di Kota Sorong, 15 Agustus 2024. Wespa Papwes Gombo, perwakilan dari Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P) mengatakan aksi ini untuk mengingat kembali perjanjian Perjanjian New York yang dibuat secara sepihak, tanpa melibatkan bangsa Papua yang setahun

sebelumnya, pada 1 Desember 1961, telah mengeluarkan manifesto untuk merdeka dan berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara. Perjanjian New York mengatur masa depan wilayah West Papua dalam 29 pasal, di mana pasal 14-21 secara khusus mengatur tentang Penentuan Nasib Sendiri yang seharusnya didasarkan pada praktik hukum internasional, yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote) (https://jubi.id/polhukam/2024/indonesia-segera-berikan-hak-penentuan-nasib-sendiri-bagi-rakyat-papua/).



Aksi Damai Mahasiswa STFT Fajar TImur dalam perayaan Hari HAM 10 Desember 2018.
(Dok. JPIC OFM Papua)

BAB VII

KRISIS KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI PAPUA: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Oleh Bernadus B. Koten

Pengantar

Dalam konteks bernegara, pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran krusial. Sebagai penyelenggara, pembuat kebijakan, dan penyedia layanan publik, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 secara tegas mengamanatkan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah.

Kesehatan dan Pendidikan di Papua

Kesehatan dan pendidikan merupakan pilar fundamental dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Kedua sektor ini saling melengkapi dan menjadi indikator penting kualitas hidup. Di Papua, permasalahan kesehatan dan pendidikan seringkali menjadi sorotan publik karena belum terselesaikan secara optimal. Lambannya respons pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini seringkali memicu keluhan masyarakat.

Berdasarkan kronik sepanjang tahun 2024, persoalan pada aspek pendidikan dan kesehatan di Papua merupakan tanggung jawab peme-

rintah daerah. Pemerintah daerah di Papua wajib bertanggung jawab memperbaiki persoalan tersebut.

Masalah Kesehatan

Beberapa persoalan seputar kesehatan masih tetap terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Perhatian terhadap sarana prasarana dan obat-obatan yang mendukung kelancaran kebutuhan dasar warga akan kesehatan belum dilaksanakan secara maksimal:

- Kasus kerusakan perumahan tenaga kesehatan di Puskesmas Pembantu di Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori. Kasus ini berdampak pada tidak ada petugas yang melayani warga di tempat itu.
- Kasus kehabisan stok obat dan alat kemoterapi di RSUD Jayapura.
- Kasus 'menghentikan sementara' 32 orang pegawai di RSUD Jayapura.
- Kasus penghentian pelayanan pasien Otsus Port Numbay Sehat.
- Kasus 40 Pustu di Merauke yang tidak beroperasi lantaran kekurangan tenaga kesehatan.
- Persoalan lahan pembangunan sarana kesehatan seperti di Puskesmas Kombas, Kabupaten Jayapura dan RSUD Abepura, Kota Jayapura.
- Kasus kekurangan sarana kesehatan di Rumah Sakit Yowari, Kabupaten Jayapura.
- Kasus kekurangan stok obat maupun alat habis pakai yang habis seperti keluhan dari puluhan pasien cuci darah karena kehabisan stok cairan.
- Kasus puluhan dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Biak Numfor yang menuntut pembayaran insentif yang telah tertunggak selama 11 bulan (Desember 2023-Oktober 2024).
- Tingginya kasus stunting dan HIV/AIDS.

Masalah Pendidikan

Cerita tentang pendidikan formal di Papua mirip dengan situasi kesehatan. Aktivitas persekolahan yang tidak berjalan, tuntutan hak dari para tenaga pengajar, serta program beasiswa bagi kaum muda-mudi Papua mewarnai kisah perjalanan pendidikan di Papua:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Moses Wandenggei, mengakui bahwa banyak guru di Boven Digoel tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mereka berbulan-bulan tinggal di kota, meninggalkan tempat tugas mereka tetapi tetap menerima gaji tiap bulannya.
- Aktivitas belajar-mengajar di SMA Negeri 1 Kaureh dan SMA Negeri Demta, Kabupaten Jayapura, tidak berjalan dengan baik karena kepala sekolah sering tidak masuk dan sebagian besar guru tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
- Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia di Merauke menggelar aksi demo damai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke, karena guru yang sudah mendapat sertifikasi tidak mendapat TPP.
- Dinas Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan memastikan banyaknya anak jalanan yang putus sekolah saat ini disebabkan karena pendidikan dasar di kampung dan distrik yang tak berjalan dengan baik.
- Minimnya fasilitas hingga guru yang jarang berada di tempat tugas menjadi bagian dari faktor pelajar belum bisa baca tulis di Papua. Sekretaris Pendidikan Provinsi Papua, Terry Wanena, menyatakan bahwa kurangnya pendampingan dari orang tua ketika anak berada di rumah juga menjadi faktor.
- Sebanyak 24 mahasiswa asli Papua penerima beasiswa Siswa Unggul Papua terancam putus sekolah dan akan dideportasi dari Amerika Serikat karena tunggakan biaya kuliah mereka.

Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab

Persoalan klasik yang terjadi berulang-ulang setiap tahun, kembali terulang di tahun 2024. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang layak berbenturan dengan ketidak-mampuan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar ini. Di dalam UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 36 menyatakan bahwa salah satu parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintah adalah aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Mengingat beberapa persoalan kese-hatan dan pendidikan yang ada, apakah ini berarti pemerintah daerah di Papua tidak mampu?

Selain peran pemerintah (badan eksekutif), peran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berkontribusi dalam pemajuan kebutuhan dasar tersebut. Di Papua, ada lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dituntut kinerjanya untuk menguatkan kebutuhan dasar Orang Asli Papua. UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 73 menyatakan bahwa DPRD provinsi berhak melaporkan gubernur kepada Menteri, dan DPRD kabupaten/kota berhak melaporkan bupati/walikota kepada gubernur. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk kesehatan dan pendidikan, harus dilaporkan.

Bagi Majelis Rakyat Papua (MRP), UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak secara terperinci menjelaskan kewenangan penuh MRP untuk menjamin jalannya kesehatan dan pendidikan di Papua. Dalam UU No. 21 Tahun 2001, Pasal 20 dinya-takan bahwa tugas dan wewenang MRP adalah memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama, baik yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak ketiga, khusus yang menyangkut perlindungan hak Orang Asli Papua. Ketentuan ini harus diterjemahkan lagi ke dalam peraturan daerah khusus.

Kurangnya Penyediaan Sarana dan Tenaga Kerja

Persoalan kurangnya penyediaan peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit pusat provinsi dan kabupaten/kota dapat dijadikan parameter terselenggaranya pelayanan kesehatan di daerah-daerah perkampungan atau terpencil di Papua. Bisa dibayangkan, bagaimana pelayanan akses kesehatan di daerah-daerah pelosok Papua. Para pihak ketiga (yayasan berlatar belakang keagamaan seperti Islam, Protestan, dan Katolik) terpaksa dilibatkan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan. Pusat kesehatan dari yayasan cukup setia melayani warga di daerah-daerah perkampungan di Papua. Hal yang sama juga terjadi pada bidang pendidikan formal. Sekolah-sekolah yang bernaung pada yayasan keagamaan masih tetap setia dan eksis sampai saat ini untuk memberantas buta aksara di wilayah pelosok Papua.



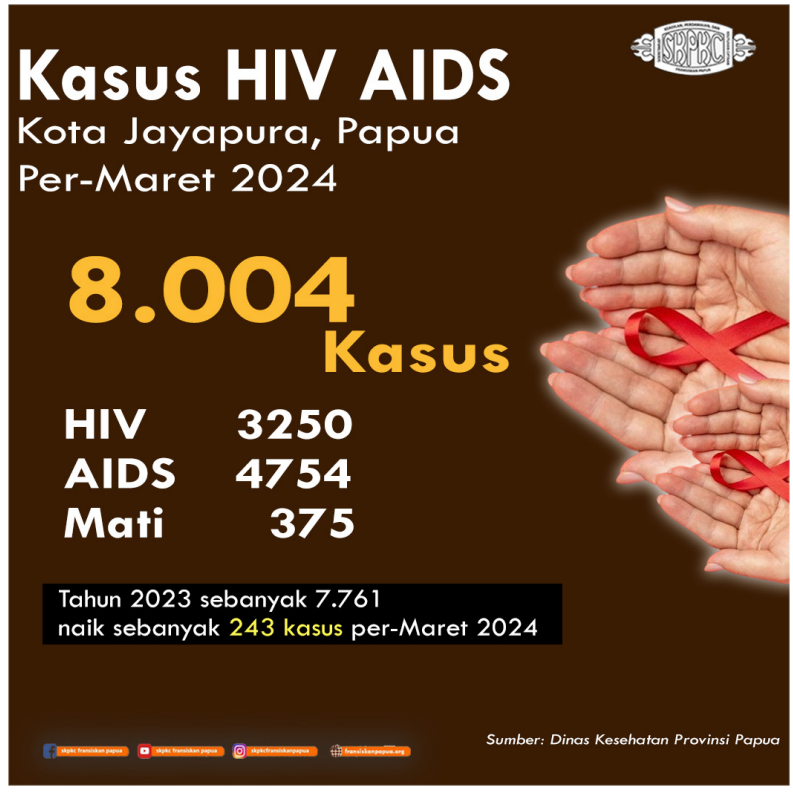
Potret Anak Sekolah Dasar di SD YPK Simporo, Kabuapten Jayapura
(Dok. JPIC OFM Papua)

Persoalan kurangnya tenaga kesehatan dan pendidikan sepatutnya tidak terjadi lagi karena hampir setiap tahun ada lulusan mahasiswa kesehatan dan pendidikan atau keguruan. Selain itu, hampir setiap tahun ada penerimaan ASN atau pegawai honor daerah yang bekerja pada dua bidang dasar ini. Penting bagi pemerintah untuk membagikan kuota berimbang terhadap petugas yang bergerak di dua bidang ini, baik di

daerah perkotaan maupun perkampungan. Di samping itu, perlu ada pengawasan yang tegas kepada aparatus yang mangkir atau lalai dalam memberikan layanan kepada warga. Ketegasan bukan hanya melalui perkataan atau berbicara di media massa tetapi melalui tindakan nyata yang tegas.

Masalah Beasiswa dan Manipulasi

Dalam bidang pendidikan, persoalan beasiswa bagi para pelajar Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua (baik di daerah lain di Indonesia maupun di luar negeri) menjadi topik yang dibahas pada tahun 2024. Para orang tua yang anaknya mendapatkan beasiswa harus melakukan demonstrasi ke pemerintah karena penyaluran dana beasiswa terhambat. Beberapa mahasiswa yang studi di luar negeri harus pulang ke Indonesia karena tunggakan biaya studi. Masalah dana yang sama juga terjadi di beberapa sekolah di daerah pedalaman Papua. Sekolah-sekolah dijadikan 'lahan bisnis' oleh oknum di Dinas Pendidikan dan tenaga pengajar. Manipulasi jumlah siswa untuk mendapatkan dana BOS atau dana bantuan pendidikan lainnya seringkali terjadi di Papua. Keluhan tentang kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta tidak terbayarnya



Infografis Kasus HIV AIDS Kota Jayapura,Papua.
(Dok. JPIC OFM Papua)

honor atau gaji bagi tenaga pendidikan seharusnya tidak terjadi. Di Tanah Papua, selain ada dana bantuan pendidikan dari APBD, ada juga dana taktis yang berasal dari Dana Otonomi Khusus. Pertanyaan yang muncul: Apakah para pelajar yang studi di luar Papua (Indonesia dan luar negeri) benar-benar diseleksi secara tepat atau berdasarkan kedekatan tertentu atau balas budi? Apakah dana bantuan pendidikan sengaja dihilangkan oleh para penyelenggara pendidikan? Siapa yang salah dan bertanggung jawab terhadap kemacetan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan?

Masalah Stunting dan HIV/AIDS

Dalam bidang kesehatan, seperti tahun-tahun sebelumnya, cerita tentang stunting atau kurangnya gizi bagi anak-anak Papua semakin menjadi tren. Pada pembahasan tahun sebelumnya di Buku Seri Memoria Passionis No. 41, *Papua: Antara Berkat dan Kutuk*, persoalan stunting seharusnya tidak terjadi di Tanah Papua karena alam Papua menyediakan beraneka makanan dan lauk-pauk. Di samping itu, angka penularan HIV/AIDS di beberapa wilayah terus meningkat. Pertanyaan yang masih sama seperti pada buku *Seri Memoria Passionis No. 41* adalah apakah pola hidup orang Papua yang berubah? Apakah pola makanan orang Papua yang berubah? Apakah semakin rendah pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka?

Penutup

Permasalahan kesehatan dan pendidikan di Papua merupakan cerminan dari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta lambannya respons dalam mengatasi masalah ini, telah memicu keluhan dan protes dari masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab utama pemerintah daerah. Namun,

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Selain peran eksekutif, peran legislatif juga sangat penting dalam mengawasi dan melaporkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Majelis Rakyat Papua (MRP) memiliki tugas untuk memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerja sama yang melibatkan hak Orang Asli Papua. Namun, ketentuan ini perlu diterjemahkan ke dalam peraturan daerah khusus untuk memastikan implementasinya berjalan efektif.

Di samping itu, peran pihak ketiga seperti yayasan keagamaan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan dan pendidikan di wilayah-wilayah perkampungan di Papua. Sekolah-sekolah dan pusat kesehatan yang didirikan oleh yayasan ini berperan penting dalam memberantas buta aksara dan menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada, diperlukan pengawasan yang tegas terhadap aparat yang lalai dalam memberikan layanan, serta kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kesehatan dan pendidikan di Papua. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan bagi korban kekerasan juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat Papua terpenuhi.

Semoga dengan adanya upaya yang lebih nyata dari semua pihak, masalah kesehatan dan pendidikan di Papua dapat terselesaikan dengan baik, dan masyarakat Papua dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik di masa depan.

Kronik Penyelenggaraan Pemerintahan

09-10 Februari

Pemerintah Kota Jayapura membangun sejumlah rumah layak huni bagi Orang Asli Papua. Pembiayaannya bersumber dari Dana Otsus Papua. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Pemukiman Kota Jayapura Nofdi J Rampi mengatakan rumah tersebut bertipe 45 dengan dua kamar tidur. Nilai pembangunan setiap sekitar Rp 300 juta per-rumah. Dia melanjutkan pembangunan rumah layak huni itu tersebar di sejumlah kampung dan kelurahan. Pembangunannya didahului dengan pendataan terhadap calon penerima manfaat program berdasarkan usulan pemerintah kampung atau kelurahan setempat (Koran Jubi).

04-05 Maret

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menetapkan APBD Provinsi Papua Selatan tahun 2024 sebesar Rp 1,9 triliun. Anggaran belanja provinsi ini masih ditentukan oleh pusat, mengingat belum terbentuknya lembaga legislatif di daerah otonomi baru tersebut. Penjabat Sekda Papua Selatan, Madderemmeng kepada wartawan, Selasa (13/02), mengatakan bahwa APBD Provinsi Papua Selatan 2024 telah ditetapkan oleh Kemendagri pada Januari lalu. Anggaran provinsi baru ini sebesar Rp1,9 triliun, yang mana di dalamnya termasuk sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 (Koran Jubi).

06-07 Maret

- Penjabat Bupati Jayawijaya Sumule Tumbo melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang berlokasi di Musaima, Distrik Hubikiak pada saat jam dinas, Jumat (01/03). Namun tidak da satu pun ASN dan pegawai lainnya berada di kantor itu. *"Sampai di kantor Dinas Kesehatan ini pukul 10.40 WP tidak ada satu pun pegawai, begitu juga kepala dinas di tempat, kantor kosong,"* ujar Tumbo. Menurutnya jika memang kepala Dinas ada keperluan lain di luar kantor, seharusnya dapat menugaskan pejabat eselon

III atau IV, bahkan staf untuk berada di kantor untuk menerima pelayanan bagi masyarakat yang datang (Koran Jubi).

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua mulai menyalurkan Dana Desa 2024 tahap pertama untuk sejumlah kampung penerima dengan mentransfer ke rekening pemerintah kampung setempat. Menurut Bupati Biak Herry Ario Naap, pencairan Dana Desa 2024 terbagi dua, yakni dana desa earmark dan non-earmark. Dana desa earmark, merupakan dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat. Sedangkan dana desa non-earmark merupakan dana desa yang penggunaannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat (Koran Jubi).

14 Maret

Ratusan tenaga honorer di atas 35 tahun yang dialihkan dan diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di tiga daerah otonomi baru gelar aksi di kantor gubernur, Rabu (13/03) kemarin. Kedatangan mereka di Kantor Gubernur menuntut SK CASN bulan Februari, termasuk meminta kejelasan SK dan kepastian waktu pendistribusian CASN usia 35 tahun ke atas ke tiga DOB. Sekretaris DPR Provinsi, Alfred Krisifo menerangkan ada sekitar 1.070 orang yang sedang menunggu penerbitan namun hingga kini pemerintah belum juga merealisasikan itu dan hanya berjanji (Cenderawasih Pos).

19 Maret

Mama-mama pedagang asli Papua melakukan aksi demo ke Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan yang berada di Jalan Raya Mandala, Merauke pada Senin (18/03) kemarin. Ketua aksi demo yang tergabung dalam Ikatan Pedangan Mama-Mama Asli Papua, Milka Balagaize, membacakan aspirasi dan tuntutan mereka agar diperhatikan oleh pemerintah. Masa aksi juga menyatakan menolak Pasar Pedagang Mama-Mama Asli Papua yang sedang dibangun dsi sekitar perumahan Blorep karena jauh dari keramaian dan pemukiman apalagi letak pasar tersebut bukan jalur angkutan umum, sehingga pedagang mama-mama asli papua kuatir jualan mereka nantinya tidak laku (Cenderawasih Pos).

05 April

- Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan setiap wilayah adat di Provinsi Papua bisa memiliki data akurat tentang OAP. Data tersebut bisa langsung diberikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat di wilayah adat itu, sehingga data bisa akurat dan valid untuk pemberdayaan OAP. Jika data diambil langsung *by name by address* terhadap OAP, maka ke depan jika membuat program lebih tepat sasaran langsung ke OAP di wilayah tersebut. Hal ini dikatakan Pj Gubernur Papua M.Ridwan Rumasukun, melalui Pj Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur saat ditemui di Hotel Suni Sentani, usai membuka kegiatan sosialisasi pendataan OAP dan koordinasi pelaksanaan kerjasama pemerintah dan lembaga adat di wilayah adat Mamta tahun 2024, Kamis (04/04) kemarin (Cenderawasih Pos).
- Ratusan Warga dari Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya mendatangi kantor Otonom untuk menanyakan masalah data penerima bantuan Sosial untuk tahun 2023 yang baru disalurkan untuk tahun 2024. Warga menilai tak ada perubahan data sehingga banyak warga tidak mendapatkan bantuan tersebut, ironisnya nama yang dikeluarkan tak sesuai. Masyarakat minta pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Jayawijaya dan pihak terkait lainnya segera memperbaiki data penerima Bansos Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Jayawijaya (Cenderawasih Pos).

18 April

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI kerja sama dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI akan mengembangkan 500.000 lahan sawah di Kabupaten Merauke. Rencana pengembangan lahan pertanian seluas 500.000 hektar di Merauke tersebut diungkapkan Menteri Pertanian, Andi Ambran Sulaiman saat membuka Rakor di Merauke Rabu (17/04). Proyek ini akan digerakan oleh Pangdam XVII/ Cenderawasih, Danrem 174/ATW, Danyon 757/GV. Namun dalam 3 bulan ke depan, akan selesai dikerjakan 20.000 hektar yang merupakan existing yang ada. Dikatakan lebih lanjut bahwa untuk bibit lahan seluas 20.000

hektar akan diberikan secara gratis kepada petani. Untuk bibit seluas 20.000 hektar tersebut mencapai Rp 100 miliar (Cenderawasih Pos).

19 April

Aksi protes dari Forum Aliansi Honorer Papua di Kantor Gubernur Papua di Jl Soa Siu Dok II Jayapura berlanjut. *"Tentunya kami sangat kecewa dengan pemerintah yang ada dan apa pun juga kami tetap anggap pemerintah adalah orang tua kami, pimpinan kami yang kami percaya dengan segala kebijaksanaan,"* kata Melvin Tokoro (40) salah satu pegawai Honorer yang ikut demo, kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/04) kemarin. Melvin sesalkan pemerintah hingga saat ini belum memberikan kejelasan terhadap masa depan para honorer (Cenderawasih Pos).

29 April

Selain membuka perkebunan tebu dan pabrik pengolahan di Merauke Provinsi Papua Selatan dengan lahan seluas 506.000 hektar, investasi di bidang penanaman jagung juga akan dilakukan di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Satu Pintu Terpadu Provinsi Papua Selatan Petrus Assem, ketika ditemui media ini mengungkapkan bahwa, investasi jagung tersebut akan dibuka di Kabupaten Boven Digoel dengan target luasan 200.000 hektar dengan rencana investasi Rp10 triliun. Perusahaan yang akan melakukan investasi jagung ini, adalah perusahaan asal Australia. Petrus Assem menjelaskan bahwa investasi penanaman jagung tersebut sudah mulai dilakukan. Sebab, lahan yang digunakan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) (Cenderawasih Pos).

28 Mei

Sekelompok pegawai, yang mengatasnamakan Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Papua melakukan aksi demo di Kantor Gubernur, Senin (27/05). Dalam demo tersebut, tuntutan mereka adalah meminta Pj Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN tahun 2024. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Yohanis Walilo langsung menemui

para pendemo dan menyampaikan dalam waktu dekat Pemprov segera membayar TPP (Cenderawasih Pos).

03 Oktober

Pemerintah Kota Jayapura kembali menyerahkan dana hibah tambahan untuk mendukung program dan kegiatan FKUB di Kota Jayapura. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Pejabat Walikota Jayapura Christian Sohilait yang diterima oleh Pdt. Hein Carlos Mano, selaku Ketua FKUB Kota Jayapura pada Selasa (01/10) kemarin. Dalam sambutannya, Pj Wali Kota Christian Sohilait mengatakan penyerahan dana hibah tersebut, merupakan penyerahan dana tahap kedua setelah sebelumnya pemerintah kota juga menyerahkan sebagian dana dari anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA. Karena itu, dia berharap agar FKUB sebagai perwakilan pemerintah dapat menggunakan dana itu untuk menunjang program dan kegiatan baik keagamaan maupun juga program kegiatan lainnya dalam kaitannya untuk mendukung terjaminnya suasana atau situasi aman dan nyaman di Kota Jayapura (Cenderawasih Pos).

04 Oktober

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan Sembako kepada 8940 kepala keluarga yang tersebar di 18 distrik di Mimika. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito kepada perwakilan masing-masing Kepala Distrik, dalam kegiatan penyediaan permakanan Otsus tahun 2024 di halaman Kantor Distrik Mimika Baru, Kamis (03/10) kemarin. Adapun item sembako yang disalurkan ke masing-masing distrik terdiri dari beras, mie instan, minyak goreng dan telur (Cenderawasih Pos).

02 November

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Ketahanan Pangan menyerahkan bantuan susu dan telur kepada anak yang terdampak stunting di kantor Distrik Wamena kota, Jumat (01/11) kemarin. Pejabat Bupati Jayawijaya Thony M Mayor menyatakan penyerahan bantuan untuk masyarakat ini diinisiasi oleh pemerintah dalam rangka membantu

masyarakat khususnya kepada keluarga yang memiliki anak bayi, Balita yang menurut pemeriksaan dari medis ada terindikasi stunting (Cenderawasih Pos).

13 November

Salah satu program strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, adalah program makan gratis atau makanan sehat bagi masyarakat. Program makan sehat ini akan lebih difokuskan kepada anak-anak sekolah. Kepala SMPN 2 Kota Jayapura, Dorthea Carolien Enok, menyambut baik program tersebut apalagi di Kota Jayapura. Ia mengaku sebelumnya juga pernah dilaksanakan program makan sehat bagi anak-anak sekolah. Namun demikian pihaknya menyarankan, program tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sekolah. Jika program itu benar-benar diterapkan tahun ini dan tahun ajaran baru, pihaknya pun sudah mempersiapkan dan sedang menggagas, ada program itu dimulai di kelas 7. Tentunya itu juga perlu dibicarakan dengan orang tua siswa (Cenderawasih Pos).

Kronik Kesehatan

04 Januari

Dua kopel rumah dinas pegawai Pustu di Kampung Douwbo, Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori mengalami kerusakan sekian lama namun belum diperbaiki hingga saat ini. Dua kopel rumah dinas pegawai Pustu tersebut mengalami kerusakan karena usia bangunan dan tidak ada perawatan. Samual Asaribab, Wakil Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Douwbo, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori berharap ada perhatian Pemerintah Daerah Supiori terhadap dua kopel pegawai Pustu yang rusak untuk segera diperbaiki. Ia juga berharap Pemerintah Daerah Supiori dalam hal ini Dinas Kesehatan Supiori pada Pustu di Kampung Douwbo dengan menempatkan tenaga bidan, perawat dan dokter pada Pustu sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat setempat (Cenderawasih Pos).

05 Januari

- Direktur RSUD Abepura dr. Daisy C. Urbinas menyampaikan mulai tahun 2024 RSUD Abepura siap menjadi pusat rujukan penyakit jantung, stroke urologi, kesehatan ibu dan anak serta penyakit gula. Karena itu, mulai sekarang pihaknya intens menyiapkan sumber daya manusia, termasuk, peralatan dan tenaga medis. Sebab hal itu akan menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Selain itu, di tahun 2024 ini juga RSUD Abepura akan membangun Gedung IGD baru. Pembangunan IGD tersebut akan bersumber dari dana DAK. *"Mulai Januari kita perlu segera berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk menyiapkan proses pelelangan, sehingga mulai Februari, IGD sudah mulai dibangun,"* ujarnya, Kamis (04/01) (Cenderawasih Pos).
- Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Provinsi Papua dalam waktu dekat melakukan skrining terhadap penyakit Tuberkulosis (TBC) HIV/ AIDS, kusta dan malaria secara massal. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Jayapura Yusnita Pabeno di Jayapura, Rabu (03/01) mengatakan skrining massal TBC, HIV/AIDS, kusta dan malaria rencananya akan dilakukan di 30 lokasi. *"Kami sementara ini tengah melakukan asesmen lokasi mana yang akan dijadikan pusat pemeriksaan,"* katanya. Menurut Yusnita, pihaknya juga sudah menerima masukan dari masyarakat untuk lokasi-lokasi yang memang rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut (Koran Jubi).

31 Januari-01 Februari

Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Papua menyebutkan 2.335 anak di daerah itu mengalami stunting pada akhir 2023 atau naik 13,78 persen dari total 18.838 Balita yang ditimbang. *"Masih sekitar tujuh ribu balita yang belum diukur sehingga kami berharap ke depan semua anak di Kota Jayapura dapat diukur,"* kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura pada Sabtu (27/01) (Koran Jubi).

05 Februari

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, gandeng tujuh rumah sakit yang ada di Provinsi Papua untuk program Kartu Otsus Sehat (Ko-Sehat) yang diperuntukan bagi OAP. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Penjanjian Kerja Sama tahun 2024 dengan tujuh rumah sakit diantaranya RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RSUD Jiwa Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Marthe Indey dan RS Bhayangkara (Cenderawasih Pos).

07 Februari

Bupati Keerom, Piter Gusbager mengatakan, Pemerintah Kabupaten Keerom terus berupaya untuk mengatasi masalah stunting. *"Stunting ini menjadi agen da nasional dan tentunya menjadi perhatian serius kita di daerah lebih khusus di Kabupaten Keerom,"* ucap Piter Gusbager. Piter Gusbager mengaku, selama ini pihaknya terus berkolaborasi dengan mitra-mitra dalam pemberantasan masalah stunting di masyarakat Keerom. Mitra yang dimaksudnya adalah selain Dinas Kesehatan, kader Posyandu, PKK dan Puskesmas (Cenderawasih Pos).

12-13 Februari

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynold Ubra mengatakan pada awal 2024 dinasnya *menemukan sebanyak 217 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Mimika. "DBD di Timika dari 1 Januari hingga 7 Februari 2024 ada sebanyak 217 kasus yang kami temukan dengan satu kasus kematian akibat DBD,"* katanya di Timika, Jumat (09/02). Menurut Reynold pada Februari ini pihaknya menemukan kasus DBD harian lebih banyak dibandingkan saat Januari (Koran Jubi).

20 Februari

- Dua pasien asal kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jayapura. Keduanya bernama Maleaki Ahayon (1) berasal dari Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo, yang dirawat di RSUD Abepura sejak 12 Februari 2024 karena divonis gizi buruk dan Kostan Lelampo (16) terdiagnosis

penyakit tumor dan tengah dirawat di RS. Dian Harapan. Keduanya dirujuk ke Jayapura berkat Legislator Papua, Nathan Pahabol karena prihatin. Nathan mengatakan, pasca hilangnya Kartu Papua Sehat (KPS) 2021, OAP terutama yang tinggal diwilayah DOB yang terpencil dan belum memiliki KTP, kehilangan proteksi kesehatannya (Cenderawasih Pos).

- Problema di RSUD Jayapura yang masih hingga kini, kerap mengalami kekurangan bahan habis pakai hingga obat-obatan yang kosong. Menurut Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr. Jan Frits Siauta kekosongan obat tersebut sudah diketahui oleh Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giay, hanya saja belum ada respon. Karena kekosongan obat-obatan ini, Jan mengaku terpaksa pihaknya menolak beberapa pasien dan berpengaruh terhadap pelayanan pasien di RSUD Jayapura (Cenderawasih Pos).

21 Februari

- Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai angkat bicara soal perihal dipulangkannya sejumlah pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi akibat kekosongan obat dan fasilitas kesehatan. Ia bahkan tak menampik akan hal itu, menurutnya kekosongan obat kemoterapi lantaran manajemen lama pada tahun 2022, masih meninggalkan utang sekitar 1,2 miliar kepada Paramindo Lestari (APL) selaku distributor obat. *"Akibat utang tersebut, APL tak lagi memasok obat ke RSUD Jayapura. Namun Selas (20/02) kemarin kami baru saja rapat dengan pimpinan APL Papua dan akan melakukan proses pembayaran dengan cicil 30% utang dulu sebagai jaminan supaya obat kemoterapi dan obat-obatan lain bisa kembali di drop masuk ke RSUD Jayapura,"* tutur Aloysius (Cenderawasih Pos).
- Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan mencatat hingga 2023 lalu jumlah anak-anak di Kota Jayapura yang mengalami *stunting* sebanyak 2.500 lebih anak. *"Stunting di Kota Jayapura pada bulan Desember naik karena cukup banyak yang datang ke Posyandu, jadi 2.500-an yang dilaporkan,"* kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, Selasa (20/02). Dia mengatakan, banyak

tidaknya anak-anak yang terjaring atau yang terdata menderita *stunting* tergantung dari jumlah masyarakat yang datang untuk mengantarkan anaknya periksa di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah (Cenderawasih Pos).

22 Februari

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, rumahkan sebanyak 32 orang pegawai honor/kontrak yang bekerja di rumah sakit. Mereka yang dirumahkan merupakan sisa dari pegawai K2. Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai mengatakan 32 orang tersebut dirumahkan sejak awal tahun 2024, seiring dengan menurunnya dana APBD untuk RSUD Jayapura sebanyak 22 miliar. Adapun jumlah pegawai RSUD Jayapura saat ini sebanyak 1.064 orang terdiri dari ASN, Kontrak atau K2 (Cenderawasih Pos).

02 Maret

Pihak LBH Papua mendesak pemerintah membangun saluran pembuangan air dan tempat pengolahan sampah di sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit Vertikal Kelas B, di Kawasan Uncen Jayapura. Terlebih khusus di wilayah Emereuw Konya yang letaknya di belakang rumah sakit tersebut. Adapun dasar dari tuntutan tersebut untuk memberikan perlindungan bagi warga sekitar dari dampak pencemaran lingkungan atas limbah rumah sakit tersebut. *"Membangun rumah sakit tidak harus membuat warga sekitar menjadi sakit akibat cemar lingkungan dari limbah rumah sakit, apalagi sampai adanya penggusuran paksa rumah warga nantinya,"* kata Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, Jumat (01/03) (Cenderawasih Pos).

04-05 Maret

Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, mengatakan pembangunan Rumah Sakit Unit Pelayanan Terpadu Vertikal Universitas Cenderawasih melanggar beberapa aturan dan berpotensi bermasalah dari segi lingkungan. Selain lokasi itu tempat resapan air dan memiliki sungai bawah tanah yang terhubung dengan debit air Danau Sentani, lokasi

itu juga bukan kawasan yang diperuntukkan bagi rumah sakit, dan dalam memproses Amdal juga tidak melibatkan masyarakat. Gobay menyampaikan hal itu pada diskusi yang diadakan oleh BEM USTJ di Aula USTJ, Kamis (29/02) (Koran Jubi).

13-14 Maret

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay mengatakan ada pihak yang mempunyai kepentingan ekonomi dalam Pembangunan Rumah Sakit Unit Pelayan Terpadu (RSUPT) Vertikal Uncen Jayapura. Hal itu dinyatakan dalam diskusi perlindungan kawasan resapan air bersama warga Dusun Konya, di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Sabtu (09/03). "*Saya ingin mengatakan terkait pembangunan rumah sakit ini ada beberapa pihak yang punya kepentingan ekonomi di dalam yang pertama adalah pihak Uncen. Itu tanah sertifikatnya adalah tanah milik Uncen dan rumah sakit ini dibangun milik pemerintah. Di mana pihak Uncen akan menerima uang sewa setelah lima tahun berjalan. Jadi lima tahun sekali mereka akan bayar tapi saya tidak tahu berapa harganya begitu. Itu keuntungan ekonomi pertama yang akan diterima Uncen,*" katanya (Koran Jubi).

13 Maret

Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura untuk sementara menghentikan pelayanan pasien Otsus Port Numbay Sehat hingga adanya kesepakatan bersama antara Dinas Kesehatan Kota Jayapura dan pihak rumah sakit. Hal itu disampaikan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Selasa (12/03) kemarin. "*RSUD Jayapura sementara belum bisa melayani pasien Otsus Port Numbay hingga ada kesepakatan atau komitmen pembayaran tunggakan sekitar 5 bulan dari Dinkes Kota kepada rumah sakit,*" ucap Aloysius. Penghentian sementara pelayanan pasien Otsus Port Numbay Sehat bermula tunggakan Agustus hingga Desember tahun 2023 yang belum juga dibayarkan Dinkes Kota Jayapura ke pihak rumah sakit (Cenderawasih Pos).

14 Maret

Sampai saat ini palang Puskemas Komba, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura belum juga dibuka. Hal ini tentu menjadi keluhan Masyarakat

setempat yang ingin memeriksakan kesehatan atau berobat. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang, palang Puskesmas Komba saat ini belum dibuka, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga yang tinggal di sekitaran Puskesmas Komba sementara dialihkan ke Puskesmas Sentani di daerah Kemiri. Edward berharap, penyelidikan terkait ganti rugi tanah di Puskesmas Komba bisa segera diselesaikan dengan baik agar operasional Puskesmas bisa berjalan Kembali (Cenderawasih Pos).

15 Maret

Dengan menggandeng petugas kesehatan Puskesmas Ngguti, personel Satgas TMMD ke-119 Kodim 1707/Merauke memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat di Kampung Po Epe Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Kamis (14/03). Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, selaku Dansatgas TMMD ke-119 Kodim 1707/Merauke melalui Komandan SSK Satgas TMMD ke-119 Lettu Inf Abdullah Latupono, menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kampung Po Epe merupakan salah satu kegiatan non fisik TNI Manunggal Membangun Desa ke-119 (Cenderawasih Pos).

20 Maret

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, tahun 2023 lalu, jumlah warga Kota Jayapura yang mengidap TBC mencapai lebih dari 2.300 orang. Itu ditemukan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Tidak saja di fasilitas Kesehatan tetapi juga melalui kader-kader yang sudah direkrut (Cenderawasih Pos).

20-21 Maret

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Khairul Lie mengatakan Pmerintah Kabupaten Jayapura telah menyiapkan anggaran sebesar Rp16 miliar melalui alokasi dana Otsus untuk OAP. Sekitar Rp 2,5 miliar dikhususkan sebagai komplementer. Dana itu digunakan jika terjadi laka

tunggal atau kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, luka berat akibat perkelahian atau kecelakaan akibat miras yang terlayani melalui BPJS bagi OAP yang berdomisili di Kabupaten Jayapura (Koran Jubi).

03-04 April

Orang dengan disabilitas mengeluhkan perhatian Pemprov Papua. Mereka menilai pelaksanaan peraturan daerah tidak optimal dalam melindungi orang dengan disabilitas. Aktivis Disabilitas Fisik Paulina Usior menilai banyak perangkat daerah masih mengabaikan Peraturan Daerah Papua tentang Perlindungan terhadap Disabilitas. Dia berharap mereka konsekuen dalam menjalankan peraturan itu. *"Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lain tidak menjalankan peraturan itu. Kami tidak merasakan dampak manfaat perda tersebut,"* kata Usior, Jumat pekan lalu. Menurutnya, orang dengan disabilitas masih mendapat perlakukan diskriminatif di Papua. Mereka belum mendapat akses yang layak pada layanan kesehatan, pendidikan, transportasi bahkan kesempatan kerja (Koran Jubi).

04 April

Sedikitnya 40 Puskemas Pembantu (Pustu) yang ada di Merauke tidak beroperasi gara-gara Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke mengalami kekurangan tenaga kesehatan (Nakes). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita menjelaskan bahwa rata-rata Puskesmas Pembantu yang tidak beroperasi tersebut berada di kampung-kampung lokal (Cenderawasih Pos).

19 April

Terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jayapura 2024, menjadi harapan besar bagi Pemkab Jayapura untuk bisa mencapai target nasional, dalam menurunkan kasus angka stunting di Kabupaten Jayapura tahun 2024. *"Pemkab Jayapura memberikan apresiasi atas TPPS Kabupaten Jayapura, dalam rang ka mempercepat penurunan kasus stunting di Kabupaten Jayapura,"* ucap Pj Bupati Jaya pura, Triwarno Purnomo, Kamis (18/04) kemarin (Cenderawasih Pos).

22 April

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Sihotang mengatakan, tahun ini (2024) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengelola dana Otsus Rp 12 miliar. Dana Otsus tersebut digunakan untuk pembiayaan mendekatkan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan melalui penyediaan Puskesmas Pembantu di Kampung Aurina dan Kampung Kamikaro, Distrik Airu. Juga untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terhadap layanan melalui SDM Kesehatan dengan menyediakan 9 jenis profesi kesehatan di 22 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, serta penyediaan rumah dinas bagi petugas kesehatan, terutama OAP agar dapat melaksanakan pelayanan kesehatan lebih optimal kepada masyarakat (Cenderawasih Pos).

25 April

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura kembali dipalang oleh masyarakat adat Mata Rumah III Yehuda Merahabia, Rabu (24/04) kemarin. Dari isi tuntutan yang ditulis menggunakan spanduk yang dipasangkan di gerbang masuk RSUD Abepura itu bahwa pemalangan itu mengacu pada putusan kasasi Mahkama Agung RI, nomor 1510/K/PDT/2017. Hal lain pasal 43 UU OTSUS yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui hak-hak masyarakat adat Papua. Adapun spanduk lain juga yang dipasangkan di gerbang masuk RSUD Abepura ini menjelaskan terkait status lahan RSUD Abepura. Atas dasar itu sehingga mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua untuk segera membayar ganti rugi tanah adat milik Mata Rumah III Yehuda Merahabia yang ditempati oleh RSUD Abepura seluas kurang lebih 42,349 meter persegi (Cenderawasih Pos).
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura menyebut penyakit TBC merupakan salah satu penyakit yang sangat gampang menular dari seorang penderita ke orang lain di sekitarnya. Karena itu dia meminta dan mengingatkan masyarakat di Kota Jayapura supaya waspada dengan terus menghindarinya, salah satunya menggunakan masker terutama bagi mereka yang sudah terkena penyakit ter-

sebut. Lebih lanjut dia mengatakan, tahun 2024 ini pihaknya sudah memprogramkan untuk menemukan kasus TB dengan target mencapai 4.000 kasus. Sampai di bulan April dari hasil temuan yang dilakukan oleh pihaknya itu baru di 180-an kasus (Cenderawasih Pos).

13 Juni

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengakui ketersediaan stok obat saat ini dalam keadaan aman. Sementara yang alami kekosongan adalah paracetamol. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Manik Sihotang menjelaskan, sesuai evaluasi yang telah dilakukan, dari 40 jenis obat wajib layanan dasar yang tidak boleh habis, masih ada 37 jenis obat yang tersedia. *"Kami selalu memastikan tiap tahun penyediaan logistik kesehatan harus 18 bukan ke depan, namun untuk saat ini ada 3 jenis obat yang kosong,"* ujarnya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (12/06) kemarin. Selain itu, untuk suplay obat-obatan sendiri, di Kabupaten Jayapura selain dari pihak ketiga, pihaknya juga mendapatkan suplay obat dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Sehingga ketersediaan obat lengkap, sementara yang kosong saat ini adalah obat paracetamol tablet, namun tengah diupayakan agar dapat segera tersedia (Cenderawasih Pos).

25 Juli

Hingga 22 Juli 2024, sebanyak 438.390 anak atau 50,6 persen anak di Tanah Papua telah diberi vaksin Polio dosis pertama. Jumlah itu masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah total sasaran Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio 2024 di Tanah Papua yang mencapai 865.690 anak. PIN Polio 2024 akan berlangsung hingga September 2024, dan setiap anak kelompok sasaran diharapkan menerima paket lengkap empat dosis vaksin Polio. Ribuan anak-anak yang sudah menerima imunisasi Polio dosis pertama diantaranya umur 0-59 bulan (258.269 anak), umur 5 sampai kurang dari 7 tahun (110.915 anak) dan umur 7 tahun (69.206 anak). Anak-anak yang sudah menerima vaksin Polio dosis pertama itu tersebar di Provinsi Papua (105.588 anak), Papua Barat (75.212 anak), dan Papua Tengah (86.945 anak). Ada pun anak-anak yang telah menerima vaksin Polio dosis pertama di Papua Pegunungan (17.866), Papua Selatan (84.330

anak), dan Papua Barat Daya (68.449 anak). Jumlah anak yang menerima vaksin Polio lanjutan (dosis kedua dan dosis ketiga) lebih sedikit lagi. Jumlah anak yang telah menerima vaksin Polio dosis kedua mencapai 224.126 anak, sedangkan anak yang menerima vaksin Polio dosis ketiga baru 2.564 anak (https://jubi.id/penkes/2024/baru-438-390-anak-di-tanah-papua-yang-telah-divaksin-polio-dosis-pertama/).

12 Agustus

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berencana menarik semua tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Alama pasca peristiwa pembunuhan terhadap pilot Glen Malcolm Conning. Para Nakes akan menjalani mental healing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika dan juga akan difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Saat ini pelayanan kesehatan di Distrik Alama pasca kejadian itu menjadi terhambat bahkan tidak berjalan. Oleh karena itu, Dinkes juga akan menggelar rapat bersama lintas sektor serta tokoh-tokoh masyarakat dari wilayah pegunungan Mimika untuk mengatasi pelayanan kesehatan diwilayah pegunungan yang saat ini terganggu (Cenderawasih Pos).

13 Agustus

Fasilitas, sarana dan prasarana di RSUD Yowari, Sentani, Kabupaten Jayapura saat ini masih sering dikeluhkan oleh masyarakat dan pasien. Untuk melengkapinya dibutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Direktur RSUD Yowari Petronela Risamasu, Senin (12/08) kemarin. Diakui Petronela, fasilitas sarana dan prasarana yang berada di Rumah Sakit Yowari memang masih jadi kendala. Contohnya saja pagar pengaman di lingkungan rumah sakit, sampai saat ini juga belum dipasang semuanya. Masih butuh pembangunan pagar disepanjang halaman Rumah Sakit Yowari, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung yang ada di sana (Cenderawasih Pos).

20 Agustus

Dalam momentum perayaan HUT RI ke-79, Bupati Keerom, Piter Gusbager menyerahkan tiga unit kendaraan ambulance kepada tiga

Puskesmas di Kabupaten Keerom. Tiga Puskesmas itu adalah Puskesmas Pitewi, Puskesmas Arso 3 dan Puskesmas Ubrub. Tiga mobil ambulance tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Gusbager usai memimpin upacara 17 Agustus kemerdekaan RI di lapangan sepakbola Swakarsa Arso. Dia berharap, tiga ambulan tersebut bisa dirawat dengan baik dan diperuntukkan sebagaimana fungsinya. Serta meningkatkan pelayanan kesehatan di 3 puskesmas tersebut (Cenderawasih Pos).

03 September

Kondisi RSUD Dok II Jayapura nampaknya masih "belum pulih". Keluhan klasik terkait stok obat maupun alat habis pakai yang habis ternyata masih juga terjadi. Yang terbaru adalah keluhan dari puluhan pasien cuci darah di RSUD Dok II karena kehabisan stok cairan. Cairan yang biasa digunakan untuk proses cuci darah adalah dialisat. Cairan ini digunakan dalam dua jenis prosedur cuci darah yakni Hemodialisis dan CAPD. Salah satu pasien bernama Nur menyampaikan bahwa pada Senin (02/09) kemarin pihaknya hendak melakukan cuci darah. Namun saat di rumah sakit, ia mendapatkan informasi jika ada stok cairan yang habis. Mirisnya lagi stok cairan ini baru akan didatangkan bulan depan. Sementara kondisi pasien tidak bisa menunggu selama itu mengingat dalam seminggu paling tidak pasien harus 2 kali melakukan cuci darah (Cenderawasih Pos).

13 September

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke Damario Sriyono menyatakan keprihatiannya atas peningkatan HIV di kalangan pelajar di Merauke saat ini. Pasalnya di tahun 2024 ini, setiap bulannya ada saja pelajar yang dinyatakan positif terinveksi HIV. Peningkatan HIV di kalangan pelajar tersebut, jelas Damaria karena adanya pergaulan dan seks bebas (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

Kepala Dinkes Kabupaten Jayapura Khoirul Lie mengatakan bahwa dari pendataan yang dilakukan pihaknya tercatat bahwa di Kabupaten Jayapura ditemukan 1006 kasus stunting pada Balita dan anak. Mirisnya

jika dipresentase maka ada 13.3 persen dari sekitar 20 ribu anak di Kabupaten Jayapura yang terkena stunting. Meski demikian dikatakan bahwa presentase tersebut dalam angka dari WHO dikategorikan masih terkendali. Masih dibilang aman meski angka yang dicapai tidak bisa dibilang sedikit. Lie menyebut bisa dianggap mengkhawatirkan apabila terjadi presentase anak yang terkena sebanyak 20-30 persen (Cenderawasih Pos).

09 Oktober

Pejabat Gubernur Papua, Ramses Limbong angkat bicara terkait penanganan kasus stunting di Papua. Terutama dengan adanya temuan 1.006 kasus stunting di Kabupaten Jayapura. Ramses mengatakan, tidak bisa ada stunting hari ini lalu besoknya langsung hilang. Sebab, stunting mulai diukur setelah bayi lahir sampai dengan usia 5 tahun (Cenderawasih Pos).

11 Oktober

Pejabat Gubernur Papua, Ramses Limbong tak menampik jika banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dasar di rumah sakit yang belum maksimal. *"Seperti di RSUD Dok II, obat-obatan kerap tidak ada. Sehingga masyarakat terpaksa beli di luar,"* kata Ramses usai sidak, Rabu (09/10). Ia pun berharap dengan APBD Perubahan dan digantinya Direktur RSUD Jayapura, pelayanan di rumah sakit milik pemerintah itu berjalan dengan maksimal (Cenderawasih Pos).

02 November

Plh Bupati Keerom, Wahfir Kosasih membeberkan penanganan stunting di Kabupaten Keerom hingga saat ini telah mencapai 13,9% dan berdasarkan data dari SKI telah mencapai 34,40% dari target nasional yaitu 14%. Kata Kosasih, tak hanya soal stunting dan cakupan polio, tapi Pemerintah Kabupaten Keerom terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat Keerom hingga pelosok kampung (Cenderawasih Pos).

05 November

Pejabat Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan telah menerima data terkait angka stunting di Kabupaten Keerom dan Waropen. Menurutnya, angka stunting di Keerom dan Waropen terbilang masih tinggi, sehingga perlu adanya intervensi yang intens dari pemerintah untuk menekan angka stunting di dua kabupaten tersebut (Cenderawasih Pos).

12 November

Puluhan dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Biak Numfor menggelar aksi damai di pelataran Gedung IGD RSUD Biak Senin (11/11) kemarin. Para Nakes menuntut pembayaran insentif yang telah tertunggak selama 11 bulan sejak Desember 2023 hingga Oktober 2024. Aksi ini menyebabkan layanan pasien rawat jalan sementara dihentikan, sementara pelayanan darurat dan rawat inap tetap berlangsung. Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera memenuhi kewajiban untuk melunasi insentif yang belum terbayarkan. Menurut perwakilan Forum Nakes RSUD, tuntutan ini mencakup tunjangan kelangkaan profesi serta beban dan risiko kerja yang seharusnya diterima dokter dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Biak Numfor (Cenderawasih Pos).

Kronik Kasus HIV AIDS

24-25 Januari

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari mengatakan kasus HIV di Kota Jayapura sangat serius. Sebab tahun ini Kota Jayapura mencapai peringkat tertinggi kasus HIV di Tanah Papua. Antari menceritakan kendala umum yang dialami stakeholder yang menangani HIV/AIDS di lapangan adalah bagaimana memberikan pelayanan pentingnya pemeriksaan diri terkait HIV/AIDS dan orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih sering mengalami diskriminasi (Koran Jubi).

15 Maret

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jayawijaya Margaretha Wetipo dalam jumpa pers di Kantor Sekretariat KPA Jayawijaya, Selasa (14/03) menyampaikan jumlah ODHA di Kabupaten Jayawijaya mencapai 8.386 orang. Angka itu berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Nomor 440/231/DINKES/ III/2023 tertanggal 7 Maret 2023. Wetipo menjelaskan dari 8.386, sebanyak 4.133 laki-laki dan 4.253 perempuan. *"Sedangkan jumlah LFU (Lost to Follow-Up) atau pasien yang putus mengonsumsi obat sebanyak 2.721 orang, dengan rincian laki-laki 1.208 orang dan perempuan 1.513 orang,"* katanya (Koran Jubi).

22-23 Maret

Komisi Penanggulangan AIDS Merauke mencatat sejak Januari-Maret 2024 terdapat 16 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Tiga penderita diantaranya meninggal dunia. Sekretaris KPA Kabupaten Merauke, Damario Sriyono kepada Jubi, Selasa (19/03) menyatakan bahwa penderita HIV/AIDS dari 16 kasus di awal tahun ini adalah kelompok masyarakat umum (Koran Jubi).

10 Mei

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat, angka kasus HIV di Mimika mencapai 350 hingga 400 kasus per tahunnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengungkapkan, dari angka tersebut, kontribusi rata-rata kasus HIV setiap bulan mencapai 100 hingga 150 kasus. Kata Reynold, 98 persen transmisi penularan kasus HIV di Timika melalui hubungan seksual. Kemudian, 60 persen dari kasus HIV di Kabupaten Mimika diidap oleh penduduk OAP. Ia melanjutkannya pihaknya terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kalangan remaja putri melalui pendidikan reproduksi sehingga mereka dapat memprotektif diri. *"Memang kita lihat beban kesehatan 20 tahun yang lalu pada tahun 2005 sampai tahun 2025 mendatang ini polanya masih sama. Kuncinya adalah perilaku dan lingkungan,"* ungkapnya kepada wartawan di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Rabu (08/05). Reynold melanjutkan, yang terpenting adalah bagaimana melibatkan masyarakat

dalam program-program pembangunan kesehatan meskipun tidak sustainable. Kemudian, partisipasi masyarakat serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan menjadi penting dan bisa bersinergi bersama pemerintah untuk mendorong hal tersebut (Cenderawasih Pos).

07 Agustus

Kasus HIV AIDS Kabupaten Jayawijaya mencapai 1.150 kasus per 31 juli 2024. Sekretaris Dinkes Jayawijaya, Monika Mallisa menyatakan pihaknya dari dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya melaksanakan kegiatan pertemuan Kolaborasi TB-HIV bersama Komisi Penanggulangan AIDS untuk mencari kesepakatan antara dinas kesehatan dan KPA guna menurunkan infeksi TB dan HIV (Cenderawasih Pos).

26 Oktober

Dinas Kesehatan Mimika mencatat, hingga bulan September 2024, ada 31.383 orang yang diperiksa terkait dengan kasus HIV-AIDS. Dari angka tersebut, sebanyak 347 orang terpapar. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular, Kamaludin menyebut, 97 persen penularan Penyakit HIV-AIDS di Kabupaten Mimika adalah melalui hubungan seksual yang berisiko (Cenderawasih Pos).

16 November

Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mencatat, per September 2024 kasus HIV mencapai 149 kasus, sedangkan AIDS mencapai 198 kasus. Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular Mimika, Kamaludin mengatakan, penyebaran dua jenis penyakit ini terbanyak di Distrik Mimika Baru dengan sasaran terbanyak adalah pasangan resiko tinggi dan pekerja seks. Sementara itu, dari data di atas, kata Kamaludin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2023 untuk kasus HIV sebanyak 186 kasus, sedangkan AIDS sebanyak 267 kasus. Angka ini menurun di tahun 2024 (Cenderawasih Pos).

29 November

Dinas Kesehatan Provinsi Papua mencatat ada 20.738 kasus HIV/AIDS di Papua. Jumlah ini merupakan kumulatif dari kasus pertama

kali ditemukan Tahun 1993 hingga trimester III September 2024. Dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 9.308 dengan kasus HIV/AIDS dan perempuan 11.408. Dari sembilan kabupaten/ kota di Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen dan Biak paling banyak kasus penyebaran HIV/ AIDS. (baca tabel). Kasie HIV AIDS dan IMS Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Rindang Pribadi Marahaba mengatakan daerah dengan penyebaran HIV/AIDS tertinggi akibat perilaku seks berisiko (Cenderawasih Pos).

30 November

Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS kota Jayapura, Binton Nainggolan mengungkapkan bahwa sejak tahun 1990-an sampai 2024 total masyarakat di kota Jayapura yang terinfeksi HIV AIDS mencapai ribuan orang. Kisarannya ada pada angka 8.000-an. *"Kalau data kita dilihat dari tahun 1990-an sampai dengan Juni 2024 itu sudah mencapai 8 ribuan kasus,"* kata Binton Nainggolan, Jumat (29/11). Angka ini terus merangkak karena ketika itu di Sentani Kabupaten Jayapura masih terdapat lokalisasi, Tanjung Elmo. Ada juga beberapa titik tempat prostitusi terselubung lainnya. Penyebaran HIV AIDS sendiri lebih banyak terjadi melalui hubungan seks berisiko (Cenderawasih Pos).

21 Desember

Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura menemukan kasus ODHIV atau Orang Dengan HIV baru sebanyak 257 kasus berdasarkan data dari Januari hingga September 2024. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Pungut Sunarto saat ditemui Jubi di ruang kerjanya, Jumat (20/12). Pungut Sunarto memprediksikan temuan kasus pada triwulan keempat pada 2024 akan bertambah sekitar 100-an kasus, karena Dinkes Kabupaten Jayapura berupaya untuk menemukan kasus HIV/AIDS dengan turun ke lapangan, khususnya kelompok berisiko HIV/AIDS. *"Saya lihat ini kayaknya pada triwulan berikutnya kemungkinan akan naik. Kemungkinan bakal naik seratusan lebih. Hal itu karena kami ada kegiatan mobile visite untuk penemuan kasus baru,"* katanya (https://

jubi.id/mamta/2024/dinkes-kabupaten-jayapura-temukan-257-kasus-odhiv-baru/).

Kronik Pendidikan

05 Januari

Pemerintah Provinsi Papua Selatan tetap membiayai mahasiswa penerima beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua dari dana Otsus dan telah diserahkan provinsi induk ke Provinsi Papua Selatan. Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Merauke mengatakan bahwa masalah beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di luar negeri yang selama ini dibiayai dari Otsus Papua sudah dirapatkan dan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri bekerja sama dengan pemerintah provinsi induk, DPRP, MRP dan juga dengan DOB provinsi baru. *"Bahwa untuk mahasiswa yang dulu dibiayai oleh pemerintah provinsi Papua dengan dana Otsus itu akan kita lanjutkan. Hanya ada satu kesepakatan lagi bahwa mereka harus melangkapi datanya,"* kata Apolo Safanpo di Merauke, Kamis (04/01). Menurutnya, bagi yang sudah lengkap akan dibiayai sekarang. Sementara yang belum lengkap datanya masih di tunggu (Cenderawasih Pos).

10-11 Januari

Sebanyak 24 mahasiswa asli Papua penerima beasiswa Siswa Unggul Papua terancam putus sekolah dan akan dideportasi dari Amerika Serikat gara-gara tunggakan biaya kuliah mereka. Hal itu disampaikan Ketua Forum Komunikasi Orangtua Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri, Jhon Reba di Kota Jayapura, Selasa (09/01) (Koran Jubi).

12 Januari

Penanganan Indeks Pembangunan Manusia, pemberantasan buta huruf, akreditasi sekolah, dan pembangunan gedung permanen sekolah akan menjadi fokus utama Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua pada 2024. Keempat hal itu merupakan empat permasalahan mendasar pendidikan di Provinsi Papua. Hal

itu disampaikan Kepala DPPAD Papua, Christian Sohilait di sela-sela syukuran dan lepas sambut tahun 2023 – 2024 bersama jajarannya yang berlangsung di Kota Jayapura, Jumat (12/01). *"Itu menjadi fokus kami di tahun ini, untuk menuntaskan empat permasalahan pendidikan Papua,"* katanya. Menurut Christian, Indeks Pembangunan Manusi Papua hingga kini masih berada di bawah 70. Badan Pusat Statistik (BPS) Papua mencatat nilai IPM Papua pada 2023 mencapai 63,01 (https://jubi.id/penkes/2024/ini-4-persoalan-besar-yang-akan-jadi-fokus-dinas-pendidikan-papua-pada-2024/).

17-18 Januari

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan pada 2024 telah menyiapkan dana sebesar Rp125 miliar untuk program beasiswa unggul Papua bagi 677 mahasiswa yang studi di dalam dan luar negeri. Pejabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan dari hasil rapat koordinasi dengan wakil Menteri Dalam Negeri terkait dengan penanganan dan penataan Beasiswa Unggul Papua di Jakarta pekan lalu sebagai transisi dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Pemprov Papua Pegunungan mengelola 677 mahasiswa di dalam dan luar negeri. la menyebutkan ada 500-an mahasiswa asal Papua Pegunungan yang berada di luar Papua dan ada 89 mahasiswa asal Papua Pegunungan yang berada di luar negeri dengan mayoritas berada di Australia dan Amerika (Koran Jubi).

18 Januari

Pemerintah Provinsi Papua, akhirnya bersedia membayar biaya tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua senilai Rp 116,8 miliar. Kesanggupan pembayaran tunggakan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus Papua itu dipastikan setelah dilakukan rapat tindak lanjut penyelesaian beasiswa SUP TA 2023 dan keberlanjutannya. Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari, 16-17 Januari di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan walikota, Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB). *"Total anggaran yang kita sediakan Juli-Desember 2023 sebesar Rp 116,8 miliar,"* kata Pj Sekda Papua, Derek

Hegemur, kepada wartawan usai menemui para orang tua penerima beasiswa, Rabu (17/01) (Cenderawasih Pos).

19 Januari

Persoalan beasiswa mahasiswa Papua yang sempat menjadi polemik belakangan ini, akhirnya sudah mendapatkan titik temu. Hal ini setelah Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota termasuk provinsi di daerah otonomi baru, sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan beasiswa mahasiswa asal Papua. Baik yang sedang kuliah di dalam maupun luar negeri. Dari hasil pertemuan itu pula, Pemkot Jayapura memastikan akan menyediakan anggaran sekitar Rp 15 miliar (Cenderawasih Pos dan Koran Jubi).

22-23 Januari

Provinsi Papua kekurangan sekitar 3.000 guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Christian Sohilait di Kota Jayapura, Papua, Jumat (19/01). Ia menjelaskan kekurangan guru terjadi merata di seluruh wilayah Papua. Karena itu menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan. Kekurangan guru itu disebabkan banyaknya guru yang pensiun. Christian menyebutkan pihaknya juga tengah mengupayakan sertifikasi dosen dan guru, karena sertifikasi itu menentukan kelayakan seorang guru mengajar (Koran Jubi).

25 Januari

Sebanyak 17 mahasiswa penerima beasiswa Siswa Unggul Papua yang kuliah di Corban University USA, dipulangkan pihak kampus. Dari 17 tersebut, 15 berasal dari Papua sementara dua orang berasal dari Provinsi Papua Selatan. Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, mengatakan belasan mahasiswa tersebut dipulangkan lantaran pemerintah tidak menepati janji terhadap batas waktu pembayaran biaya beasiswa yang bersumber dari dana Otsus. Dikatakan John, adapun 17 mahasiswa penerima beasiswa SUP yang dipulangkan pihak kampus 8 orang diantaranya akan wisuda pada Maret dan Mei mendatang (Cenderawasih Pos).

01 Februari

- Kendati Pemerintah Provinsi Papua secara bertahap telah membayar tunggakan beasiswa unggul Papua, namum Forum Komunikasi Orang Tua Penerima Beasiswa Otsus Papua menilai beasiswa Otsus Papua dalam pusaran tak jelas. Ketua Forum Jhon Reba dalam keterangan persnya menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas upaya baik yang dilakukan, sehingga 15 mahasiswa penerima BUP telah diijinkan pihak kampus untuk mengikuti perkuliahan dimana 14 orang di Corban University dan 1 orang di Fox University. Namun, Pemprov juga segera melanjutkan proses penyelesaian tunggakan biaya kuliah dan biaya hidup 2023. Beberapa mahasiswa penerima BUP dalam negeri memilih pulang lantaran tunggakan beasiswa dan uang saku yang belum juga diberikan oleh Pemprov Papua. Mereka berharap Pemprov dapat segera membayar tunggakan agar mereka dapat kembali berkuliah (Cenderawasih Pos).
- Sekolah Dasar Negeri 1 Merauke yang berada di belakang Gedung Negara, Kelurahan Maro Merauke sudah sekitar 2 minggu belakangan tidak ada proses belajar mengajar. Akibatnya Guru dan 524 orang murid yang ada di sekolah itu dirumahkan. Pasalnya sekolah mereka dipasangi janur kuning pada pintu masuk-keluar sekolah sebagai tanda dipalang. Kepala Sekolah SDN 1 Merauke, Herman Balagaize mengaku bahwa pemalangan itu dilakukan oleh pemilik hak ulayat yang menuntut ganti rugi atas tanah yang ditempati sekolah (Cenderawasih Pos).

02-03 Februari

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menganggarkan Rp 28 miliar untuk menanggung pendanaan Beasiswa Siswa Unggul Papua. Mereka akan menggunakan Dana Otsus Papua sebagai sumber anggarannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaruddin mengatakan kebijakan itu berdasarkan keputusan Bupati Herry Ario Naap. Mereka prihatin karena banyak mahasiswa Papua

terancam putus kuliah akibat mandeknya pembayaran beasiswa tersebut (Koran Jubi).

- Pasca pemekaran DOB, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan mengelola 677 mahasiswa/mahasiswi penerima beasiswa unggul yang awalnya merupakan program provinsi induk Provinsi Papua. Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai mengatakan, 677 orang mahasiswa/mahasiswi tersebut, seluruhnya berasal dari Provinsi Papua Pegunungan. Velix Wanggai menyampaikan pengelolaan beasiswa mahasiswa unggulan Papua ini menjadi kebijakan strategis bagi Provinsi Papua Pegunungan. Sebab beasiswa unggulan ini merupakan terobosan pemerintah provinsi induk untuk meningkatan SDM di tanah Papua (Cenderawasih Pos).

19 Februari

- Pejabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyerahkan bantuan pendidikan tahun anggaran 2023 secara simbolis baik kepada lembaga pendidikan maupun kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan di Provinsi Papua Selatan di Aula SMKN 3 Merauke, Sabtu (17/02). Bantuan pendidikan yang diserahkan ini khusus bagi Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat akan diserahkan kemudian. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Ignasius Babaga mengurai bantuan tersebut berupa hibah kepada 7 lembaga pendidikan atau yayasan pendidikan dengan total Rp 22,55 miliar, 12 sekolah penerima bantuan, selanjutnya bantuan beasiswa unggul Papua bagi 15 mahasiswa luar negeri sebesar Rp 9,9 miliar, beasiswa unggul Papua bagi 83 mahasiwa dalam negeri sebesar Rp 4,35 miliar, dan bantuan beasiswa unggul Papua bagi 140 mahasiswa dengan nilai Rp 8,95 miliar (Cenderawasih Pos).
- Pemerintah Kabupaten Jayapura di tahun 2023 membantu Pemerintah Provinsi Papua melalui sharing dana untuk pembiayaan tunggakan mahasiswa dalam dan luar negeri sebesar Rp 10 miliar. Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota, Sabtu (17/02) pekan kemarin. *"Kita telah lakukan sharing dana dengan Pemprov*

guna mem bantu membayarkan tunggakan mahasiswa yang kuliah di dalam dan luar negeri yang berasal dari Kabupaten Jayapura sebesar Rp 10 miliar. Kita sudah transfer dana sharing itu di tahun 2023 dan sebelumnya telah dilakukan pertemuan maupun rapat bersama antara Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo dan Pj Gubernur Papua M.Ridwan Ruma sukun berserta kepala daerah lainnya di Papua berlangsung di Kantor Gubernur Papua di Dok II Jayapura," ungkapnya (Cenderawasih Pos).

20 Februari

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel, Moses Wandenggei, mengakui bahwa sampai saat ini banyak guru di Boven Digoel yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Mereka berbulan-bulan tinggal di kota, meninggalkan tempat tugas mereka tapi tetap menerima gaji tiap bulannya. Karena itu, ungkap Moses Wandenggei, mulai tahun ini meminta seluruh guru tersebut untuk kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Jika tidak, maka pihaknya akan memberikan teguran 1, 2 dan sampai 3. Kalau ternyata tidak juga diindahkan maka gaji mereka akan ditahan (Cenderawasih Pos).

22-24 Februari

Dari 1.623 orang yang pembayaran beasiswanya tertunggak, baru 171 orang yang telah menerima pembayaran tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua periode Juli-Desember 2023. Artinya, sebanyak 1.452 pelajar penerima beasiswa yang belum dibayar tunggakannya. Para orangtua penerima beasiswa menyatakan kelambanan Pemerintah Provinsi Papua membayar tunggakan itu membahayakan kelangsungan studi anak mereka. Ketua Forum Komunikasi Orangtua Penerima Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri, Jhon Reba menyatakan Pemerintah Provinsi Papua sangat lamban membayar tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua periode Juli-Desember (Koran Jubi).

22-23 Maret

Aktivitas belajar-mengajar di SMA Negeri 1 Kaureh dan SMA Negeri Demta, Kabupaten Jayapura hingga saat ini tidak berjalan dengan baik lantaran kepala sekolahnya dikabarkan sering tidak masuk dan sebagian

besar guru tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Hal itu terungkap dari laporan warga yang juga sebagai orang tua wali siswa di SMA Negeri Demta dan SMA Negeri 1 Kaureh kepada Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura. *"Kepala sekolah di SMA Negeri Demta sudah pensiun dan hingga saat ini belum ada kepala sekolah definitif, sementara ujian nasional saat ini sedang berjalan dan mereka [SMA Demta] belum mendapat informasinya,"* ujar Piet Soyan, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Kamis (21/03). Dikatakan, kekosonga jabatan kepala sekolah di SMA Negeri Demta sangat berdampak kepada aktivitas belajar dan mengajar, sementara Dinas Pendidikan sudah mengetahui informasi tersebut tetapi hingga saat ini tidak ada langkah positif (Koran Jubi).

06 April

Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia mewakili ribuan guru yang ada di Merauke mulai dari SD sampai SMA-SMK menggelar aksi demo damai di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke di Jalan Misi Merauke, Jumat (05/04). Mereka menyatakan dengan tegas menolak keputusan bupati Merauke Nomor 100.3.2.2/75/tahun 2024 tentang penetapan TPP ASN di lingkungan Pemkab Merauke, karena guru yang sudah mendapat sertifikasi tidak mendapat TPP. Sementara guru yang belum sertifikasi hanya diberikan Rp 500.000 perbulan (Cenderawasih Pos).

08 April

Pemerintah Provinsi Papua hingga 2024 telah merealisasikan pembayaran biaya studi pendidikan mahasiswa Program Papua Unggul melalui dana Otsus sebesar Rp 90 miliar. *"Dari total Rp117 miliar anggaran pendidikan Papua Unggul sampai saat ini masih tersisa Rp 17 miliar yang masih didata,"* ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Christian Sohilait di Biak, Minggu (07/04). Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang

lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri (Cenderawasih Pos).

19 April

Pemerintah Kota Jayapura sudah mulai menanggung biaya pendidikan mahasiswa dan mahasiswi yang saat ini kuliah di luar negeri melalui Program Papua Unggul. Kepala BPKAD Jayapura, Desy Wanggai mengungkapkan, Pemerintah Kota Jayapura mulai menanggung biaya pendidikan mahasiswa-mahasiswi tersebut mulai dari tahun 2023-2026 (Cenderawasih Pos).

23 April

Ribuan guru yang tergabung dalam PGRI Kabupaten Merauke kembali menggelar aksi demo damai ke Kantor Bupati Merauke, Senin (22/04). Aksi demo damai ini merupakan lanjutan dari aksi demo sebelumnya yang dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke sehubungan dengan penolakan keputusan bupati Merauke terkait dengan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai yang dinilai merugikan para guru (Cenderawasih Pos).

29 April

Dinas Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Papua Pegunungan memastikan banyaknya anak jalanan yang putus sekolah saat ini disebabkan karena pendidikan dasar di kampung dan distrik yang tak berjalan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Aron Wanimbo menyatakan banyak guru yang ditempatkan di kampung-kampung terpencil namun mereka tak pernah mengajar dengan baik, tiba saatnya ujian mereka meloloskan siswa dengan nilai yang bagus saat masih duduk di bangku SD (Cenderawasih Pos).

02 Oktober

Tiga hari bentrokan antara kedua kelompok masyarakat di wilayah kampung Ilekma Distrik Napua, sehingga sekolah-sekolah yang ada wilayah itu tidak melaksanakan aktifitas belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya Natalis Mumpu Amd membenarkan

adanya sekolah yang tak beroperasi pasca terjadinya perang suku antara masyarakat Lanny Jaya dan masyarakat Ndugayang telah berlangsung selama 3 hari, sehingga sampai dengan saat ini siswa dan guru dari beberapa sekolah tersebut masih diliburkan. *"Untuk sekolah yang sementara meliburkan siswa dan gurunya sementara waktu karena perang suku antara lain, SD YPPK Santo Yakobus honelama, SD YPPGI Sinakma, SD YP3 Sapalek, SD YPPGI Napua,"* ungkapnya Selasa (01/10) saat ditemui di Wamena (Cenderawasih Pos).

03 Oktober

Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito menegaskan bahwa akan merombak sistem pendidikan di Kabupaten Mimika. Hal ini dikarenakan pendidikan di Kabupaten Mimika mendapat sorotan dari Pejabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk dan Menteri Dalam Negeri tentang pendidikan di Kabupaten Mimika yang sangat tertinggal. Anggaran pendidikan di Kabupaten Mimika sangat besar namun sistem pendidikan yang diterapkan justru tidak mampu mendongkrak indeks pembangunan manusia melalui pendidikan. Valentinus menceritakan, setelah dilantik menjadi Pj Bupati Mimika beberapa waktu lalu, ia didampingi istrinya sebagai Ketua Penggerak PKK melakukan kunjungan ke Sentra Pendidikan, yang berlokasi di SP5 Mimika. Di tempat itu, terdapat SD, SMP hingga SMA dimana lebih dari seribu anak Orang Asli Papua menempuh pendidikan berjenjang. Mirisnya, masih ada siswa SMA yang belum bisa membaca dengan baik dan benar (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

Minimnya fasilitas hingga guru yang jarang berada di tempat tugas menjadi bagian dari faktor pelajar belum bisa baca tulis di Papua. Hal itu disampaikan Sekretaris Pendidikan Provinsi Papua, Terry Wanena, kepada Cenderawasih Pos, Senin (07/10). Faktor lainnya adalah kurangnya pendampingan dari orang tua ketika anak tersebut berada di rumah. Terry menyebutkan, rata-rata anak kelas 6 hingga kelas 12 ada yang belum bisa membaca. *"Guru yang mendapatkan tugas di daerah terpencil harus berada di tempat, jangan tinggalkan tempat tugas,"* tegasnya (Cenderawasih Pos).

Kronik Program Transmigrasi di Tanah Papua

04 Oktober

Mahasiswa dari sembilan universitas yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Jayapura menggelar aksi menolak kebijakan transmigrasi ke Papua pada 4 Oktober 2024. Aksi tersebut berlangsung di dekat Tugu Pendidikan, Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan "Papua Bukan Tanah Kosong", "Tolak Transmigrasi", dan "Papua butuh pendidikan dan kesehatan". Menurut koordinator lapangan Maksimus You, program transmigrasi yang dicanangkan Presiden Prabowo melalui Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman merupakan tindakan menyelundupkan masyarakat secara ilegal ke Papua. Aksi yang berlangsung pukul 10.00 - 14.00 itu dihadiri sekitar 300-an mahasiswa. Demonstran sempat ditemui 31 anggota DPR Provinsi Papua. Kepada anggota DPR Papua, massa berharap agar aspirasi dapat sampai kepada DPR RI (https://witness.tempo.co/article/detail/9576/bem-kota-jayapura-tolak-program-transmigrasi-ke-papua.html).

22 Oktober

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Kementerian Transmigrasi mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengadakan program transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke Papua. Tujuannya, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia. *"Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar,"* kata Iftitah saat serah terima jabatan Menteri Transmigrasi di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024. Ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Kementerian Transmigrasi akan berusaha membangun kebanggaan warga transmigrasi, yang dimulai dari lingkungan kementeriannya. *"Kementerian Transmigrasi sebagai fasilitator dari para patriot bangsa tersebut pertama-tama harus*

membangun kebanggaannya terhadap kementeriannya sendiri," ujar Iftitah. Kementerian Transmigrasi adalah kementerian baru dalam pemerintahan Prabowo. Kementerian Transmigrasi merupakan pemisahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian itu terbagi menjadi dua, yaitu Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (https://www.tempo.co/politik/agenda-transmigrasi-ke-papua-pemerintahan-prabowo-892583).

30 Oktober

Program transmigrasi ke Tanah Papua yang diwacanakan pemerintah Indonesia di era kepemimpinan presiden Prabowo Subianto menuai beragam tanggapan. Sebagian besar menyatakan tak setuju dengan program usang itu. Melianus Asso, ketua Pemuda Katolik komisariat daerah Papua, menyatakan, pemerintah harus mengkaji ulang sejumlah program nasional, salah satunya rencana transmigrasi dan Program Strategis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan. Dibeberkan dalam keterangan tertulis yang diterima Suara Papua, Rabu (30/10), proyek-proyek tersebut sama sekali tak memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia, termasuk orang asli Papua. *"Papua bukan tanah kosong. Ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah, lingkungan dan budayanya. Kami Pemuda Katolik se-Tanah Papua tidak butuh transmigrasi. Yang dibutuhkan orang Papua adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya,"* ujar Asso. Pemuda Katolik menilai sejumlah proyek nasional itu mestinya mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam. Sebab, tanah bagi orang asli Papua memiliki nilai sakral yang tak mudah dialih tangan pihak lain (https://suarapapua.com/2024/10/30/bukan-tanah-kosong-papua-tak-terima-transmigrasi/).

04 November

Ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura Papua menggelar aksi demo damai menolak program transmigrasi ke Papua yang diwacanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan membawa pamflet, spanduk, poster hingga baliho bertuliskan penolakan transmigrasi di Papua serta berkumpul dan berorasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura pada Senin (04/11) siang. Dalam orasi yang disampaikan beberapa mahasiswa, mereka menolak dengan tegas program transmigrasi di Tanah Papua yang juga merupakan program kabinet merah putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kebijakan transmigrasi di Papua hanya akan membuat warga asli kesulitan dalam meningkatkan ekonominya, karena yang terjadi saat ini, warga pendatang menguasai seluruh aktivitas ekonomi. *"Kami mahasiswa menyatakan sikap menolak rencana transmigrasi ke Papua. Tanah Papua bukan tanah kosong, di sini kami tidak memerlukan warga dari luar ke Papua. Hentikan transmigrasi ke Papua,"* kata koordinator lapangan Maksi You. Kurang lebih 1 jam berorasi, ratusan mahasiswa ini ditemui oleh 30 anggota DPR Papua di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura (https://seputarpapua.com/view/tolak-transmigrasi-ke-papua-mahasiswa-serahkan-7-poin-tuntutan-ke-dpr-papua.html).

11 November

Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah menyatakan menolak dengan tegas program transmigrasi ke Tanah Papua yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Ketua Pokja Agama MRP Papua Tengah Benny Pakage dalam pernyataannya kepada suarapapua.com pekan kemarin. Menurut Pakage, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan penolakan penempatan transmigrasi ke Tanah Papua. Dimana kata dia program transmigrasi di Tanah Papua sudah terjadi sejak tahun 1902, dimana ketika itu Indonesia di jajah pemerintah kolonial Belanda (https://suarapapua.com/2024/11/11/mrp-papua-tengah-tolak-transmigrasi-ini-alasannya/).

12 November

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan program transmigrasi di Papua bakal difokuskan pada revitalisasi 10 kawasan transmigrasi yang ada. Terutama, revitalisasi empat kawasan transmigrasi yang masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN). *"Tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke Papua. Fokusnya transmigrasi lokal jika dibutuhkan,"* kata Iftitah usai rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid di Kementerian ATR, Selasa, 12 November 2024. Iftitah mengklaim pemerintah ingin lebih dulu mensejahterakan kawasan-kawasan transmigrasi yang sudah ada. Adapun 10 kawasan transmigrasi yang sudah ada di Papua, yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke (https://www.tempo.co/ekonomi/menteri-transmigrasi-pastikan-tidak-ada-program-pemindahan-penduduk-ke-papua-1167217).

15 November

Rencana program transmigasi di Papua menuai polemik. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman sempat mengatakan bahwa ia mendapatkan arahan untuk melakukan transmigrasi ke wilayah Indonesia Timur, terutama Papua. Dilansir Kompas.com, Iftitah mengatakan rencana program transmigrasi akan dilaksanakan pemerintah untuk menggarap lahan food estate di Papua. Ia menjelaskan, proyek tersebut akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga Kementerian Transmigrasi akan mendukungnya melalui program transmigrasi lokal.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (22/10). Iftitah mengatakan, program transmigrasi di Papua bukan berupa pemindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua.

Menurutnya, hal itu tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan sejumlah aturan. "Secara regulasi baik undang-undang pemerintah daerah, undang-undang transmigrasi maupun peraturan daerah masing-masing provinsi setempat di Papua, melakukan penempatan kepala keluarga transmigran dari luar Papua ke Papua saat ini sudah tidak memungkinkan lagi," ujar Iftitah dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (05/11), seperti dilansir Kompas.com (https://papua.tribunnews.com/2024/11/15/polemik-rencana-program-transmigrasi-di-papua).

16 November

Aksi demo tolak transmigrasi yang digelar KNPB di Lingkaran Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura Jumat (15/11) berakhir ricuh. Massa dianggap menolak untuk ditertibkan sehingga muncul perlawanan. Alhasil dilakukan pembubaran paksa dan jatuh korban baik dari pihak KNPB maupun aparat keamanan (Cenderawasih Pos).

20 November

Mahasiswa di Merauke menggelar aksi demo damai menolak rencana program pemerintah melakukan transmigrasi di Papua. Aksi demo damai ini diawali dengan longmarch dari Tugu Lingkaran Brawijaya (Libra) Merau ke menuju kantor DPR Provinsi Papua Selatan di jalan Raya Mandala depan Bank Sinar Mas. Sampai di Kantor sementara DPRP Papua Selatan, para mahasiswa tersebut langsung diterima Ketua Sementara DPR Papua Selatan Heribertus Silubun dan sejumlah anggota DPR Papua Selatan di halaman Kantor DPR Papua Selatan. Dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan menolak transmigrasi masuk ke Papua, para mahasiswa dari sejumlah organisisasi kemahasiswaan itu satu persatu tampil melakukan orasi yang pada intinya menolak program transmigrasi masuk ke Papua (Cenderawasih Pos).

Kronik Kunjungan Pejabat Pusat

17 April

Dalam rangka mensukseskan program food estate di Merauke, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra tiba di Merauke. Bupati Merauke Romanus Mbaraka kepada wartawan di Merauke menjelaskan, kunjungan Mentan dan Wamenhan ke Merauke ini dalam rangka suksesi program food estate. *"Hari ini Mentan dan besok Wamenhan akan tiba disini (Merauke, rted) dalam rangka suksesi program food estate di Merauke,"* kata Romanus Mbaraka. Dijelaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan atensi agar besok Indonesia memiliki ketahanan pangan yang kuat dan menjadi swasembada pangan (Cenderawasih Pos).

24 Mei

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengawali kunjungan kerja di wilayah Provinsi Papua Selatan, disambut Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan beserta unsur Forkopimda Prov. Papua Selatan dan Kabupaten Merauke serta para pejabat TNI/Polri, di Bandara Mopah Merauke Rabu (22/05). Kunjungan Panglima TNI kali ini dalam rangka meninjau lahan perdana 1.000 hektar yang disiapkan sebagai food estate dalam rangka program ketahanan pangan 1,2 juta Ha (Cenderawasih Pos).

25 Mei

Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Merauke, ibukota Provinsi Papua Selatan pada 03-04 Juni 2024. Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanawo Yolmen mengungkapkan bahwa kunjungan kerja Wapres tersebut dalam rangka ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan dan MRP Papua Selatan (Cenderawasih Pos).

04 Juni

Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin tiba di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Senin (03/06) tadi malam. Kunjungan kerja Wapres ke Provinsi Papua Selatan tersebut dalam rangka groud breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan peresmian Pos Lintas Batas Negara Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel (Cenderawasih Pos).

05 Juni

- Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin resmi melakukan ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan infrastruktur di pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang berlokasi di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Selasa (04/06) kemarin. Ground breaking tersebut dilakukan di Swiss

Belhotel Merauke. Wapres didampingi Wamendagri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papau Selatan Apolo Safanpo. Peletakan batu pertama serta penandatangan prasasti ini dilakukan Wapres setelah berdialog para tokoh yang ada di Papua Selatan secara tertutup (Cenderawasih Pos).

- Sebanyak 1089 Personil gabungan TNI/POLRI dan Satpol PP dari Pemprov Papua pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya, dipersiapkan melakukan pengamanan kedatangan wakil Presiden RI KH. Maa'ruf Amin ke Wamena Ibukota Provinsi Papua Pegunungan Rabu (05/06) (Cenderawasih Pos).

06 Juni

Wakil Presiden RI K.H Maa'ruf melakukan kunjungan kerja ke Wamena. Kunjungan kerja ke Wamena Wakil Presiden RI KH. Maa'ruf Amin menekankan pembangunan Provinsi Papua Pegunungan atau perhatian terhadap wilayah adat Lapago telah ditekankan dalam RPJM tahun 2020-2024 sebagai program prioritas strategis dalam rangka percepatan pembangunan sekaligus melakukan pencanangan program strategis nasional (Cenderawasih Pos).

08 Juni

Setelah Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berkunjung ke Merauke Papua Selatan, giliran Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berkunjung ke Merauke. Prabowo yang turun ke ibu kota Provinsi Papua Selatan itu dalam kapasitas sebagai Menteri Petahanan (Menhan), selain Prabowo, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga akan ke Merauke. Tim Wasgiat Satgas Pangan Mabes TNI yang dipimpin oleh Komandan Satgas Ketahanan Pangan Kementan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Wadan Satgas Hanpangan Kementerian Brigjen TNI Ade Prasetya melakukan kunjungan langsung di Kampung Telaga Sari, Salor 1, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Kamis (06/06) kemairn. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan lahan menjelang kenker Menhan RI Parobowo Subianti dan Mentan RI Andi Ambran Sulaiman diwilayah Korem 174/ATW (Cenderawasih Pos).

24 Juli

- Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Kampung Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa, 23 Juli 2024. Dalam lawatan itu, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Di Kampung Sermayam kemarin, Jokowi melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi. Eks Gubernur Jakarta ini juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang ada di perusahaan tersebut. Di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi (https://nasional.tempo.co/read/1895068/jokowi-kunjungi-megaproyek-di-merauke-jamin-prabowo-lanjutkan-kebijakan-pangan).
- Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo atau Jokowi ke Tanah Papua, pada 22-24 Juli 2024, dianggap tidak berguna, karena masih banyak perempuan dan anak yang sedang mengungsi. Kunjungan Jokowi ke-19 kali ini dilakukan untuk merayakan Hari Anak Nasional (HAN) ke-40. Kepala Departemen Perempuan dan Anak United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP, Iche Morip mengatakan, kunjungan Jokowi adalah upaya pencitraan di mata internasional dari kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui operasi-operasi militer di Tanah Papua. Kekerasan negara telah berlangsung lama sejak 1962-2024, yang mengakibatkan ribuan juta jiwa orang asli Papua terbunuh dan mengungsi di berbagai tempat di tanah Papua (https://jubi.id/rilis-pers/2024/jokowi-ke-papua-perempuan-dan-anak-masih-mengungsi/).

07 Oktober

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Merauke sebelum dilantik sebagai presiden. Pejabat Sekda Papua Selatan Maddaremmeng membenarkan terkait rencana kunjungan kerja Presiden terpilih ke Merauke tersebut. Menurut Maddaremmeng, rencana

kunjungan tersebut baru sekedar informasi. Namun kepastiannya kapan belum terkonfirmasi dengan baik. Hal ini mengingat pelantikan beliau sebagai Presiden terpilih tinggal menyisahkan 2-3 minggu kedepan (Cenderawasih Pos).

14 Oktober

Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meninjau lahan pengembangan program food estate di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu, peninjauan tersebut berlangsung pada Sabtu (12/10) sampai dengan Minggu (13/10). Kedua pejabat tersebut didampingi Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, serta jajarannya, bersama pejabat terkait dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Cenderawasih Pos).

04 November

Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja perdananya di Kabupaten Merauke, pada Minggu (03/11) pagi waktu setempat. Didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kehadiran Presiden Prabowo di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam percepatan swasembada pangan berkelanjutan. Merauke sendiri diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di merauke (Cenderawasih Pos).

21 November

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, melakukan kunjungan kerja untuk memberikan arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda dalam persiapan Pilkada serentak 2024 di Papua. Wamendagri Ribka Haluk juga menyempatkan diri melakukan kunjungan dua SD di

Kabupaten Jayapura yakni SD Negeri Inpres Dabonsolo, Sentani, dan SD Inpres Kemiri, Sentani, dalam rangka uji coba pemberian makanan sehat dan bergizi program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka, Rabu (20/11), kemarin. Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk, pemberian makanan sehat dan bergizi program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk mendukung Indonesia Emas 20245, sehingga generasi muda di Indonesia mulai sejak kecil sudah diberikan makanan bergizi dan sehat, supaya kedepannya menjadi generasi yang sehat, berprestasi dan menjadi generasi emas (Cenderawasih Pos).



Suasana belajar di SD YPPK St. Agustinus Yapimakot, Pegunungan Bintang.
(Dok. JPIC OFM Papua)

BAB VIII

JERAT NARKOBA DAN MIRAS DI TANAH PAPUA

Oleh Alexandro Rangga OFM

Pengantar

Kronik ini merangkum serangkaian peristiwa terkait peredaran dan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba di Papua sepanjang tahun 2024. Data yang bersumber dari berbagai laporan media lokal maupun online menyajikan gambaran yang mengkhawatirkan mengenai kondisi di Papua. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tren umum, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi situasi ini, dan memberikan saran untuk penanganan yang lebih efektif.

Tren Umum

Peredaran narkoba di Papua didominasi oleh jenis ganja dan sabu-sabu, seperti yang terungkap dalam berbagai penangkapan. Salah satunya, "Sebanyak 2,5 Kg Ganja diamankan beserta pemiliknya, seorang pria berinisial AJ (38) dan kini dalam proses penyidikan," (*Cenderawasih Pos*, 31 Agustus 2024). Selain itu, "Dari hasil operasi tersebut, pihaknya berhasil menyita 960,79 gram narkoba jenis ganja serta 109,46 gram narkoba jenis sabu" (*Cenderawasih Pos*, 11 September 2024). Penyelundupan dari Papua Nugini (PNG) teridentifikasi sebagai salah satu jalur utama masuknya ganja, terbukti dengan penangkapan, "Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial BW (24) WNA asal PNG" (*Cenderawasih Pos*, 5 Agustus 2024).

Selain narkoba, peredaran minuman keras lokal juga meningkat. "Jajaran Polsek Merauke Kota melakukan penggerebekan terhadap 2 lokasi pembuatan atau pabrik minuman keras lokal jenis Sopi di sekitar Kudamati, Kelurahan Kamundu, Merauke" (*Cenderawasih Pos*, 25 Januari 2024). Produksi minuman keras jenis Cap Tikus juga masih marak, seperti yang ditemukan di Wamena, "Polres Wamena Kota berhasil meringkus seorang pria berinisial AS (26) lantaran kedapatan membuat Miras jenis Cap Tikus yang dihasilkan dari fermentasi pengembang makanan" (*Cenderawasih Pos*, 22 April 2024). Penjualan miras ilegal sering kali menjadi pemicu tindak kriminal dan gangguan keamanan.

Jaringan peredaran narkoba dan miras melibatkan berbagai kelompok, termasuk warga negara asing, remaja, dan residivis. "Ketiga pelaku adalah NN (22), CN (20) yang merupakan warga negara asing asal PNG dan satu pelaku lainnya, GB (32) warga Kota Jayapura" (*Cenderawasih Pos*, 7 Juni 2024). Bahkan, "Dari temuan yang pernah ditangani Kasat Narkoba Polresta AKP Irene Aronggear ternyata pernah didapati kasus anak beranjak remaja atau masih ABG terlibat jual beli ganja" (*Cenderawasih Pos*, 1 Maret 2024). Peredaran narkoba sudah menyasar anak sekolah, seperti yang diungkapkan oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilat, "Peredaran narkotika terutama ganja ini sudah melibatkan masyarakat di semua kalangan, bahkan termasuk anak-anak sekolah" (*Cenderawasih Pos*, 9 Agustus 2024).

Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Merauke menjadi wilayah dengan tingkat peredaran narkoba dan miras tertinggi. Wilayah perbatasan RI-PNG menjadi titik rawan penyelundupan narkoba. "Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TS mengamankan pelaku penyelundupan narkoba jenis ganja melalui jalan lintas batas di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG)" (*Cenderawasih Pos*, 9 September 2024).

Aparat kepolisian dan TNI terus melakukan operasi pemberantasan narkoba dan miras. Pemusnahan barang bukti narkoba dan miras dilakukan secara rutin. "Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua memusnahkan barang bukti Narkoba jenis ganja dan sabu hasil penangkapan

selama bulan September 2024" (*Cenderawasih Pos*, 17 September 2024). Kerja sama lintas lembaga digalakkan untuk mengatasi masalah ini.

Analisis Kritis

Kondisi sosial-ekonomi yang sulit di beberapa wilayah Papua dapat menjadi faktor pendorong penyalahgunaan narkoba dan miras. Aksesibilitas wilayah perbatasan yang sulit diawasi menjadi celah bagi penyelundupan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan miras juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.

Penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, seperti akses terbatas ke wilayah terpencil yang menyulitkan pengumpulan bukti dan penangkapan pelaku. Jaringan pengedar narkoba yang terorganisir dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat juga menjadi hambatan. Selain itu, budaya konsumsi miras yang sudah lama ada di masyarakat perlu menjadi perhatian khusus.

Penyalahgunaan narkoba dan miras merusak generasi muda dan memicu tindak kriminal. Keterlibatan anak sekolah dalam peredaran narkoba mengkhawatirkan masa depan generasi muda. "Peredaran narkotika terutama jenis ganja di Kota Jayapura memang belakangan ini makin marak. Hal inilah tentunya menjadi ancaman serius bagi perkembangan generasi muda di Papua, khususnya di Kota Jayapura" (*Cenderawasih Pos*, 9 Agustus 2024). Kurangnya kepedulian keluarga terhadap keterlibatan anggota keluarga dalam peredaran narkoba juga menjadi masalah. "Mirisnya lagi adalah setelah dilaporkan kepada keluarganya ternyata respon keluarga justru tidak mempersoalkan karena sudah mengetahui jika sang anak sudah lama melakukan jual beli ganja" (*Cenderawasih Pos*, 1 Maret 2024).

Dalam perspektif sosiologis, perubahan sosial yang cepat di Papua akibat modernisasi dan ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan anomie dan ketegangan, mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam peredaran narkoba dan miras. Teori anomie (ketiadaan norma), yang dikembangkan oleh Émile Durkheim, menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang cepat, norma-norma

dan nilai-nilai dapat menjadi kabur, menyebabkan perasaan anomie. Sedangkan Teori ketegangan (strain theory), yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, menyatakan bahwa ketika individu tidak memiliki akses yang sah untuk mencapai tujuan yang dihargai oleh masyarakat, mereka dapat beralih ke cara-cara ilegal, seperti peredaran narkoba. Kedua hal ini diperparah oleh stigmatisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua dapat menyebabkan mereka terdorong ke dalam kegiatan ilegal, seperti peredaran narkoba. Lebih jauh, jika dilihat dari perspektif politik ekonomi, dalam konteks Papua, peredaran narkoba dan miras dapat dilihat sebagai bagian dari ekonomi politik yang kompleks, yang melibatkan aktor-aktor lokal, nasional, dan internasional. Ketidaksetaraan ekonomi dan marginalisasi politik dapat mendorong beberapa individu untuk terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara untuk bertahan hidup.

Selain itu, secara antropologis, perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Papua, seperti urbanisasi dan globalisasi, dapat memengaruhi pola konsumsi dan perilaku masyarakat.Masuknya budaya luar dan hilangnya tradisi lokal dapat menyebabkan perubahan dalam nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Dalam beberapa kasus, konsumsi miras dapat menjadi simbol resistensi terhadap dominasi budaya luar atau cara untuk mengatasi tekanan sosial.

Dengan menggunakan perspektif-perspektif ini, kita dapat memahami bahwa peredaran narkoba dan miras di Papua bukan hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks.

Penutup

Peredaran narkoba dan miras merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan terpadu. Upaya penegakan hukum saja tidak cukup; perlu ada pendekatan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Program pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dan miras perlu ditingkatkan. Pengawasan di wilayah perbatasan dan jalur-jalur masuk narkoba perlu diperkuat. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan kampanye anti-narkoba dan miras

juga sangat penting. Kerja sama lintas sektoral yang lebih intensif antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan tokoh agama perlu digalakkan. Pendekatan budaya juga diperlukan dalam menanggulangi peredaran miras lokal. Selain itu, peningkatan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak mudah terjerumus dalam peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

Dove, Michael R. (1988). *The Real and Imagined Role of Culture in Development: Case Studies from Indonesia*.

Durkheim, Émile. (1897). *Suicide: A Study in Sociology*.

Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*.

Merton, Robert K. (1938). "Social Structure and Anomie". *American Sociological Review*, 3(5), 672–682.

Kronik Minuman Keras dan Narkoba

08 Januari

Tiga warga Negara asing asal PNG terpaksa berurusan dengan Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota. Ketiga pria ini diringkus usai kedapatan membawa paketan ganja yang rencananya akan dipasarkan di Kota Jayapura. Ketiganya diamankan Minggu (07/01) dini hari. Ketiga pelaku tersebut berinisial GG (29), JG (28), BG (35). Mereka diamankan oleh petugas di lampu merah pertigaan Hamadi Distrik Jayapura Selatan sekira pukul 02.30 WIT. Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Irene Aronggear, ketika dikonfirmasi mengatakan, tim Opsnal Sat Narkoba mendapat informasi bahwa ada tiga orang warga negara PNG yang membawa narkotika jenis ganja menggunakan Mobil Xenia Hitam dari Hamadi ke Distrik Abepura (Cenderawasih Pos).

11 Januari

- Ratusan botol minuman keras berbagai merek yang disita oleh aparat gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura, akhirnya dimusnahkan secara bersama- sama, di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, Rabu (10/01). Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi menjelaskan, minuman keras berbagai merek yang disita tersebut, merupakan Miras yang diperoleh dari hasil operasi gabungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura bersama TNI Polri. Razia dilakukan dalam rangka menyongsong hari Natal 25 Desember 2023 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2024 yang lalu (Cenderawasih Pos).
- Kepolisian Resor Jayawijaya mengamankan 2 orang wanita berinisial RN (25) dan CT (47) yang diduga pelaku pembuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) di Jalan Yos Sudarso Wamena. Kepolisian juga mengamankan barang bukti ratusan liter miras jenis CT yang telah dikemas dalam ember pelastik (Cenderawasih Pos).

15-16 Januari

Belakangan ini wilayah Madi dan Enarotali di Kabupaten Paniai terbilang rawan konflik antara sesama warga asli Papua maupun pendatang. Pemicunya adalah pengaruh Miras dan perjudian togel, sabung ayam dan sejenisnya. Untuk meniadakan dua hal yang menjadi biang kerok itu, pada masa Pemerintahan Bupati Paniai Meki Nawipa dan wakilnya Oktopianus Gobai menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Miras dan Perjudian. Meski Perda tersebut telah disosialisasikan, bahkan diterapkan, namun masih saja ada yang tidak mengindahkannya. Untuk mengantisipasi kejadian lebih lanjut, maka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Paniai menggelar rapat koordinasi yang dipimpin Pj Bupati Paniai Denci Meri Nawipa yang dihadiri Kapolres Paniai, Dandim 1703/Deiyai, dan sebelumnya bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Koran Jubi).

17 Januari

Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali membekuk pemilik narkoba jenis Sabu yang didatangkan dari luar Papua dengan tujuan Wamena Kabupaten Jayawijaya. Seorang pemuda berinisial Ipang (21) warga Wamena Kota diciduk Tim Opsnal Polresta Jayapura Kota bersama barang bukti dua plastik bening ukuran kecil berisikan Sabu disalah satu Kantor Jasa Pengiriman di Wamena, Senin (15/01) siang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Victor D. Mackbon melalui Kasat Resnarkoba AKP Irene Aronggear saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan bahwa pergerakan Ipang sudah dimonitor sebelumnya dan saat tim opsnal melakukan penyelidikan terkait peredaran narkoba akhirnya mengantongi informasi akan ada pengiriman Sabu melalui jasa pengiriman hingga termonitor narkoba jenis Sabu yang melintas di Kota Jayapura dengan tujuan Wamena Kabupaten Jayawijaya (Cenderawasih Pos).

18 Januari

Kerap mendengar soal angka kriminalitas dan gangguan Kamtibmas maupun kecelakaan yang cenderung meningkat diakibatkan pengaruh minuman keras, membuat Kapolresta Kombes Pol. Victor D. Mackbon

gerah. Iapun memerintahkan kepada Satuan Narkoba dan polsek jajaran untuk menindak tegas para pelakunya. Yang ditindak disini adalah mereka yang berjualan di luar jadwal yang telah ditentukan. Ini juga berkaitan dengan keamanan jelang Pemilu. *"Saya sudah perintahkan, jangan beri celah maupun ruang kepada mereka (penjual Miras ilegal),"* tegas Kapolresta saat memimpin upacara bulanan di Lapangan apel Mapolresta, Rabu (17/01) pagi (Cenderawasih Pos).

22 Januari

Seorang wanita berinisial HA (22) terancam pidana selama 20 tahun setelah kasusnya diproses lanjut oleh Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota. Ia kedapatan membawa ganja seberat 1,3 Kg di area Dermaga Pelabuhan Jayapura pada September 2023 lalu. Setelah kasusnya diberkaskan, Jumat (20/01) kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (20/01) siang. Penyerahan tersangka HA ke JPU setelah berkas perkaranya dengan Laporan Kepolisian nomor : LP/ A / 37 / IX / 2023 / SPKT.SAT-NARKOBA Polresta Jayapura Kota Polda Papua, tanggal 22 September 2023 telah dinyatakan lengkap atau P.21 (Cenderawasih Pos).

23 Januari

Satuan Narkoba Polres Merauke berhasil menangkap 2 pengedar narkotika jenis Sabu di Jalan Martadinata, Kelurahan Mandala Merauke, 25 November 2023 sekitar pukul 10.11 WIT. Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana melalui Kasat Narkoba AKP Ishak O. Runtulalo ditemui, Senin (22/01) membenarkan penangkapan kedua pengedar narkotika jenis Sabu tersebut. Keduanya adalah AR alias Rey dan YH dan DA (Cenderawasih Pos).

24 Januari

Mabuk ganja seorang warga di Merauke berinisial YK alias Jo terpaksa ditangkap Satuan Narkoba Polres Merauke karena mengedarkan Narkotika jenis ganja. Penangkapan pelaku itu dilakukan Polisi di lapangan Monumen Kapsul Waktu pada 04 Januari sekitar pukul 22.30 WIT. Adapun barang bukti yang disita dari pelaku berupa 4 pack ganja

kering, 1 tumpukan ganja kering, satu plastik warna hitam ukuran sedang, 1 lembar celana pendek warna biru navi, satu unit HP samsung A02s warna putih, 1 batang papaya berukuran kurang lebih 20cm sebagai alat hisap (bong) dan uang tunai sebesar Rp 91.000 (Cenderawasih Pos).

25 Januari

Jajaran Polsek Merauke Kota melakukan penggerebekan terhadap 2 lokasi pembuatan atau pabrik minuman keras lokal jenis Sopi di sekitar Kudamati, Kelurahan Kamundu, Merauke, Rabu (24/01) pagi. Dari penggerebekan di dua tempat tersebut, satu pembuat berinisial JT langsung digelandang ke Mapolsek Kota Merauke. Sedangkan pembuat Sopi di lokasi lainnya berhasil melarikan diri. Namun peralatan masak di dua lokasi yang digerebek tersebut berhasil diamankan Polisi. Seperti kompor, alat masak, dandang, ember besar untuk menampung permentasi, alat suling dan sebagainya (Cenderawasih Pos).

29-30 Januari

Personel Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura berhasil meng-amankan tiga pengedar narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Hal itu disampaikan Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen di Kota Jayapura, Minggu (28/01). Dalam rilis tertulisnya, Maclarimboen, mengatakan penangkapan FW (26), MP (45) dan AR (31) beserta barang bukti seberat 64,8 gram yang dibagi menjadi 60 paket siap edar, dan 4 unit handphone serta tas kecil berwarna biru (Koran Jubi).

03 Februari

Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu-sabu, disaksikan 4 tersangka di Aula Obhe Reay May Polres Jayapura, Jumat (02/02). Pemusnahan barang bukti dilakukan oleh Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen diwakili Wakapolres Kompol Joni Samonsabra serta Kejaksaan Negeri Jayapura Ema Kristina Dogomo KBO Sat Res Narkoba Polres Jayapura Ipda Sudirman. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya berinsial MLMK (30) dengan barang bukti 1.133 Kg ganja kering, kemudian HM

(34) dengan barang bukti 1,36 gram sabu-sabu serta RA (37) dan SS (37) dengan barang bukti sabu-sabu seberat 14,96 gram. 4 tersangka ditangkap pada bulan Desember 2023 (Cenderawasih Pos).

12 Februari

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali menciduk seorang pria berinisial EH (31) beserta barang bukti sejumlah sabu-sabu. Tak hanya itu, dari tangan EH polisi juga berhasil menemukan narkoba lainnya jenis Ganja. Saat ini EH menjalani pemeriksaan untuk mengetahui jejaringnya sebab disinyalir sabu-sabu ini juga dipasarkan (Cenderawasih Pos).

22 Februari

Pihak Polsek Jayapura Selatan mengamankan miras ilegal di sekitar wilayah Entrop. Kapolsek Jayapura Selatan, AKP Frets Lamahan, mengatakan bahwa barang bukti 100 lebih botol miras ini diamankan di belakang Mandiri Syariah, Entrop, tepatnya di salah satu rumah kos Rabu (21/02) (Cenderawasih Pos).

01 Maret

- Sungguh ironis, dampak peredaran ganja di Kota Jayapura nampaknya membuat miris hati. Dari temuan yang pernah ditangani Kasat Narkoba Polresta AKP Irene Aronggear ternyata pernah didapati kasus anak beranjak remaja atau masih ABG terlibat jual beli ganja. Selain menjual ia juga berstatus sebagai pemakai. Mirisnya lagi adalah setelah dilaporkan kepada keluarga- nya ternyata respon keluarga justru tidak mempersoalkan karena sudah mengetahui jika sang anak sudah lama melakukan jual beli ganja (Cenderawasih Pos).
- Kepolisian Resor Jayawijaya merazia tempat pembuatan minuman keras lokal jenis Cap Tikus (CT) di Jalan Sosial Wamena, Rabu (28/02) sore. Dalarn razia tersebut polisi tak menemukan pelaku pembuat Miras karena telah melarikan diri dan hanya meninggalkan barang bukti berupa peralatan pembuatan Miras oplosan jenis CT. Razia ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Jayawijaya Iptu Samuel Lasarus Werinussa (Cenderawasih Pos).

04 Maret

- Satuan Narkotika Polres Boven Digoel kembali menangkap seorang residivis kasus Narkotika jenis Sabu berinisial HS. Penangkapan terhadap HS tersebut dilakukan Satuan Narkoba Polres Boven Digoel saat HS sedang melakukan transaksi di Jln. Trans Papua Km. 4 Tanah Merah, Boven Digoel depan Resto, Rabu 21 Februari 2024 sekitar pukul 22.25 WIT (Cenderawasih Pos).
- Seorang pedagang makanan di jalan Irian Wamena harus dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya lantaran kedapatan memiliki 4 paket narkotika golongan I jenis Sabu-sabu yang sengaja disimpan dalam sebuah botol obat mulut dalam rumahnya Jalan Safridarwin Sabtu (02/03) sore kemarin (Cenderawasih Pos).

07 Maret

Satuan

Narkoba Polres Jayawijaya memastikan ada permainan sistem tempel yang dipraktekan para pengedar dan pengguna narkoba di Kabupaten Jayawijaya, hal ini dibuktikan usai aparat menangkap seorang pedagang makanan di wilayah kota Wamena dengan inisial FUQ (33) dengan barang bukti 4 bungkus narkotika jenis Sabu. Kapolres Jayawijaya melalui kasat Narkoba AKP. F. Taborat menyatakan untuk pelaku FUQ ini bakal dikenakan pasal berlapis sebab yang bersangkutan sebagai pengguna juga sebagai pengedar oleh karena itu diterapkan pasal primer 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) subside pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Cenderawasih Pos).

22 Maret

Dua warga asal Kabupaten Boven Digoel diringkus Satuan Reserse Narkotika Polres Merauke, keduanya berinisial KN (25) dan FR (24). Keduanya diringkus karena mengedarkan narkotika jenis ganja. Adapun total barang bukti narkotika ganja yang berhasil diamankan dari tersangka KN (25) seberat 500 gram dan uang tunai sebesar Rp 2.234.000 serta barang bukti lainnya. Kemudian dari hasil pemgembangan tersebut, kata Kasi

Humas, Satnarkoba Polres Merauke Kembali berhasil menangkap FR (24) dengan barang bukti 9 paket Narkotika jenis Ganja (Cenderawasih Pos).

27 Maret

Polsek Merauke Kota berhasil menggrebek pabrik Sopi di Jalan Pembangunan, Kelurahan Kamundu Merauke, Senin (25/03). Penggerebekan yang dilakukan ini atas informasi yang diperoleh Polsek Kota Merauke yang merasa resah dengan adanya pembuatan minuman keras lokal jenis Sopi itu (Cenderawasih Pos).

28 Maret

Upaya Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas II A Abepura berhasil digagalkan Petugas, Rabu (27/03) sekitar pukul 10.15 WIT. Diduga pelaku berusaha menyelundupkan narkotika jenis ganja ke dalam Lapas. Upayanya itu diungkap saat petugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap barang bawaan pengunjung. Hal itu dilakukan terhadap seorang ibu muda berinisial DYM (21), yang hendak menjenguk keluarganya, FJA (22), seorang narapidana di Lapas Abepura. Dari hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U), Katrin Yoku mengatakan, dua paket plastik berisi Narkotika jenis Ganja dengan total berat 0,079 gram disisipkan ke dalam bungkusan gula pasir yang dibawa pengunjung tersebut (Cenderawasih Pos).

05 April

Tersangka tindak pidana Narkotika berinisial IG, melalui kuasa hukumnya, mengajukan Permohoman Praperadilan (Prapid) terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Papua (Termohon) di Pengadilan Negeri Jayapura pada Selasa (2/4) lalu. Anthon Raharusun selaku Kuasa Hukum Tersangka (Pemohon) mengatakan Prapid itu diajukan karena tindakan BNN Papua (Termohon) dalam melakukan Penangkapan, Penahanan dan Penetapan Tersangka terhadap IG terkait Perkara Dugaan Tindak Pidana Narkotika, dilakukan secara sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum atau tanpa adanya bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti yang sah. Mengacu

pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015, Penetapan Tersangka dan SPDP termasuk dalam pranata Objek Praperadilan. Hal ini dimaksudkan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana wajib memperhatikan hak-hak Tersangka, sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan (Cenderawasih Pos).

06 April

Polres Jayawijaya berhasil mengamankan seorang pelaku pemilik Narkotika golongan 1 jenis Ganja dengan inisial FK (22) di Jalan Thamrin, tepatnya di dalam GOR Wamena, Kamis (04/04) sore. Dimana dari pemeriksaan yang dilakukan aparat berhasil mengamankan 17 paket ganja kering siap edar dari tangan pelaku. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Resnarkoba AKP F. Taborat saat dikonfirmasi Jumat (05/04) pagi membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang laki-laki berinisial FK (22) karena kedapatan membawa Narkotika golongan 1 jenis ganja sebanyak 17 paket siap edar (Cenderawasih Pos).

08 April

Usai berkas perkara dinyatakan lengkap, Penyidik Sat Resnarkoba Polres Jayawijaya melaksanakan tahap II terkait kasus penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja dengan tersangka OU (31) Ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya guna ditindaklanjuti dalam persidangan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Resnarkoba AKP F. Taborat menyatakan bahwa hari ini pihaknya telah melaksanakan tahap II kasus penyalahgunaan Narkotika dengan tersangka OU dimana berkas perkara yang bersangkutan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. *"Tersangka kita kenakan dengan tindak pidana narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana dimaksut dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Subsidair Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,"* ungkapnya Sabtu (06/04) kemarin (Cenderawasih Pos).

18 April

- Proses hukum terhadap delapan warga PNG yang saat ini diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura dipastikan bakal berlanjut. Bahkan tidak lama lagi berkas kedelapan pria ini akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jayapura. Ini sebagaimana disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura, Muhammad Akmal di kantornya, Rabu (17/04). Ia menjelaskan bahwa delapan warga PNG ini ditangkap dengan tiga kasus berbeda. Kelompok pertama yakni SD, TS, EN dan SK diamankan tim Satrol Lantamal X pada 27 Maret 2024 karena kedapatan membawa narkotika jenis ganja seberat 2,8 gram plus BBM sebanyak 5 jerigen Lalu ada satu pria lainnya yakni EK yang diamankan petugas imigrasi pada 07 April di Bucend II karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah (Cenderawasih Pos).
- Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali amankan ratusan Miras di seputaran Abepura beserta penjualnya berinisial AH. Si penjual disinyalir kerap menjual Miras di luar batas waktu yang sudah ditentukan atau yang sering dikenal dengan Miras "ada sayang". Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota AKP Irene Aronggear menjelaskan bahwa untuk penjualan Miras secara illegal telah menjadi atensi pihaknya selama ini sehingga ketika ada informasi penjualan di luar batas waktu maka akan ditelusuri (Cenderawasih Pos).

19 April

Upaya penggagalan peredaran narkotika jenis ganja dilakukan BNN Provinsi Papua pada Maret 2024 lalu. Ganja sebanyak 1 Kg berhasil diamankan dari dua pria yakni DM dan JK. Keduanya kini ditahan di BNN Papua sedangkan barang buktinya Jumat (19/04) kemarin dimusnahkan. Proses pemusnahan ini dipimpin Kabib Brantas BNN Provinsi Papua, AKBP Eddy Mulsupriyanto disaksikan perwakilan Polda Papua, tim Labfor, Kejari dan siswa SMP-SMA. Kabid Brantas menjelaskan bahwa keduanya ditangkap pada 15 Maret pukul 22.45 WIT di Abepura dan langsung diamankan ke BNN untuk diperiksa (Cenderawasih Pos).

22 April

- Aparat Polres Wamena Kota berhasil meringkus seorang pria berinisial AS (26) lantaran kedapatan membuat Miras jenis Cap Tikus yang dihasilkan dari fermentasi pengembang makanan. Kini pelaku dan barang bukti diamankan di Polsek Wamena Kota. Kapolres Wamena Kota AKP Najamuddin mengaku jika telah mengamankan pelaku pembuat minuman keras lokal jenis Cap Tikus di kompleks perumahan Pikhe Wamena, Sabtu (20/04) bersama dengan barang bukti berupa 1 buah Drum 200 liter warna biru, 1 buah Dandang dengan pipa penyulingan, 3 batang pipa besi, 1 set unit kompor, 1 buah galon 19 liter yang berisikan miras jenis CT, ada juga 1 unit Blower, 5 buah jerigen 5 liter yang berisikan miras jenis CT dan 2 jerigen 5 liter yang berisikan bahan mentah pembuatan miras jenis CT (Cenderawasih Pos).
- Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura menyerahkan 3 orang tersangka kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap ke Kejaksaan Negeri Jayapura, Jumat (19/04) siang. Berkas Perkara P21 ke tiga pengedar sekaligus pemilik 60 bungkus/ paket seberat 64,8 gram Narkotika Golongan I jenis sabu berinisial FW (26), MP (45) dan AR (31) dilimpahkan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura yang diterima langsung JPU Rakhmat. Kasat Reserse Narkoba Iptu Muhamad Imran mengatakan, ketiga pengedar sabu tersebut ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 di wilayah Kabupaten dan Kota Jayapura, yang merupakan pemain baru atau orang baru di wilayah Jayapura, dimana salah satu pelaku AR merupakan bandar yang mengendalikan distribusi atau peredaran sabu di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat (Cenderawasih Pos).

27 April

Hasil pengembangan penyelidikan yang dilakukan Tim Opsnal Satuang Narkoba Polresta Jayapura Kota berhasil meringkus seorang perempuan berinisial SJ Alias Ceria (43) yang kedapatan menjual

narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Baru Kali Acai Distrik Abepura, Rabu (24/04) sore. Ceria tertangkap tangan bersama barang buktinya narkotika golongan satu jenis Sabu (Cenderawasih Pos).

02 Mei

Penyidik Satuan Resnarkoba Polres Jayawijaya kembali menyerahkan tersangka kasus penjualan minuman keras ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya dengan inisial ML (32) yang tertangkap di sebuah Kos-kosan jalan Gatot Subroto Distrik Wamena Kota 31 Desember lalu, usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Resnarkoba AKP F. Taborat menyatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan tahap II terkait tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan, barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang berupa minuman lokal jenis CT pasal 204 ayat (1) KUHP. *"Tersangka ML sebelumnya ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 lalu sekitar pukul pukul 23.00 wit oleh patroli polres jayawijaya di sebuah kos-kosan di Jalan Gatot Subroto Wamena saat sedang menjual Miras Oplosan Janis CT,"* ungkapnya Selasa (30/04) kemarin (Cenderawasih Pos).

08 Mei

Proses penyidikan yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Keerom berhasil mengamankan barang bukti ganja sebanyak 4 bungkus plastik bening seberat 9,9 gram dari dia pelaku yakni AY (26) dan CA (18). Barang bukti ini langsung dimusnahkan di depan dua pelaku di lapangan apel Polres Keerom, Senin (06/05). Diketahui kedua tersangka diamankan Polisi saat sedang berboncengan menggunakan sepeda motor yang tidak dilengkapi plat nomor Polisi didepan Mako Polres Keerom. Saat ditahan dan digeledah terdapat narkotika jenis ganja sehingga kedua tersangka langsung diserahkan kepada Sat Resnarkoba Polres Keerom. *"Barang bukti yang kami musnahkan merupakan milik dua tersangka di atas"* (Cenderawasih Pos).

16 Mei

Empat pengedar Narkotika jenis ganja berhasil dibekuk oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Merauke. Keempat pengedar ganja yang berhasil

dibekuk ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda, yakni MGM, JA, SK dan YW. Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya melalui Kasi Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung didampingi Kasat Resnarkoba Polres Merauke Ipda Muhammad Mardani Fahacer saat menggelar konfrensi pers memberikan apresiasi kepada Kasat Resnarkoba Polres Merauke Ipda Muhammad Mardani yang baru menjabat langsung berhasil mengungkap kasus narkotika. Dikatakan, pengungkapan kasus Narkotika oleh Satuan Resnarkoba Polres Merauke ini terjadi pada Minggu (12/05) (Cenderawasih Pos).

22 Mei

Polisi berhasil menangkap pelaku penjualan minuman keras jenis botol plastik di BTN Lembah Furia di Sentani Kab. Jayapura, Senin (20/05) sore. Penggrebekan dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Sentani Kota Iptu Priyono beserta anggotanya dan berhasil mengamankan salah seorang tersangka atau pelaku pembuat berinisial JY (42), dengan barang bukti minuman keras oplosan siap edar. Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen melalui Kanit Reskrim Polsek Sentani Kota Iptu Priyono membenarkan penggrebekan yang dilakukannya bersama anggotanya. Pengrebekan dilakukan berdasarkan keresahan warga terkait adanya laporan pemalakan (Cenderawasih Pos).

07 Juni

Tim Satnarkoba Polresta Jayapura Kota pada Rabu (05/06) berhasil meringkus 3 terduga pelaku pengedar narkoba. Ketiga pelaku adalah NN (22), CN (20) yang merupakan warga negara asing asal PNG dan satu pelaku lainnya, GB (32) warga Kota Jayapura. Tiga pria ini diringkus tim opsnal narkoba Polresta Jayapura Kota di Taman Mesran Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol. Dr. Victor D. Mackbon melalui Kasat Resnarkoba AKP Irene Aronggear saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa ada 21 paket ganja yang dibungkus dalam plastik bening. *"Penangkapan dilakukan sekitar jam 5 sore, tim opsnal narkoba Polresta berhasil mengamankan tiga pria yang diduga merupakan pelaku pengedar ganja bersama barang buktinya,"* kata Kasat Irene (Cenderawasih Pos).

13 Juni

Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering serta minuman keras jenis boplas (botol plastik) di halaman Mapolres Jayapura, Rabu (12/06). Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen menjelaskan, selain melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering serta minuman keras, pihaknya juga mengamankan 3 orang tersangka pemilik Narkotika jenis ganja kering dengan berat total sebanyak 2068,11 gram, berinisial RS (19), DMK (21), TB (23) serta 1 tersangka pembuat minuman keras jenis boplas berinisial JY (42) dengan barang bukti sebanyak 20 botol Miras ukuran 600 ml. Kapolres Jayapura mengungkapkan 3 orang tersangka untuk kasus narkotika jenis ganja yang didapat dari PNG (Papua New Guinea) ditangkap diwaktu dan tempat yang berbeda (Cenderawasih Pos).

05 Agustus

Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura telah menetapkan satu orang tersangka pengendara Narkoba jenis ganja seberat 1,1 kg di perbatasan RI-PNG, Rabu pekan lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial BW (24) WNA asal PNG. Diketahui tersangka bersama satu rekanya berinisial Ds (25) ditangkap Satgas Yonif 122/TS pada Rabu, 29 Mei 2024 di lokasi yang berbeda. Kapolresta Jayapura Kombes Pol Victor D. Mackbon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (01/08) di Mapolresta Jayapura Kota mengatakan bahwa saat ini pelaku telah diamankan, sementara dalam proses dan sudah diterbitkan laporan polisi (Cenderawasih Pos).

06 Agustus

- Empat warga di Kabupaten Boven Digoel diringkus Satuan Narkoba Polres Boven Digoel saat sedang berpesta Narkotia jenis sabu-sabu di rumah seorang warga di Jalan Trans Papua Kilometer 4. Keempat warga yang diringkus tersebut adalah AA, MM, OW, dan IS. Mereka diringkus pada 18 Juli 2024 lalu. Kapolres Boven Digoel melalui Kasat Narkoba Narkoba Ipda M. Hanif Tambusai menjelaskan penangkapan

ke-4 warga itu berawal dari pembuntutan dan pengintaian setelah mendapat informasi yang valid. Kemudian anggota melakukan penggerebekan terhadap salah satu rumah di Kampung Sokanggo yang diduga kuat tempat melakukan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut (Cenderawasih Pos).

- Bertempat di Jalan Ampera samping Toko Saudara Dua Penyidik Satuan Narkoba Polresta Jayapura memusnahkan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang disaksikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum Yosef Senin (05/08). Kasat Narkoba Polresta Jayapura Kota AKP Irene Aronggear ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dirinya mengatakan, barang bukti Ganja yang dimusnahkan seberat 2,688,57 gram milik tersangka HH (24) (Cenderawasih Pos).

09 Agustus

Peredaran narkotika terutama jenis ganja di Kota Jayapura memang belakangan ini makin marak. Hal inilah tentunya menjadi ancaman serius bagi perkembangan generasi muda di Papua, khususnya di Kota Jayapura. Pejabat Walikota Jayapura, Christian Sohilat, yang dimintai tanggapannya mengaku sangat sedih dengan kondisi saat ini. Pasalnya meskipun pemerintah termasuk aparat TNI Polri berjuang keras untuk memberantas peredaran narkotika, namun peredaran ini seperti sulit diberantas. Hal ini karena jaringan peredaran narkotika terutama ganja ini sudah melibatkan masyarakat di semua kalangan, bahkan termasuk anak-anak sekolah (Cenderawasih Pos).

28 Agustus

Selama semester pertama sejak Januari-Juni 2024 sebanyak 13 pengedar narkotika jenis ganja berhasil diamankan oleh pihak BNN Papua. *"Dari bulan Januari sampai Juni 2024 semester pertama itu, ada 10 laporan kejadian narkotika yang ditangani oleh BNN dengan 13 tersangka, dengan barang bukti ganja sekitar kurang lebih 7 kg,"* kata Kabid pemberantasan dan intelijen BNN Papua, Edi Mul Supriyanto, Selasa (27/08). Pihak yang mengakui upaya penyelundupan narkotika jenis

ganja ini cukup banyak terjadi di wilayah perbatasan. Namun demikian pihaknya juga bekerja sama dengan anggota Satgas Pamtas termasuk juga dengan bea cukai dan imigrasi untuk memastikan tidak adanya penyelundupan barang haram tersebut (Cenderawasih Pos).

31 Agustus

Satuan Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis Ganja di area Pelabuhan Laut Jayapura. Sebanyak 2,5 Kg Ganja diamankan beserta pemiliknya, seorang pria berinisial AJ (38) dan kini dalam proses penyidikan. Hal ini diungkapkan Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. Mackbon, didampingi Kasat Resnarkoba AKP Febry V. Pardede, dan Kasi Humas AKP M. Anwar saat jumpa pers di Aula Mapolresta, Jumat (30/08) siang. Kapolresta mengatakan, AJ dibekuk bersama barang buktinya pada Rabu 28 Agustus 2024 sekira Pukul 14.00 WIT (Cenderawasih Pos).

09 September

Satgas Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122/TS mengamankan pelaku penyelundupan narkoba jenis ganja melalui jalan lintas batas di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG), di Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Minggu (08/09). Batih Kipur B Satgas Yonif 122/TS, Sertu Julius Simalango menyampaikan bahwa penangkapan tersebut terjadi di jalan Lintas Batas Kampung Pitewi Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua. Dalam pelaksanaan sweeping, per sonel Pos Koki B Pitewi dipimpin langsung oleh Sertu Julius Simalango melaksanakan pemeriksaan terhadap satu unit Mobil Jenis Avanza biru, alhasil di temukan adanya 6 bungkus kantong gula barang jenis Ganja dengan berat kurang lebih 700 Gram dan menahan tujuh (7) orang pemuda berinisial PL (28),PK (24),TN (23),P (20), MK (23), RK (23) dan HK (16) (Cenderawasih Pos).

11 September

Peredaran Narkoba, khususnya ganja dan sabu masih marak di Papua. Hal ini, terbukti dari hasil operasi personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua kembali mengamankan tiga pelaku penyalahgunaan

Narkoba dalam dua operasi terpisah. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol. Alfian mengungkapkan bahwa dari hasil operasi tersebut, pihaknya berhasil menyita 960,79 gram narkoba jenis ganja serta 109,46 gram narkoba jenis sabu. Menurutnya, Operasi pertama yang digelar pada Rabu (4/9) pekan kemarin di Jalan Argapura, Kota Jayapura. Operasi ini membuahkan hasil dengan penangkapan dua pelaku berinisial SW dan RW yang kedapatan membawa barang bukti ganja dalam jumlah besar (Cenderawasih Pos).

13 September

Seorang bandar narkoba di Mimika, Papua Tengah yang masuk ke dalam daftar pencarian orang Satuan Resnarkoba Polres Mimika sejak 2016 ditangkap polisi pada Rabu (11/09) malam beserta 317 barang bukti narkotika jenis sabu. Bandar yang berinisial T alias Putra ditangkap di Jalan Budi Utomo dekat swalayan Sharon Mart sekitar pukul 19.30 WIT. Kasat Resnarkoba Polres Mimika, AKP Andi Sudirman Arif saat dikonfirmasi membenarkan, T alias Putra sempat mengelak dan menangis saat ditangkap oleh personil Sat Resnar koba. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh KBO Satresnarkoba Polres Mimika, Iptu Rumthe bersama empat orang anggotanya (Cenderawasih Pos).

17 September

Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua memusnahkan barang bukti Narkoba jenis ganja dan sabu hasil penangkapan selama bulan September 2024. Adapun barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 959,56 gram Narkoba jenis ganja dan 210 paket Narkoba jenis Sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian mengatakan pemusnahan narkoba tersebut dilaksanakan di kantor Penjagaan Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua jalan Trikora Dok 5 atas, Jumat (13/09) sekira pukul 10.00 WIT (Cenderawasih Pos).

04 Oktober

Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire menggelar acara pemusnahan barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa ganja dan sabu. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari dua kasus

berbeda bertempat di Mako Polres Nabire, Rabu (02/10). Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/22/X/2024/Res Narkoba, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 15,27 gram ganja milik tersangka berinisial ED (20). Selain itu, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/23/X/2024/ Res Narkoba juga mencantumkan pemusnahan 8,25 gram sabu milik tersangka berinisial EH (48), yang juga dikenal dengan alias T. Keduanya dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Pasal 114 ayat (1) atau (2), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Satresnarkoba Polres Nabire dalam mengungkap dua kasus penyalahgunaan Narkotika, yakni ganja dan sabu (Cenderawasih Pos).

07 Oktober

Lantamal X Jayapura terus berkomitmen dalam memberantas upaya peredaran Narkoba di Kota Jayapura. Hal itu terlihat dari upaya-upaya anggota TNI dari Lantamal X Jayapura mencekal para pengedar Narkoba di Pelabuhan Laut Jayapura. Sebelumnya pada Rabu (25/09) Lantamal X Jayapura, berhasil menangkap seorang pemuda berinisial MM (22) yang hendak membawa Narkotika jenis ganja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Selain itu pada Jumat (04/05) dini hari, personel Yonmarhanlan X Jayapura kembali menangkap salah seorang remaja berinisial RR (16) di Pelabuhan Laut Jayapura dengan membawa barang bukti ganja seberat 600 gram. Pelaku saat itu hendak naik ke KM Gunung Dempo, dengan tujuan Manokwari Papua Barat (Cenderawasih Pos).

08 Oktober

Razia Miras Polres Keerom amankan pelaku penjual Miras beserta barang buktinya, Minggu (06/10). Kapolres Keerom AKBP Christian Aer, melalui Kasat Reskrim Polres Keerom, Iptu Jetny L Sohilait mengatakan saat razia pihaknya berhasil menyita sejumlah botol Miras dengan berbagai merek di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom dari pemiliknya berinisial MK (33) (Cenderawasih Pos).

18 Oktober

Seorang pengedar sabu di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah kembali ditangkap polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mimika, Kamis (17/10) kemarin. Kasat Resnarkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki Rahmat membenarkan, penangkapan terhadap pelaku berinisial IS tersebut dilakukan sekitar pukul 00.30 WIT (dini hari) di Jalan Kartini (Cenderawasih Pos).

21 Oktober

Kepolisian Daerah Papua melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 2551,42 gram di Lapangan Ampera Jayapura, Jumat (18/10). Pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Ganja íní merupakan barang bukti tindak kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Direktur Reserse Narkoba Polda Papua, Kombes Pol Alfian mengatakan sebelum melakukan pemusnahan semua barang bukti, baik ganja maupun sabu diperiksa dulu oleh pihak Labfor Polda Papua (Cenderawasih Pos).

22 Oktober

Satu orang terduga kurir Narkoba berinisial AK (25) yang hendak menyelundupkan narkotika jenis ganja seberat 290 gram di Pelabuhan Laut Jayapura berhasil dibekuk oleh anggota marinir yagn bertugas pengamanan kapal, Senin (21/10). Asops Lantamal X Jayapura Kolonel Laut (P) Yustus Nasarius dalam perss release di pendopo Yonmarhanlan X Jayapura, pada Senin (21/10) mengatakan anggota pengamanan Kapal Yonmarhanlan X mencurigai AK yang sedang membawa karton kecil mencoba mengelabuhi petugas saat dilakukan pemeriksaan. Ia mengaku sebagai buruh TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat). Namun setelah diperiksa, ternyata dalam karton tersebut berisi satu paket ganja seberat 290 gram dan batu tela (Cenderawasih Pos).

26 Oktober

Seorang ibu rumah tangga berinisial BK (56) diciduk oleh Polresta Jayapura Kota karena menyimpan barang bukti Narkotika jenis ganja

di dalam lemari kamarnya. BK ditangkap setelah polisi berhasil mengamankan barang bukti seberat 9,6 kilo gram ganja kering siap edar. Polresta Jayapura Kota mengamankan pelaku setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa seorang warga di Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, tengah menyimpan Narkotika jenis ganja di dalam rumahnya dengan jumlah yang cukup besar. Tak tunggu lama Anggota Opsnal Satuan Narkoba Polresta Jayapura kota langsung ke TKP untuk mengamankan pelaku (BK), pada Kamis (24/10) sekira pukul 20.00 WIT. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor D Mackbon saat mengelar konferensi pers, Jumat (25/10) di Mapolresta Jayapura Kota mengatakan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut disimpan di dalam kamar pelaku. Diduga ganja akan dijual ke luar daerah Jayapura. Namun bersangkutan belum memberikan keterangan (Cenderawasih Pos).

29 Oktober

Direktur Narkoba Polda Papua Kombes Pol. Alfian, mengaku akan mengusulkan ke pimpinan untuk diberikan reward atau penghargaan atas kinerja serta prestasi yang diraih personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota yang berhasil mengamankan Narkoba jenis ganja seberat 9,6 Kg. Hal itu disampaikan Kombes Alfian, saat kembali melakukan release pengembangan pengungkapan kasus narkotika jenis ganja 9,6 Kg dengan pelaku BK (56) di Mapolresta Jayapura Kota, Senin (28/10) siang. Seperti diketahui BK adalah warga Hamadi Tanjung Distrik Jayapura Selatan, dimana BK telah ditetapkan sebagai tersangka dan anak mantunya FF yang saat ini sementara jadi buronan polisi. Polresta Jayapura kota telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk tersangka FF. Untuk itu, Masyarakat diharapkan untuk tidak sembunyikan keberadaan pelaku (Cenderawasih Pos).

31 Oktober

Polres Mimika memusnahkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis dan Obat Dextromethorpan senilai Rp 51 juta yang berhasil diamankan Satresnarkoba Polres Mimika. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP I Komang Budiartha,

dengan melibatkan instansi Kejari Mimika, PN Kota Timika, BNN, Beacukai dan pengacara di Mapolres Mimika, Selasa (29/10). AKBP I Komang Budiartha, mengatakan bahwa untuk barang bukti Tembakau Sintetis diamankan dari tersangka Andi Reyhan Ardiansyah alias Yoyo di dua TKP masing- masing pada, 10 Oktober 2024 yang lalu di Jalan Leo Mamiri Pasar Damai pukul 14.30 WIT dan di Jalan Hasanudin Lorong Zam-zam, pukul 15.00 WIT (Cenderawasih Pos).

13 November

Polsek Kawasan Pelabuhan Laut (KPL) Jayapura kembali menggagalkan penyelundupan Narkotika jenis ganja seberat 4 Kg lebih yang dibawa oleh salah satu penumpang kapal di Pelabuhan Laut Jayapura, Selasa (12/11) sore. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. Mackbon melalui Kapolsek KPL Jayapura AKP Rischard L. Rumboy mengatakan pihaknya telah menahan pelaku berinisial MY (34) yang diduga sebagai kurir ganja. Awalnya, polisi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dalam kapal penumpang KM Dobonsolo dari Yapen tujuan Kota Jayapura, terdapat seorang penumpang yang akan mengambil ganja dari Jayapura. Dijelaskan Kapolsek, pelaku mencampur bersama barang-barang dan karung yang berisi jagung untuk mengelabuhi petugas. Pelaku ditangkap saat akan kembali naik dengan kapal yang sama. *"Dia memasukkan ganja ke dalam kantong plastik lalu digabungkannya dengan barang-barang penumpang lain, setelah itu sama-sama penumpang naik ke atas kapal,"* kata AKP Rischard kepada wartawan di Polsek Pelabuhan Laut Jayapura, Selasa (12/11) sore sekitar pukul 16.00 WIT (Cenderawasih Pos).

20 November

Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota mengamankan satu orang terduga Pelaku tindak pidana Narkotika jenis Ganja, di Seputaran Taman Imbi Kota Jayapura, Selasa (19/11) dini hari. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Victor D. Mackbon, melalui Kasat Resnarkoba AKP Febry V. Pardede, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan seorang terduga Pelaku berinisial KP (40) yang merupakan Warga Negara Asing asal PNG. Kasat menerangkan bahwa KP dibekuk

tim opsnalnya saat mobil yang dinaiki oleh terduga pelaku sedang berhenti di seputaran Taman Imbi. *"Dari hasil penyelidikan di lapangan oleh tim opsnal bahwa terduga pelaku diketahui membawa Narkotika jenis Ganja,"* ungkap AKP Febry dalam press rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (19/11) sore (Cenderawasih Pos).



Generasi Muda, Anak Sekolah di SMA YPPK Oksibil, Pegunungan Bintang sedang belajar.
(Dok. JPIC OFM Papua)

PENUTUP

Kesimpulan

Tahun 2024 menunjukkan betapa rumitnya permasalahan yang dihadapi oleh Papua, dari deforestasi yang masif, pelanggaran hak asasi manusia, krisis kesehatan dan pendidikan, hingga peredaran narkoba dan minuman keras. Semua isu ini saling berhubungan dan memperparah keadaan, menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Upaya pembangunan yang sering kali mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan justru menambah kerumitan masalah yang ada. Konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri terus berlanjut, menciptakan rasa ketidakamanan dan ketidakadilan di antara masyarakat Papua. Pelaksanaan pemilu dengan sistem noken juga menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan integritas proses demokrasi di Papua.

Secara keseluruhan, situasi di Papua membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, penghentian deforestasi, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemberantasan narkoba dan minuman keras harus dilakukan secara bersamaan. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan berbagai pihak lainnya perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

Selain itu, penting untuk menghormati dan melibatkan masyarakat adat dalam setiap langkah pembangunan. Keunikan budaya dan tradisi lokal, seperti sistem noken, harus diperhitungkan dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat

dihormati dan dilindungi. Dialog dan penyelesaian konflik secara damai perlu menjadi prioritas utama untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Papua.

Rekomendasi

1. **Kepada Presiden:**
    - Mendorong moratorium pembangunan yang merusak lingkungan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan di Papua.
    - Menginstruksikan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM dan korupsi.
    - Mengutamakan pendekatan dialog dan damai dalam penyelesaian konflik di Papua.

2. **Kepada Pemerintah Daerah:**
    - Memperbaiki sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan dana publik.
    - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan di seluruh Papua.
    - Menyusun kebijakan khusus yang melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.

3. **Kepada Wakil Rakyat:**
    - Berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Papua di tingkat nasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan layanan dasar.
    - Memantau dan mengawasi jalannya pembangunan dan program pemerintah di Papua untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
    - Mengadakan forum-forum diskusi dan konsultasi dengan masyarakat lokal untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

4. **Kepada Pemuka Agama:**
    - Menyuarakan keprihatinan dan pembelaan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia, serta mengkampanyekan perlindungan martabat manusia.
    - Mendorong kerja sama dan dialog antarumat beragama untuk menciptakan kedamaian dan harmoni di tengah masyarakat.
    - Berperan aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, melalui lembaga-lembaga keagamaan.

5. **Kepada TNI-Polri dan TPNPB/OPM:**
    - Menahan diri dari tindakan kekerasan dan memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan konflik.
    - Menghormati Hak Asasi Manusia dalam setiap operasi yang dilakukan di Papua.

6. **Kepada Komnas HAM:**
    - Mengawasi dan melaporkan secara independen kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
    - Mengadvokasi hak-hak masyarakat Papua di tingkat nasional dan internasional.

7. **Kepada Media dan Pihak-pihak Lain:**
    - Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah-masalah di Papua melalui pemberitaan yang objektif dan mendalam.
    - Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan tokoh adat dalam upaya-upaya penyelesaian masalah di Papua.
    - Mendorong partisipasi aktif masyarakat Papua dalam berbagai program pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan Papua dapat mencapai kondisi yang lebih baik, di mana hak asasi manusia dihormati, lingkungan terjaga, dan masyarakat menikmati kesejahteraan yang berkelanjutan.

BIODATA PENULIS

Alexandro Rangga OFM

Alexandro Rangga OFM adalah direktur JPIC OFM Papua. Dua bukunya yang telah diterbitkan oleh JPIC OFM Papua adalah *Fenomena Papua* (kumpulan esai-esai sosial) (2018) dan *Tindakan Politik Bagi Papua: Relevansi Pemikiran Hannah Arendt (2020)*. Karyanya yang terbaru ialah *Pastoral Digital: Pendekatan Komunikasi dan Teologi Pastoral* (KanisiusMedia, 2024). Saat ini menjadi editor tetap seri *Memoria Passionis*.

Bernadus B. Koten

Bernadus B. Koten adalah Koordinator Divisi Informasi dan Dokumentasi (Infodoc) JPIC OFM Papua. Sejak bergabung dengan JPIC OFM Papua, Bernadus melanjutkan tradisi menulis dan menerbitkan buku Seri Memoria Passionis. Selain itu, Bernadus banyak terlibat dalam pembuatan film dokumenter bersama *Papuan Voices*.

David Dapi OFM

David Dapi OFM saat ini bekerja sebagai staf pengajar di STFT Fajar Timur, Abepura sejak tahun 2022. Sejak 2023, David menjadi anggota Komisi JPIC OFM Papua. Selain mengajar bidang kitab suci, ia juga terlibat dalam penelitian kampus dan memiliki peran penting dalam membimbing para saudara muda fransiskan di Papua.

Goklian PH Lumban Gaol

Goklian bergabung dengan JPIC OFM Papua sejak Januari 2024. Saat ini menjadi Koordinator Divisi Animasi. Goklian juga merupakan seorang lawyer dan Instruktur Nasional Kementrian Agama RI untuk moderasi beragama di wilayah Indonesia Timur.

Ignasius Ngari OFM

Ignasius Ngari OFM adalah seorang Bruder Fransiskan yang memiliki hobi filsafat. Ia mengajar filsafat di STFT Fajar Timur dan Universitas Cenderawasih. Ignasius aktif menulis artikel tentang filsafat, teologi, dan budaya, serta berkontribusi dalam jurnal akademik di bidang tersebut.

Yuliana Langowuyo

Yuliana Langowuyo bekerja di JPIC OFM Papua sejak tahun 2010 dan saat ini menjadi Koordinator Divisi Advokasi. Ia dikenal sebagai "iron lady" yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia di Papua. Yuliana sering menjadi pembicara terkait situasi HAM di Papua, baik di dalam maupun luar negeri.

Catatan

Catatan